



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 93 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) RKPD Tahun 2020 adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 8 (delapan) BAB dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - f. BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RKPD Tahun 2020 yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 November 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGKILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 1



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Nopember 2019

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


✓ VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Nopember 2019

✓ SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ✓


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 93


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 93 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2019

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	I.3
1.1. Latar Belakang	I.3
1.2. Dasar Hukum	I.5
1.3. Hubungan antar Dokumen	I.6
1.4. Maksud dan Tujuan	I.7
1.5. Sistematika Penulisan	I.8
BAB II. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II.1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II.1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.10
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II.30
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II.93
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.15
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV.1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV.1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020	IV.5
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V.1
5.1. Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017	V.1
5.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT pada Tahun Rencana	V.9
5.3. Target Pengurangan Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT pada Tahun Rencana 2020	V.11
5.4. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT pada Tahun Rencana 2020	V.14
BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	VI.1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VII.1
BAB VIII. PENUTUP	VIII.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

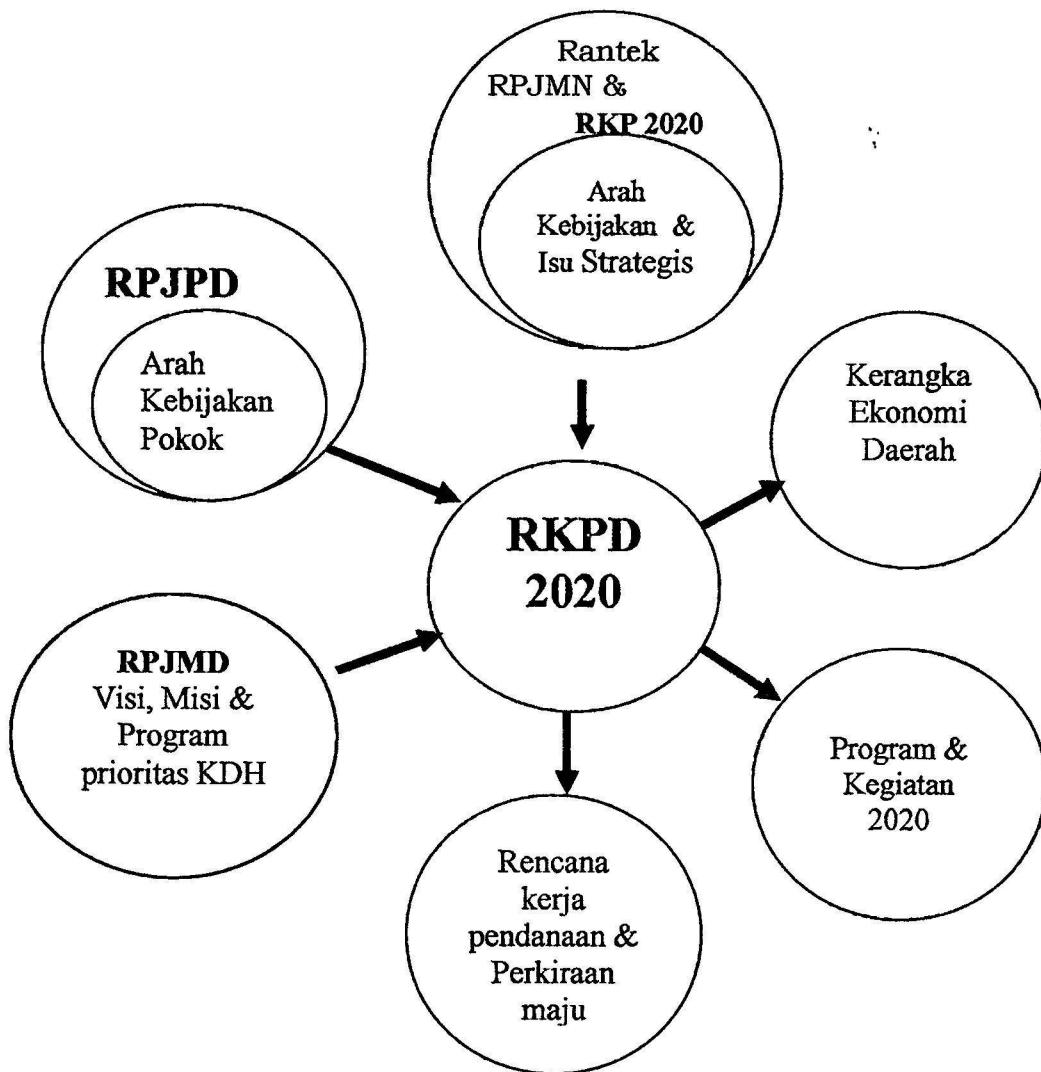
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran RPJMD yang memuat Visi dan Misi Gubernur terpilih. RKPD disusun untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memerlukan penentuan propititas, strategi pencapaian serta rangkaian tindakan yang tepat dan cepat termasuk berbagai kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut bukan hanya pencapaian tujuan dan sasaran provinsi, tetapi juga pencapaian tujuan dan sasaran secara nasional. Karena itu, setiap daerah termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyusun RKPD sebagai satu kesatuan perencanaan secara nasional.

RKPD Tahun 2020 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2018-2023 yang sekaligus merupakan periode IV RPJPD 2005 – 2025. Sebagai periode akhir RPJPD, RPJMD 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKPD 2020 sudah mulai menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan. RKPD Tahun 2020 juga harus dapat memastikan tercapainya indikator dan target RPJPD 2005-2025 dengan memastikan pelaksanaan strategi dan skema pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu dipetakan potensi dan hambatan yang mungkin dihadapi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan antarnegara baik dengan Timor Leste maupun dengan Australia, di sisi lain Nusa Tenggara Timur belum mampu lepas dari kondisi sebagai daerah tertinggal karena 18 dari 22 kab/kota masih merupakan daerah tertinggal. Karena itu Provinsi Nusa Tenggara Timur harus bangkit, menata, membangun dan meningkatkan segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam konteks ini RKPD 2020 memegang peranan penting untuk menjawab berbagai tuntutan yang ada, sekaligus memastikan target-target yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 dan RPJPD 2005-2025 dapat dicapai.

RKPD 2020 berpedoman pada RKP 2020, dan memberikan arahan pembangunan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dapat diwujudkan. Muatan RKPD Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Substansi Muatan RKPD Tahun 2020



RPJPD 2005 – 2025 mengusung visi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 Yaitu : **“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka menengah, dimana periode 2018 – 2023 merupakan periode pembangunan tahap ke-4, atau tahap akhir RPJPD 2005-2025. Arah kebijakan periode keempat adalah : **Percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.**

Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJPD 2005 – 2025 sekaligus mengacu pada tema RKP Tahun 2020 yaitu : **“Peningkatan Kualitas SDM”**, maka RKPD 2020 mengambil Tema : **“Peningkatan SDM melalui Akses dan Mutu Pelayanan Dasar serta Pengembangan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Berbasis Masyarakat”** dan diarahkan untuk mewujudkan **NTT Bangkit**, yang diukur dari 1) kualitas SDM, tingkat kemakmuran, kemampuan berusaha serta menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat NTT, serta 2) Mampu mewujudkan kehidupan seajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dan mewujudkan **NTT Sejahtera**, uang diukur dari 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik sandang, pangan dan papan, serta 2) Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar

individu, gender, maupun wilayah dengan pendekatan pembangunan berbasis keadilan sosial

Upaya mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit menuju Sejahtera ini disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2020 sebagaimana yang diarahkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang sedang disusun.

Pendekatan Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berorientasi pada proses dilakukan dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, *top down*, *bottom up*, dan partisipatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan politik digunakan dalam menyusun RKPD provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperhatikan berbagai masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, reses, maupun surat-surat masuk ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendekatan teknokratik dalam penyusuan RKPD provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 menggunakan metode dan logika berpikir ilmiah dalam menganalisis masalah secara sistematis dengan data-data yang akurat. Pendekatan *top down* dilakukan dengan mengacu pada RKP 2020 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota, serta musrenbang Provinsi. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang berbasis rakyat, artinya seluruh prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan telah melalui tahapan konsultasi dengan masyarakat, para tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan telah dimuatnya rancangan RKPD Provinsi NTT di website Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan Pendekatan Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan Holistik, Integrasi, Tematik dan Spasial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dimana RKPD Tahun 2020 akan menjadi Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan RAPBD TA.2020 dan pedoman penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Untuk menyelaraskan dinamika dan perubahan kebijakan serta asumsi dasar di dalam penyusunan dokumen perencanaan maka perlu diadakan penyesuaian RKPD Tahun 2020. Adanya perubahan kebijakan untuk melakukan pinjaman daerah dan berdasarkan pada hasil evaluasi dan pengendalian yang menunjukkan adanya inkonsisten pada dokumen perencanaan, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian terutama untuk menampung pinjaman daerah. Selain itu juga, hasil reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2020 menyatakan masih terdapat inkonsistensi sehingga direkomendasikan agar dilakukan penyesuaian RKPD Tahun 2020.

Dengan demikian, pinjaman daerah yang mana sudah termuat di dalam Dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 namun pada saat penyusunan tidak termuat di dalam RKPD Tahun 2020 dan KUA PPAS Tahun 2020 karena pada saat penyusunan kedua dokumen tersebut, kajian tentang Pinjaman Daerah dilakukan tetapi belum ada keputusan akhir; sedangkan di dalam RAPBD Tahun 2020 sudah memasukkan akan dilakukan

pinjaman daerah, maka penyesuaian RKPD Tahun 2020 perlu dilakukan untuk alasan – alasan tersebut di atas.

Penyesuaian ini tidak menitikberatkan pada konsistensi pagu anggaran tetapi difokuskan pada konsistensi program/kegiatan/ indikator dan kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 adalah sebagai berikut:

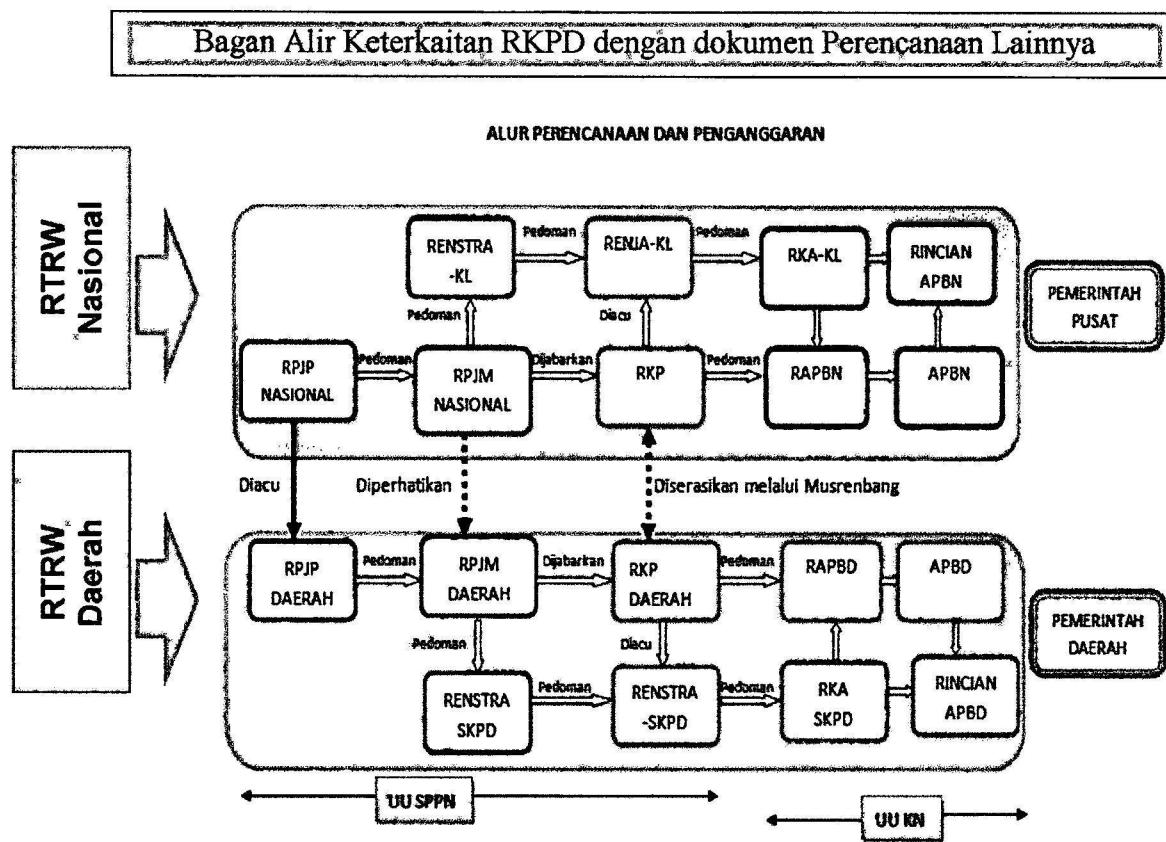
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar I.2



Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang bersifat a-spasial. Dengan demikian, RKPD Tahun 2019 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030. Tentu saja dengan tetap menjaga keserasian terhadap RTRW Nasional, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTR Kawasan Strategis Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

RKPD Tahun 2020 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS Tahun 2020. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2020 serta dasar penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2020. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD TA 2020.

1.4. MAKSDUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

2. Tujuan

Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 adalah:

- 1) Menjadi acuan bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2020, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 dan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2020;
- 2) Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
- 3) Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020;
- 4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antarperangkat daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RKPD Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika dokumen RKPD, alasan penyesuaian RKPD Tahun 2020.

Bab II. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah.

Bab ini menguraikan tentang kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro ekonomi, IPM), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai

dengan Tahun 2018 dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan permasalahan pembangunan daerah.

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan perincian sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah (tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana); arah kebijakan ekonomi daerah; analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi uraian tentang prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian capaian kinerja RPJMD, identifikasi permasalahan daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi

Bab ini memuat kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana RPJMD kab/kota dan arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi sebagai pedoman kabupaten/kota.

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok RKPD tahun 2019 lengkap dengan instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-masing program serta pagu indikatifnya. Bab ini menampilkan tabel yang menjabarkan Urusan Pemerintahan Daerah, PD pelaksana, Program dan pagu indikatif program tahun 2019.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.

Bab VIII. Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani RKPD sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

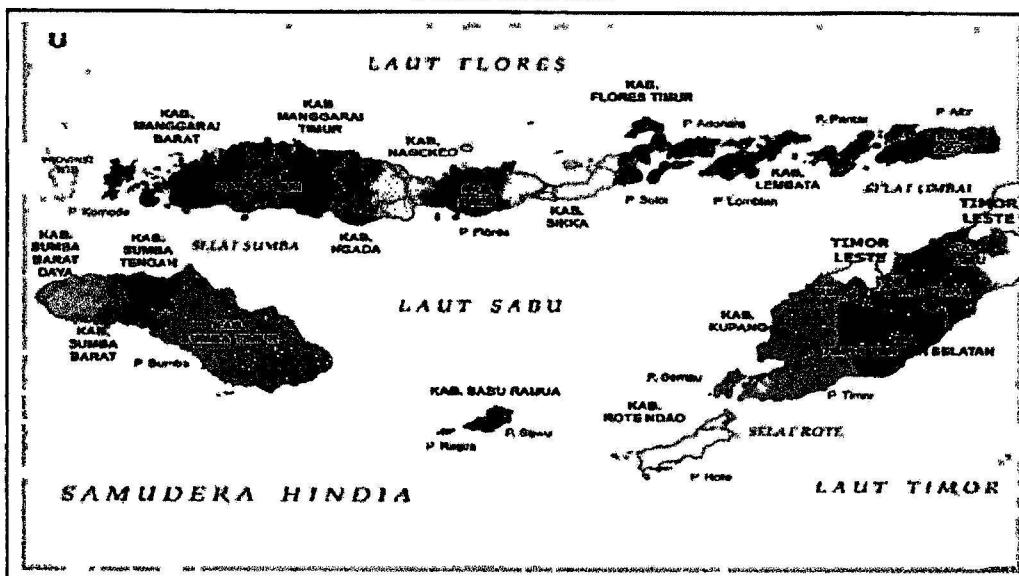
2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 km² dan wilayah lautan seluas 200.000 km². Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 8°–12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. Sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Secara administratif wilayah NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Peta Provinsi NTT



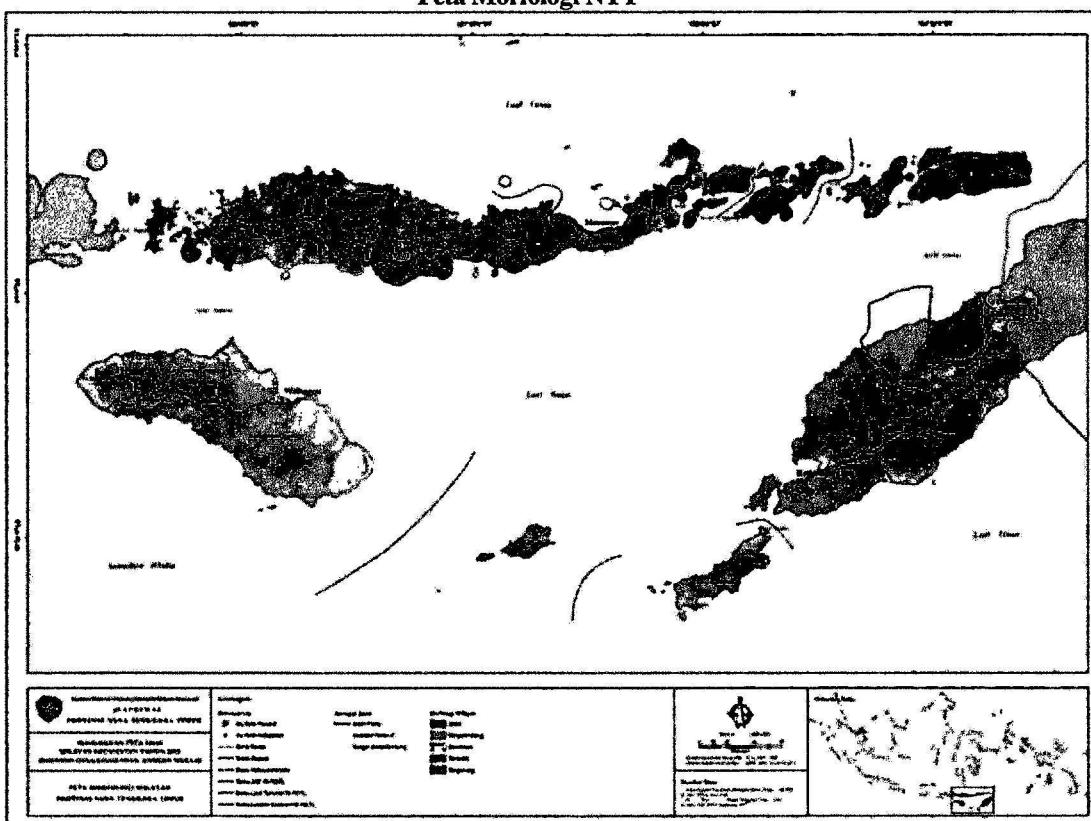
Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km² (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km² (0,96 persen).

2.1.1.1 Kondisi Topografi

Secara geomorfologis Provinsi NTT mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit dan bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang sempit yang umumnya memanjang sepanjang pantai dan diapit oleh dataran tinggi atau perbukitan. Kondisi geomorfologi seperti pada gambar berikut.

Gambar 2.2
Peta Morfologi NTT



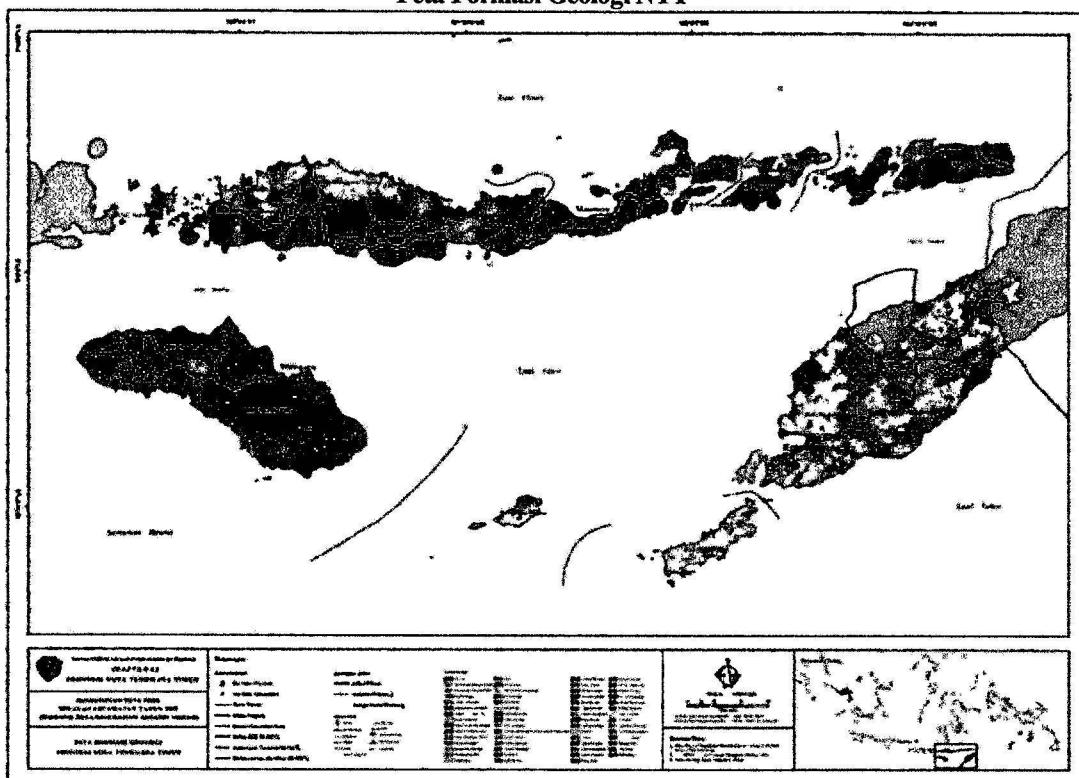
Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Secara topografis 48,78 persen atau sekitar 2.309.747 ha luas wilayah NTT mempunyai lahan dengan rentang ketinggian 100 – 500 m diatas permukaan laut (dpl). Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65 persen memiliki ketinggian di atas 1.000 m. Dari sudut kemiringan lahan ada 38,07 persen luas lahan yang mempunyai kemiringan 15–40 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen mencapai 35,46 persen dari keseluruhan luas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut, sistem produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian lahan basah maupun lahan kering.

2.1.1.2 Geologi

Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Circum-Pacific sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores dan Pulau Timor, memiliki struktur tanah yang labil. Sebaran wilayah dan potensi geologis disampaikan pada gambar 2.3. berikut.

Gambar 2.3
Peta Formasi Geologi NTT



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terletak pada jalur vulkanik (*Ring of Fire*) dan dapat dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga terdapat kandungan sumber daya mineral dan sumber-sumber energi lainnya termasuk sumber energi panas bumi/bahan bakar minyak.

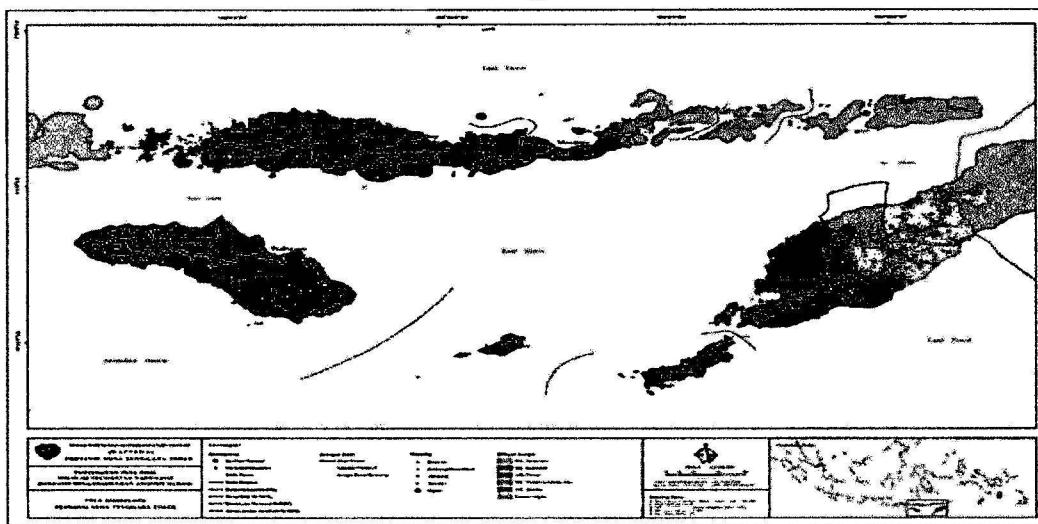
2.1.1.3 Hidrologi

Kondisi dan potensi hidrologis dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologis terutama air permukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksplorasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan.

Nusa Tenggara Timur memiliki 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 1.527.900 ha. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Benanain sepanjang 100 Km yang mencakup Kabupaten TTS, TTU dan Belu. DAS terluas adalah DAS Benanain yaitu 329.841 ha.

Kondisi hidrologis yang menentukan kemampuan penyediaan air di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi NTT



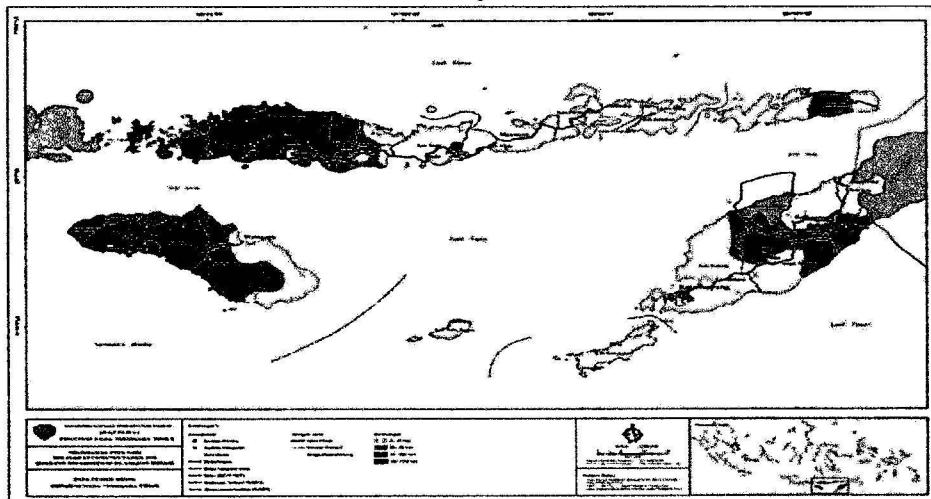
Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

Curah hujan rata-rata di NTT adalah 1.200 mm per tahun, dengan *baseflow* andalan dari 194 sungai sebesar $122,50 \text{ m}^3/\text{detik}$ setara dengan 3,863 miliar m^3/tahun . Dengan demikian bila jumlah penduduk NTT adalah 5.287.302 jiwa pada tahun 2017 maka kebutuhan air adalah 6.344.762.400 liter atau 6,345 miliar m^3/tahun (dengan standar 1.200 liter per kapita) atau $201,19 \text{ m}^3/\text{detik}$. Artinya NTT mengalami defisit air sebesar $78,69 \text{ m}^3/\text{detik}$ atau 2,461 miliar m^3/tahun .

2.1.1.4 Klimatologi

NTT termasuk dalam wilayah iklim tropis yang termasuk ke dalam kategori iklim semi-ringkai dengan karakteristik musim penghujan rata-rata tiga-sampai empat bulan dan musim kemarau delapan hingga sembilan bulan. Peta sebaran intensitas dan hari hujan variatif antar wilayah disampaikan dalam gambar berikut.

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan NTT



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

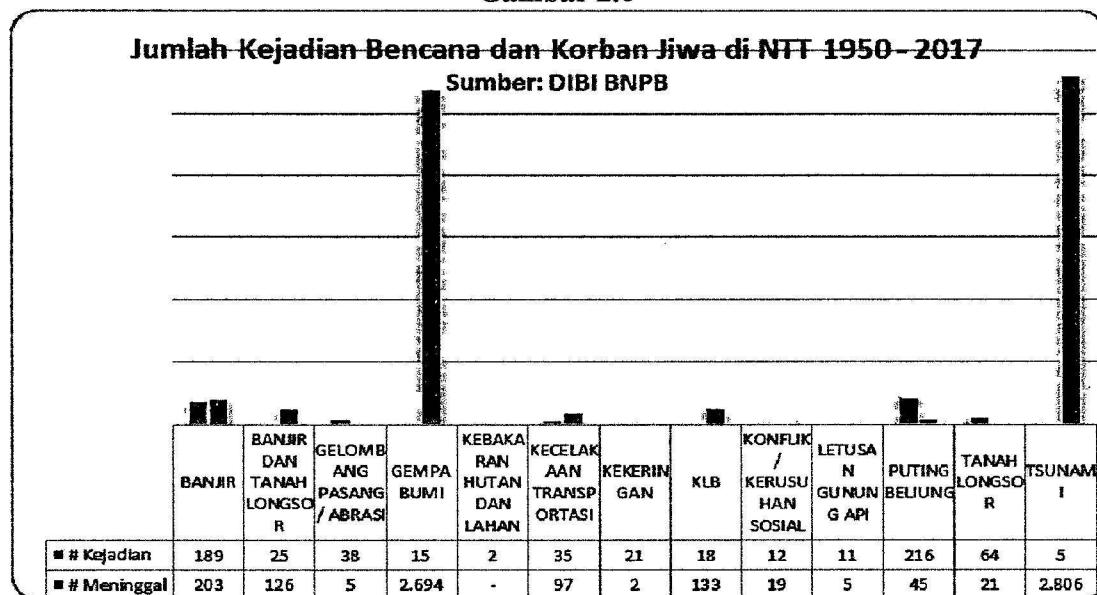
Pemantauan iklim dalam periode 2014-2017 menunjukkan puncak musim penghujan terjadi pada bulan Desember hingga Februari dengan curah hujan tertinggi dan hari hujan tertinggi selama 26 hari terjadi pada bulan Januari. Wilayah dengan intensitas hujan rendah, rata-rata 850 mm/tahun, adalah Sabu, Maumere, dan Waingapu, sementara intensitas lebih dari 2.500 mm terjadi di Ruteng, Kuwus dan Lelogama.

2.1.1.5 Wilayah Rawan Bencana

NTT memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis (gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alor, dan bagian barat Pulau Sumba. Di pulau Flores dan Lembata saja, terdapat 13 gunung berapi aktif, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 orang meninggal.

Sementara risiko bencana *hidrometeorologis* secara merata dialami oleh seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua, bagian selatan TTS, dan sebagainya. Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana di NTT adalah bencana *hidrometeorologis*, dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 150 orang meninggal dunia.

Gambar 2.6



Sumber : DPBD Provinsi NTT, 2017

Bencana hidrometeorologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat-akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometeorologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) disebabkan oleh kegiatan manusia (anthropogenic) yang menghasilkan emisi terlalu banyak seperti CO₂, N₂O dan CH₄. Adapun sektor – sektor yang berkontribusi di dalam peningkatan emisi GRK berasal dari 4 sektor, yaitu :

- 1) Sektor Berbasis Lahan, seperti : Illegal logging, kebakaran hutan, pupuk organik, kotoran hewan (manure) dan pestisida.
- 2) Sektor Energi , seperti : Penggunaan bahan bakar fosil, transportasi dan industri
- 3) Sektor Limbah, seperti : Pembakaran sampah padat dan limbah B3
- 4) Sektor Kelautan dan Perikanan, seperti : Penebangan mangrove dan kerusakan padang lamun

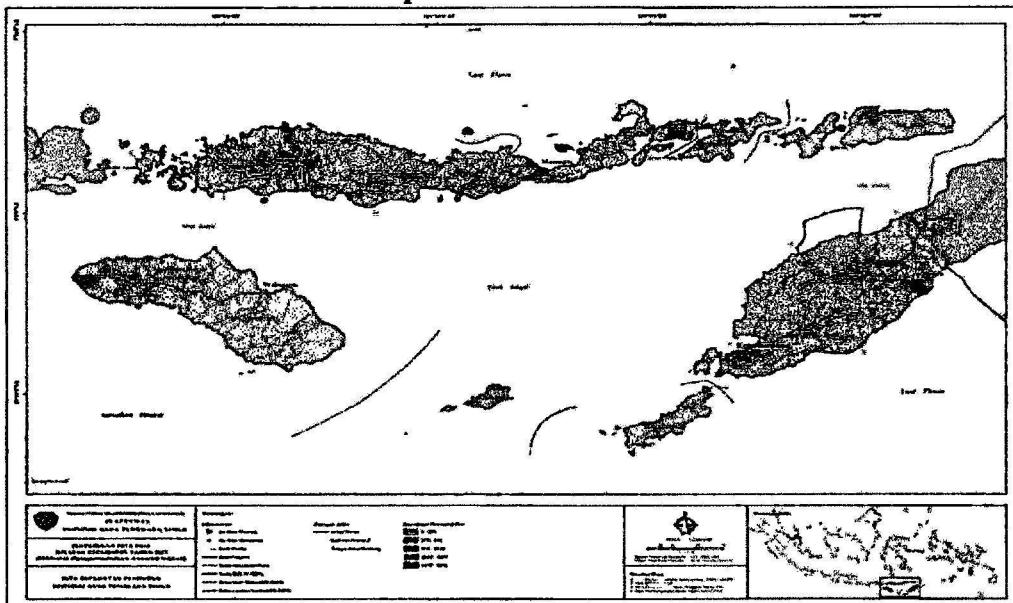
Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana hidrometeorologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil-hasil laut.

Pembangunan di NTT perlu memperhatikan dampak perubahan iklim, terutama pada sektor pertanian, dan perikanan, yang merupakan sektor yang rentan pada perubahan iklim. Mengingat mata pencaharian utama di NTT adalah bertani terutama pertanian lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. maka perlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim termasuk di dalamnya adalah upaya rehabilitasi dan konservasi lahan.

2.1.1.6 Demografi Wilayah

Peningkatan jumlah penduduk dipengaruhi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 5.120.061 jiwa meningkat menjadi 5.203.514 jiwa tahun 2016 atau meningkat 83.453 jiwa. Tahun 2017 jumlah penduduk 5.287.302 jiwa dengan kepadatan mencapai 110 jiwa/km² tersebar seperti pada gambar berikut.

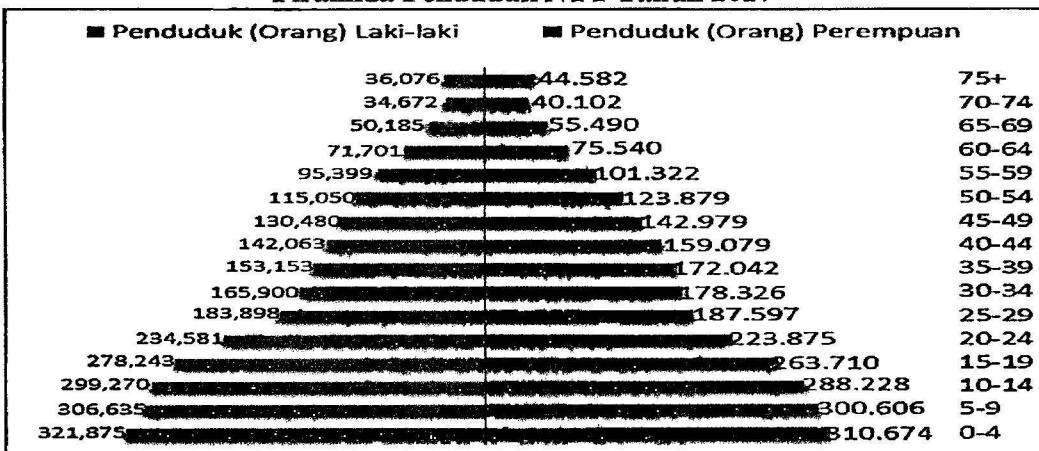
Gambar 2.7
Peta Kepadatan Penduduk NTT



Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2017

Kepadatan penduduk tertinggi di Kota Kupang sebesar 2.289 jiwa/ km², dan terendah Kabupaten Sumba Timur 36 jiwa/km². Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki adalah 2.619.181 jiwa atau sebesar 49,54 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.668.121 jiwa atau 50,46 persen dengan *sex ratio* sebesar 98 persen yang berarti di setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 98 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk berdasarkan *sex ratio* sebesar 100 penduduk perempuan dan hanya terdapat *sex ratio* sebesar 98 penduduk laki-laki. Berdasarkan perkembangan penduduk, maka struktur penduduk tahun 2017 seperti piramida pada gambar berikut.

Gambar 2.8
Piramida Penduduk NTT Tahun 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2018

Sesuai Gambar 2.8, usia penduduk produktif (16-64 tahun) sebanyak 3.198.817 jiwa atau 60,50 persen, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) 1.827.378 jiwa

atau 34,56 persen, dan penduduk tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun 261.107 jiwa. Angka ketergantungan (*dependency ratio province*) tahun 2017 sebesar 65,29 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif menanggung ekonomi sebesar 65,29 persen penduduk usia tidak produktif.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

A. Kawasan Lindung

Rencana Kawasan Lindung Provinsi NTT adalah 29,03% dari total luas wilayah Provinsi NTT atau sekitar 1,348,760.25 ha, dimana luas lahan total adalah 3,297,598.85 ha. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar 19.148.400ha. Luasan ini mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NTT. Kawasan lindung di Provinsi NTT baik yang terdapat di wilayah darat maupun laut secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Kawasan Lindung di Provinsi NTT

No.	Kawasan Lindung	Luasan (Ha)
1.	Hutan lindung	652.915,78
2.	Kawasan yang memberikan Perlindungan Setempat	
	a. Sempadan pantai	56.274
	b. Sempadan sungai	181.837
	c. Kawasan sekitar danau/waduk	28.944
3.	Kawasan cagar alam, Suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan pantai hutan bakau	276.666,85
4.	Kawasan lindung lainnya	695.844,47

Sumber : RTRW Provinsi NTT tahun 2010-2030

Kawasan peruntukan hutan secara keseluruhan seluas 37,69 persen dari luas daratan sebagaimana dimanfaatkan untuk perlindungan dan untuk hutan produksi dapat dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial untuk pengembangan kawasan wisata, pengembangan marungga, pakan ternak, rempah-rempah dan peternakan terpadu sesuai daya dukungnya. Sebaran potensi ekonomi melalui perhutanan sosial pada kawasan hutan produksi terbatas 189.561,06 ha, hutan produksi tetap 280.993,19 ha, hutan produksi tujuan khusus 3.569,18 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 111.568,56 Ha.

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung terdapat 20 jasa sebagai fungsi pengatur, penyedia, pendukung dan budaya yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Terdapat 20 Klasifikasi Jasa Layanan Ekosistem berdasarkan daya dukung dan daya tampung yaitu: (a) 3 Fungsi penyediaan (*provisioning*): pangan, air bersih, serat (*fiber*), bahan bakar (*fuel*); (b) 8 Fungsi pengaturan (*regulating*): pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pemurnian air, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyebukan alami, pengendalian hama dan penyakit; (c) 6 Fungsi budaya (*cultural*): spiritual dan warisan leluhur, tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of space*), rekreasi dan *ecotourism*, ikatan budaya-adat-pola hidup, estetika, pendidikan dan pengetahuan; dan, (d) 3 Fungsi pendukung (*supporting*): pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan, siklus hara (*nutrient*), produksi primer. Daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai potensi jasa ekosistem yaitu prioritas satu 1.144.576,58 ha (24,79 persen), prioritas dua 1.738.367,24 ha (37,65 persen) dan prioritas tiga 1.733.874,47 ha (37,56 persen).

B. Kawasan Budidaya

Potensi sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, prasarana sosial dan pelayanan dasar berada pada kawasan budi daya dan kawasan hutan. Kawasan Areal penggunaan lain (APL) seluas 2.950.239 ha atau 62,31 persen luas daratan dapat dimanfaatkan untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata, industri infrastruktur dan permukiman.

Potensi pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang mendukung *the ring of beauty* :

- 1) Kawasan pariwisata alam: TN-Komodo, TN-Kelimutu, TL-Tujuh Belas Pulau Riung, TL Teluk Maumere, TL Pulau Kepa, TL-Teluk Kupang, Kawasan Pantai Nembrala, Kawasan Pantai Kolbano dan Kawasan Wisata Gunung Mutis;
- 2) Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan pulau-pulau kecil eksotik Teluk Kupang didukung Pulau Semau dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere dan pulau kecil sekitarnya Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung;
- 3) Kawasan pariwisata budaya: Kawasan atraksi Pasola; Kawasan prosesi Jumat Agung Larantuka; Kawasan perburuan ikan paus Lamalera; Kawasan Kampung Adat Bena, Koanara, Tarung, Laitarung, Boti, Namata, Tamkesi; Kawasan *Homo Florencis Liangbua*, Situs arkeologi Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya;
- 4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka; Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang Kota Kupang; Kawasan

Gereja Tua Kota Kupang; Kawasan Gua Alam Baumata; dan Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata buatan pemancingan dan kawasan agrowisata.

Sesuai posisi geografis wilayah potensi strategis dalam pengembangan wilayah yaitu : (a) Kawasan strategis nasional, meliputi: Kawasan perbatasan dengan Timor Leste; Kawasan perbatasan laut termasuk lima pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu; (b) Kawasan Pos Lintas batas Negara (PLBN) dan (c) Kawasan pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III. Potensi pengembangan wilayah juga didukung kawasan baru bertumbuh yaitu: Kawasan bendungan, Kawasan agrowisata kelor, Kawasan peristirahatan(*rest area*) eksotik pada jalan Nasional dan Provinsi, Kawasan hutan bakau, Kawasan sakura Sumba.

Potensi pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana struktur ruang melalui pengembangan sistem perkotaan Kabupaten/Kota didukung pusat pengembangan wilayah dengan skala yang berbeda sesuai dengan posisi geografis dan perannya dalam wilayah. Berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah, maka potensi pengembangannya yaitu : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKNp; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB yang dihitung berdasarkan dua harga yaitu harga konstan dan harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi NTT terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan harga konstan tahun 2010, pertumbuhan PDRB NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2018 nilai PDRB NTT mencapai Rp.65,94 triliun dibanding tahun 2017 sebesar 62,79 triliun rupiah. Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 99.087 miliar meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp91.159 miliar.

Tabel 2.2
Persentase PDRB ADHK-ADHB Menurut Lapangan Usaha
Di Provinsi NTT Tahun 2016-2018

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT			Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.316	26.183	28.145	16.505	17.311	17.876
Pertambangan dan Penggalian	1.166	1.186	1.207	880	898	913
Industri Pengolahan	1.034	1.147	1.253	745	800	841
Pengadaan Listrik dan Gas	59	66	75	46	47	52
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	49	50	54	40	40	43
Konstruksi	8.994	9.787	10.745	6.470	6.866	7.255
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.321	10.071	11.054	6.933	7.241	7.772
Transportasi dan Pergudangan	4.528	4.942	5.459	3.036	3.269	3.528
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	586	675	757	386	439	493
Informasi dan Komunikasi	5.878	6.194	6.570	5.256	5.524	5.794
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.357	3.726	4.066	2.361	2.498	2.586
Real Estate	2.209	2.347	2.475	1.506	1.581	1.658
Jasa Perusahaan	257	279	292	169	172	175
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.665	11.697	13.220	7.656	7.883	8.469
Jasa Pendidikan	7.983	8.917	9.466	5.163	5.486	5.572
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.768	1.941	2.151	1.287	1.382	1.480
Jasa lainnya	1.771	1.945	2.098	1.258	1.347	1.434
PDRB	83,947	91.159	99.087	59.705	62.788	65.941

Sumber : BPS NTT, 2018

Tabel 2.3
Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)		
	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,65	27,57	28,40
Pertambangan dan Penggalian	1,47	1,43	1,22
Industri Pengolahan	1,25	1,27	1,26
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,06	0,05
Konstruksi	10,84	10,94	10,84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,61	11,53	11,16
Transportasi dan Pergudangan	5,09	5,21	5,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,65	0,7	0,76
Informasi dan Komunikasi	8,8	8,8	6,63

Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)		
	2016	2017	2018
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,95	3,98	4,10
Real Estate	2,52	2,52	2,50
Jasa Perusahaan	0,28	0,27	0,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,82	12,56	13,34
Jasa Pendidikan	8,65	8,74	9,55
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,16	2,2	2,17
Jasa lainnya	2,11	2,15	2,12
PDRB	100	100	100

Sumber : BPS NTT, Berita Resmi Statistik 2018

Di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 28,40%, disusul administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 13,34%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu 0,05% disusul penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,76%.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2016–2018

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2016–2018		
	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,23	4,88	3,08
Pertambangan dan Penggalian	5,66	2,07	2,11
Industri Pengolahan	4,98	7,36	5,16
Pengadaan Listrik dan Gas	14,61	0,70	9,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,38	1,43	5,47
Konstruksi	8,46	6,12	6,39
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,77	4,45	7,33
Transportasi dan Pergudangan	6,73	7,66	7,92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,46	13,59	12,16
Informasi dan Komunikasi	6,76	5,10	4,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,47	5,81	3,42
Real Estate	3,41	4,96	4,85
Jasa Perusahaan	2,83	1,43	1,67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,63	2,96	7,43
Jasa Pendidikan	4,18	6,24	2,41
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,19	7,36	7,11
Jasa lainnya	3,55	6,99	6,47
PDRB	5,18	5,16	5,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT-Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan secara nominal yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 62.788 miliar naik menjadi Rp. 65,941 miliar pada tahun 2018, tetapi berdasarkan laju pertumbuhan tahun dasar 2010 PDRB Provinsi NTT sedikit melambat pada tahun 2018 sebesar 5,13 persen dibandingkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,16 persen. Seluruh lapangan usaha pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,16 persen.

2.2.2 Laju Inflasi

Pada tahun 2018 ini, Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 3,07 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 2,00 persen. Inflasi ini dipicu oleh naiknya harga semua kelompok komoditas pengeluaran kecuali kelompok komoditas bahan makanan. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi di tahun 2018 terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi sebesar 6,61 persen, diikuti kelompok bahan makanan sebesar 3,89 persen, dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang naik sebesar 2,63 persen. Di tahun 2018, penyebab utama terjadinya inflasi di Nusa Tenggara Timur didorong oleh kenaikan indeks harga pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan. Seluruh kelompok pengeluaran selama tahun 2018 mengalami kenaikan indeks harga.

Tabel 2.5
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur
Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), 2016–2018

Wilayah Inflasi	IHK Desember 2016	IHK Desember 2017	IHK Desember 2018	Inflasi (%)		
				2016	2017	2018 (Laju Inflasi Tahun Kalendar **)
Bahan Makanan	126.74	123.63	128.44	3,86	-2,46	3.89
Makan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	144.46	148.87	152.79	8,83	3,05	2.63
Perumahan	123.63	128.50	130.36	0,77	3,93	1.45
Sandang	125.04	129.66	130.32	3,84	3,70	0.51
Kesehatan	115.73	117.70	119.05	2,72	1,70	1.15
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	126.99	132.66	134.72	2,82	4,46	1.56
Transportasi & Komunikasi	130.11	134.68	143.59	-2,52	3,51	6.61
Nusa Tenggara Timur	128,12	130,68	134,70	2,48	2,00	3.07
Nasional	126.71	131.28	135.39	3.02	3.61	3,16

Sumber : BPS NTT-Berita Resmi Statistik 2018

Dari tabel di atas, terlihat bahwa selama tahun 2018, kecenderungan inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti pola inflasi nasional, artinya bahwa inflasi

yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Nusa Tenggara Timur sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara Nasional. Diawal tahun 2017 pada bulan Januari, Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 0,94 persen yang disebabkan karena naiknya harga-harga pada kelompok bahan makanan akibat perubahan cuaca. Puncak inflasi terjadi pada bulan Desember 2017 yang mencapai 1,84 persen yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas bahan makanan dan transportasi yang bertepatan dengan hari raya Natal dan Tahun Baru.

2.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi NTT sejak tahun 2015 sebesar Rp. 14,87 juta meningkat menjadi Rp. 17,24 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang dari tahun ketahun juga cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2015 sebesar Rp. 11,66 juta meningkat menjadi Rp. 11,88 juta pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015 - 2017

Uraian	2015	2016	2017
Nilai PDRB (Miliar Rp)			
- ADHB	76,120,8	83,947,8	91,159,7
- ADHK 2010	56,770,8	59,705,3	62,788,1
PDRB perkapita (Ribu Rp)			
- ADHB	14,867,1	16,132,9	17,241,6
- ADHK 2010	11,661,0	11,474,1	11,875,5
Pertumbuhan			
PDRB perkapita ADHK 2010	7,2	(1,6)	3,5
Jumlah penduduk (000 org)	5 120,1	203,5	5 287,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

2.2.4 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Indeks Gini NTT berada dalam kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,30-0,40. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, meskipun PDRB per kapita rendah. Indeks Gini NTT relatif stabil pada angka 0,34-0,36 dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, indeks Gini sebesar 0,36, menurun pada tahun 2013

menjadi 0,35, naik menjadi 0,36 pada tahun 2014, menurun lagi tahun 2015 menjadi 0,34 dan pada tahun 2016 dan 2017 naik menjadi masing-masing 0,36, sedangkan Indeks Gini Provinsi NTT pada bulan Maret 2018 sebesar 0,35. Dengan demikian, tingkat pendapatan antara masyarakat miskin dan kaya yang relatif tidak berbeda signifikan, baik pada masyarakat kota maupun masyarakat desa. Jika dibandingkan nasional senilai 0,39, maka indeks Gini NTT lebih rendah.

Tabel 2.7
Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	Maret 2018
Rasio Gini	0,35	0,36	0,34	0,36	0,36	0,35

Sumber : BPS NTT-Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi NTT

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup layak. Dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas manusia.

IPM NTT periode 2013-2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,86%. IPM NTT terus meningkat yaitu dari tahun 2016 sebesar 67,75 menjadi 68,28 pada tahun 2017 atau meningkat sebanyak 0,36 dalam kurun waktu tiga tahun. Berdasarkan rata-rata nasional sejak tahun 2005 hingga tahun 2012, NTT berada pada posisi 31 dari 34 Provinsi. Walau IPM NTT terus meningkat, namun secara nasional masih tertinggal jauh. Pada tahun 2012 IPM NTT 60,81 tertinggal jauh dibanding IPM rata-rata nasional yang mencapai 67,70, terus tertinggal hingga tahun 2017 IPM NTT 63,73, IPM rata-rata nasional sudah mencapai 70,81.

Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Provinsi NTT Menurut Komponen, 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Usia Harapan Hidup (thn)	65,81	65,91	65,96	66,04	66,07
Harapan Lama Sekolah (thn)	12,27	12,65	12,84	12,97	13,07
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	6,76	6,85	6,93	7,02	7,15
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	6.899	6.934	7.003	7.122	7.350
IPM NTT	61,68	62,26	62,67	63,13	63,73
IPM Rata-rata Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber: BPS NTT, 2017

2.2.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di NTT terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah di NTT mencapai 6,93 tahun, meningkat pada tahun 2016 menjadi 7,02 tahun dan pada tahun 2017 menjadi 7,15 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di NTT hanya mencapai kelas-7.

Tabel 2.9
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	6,37	6,38	6,44	6,45	6,51
Sumba Timur	5,98	6,14	6,31	6,48	6,73
Kupang	6,71	6,84	6,88	6,93	7,1
Timor Tengah Selatan	5,94	5,98	6,26	6,27	6,39
Timor Tengah Utara	6,22	6,69	6,87	7,13	7,14
Belu	6,95	7,03	7,05	7,06	7,07
Alor	7,68	7,74	7,75	7,76	7,77
Lembata	7,07	7,44	7,51	7,52	7,58
Flores Timur	6,74	6,86	6,98	6,99	7,12
Sikka	6,49	6,53	6,54	6,55	6,56
Ende	7,03	7,3	7,37	7,38	7,63
Ngada	7,47	7,51	7,6	7,61	7,85
Manggarai	6,76	6,79	6,81	6,97	6,98
Rote Ndao	6,11	6,16	6,45	6,67	6,98
Manggarai Barat	6,65	6,8	6,81	6,82	7,14
Sumba Tengah	5,07	5,1	5,12	5,21	5,51

Wilayah	Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat Daya	5,97	6,01	6,29	6,3	6,31
Nagekeo	6,98	7,14	7,33	7,34	7,52
Manggarai Timur	6,04	6,42	6,43	6,44	6,45
Sabu Raijua	5,24	5,54	5,56	5,68	6,02
Malaka	5,64	6,07	6,08	6,31	6,32
Kota Kupang	11,35	11,41	11,43	11,44	11,45
Nusa Tenggara Timur	6,76	6,85	6,93	7,02	7,15

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.7 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah di NTT menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2016 harapan lama sekolah di NTT mencapai 12,97 tahun, meningkat pada tahun 2017 menjadi 13,07 tahun.

Tabel 2.10
Harapan Lama Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	11,88	12,11	12,4	12,64	12,87
Sumba Timur	11,74	12,02	12,04	12,3	12,79
Kupang	13,13	13,45	13,47	13,48	13,49
Timor Tengah Selatan	12,03	12,51	12,52	12,53	12,54
Timor Tengah Utara	13,03	13,24	13,26	13,27	13,28
Belu	11,02	11,41	11,80	12,02	12,24
Alor	10,94	11,25	11,41	11,64	12,08
Lembata	11,19	11,50	11,86	12,23	12,25
Flores Timur	11,09	11,49	11,9	12,38	12,88
Sikka	11,03	11,38	11,54	11,91	12,34
Ende	13,49	13,71	13,73	13,74	13,75
Ngada	11,92	11,99	12,32	12,66	12,67
Manggarai	10,90	11,29	11,60	11,92	12,32
Rote Ndao	11,93	12,20	12,22	12,51	12,91
Manggarai Barat	9,89	10,15	10,41	10,67	11,09
Sumba Tengah	12,12	12,59	11,65	11,93	12,31
Sumba Barat Daya	11,23	11,44	12,79	13,02	13,03
Nagekeo	11,17	11,39	11,61	11,98	12,45
Manggarai Timur	9,91	10,15	10,30	10,58	11,04
Sabu Raijua	11,67	12,18	12,71	13,00	13,11
Malaka	11,34	11,56	12,01	12,28	12,75
Kota Kupang	15,35	15,55	15,75	15,76	15,77
Nusa Tenggara Timur	12,27	12,65	12,84	12,97	13,07

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.8 Jumlah Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 pengeluaran per kapita masyarakat NTT sebesar Rp 6,615 juta meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp 7,35 juta. Walau terjadi peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat NTT, namun jumlah tersebut masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai Rp 12,44 juta.

Tabel 2.11
Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Pengeluaran Ril per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	6.672	6.714	6.776	6.914	6.997
Sumba Timur	8.744	8.808	8.883	9.004	9.093
Kupang	6.875	6.945	7.085	7.217	7.301
Timor Tengah Selatan	6.005	6.061	6.118	6.360	6.676
Timor Tengah Utara	5.626	5.679	5.799	5.930	6.164
Belu	6.967	7.025	7.083	7.199	7.251
Alor	6.223	6.284	6.346	6.468	6.553
Lembata	6.794	6.857	6.888	7.010	7.084
Flores Timur	7.048	7.099	7.150	7.237	7.442
Sikka	7.500	7.559	7.618	7.740	7.855
Ende	8.491	8.551	8.679	8.801	8.841
Ngada	8.002	8.070	8.085	8.195	8.649
Manggarai	6.706	6.790	6.875	7.008	7.056
Rote Ndao	5.800	5.873	5.946	6.110	6.320
Manggarai Barat	6.862	6.937	7.012	7.149	7.269
Sumba Tengah	5.828	5.880	5.822	5.907	5.946
Sumba Barat Daya	5.755	5.788	5.933	6.079	6.134
Nagekeo	7.830	7.868	7.906	8.054	8.119
Manggarai Timur	5.170	5.208	5.246	5.396	5.643
Sabu Raijua	4.717	4.748	4.781	4.923	5.120
Malaka	5.495	5.512	5.563	5.658	5.726
Kota Kupang	12.676	12.766	12.856	12.986	13.028
Nusa Tenggara Timur	6.899	6.934	7.003	7.122	7.350

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.9 Umur Harapan Hidup

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat kesehatan. Selain itu menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran UHH penduduk NTT pada tahun 2015 angka umur harapan hidup sebesar 65,96 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2015 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 66 tahun. Tahun 2016 angka umur harapan hidup sebesar 66,04 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2016 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun, dan pada tahun 2017 angka umur harapan hidup sebesar 66,07. Umur harapan hidup penduduk setiap tahun semakin meningkat namun tidak terlalu signifikan, hanya berkisar 1-5 bulan.

Tabel 2.12
Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	66,07	66,11	66,11	66,15	66,20
Sumba Timur	63,45	63,48	63,88	64,00	64,12
Kupang	62,87	62,97	63,17	63,33	63,49
Timor Tengah Selatan	65,42	65,45	65,55	65,60	65,65
Timor Tengah Utara	65,89	65,89	66,09	66,14	66,19
Belu	62,26	62,31	63,01	63,21	63,42
Alor	59,71	59,73	60,23	60,35	60,47
Lembata	65,30	65,35	65,85	66,02	66,19
Flores Timur	63,88	63,88	64,28	64,36	64,45
Sikka	65,68	65,70	66,10	66,20	66,30
Ende	64,24	64,27	64,37	64,42	64,48
Ngada	67,30	67,32	67,32	67,34	67,36
Manggarai	64,75	64,78	65,48	65,66	65,84
Rote Ndao	62,67	62,86	62,86	63,13	63,41
Manggarai Barat	65,92	65,98	65,98	66,19	66,19
Sumba Tengah	67,05	67,65	67,65	67,73	67,74
Sumba Barat Daya	67,61	67,08	67,08	67,71	67,76
Nagekeo	66,04	66,05	66,25	66,31	66,36
Manggarai Timur	67,26	67,27	67,27	67,39	67,40
Sabu Raijua	57,83	57,98	58,38	58,69	59,00
Malaka	64,11	64,15	64,15	64,27	64,29
Kota Kupang	68,09	68,14	68,34	68,46	68,58
Nusa Tenggara Timur	65,82	65,91	65,96	66,04	66,07

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.10 Angka Kemiskinan

Penduduk miskin NTT menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin NTT tahun 2015 menjadi 1.159.840 jiwa, menurun tahun 2016 menjadi 1.149.920 dan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin meningkat lagi menjadi 1.150.790 jiwa sedangkan untuk bulan Maret tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 1.142.17 ribu orang.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, meski jumlah penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. BPS mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Indonesia pada Maret 2018 sebesar Rp.401.220/kapita/bulan. Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non-makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut, maka masuk kategori penduduk miskin. Garis kemiskinan tersebut terdiri dari GK makanan Rp.294.806/kapita/bulan ditambah GK nonmakanan Rp.106.414/kapita/bulan. Setiap semester, garis kemiskinan yang dikeluarkan BPS mengalami kenaikan dan sepanjang Maret 2015-Maret 2018 rata-rata mengalami kenaikan 3,27% setiap semester.

Garis kemiskinan NTT pada tahun 2017 sebesar Rp 346.737 meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 322.947. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan NTT menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan NTT 4,06 meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,69 namun menurun pada tahun 2017 menjadi 4,34 dan pada bulan Maret 2018 sebesar 3,90

Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) merupakan suatu indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di NTT mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. Pada tahun 2015 indeks keparahan kemiskinan 1,07 meningkat menjadi

1,29 di tahun 2016 dan menurun tahun 2017 menjadi 1,17, sedangkan pada Maret 2018 sebesar 1,02.

Tabel 2.13
Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2013-2018

Indikator	Angka Kemiskinan (%)			
	2015	2016	2017	Maret 2018 (ribu)
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	1.159.840	1.149.920	1.150.790	1.142.17
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	297.864	322.947	346.737	278.911
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	4,06	4,69	4,34	3,90
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	1,07	1,29	1,17	1,02
Persentase Penduduk Miskin NTT	22,58	22,01	21,38	21,35
Persentase Penduduk Miskin Indonesia	11,13	10,70	10,12	

Sumber : BPS NTT-Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi NTT Desember 2018

2.2.11 Angka Partisipasi Kasar

Sejak tahun 2007 Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Dari perkembangan angka partisipasi kasar di NTT menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah APK. Walau demikian, terjadi peningkatan angka partisipasi kasar tingkat pendidikan dasar ke tingkat pendidikan menengah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 berturut-turut angka partisipasi kasar pendidikan SMA/SMK/MA dari 57,92 meningkat pada tahun 2017 menjadi 78,83. Artinya terjadi perbaikan aksesibilitas penduduk untuk meningkatkan pendidikan.

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan				
	2013	2014	2015	2016	2017
PAUD	N/A	N/A	56,32	57,44	58,32
SD/MI	113,44	114,68	116,46	114,12	114,05
SMP/MTs	80,25	88,66	88,96	89,56	91,35
SMA/SMK/MA	64,85	71,86	75,54	79,34	78,83

Sumber : BPS NTT, 2017

APK PAUD tertinggi 58,32 dicapai pada tahun 2017 dan terendah 56,32 di tahun 2015. APK SD/MI tertinggi 114,68 dicapai pada tahun 2014 dan terendah 113,44 di tahun

2013. APK SMP/MTs tertinggi 91,35 dicapai tahun 2017 dan terendah 80,25 pada tahun 2013. APK SMA/SMK/MA tertinggi 79,34 di tahun 2016 dan terendah 64,85 pada tahun 2013.

2.2.12 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka partisipasi murni di NTT mengalami peningkatan walau masih berada di bawah rata-rata nasional. Angka partisipasi murni di NTT pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA mengalami kenaikan dari 40,84% menjadi 53,32% pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMP/MTs, maka terjadi angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 13,84%. APM SD/MI tertinggi 95,40 tahun 2017 dan terendah 92,13 di tahun 2012. SMP/MTs tertinggi 67,16 di tahun 2017 dan terendah 55,93 tahun 2013. SMA/SMK/MA tertinggi dicapai pada tahun 2017 pada angka 53,32 dan terendah 38,62 pada tahun 2013.

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Murni di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	93,60	94,56	94,95	95,24	95,40
SMP/MTs	59,24	65,86	66,32	66,56	67,16
SMA/SMK/MA	47,31	52,15	52,51	52,87	53,32
Perguruan Tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	16,55

Sumber : BPS NTT, 2017

Terdapat selisih yang cukup besar pada masing-masing jenjang apabila data APK dibandingkan dengan APM sebagai contoh untuk jenjang SD/MI terdapat selisih senilai 18,65% dikarenakan pada Tahun 2017, terdapat 31.328 siswa yang mengulang untuk jenjang SD, demikian juga untuk jenjang SMP, terdapat selisih senilai 24,19%, dikarenakan pada Tahun 2017 terdapat 720 siswa yang mengulang untuk jenjang SMP, Hal ini berlaku juga untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK, terdapat selisih sebesar 25,51% dikarenakan terdapat 419 siswa yang mengulang untuk level SMA serta 149 untuk jenjang SMK. Untuk nilai APS di Provinsi NTT, secara umum makin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah pula nilai APS. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka putus sekolah. Pada Tahun 2017 terdapat 1.980 siswa SD yang putus sekolah yang meningkat menjadi 2.872 siswa yang putus sekolah pada Tahun 2018. Rincian angka mengulang dan angka putus sekolah selengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang untuk jenjang pendidikan
SD, SMP, SMA dan SMK di NTT Tahun 2017 dan 2018

No.	Indikator	Tingkat Pendidikan			
		SD	SMP	SMA	SMK
Tahun 2017					
1.	Putus Sekolah	1.980	2.501	2.256	1.485
2.	Mengulang	31.328	720	419	149
Tahun 2018					
1.	Putus Sekolah	2.872	3.127	2.410	1.609
2.	Mengulang	28.822	1.000	371	330

Sumber: Data verifikasi PDSPK November 2018, Kementerian Dikbud

2.2.13 Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS NTT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 APS dengan kelompok umur 7-12 tahun 92,34 meningkat tahun 2017 menjadi 98,27. Demikian halnya dengan kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun masing masing meningkat dari 89,39 menjadi 94,76 dan dari 64,90 menjadi 74,65. Namun untuk kelompok umur 5-6 tahun mengalami penurunan dari 35,05 pada tahun 2015 menjadi 16,11 di tahun 2017.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur				
	2013	2014	2015	2016	2017
5-6	N/A	N/A	35,05	31,18	16,11
7- 12	92,34	97,99	98,13	98,24	98,27
13-15	89,39	94,26	94,39	94,60	94,76
16-18	64,90	73,96	74,25	74,56	74,65
19-24	22,88	26,22	26,54	26,75	27,80

Sumber : BPS NTT, 2017

2.2.14 Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf (ABH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. ABH NTT pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Pada tahun 2017 ABH NTT sebesar 7,25%, turun sebesar 0,15% dibanding tahun 2016 sebesar 7,40%. ABH tertinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 18,28%, disusul Kabupaten Sumba Tengah 15,4%, dan Kabupaten Sumba Barat 15,11%. ABH terendah di Kota Kupang 0,97%, disusul Kabupaten Ngada 1,62% dan Kabupaten Lembata 2,7%.

Tabel 2.18
Angka Buta Huruf di Provinsi NTT Tahun 2015-2017

Wilayah	Percentase Buta Huruf (Persen)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sumba Barat	15,43	13,26	13,52	17,08	13,8	16,83	16,23	13,52	15,11
Sumba Timur	4,25	6,36	7,16	8,63	9,95	9,36	6,38	8,10	8,23
Kupang	6,04	7,20	5,67	8,72	9,11	8,39	7,35	8,13	6,99
Timor Tengah Selatan	10,00	10,59	9,34	14,23	15,03	14,03	12,15	12,86	11,74
Timor Tengah Utara	8,66	7,23	5,79	10,37	8,38	9,71	9,53	7,81	7,78
Belu	9,78	9,43	7,91	11,15	12,01	12,15	10,47	10,73	10,04
Alor	3,29	1,92	2,25	5,19	5,78	5,38	4,28	3,93	3,89
Lembata	2,05	0,86	1,61	8,17	7,16	3,62	5,40	4,30	2,70
Flores Timur	4,28	2,90	2,74	9,38	7,28	7,96	6,99	5,23	5,52
Sikka	5,81	4,29	7,18	6,53	10,61	10,07	6,20	7,69	8,73
Ende	2,48	3,20	1,83	4,86	7,04	3,72	3,76	5,26	2,84
Ngada	1,63	1,39	1,64	3,10	1,61	1,60	2,39	1,50	1,62
Manggarai	3,31	3,73	2,29	6,28	6,16	6,92	4,84	4,98	4,67
Rote Ndao	6,79	8,06	8,37	7,33	7,34	8,11	7,05	7,71	8,25
Manggarai Barat	2,57	1,99	1,62	4,32	4,69	6,19	3,46	3,36	3,94
Sumba Tengah	7,14	6,26	11,76	11,9	12,67	19,34	9,43	9,35	15,4
Sumba Barat Daya	13,92	17,15	16,77	17,43	19,3	19,87	15,62	18,2	18,28
Nagekeo	3,72	4,11	4,78	5,25	5,79	3,84	4,52	4,99	4,29
Manggarai Timur	1,97	2,84	2,84	3,12	4,35	5,14	2,56	3,61	4,01
Sabu Raijua	11,39	10,21	8,01	10,82	12,46	11,07	11,11	11,3	9,50
Malaka	16,28	11,87	12,06	15,89	13,38	13,26	16,07	12,66	12,70
Kota Kupang	0,76	0,35	0,98	1,51	0,55	0,95	1,12	0,45	0,97
Nusa Tenggara Timur	6,11	6,07	5,87	8,39	8,69	8,58	7,27	7,40	7,25

Sumber : BPS NTT, 2017

2.2.15 Jumlah Kasus Kematian Bayi, Anak Balita dan Balita

Kasus kematian bayi, anak balita dan balita menunjukkan angka yang fluktuatif.

Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi tahun 2016 sebanyak 1.689 jiwa, jumlah kematian anak balita tertinggi sejumlah 449 jiwa terjadi tahun 2016 dan jumlah kematian balita tertinggi sejumlah 1.174 pada tahun 2017. Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi di Kabupaten Kupang tahun 2015 sebanyak 198 jiwa, jumlah kematian anak balita tertinggi terjadi tahun 2015 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan jumlah kematian balita tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017 sejumlah 170 jiwa.

Tabel 2.19
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita
Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Kasus Kematian				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus kematian bayi	1.286	1.280	1.300	1.088	1.044
Jumlah kasus kematian balita	1.478	1.437	1.480	1.268	1.174

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2017

2.2.16 Jumlah Kasus Kematian Ibu

Kasus kematian ibu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah kematian ibu 176 kasus, menurun tahun 2014 sejumlah 158 kasus, umtuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing menjadi 182kasus menurun menjadi 163 kasus.

Tabel 2.20
Kasus Kematian Ibu di NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Kasus Kematian Ibu				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus kematian ibu	176	158	176	182	163

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2017

2.2.17 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi Protein) adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita.

Tabel 2.21
Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase gizi buruk	1,10	1,00	0,96	0,87	0,87
Persentase gizi kurang	6,90	7,15	4,16	2,50	2,84

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2017

Persentase balita dan baduta stunting di Provinsi NTT menurun dari tahun 2015 ke tahun 2017, namun masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kenaikan justru terjadi pada persentase balita dan baduta wasting dan underweight.

Tabel 2.22
Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight
di NTT Tahun 2015-2017

Kelompok Umur	Indikator	NTT Tahun			Indonesia
		2015	2016	2017	
Baduta	Stunting	32,7	32,1	29,8	20,1
	Wasting	11,7	17,5	17,9	12,8
	Underweight	18,9	23,0	22,8	14,8
Balita	Stunting	41,2	38,7	40,3	29,6
	Wasting	13,6	17,4	15,8	9,5
	Underweight	25,6	28,2	28,3	17,8

Sumber : Pemantauan Status Gizi Tahun 2015-2017

2.2.18 Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2015 sebesar 96,17% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 2.219.291 jiwa dan rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2017 naik menjadi 96,73% atau sebanyak 2.320.061 jiwa dan Tingkat partisipasi angkatan kerja 69,09%, tingkat pengangguran terbuka 78.548 jiwa atau 3,27% sedangkan sampai dengan bulan Agustus 2018 rasio penduduk yang bekerja sebesar 96,99% atau sebanyak 2.411.533 jiwa dengan TPAK sebesar 70,17% dan TPT sebesar 74.748 jiwa atau 3,01%.

Tabel 2.23
Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi NTT Tahun 2015 dan 2017

No.	Kegiatan Utama	2015	2017	Agustus 2018
A.	Angkatan Kerja	2.307.737	2.398.609	2.486.281
1	Bekerja	2.219.291	2.320.061	2.411.533
2	Pengangguran Terbuka	88.846	78.548	74.748
B.	Bukan Angkatan Kerja	1.024.663	1.073.247	1.056.838
1	Sekolah	406.687	377.245	388.407
2	Mengurus Rumah Tangga	479.617	562.544	547.798
3	Lainnya	138.359	133.458	120.633
Jumlah		3.471.856	3.333.400	3.543.119
Rasio penduduk yang berkerja		96,17	96,73	96,99
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		3,83	3,27	3,01
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		69,25	69,09	70,17

Sumber : BPS NTT, 2017

2.2.19 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem budaya dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Provinsi NTT merupakan Provinsi dengan nilai IPM yang rendah, namun memiliki gap IPG dan IPM yang paling kecil dibandingkan Provinsi lainnya, dengan besaran rasio 96,66 persen. Nilai IPG tahun 2013 sebesar 65,99 dan IDG 68,28. Kecilnya gap pencapaian

IPM dan IPG di NTT menunjukkan bahwa pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan di NTT tidak jauh berbeda. Hal ini dapat diartikan bahwa kesenjangan gender di NTT relatif paling kecil dibandingkan Provinsi lainnya. Kecilnya gap tersebut terutama disebabkan oleh besaran sumbangan pendapatan penduduk perempuan NTT terhadap total pendapatan yang paling tinggi di antara lainnya. Sumbangan pendapatan ini dihitung dari upah buruh yang bekerja di semua sektor kecuali sektor pertanian.

Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Gender NTT dan Indonesia Tahun 2013-2017

Indeks		2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Gender	NTT	91,74	92,76	92,91	92,72	92,44
	Indonesia	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96
Indeks Pemberdayaan Gender	NTT	59,81	63,06	64,75	65,07	63,76
	Indonesia	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74

Sumber : BPS NTT, 2018

Kesetaraan gender tidak bisa dicapai tanpa dukungan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Di Provinsi NTT, sampai dengan saat ini, tidak ada kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah maupun instrumen atau alat yang bisa digunakan untuk mengarusutamakan gender.

2.2.20 Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti kebutuhan untuk menabung, dan memperoleh informasi. Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.25
Keluarga Pra Sejahtera di Provinsi NTT Tahun 2013-2014

Indikator	2013	2014
Keluarga Pra Sejahtera	627.401	625.096
Keluarga Sejahtera I	296.833	208.491
Keluarga Sejahtera II, III, III Plus	199.165	1.448.147
Jumlah	1.123.399	2.281.734

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.25, terlihat adanya peningkatan jumlah Keluarga Sejahtera II, III dan III plus dari tahun 2013 ke tahun 2014. Secara persentase pada tahun 2014 Keluarga Sejahtera dan Sejahtera I sebesar 36,53% dan Keluarga Sejahtera II, III dan III plus sebesar 63,47%.

2.2.21 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016 dan 2017 secara berturut-turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.26
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2017

2.2.22 Daya Dukung Pangan

Tabel 2.26 menjelaskan bahwa daya dukungan pangan di Provinsi NTT untuk Pangan Non Beras mengalami surplus sebesar 1.696.501 ton sedangkan pada pangan beras mengalami defisit sebesar 15.700 Ton. Dengan demikian dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan berbasis karbohidrat perlu adanya diversifikasi pangan.

Tabel 2.27
Daya Dukung Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Ton/tahun setara beras	Surplus/Defisit
Jumlah Penduduk	5,287,302	Orang	734,935	
Beras	719,235	Ton		-15,700
Pangan Non Beras	2,431,436	Ton		1,696,501

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2017

2.2.23 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang

dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00. Hal ini menunjukkan bahwa pola pangan masyarakat bergerak ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.28
Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2012-2016

Indikator	Tahun (%)			
	2013	2014	2015	2016
Skor PPH	66,2	65,0	71,3	73,0

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.2.24 Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB

Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB NTT mencakup urusan pilihan dengan melibatkan sektor pertanian, pariwisata, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan dan perindustrian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB disumbang oleh pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuhan. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB NTT berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 24,99%, turun pada tahun 2015 menjadi 24,97%, turun lagi pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 23,95% dan 23,57%.

Kontribusi sektor pariwisata didukung dengan lapangan usaha akomodasi, makan minum dan transportasi menunjukkan kenaikan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB NTT mencapai angka 5,83% meningkat pada tahun 2017 menjadi 6,16%. Sedangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB NTT tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti sejak tahun 2014-2017.

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB NTT terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sumbangan sektor perikanan terhadap PDRB NTT 4,72% meningkat di tahun 2017 menjadi 5,01%. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB NTT cenderung menurun sejak tiga tahun lalu. Pada tahun 2014 sebesar 1,44% menurun pada tahun 2017 menjadi 1,30%.

Berbeda dengan sektor pertambangan, di sektor perdagangan sumbangan terhadap PDRB NTT terus meningkat sejak tahun 2014 sebesar 10,65% meningkat tahun 2017 menjadi 11,05%. Sedangkan sektor industri dengan lapangan usaha berupa industri makanan, industri tekstil, industri kayu, industri galian memberikan kontribusi realatif rendah dari tahun 2014 hingga tahun 2017.

Tabel 2.29
Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB di Provinsi NTT Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun (Persen)			
	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	24,99	24,97	23,95	23,57
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	5,83	5,89	6,09	6,16
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	0,15	0,15	0,15	0,14
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	4,72	4,77	4,87	5,01
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1,44	1,41	1,39	1,30
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,65	10,87	11,10	11,05
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,23	1,24	1,23	1,26

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

2.3.1 Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar

2.3.1.1 Urusan Pelayanan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1 Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pendidikan Provinsi NTT diarahkan pada perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan.

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	APS NTT TAHUN					APS INDONESIA
		2013	2014	2015	2016	2017	2017
1	7 – 12 tahun Sekolah Dasar (SD/MI)	92,34	97,99	98,13	98,24	98,27	99,14
2	13-15 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	89,39	94,26	94,39	94,60	94,76	95,08
3	16-18 tahun Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	64,90	73,96	74,25	74,56	74,65	71,42
4	19-24 tahun Perguruan Tinggi	22,88	26,22	26,54	26,75	27,80	24,77

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat per jenjang usia sekolah, yaitu usia SD, usia SMP dan usia SMA. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS di atas 98 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Pada usia 13-15 tahun atau usia SMP, APS sebesar 94,76% dan pada usia 16-18 tahun atau SMA, APS hanya sebesar 74,65%. APS terendah berada pada usia 19-24 tahun atau usia perguruan tinggi sebesar 27,80%. APS pada setiap kelompok umur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mengindikasikan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan di Nusa Tenggara Timur secara persentase mengalami peningkatan, bahkan pada usia SMA dan Perguruan Tinggi, APS NTT berada di atas APS nasional, namun untuk usia SD dan SMP masih berada di bawah APS nasional.

B. Rasio Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah

Rasio sekolah dengan murid mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Semakin rendah rasio sekolah dengan murid, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31
Rasio Sekolah Terhadap Murid Provinsi NTT Tahun 2013 - 2017

Rasio Sekolah Terhadap Siswa	2013	2014	2015	2016	2017
SD	1:179	NA	1:164	1 : 88	1 : 116
SMP	1:207	NA	1:206	1 : 96	1 : 109
SMA/MA/ SMA/LB	1:414	NA	1:299	1 : 84	1 : 136
SMK	1:336	NA	NA	1 : 73	1 : 108

Sumber :SIPD Provinsi NTT, 2018

C. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah dan sederajat terhadap jumlah murid pendidikan dasar/menengah dan sederajat, rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar serta untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Guru Terhadap Murid di Sekolah Dasar dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah
Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenjang pendidikan	Tahun	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
SD/MI	2013	4.910	867.045	24.892	34,83
	2014	4.977	817.680	25.872	31,60
	2015	5.116	840.208	54.827	15,32
	2016	5.171	823.742	53.447	15,41
	2017	5.226	800.926	50.685	15,80
SMP/MTs	2013	1.453	293.126	9.677	30,29
	2014	16.16	325.742	10.56	30,85
	2015	1.599	328.827	24.567	13,38
	2016	1.667	342.498	23.757	14,42
	2017	1.730	350.169	24.936	14,04
SMA/SMK/ MA	2013	623	202.081	25.205	8,02
	2014	864	221.371	21.585	10,26
	2015	748	223.436	17.509	12,76
	2016	792	253.361	18.452	13,73
	2017	825	267.469	20.169	13,26

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Dalam periode 2013 – 2017, terjadi perbaikan rasio Murid-Guru di semua tingkatan, baik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2017, rasio Murid-Guru mencapai 15,80 (SD/MI), 14,04 (SMP/MTs) dan 12,26 (SMA/SMK/MA). Angka-angka ini sudah lebih baik daripada standar yang diatur dalam Permendikbud 23 tahun 2013.

D. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan data dari kemendikbud, angka putus sekolah dasar (SD/MI) di tahun

2013 sebesar 1,88persen, capaian kondisi akhir di tahun 2017 menjadi sebesar 1,04persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 0,53 persen. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka putus sekolah tahun 2013 sebesar 1,70 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 3,77persen, jauh lebih tinggi daripada angka nasional sebesar 1,76 persen. Berikutnya di tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), kondisi angka putus sekolah tahun 2013 sebesar 1,80 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 4,57 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 3,55 persen.

Tabel 2.33
Angka Putus Sekolah Provinsi NTT Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	NAS
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	1,88	1,32	0,69	0,30	1,04	0,53
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	1,70	1,31	1,23	6,02	3,77	1,76
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	1,80	0,59	2,49	8,60	4,57	3,55

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

E. Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.34
Angka Melanjutkan Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					NAS
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	NA	NA	85,34	84,61	91,33	90,08
2	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	NA	NA	86,97	74,38	85,45	77,50

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan tabel di atas, angka melanjutkan pendidikan jenjang sekolah dasar (SD/MI) ke tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) tahun 2015 sebesar 85,34persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 menjadi sebesar 91,33 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 90,08 persen. Berikutnya angka melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP/MTs) ke tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), kondisi angka melanjutkan pendidikan tahun 2015 sebesar 86,97 persenturun menjadi 85,45 persen di tahun 2017, namun masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 77,50 persen.

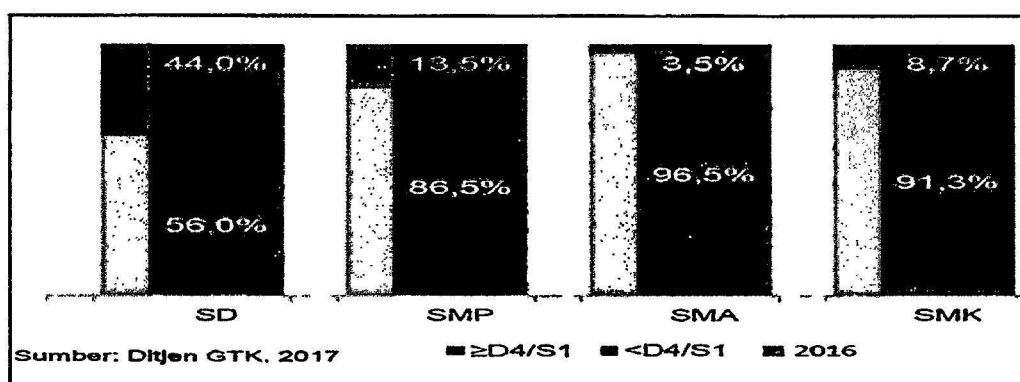
F. Kompetensi Guru

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Melalui arahan dan bimbingan guru yang profesional, peserta didik bisa berkembang menjadi sosok yang cerdas dan terpelajar. Peserta didik diharapkan menjadi generasi yang handal dan berkualitas memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat, agar kelak dapat bersaing di pasar tenaga kerja baik di tingkat nasional maupun internasional.

Guru merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan, sehingga kualifikasi dan kompetensi guru perlu dievaluasi. Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, sementara kompetensi guru diperoleh melalui standar pendidikan profesi. Menurut Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu:

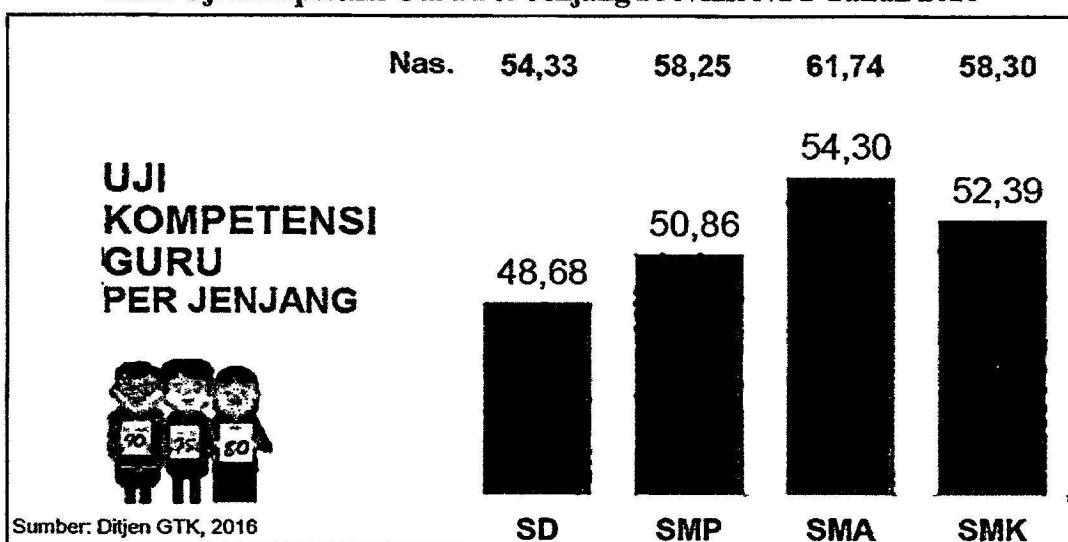
1. Guru pada SD/MI atau bentuk lain sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau Psikologi yang diperoleh dari Program studi yang terakreditasi.
2. Guru pada SMP/MTs/Sederajat, SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK/Sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Gambar 2.9
Persentase Guru yang memiliki Ijazah D4/S1
Provinsi NTT Tahun 2016



Pada Tahun 2016, Persentase Guru yang memiliki ijazah D4/S1 Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk jenjang SMP, SMA dan SMK diatas 85% dengan rincian pada jenjang SMP sebesar 86,5%, SMA 96,5% dan untuk Jenjang SMK sebesar 91,3%. Sedangkan pada jenjang pendidikan SD, persentase guru yang memiliki ijazah D4/S1 sebesar 56%.

Gambar 2.10
Hasil Uji Kompetensi Guru Per Jenjang Provinsi NTT Tahun 2016

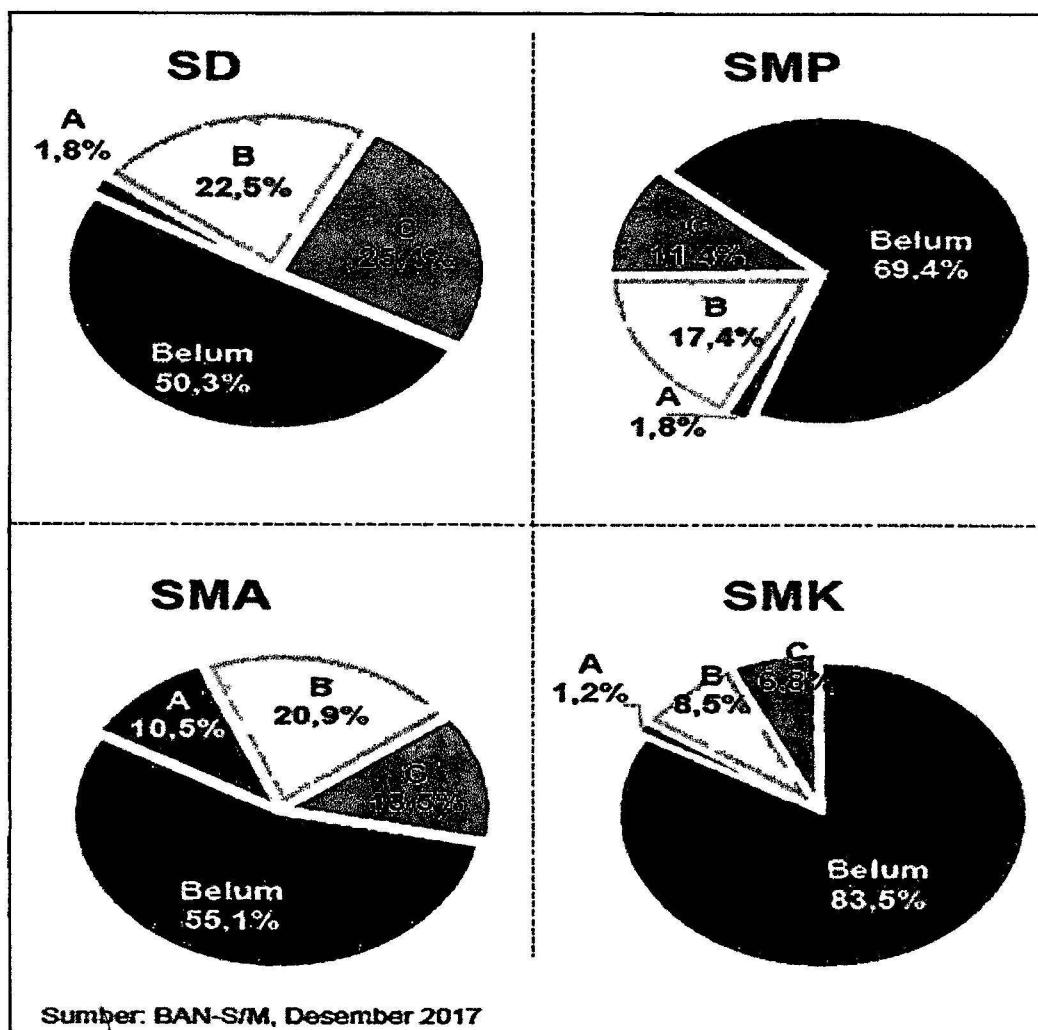


Untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi seorang guru harus dilakukan pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru (UKG) dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Output UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. Rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru Provinsi NTT pada Tahun 2016 untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK masih berada dibawah rata-rata Nasional.

G. Akreditasi Sekolah

Akreditasi dapat juga diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dengan mengacu pada 8 standar pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Gambar 2.11
Hasil Akreditasi Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan
SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi NTT Tahun 2017

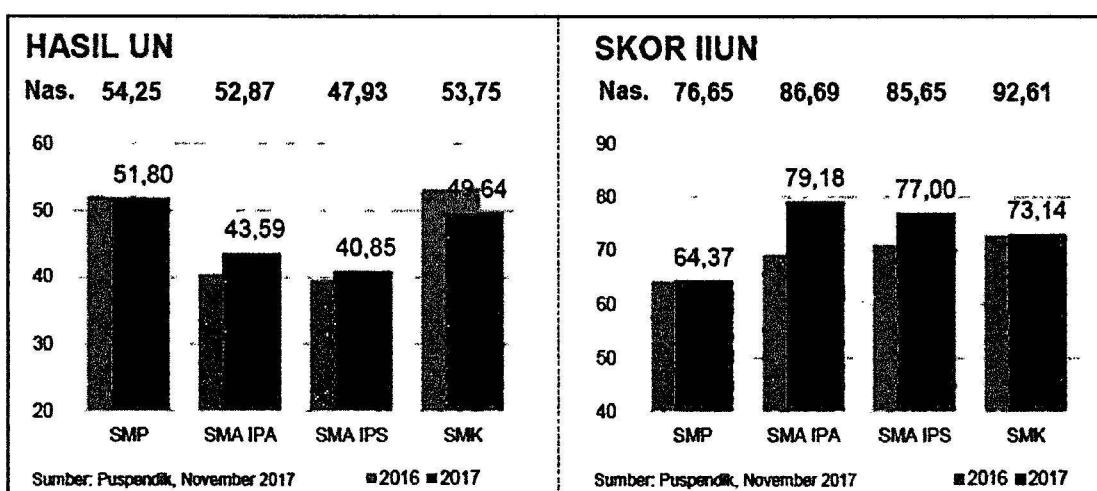


Sampai dengan tahun 2017, kondisi akreditasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh kelompok sekolah yang belum terakreditasi, dengan rincian untuk jenjang SD sebesar 50,3%, SMP sebesar 69,4%, SMA sebesar 55,1% serta SMK sebesar 83,5%. Sedangkan untuk sekolah yang terakreditasi A untuk jenjang pendidikan SD dan SMP sebesar 1,8%, SMA sebesar 10,5% serta SMK sebesar 1,2%. Hal ini menunjukkan pemerataan kualitas pendidikan di Provinsi NTT yang masih sangat amat rendah.

H. Kompetensi Lulusan

Ujian nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Gambar 2.12
Rata-Rata Hasil Ujian Nasional dan Skor Indeks Integritas Ujian Nasional
Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017



Pada Tahun 2017, rata-rata hasil ujian nasional untuk jenjang pendidikan SMP, SMA IPA, SMA IPS dan SMK masih berada dibawah rata-rata nasional. Demikian juga rata-rata Skor Indeks Integritas Ujian Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 masih berada dibawah rata-rata nasional.

I. Pendidikan Luar Biasa

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang menjadi kewenangan Provinsi. Pada tahun 2003 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Dalam undang-undang tersebut dikemukakan hal-hal yang erat hubungannya dengan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, salah satunya yaitu pada Bab IV Pasal 5 (2). Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, (3). Warganegara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, (4). Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Berbagai kebijakan yang berhubungan dengan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus tidak hanya yang bersifat regional dan nasional, tetapi juga yang bersifat internasional. Beberapa diantaranya adalah: a. Deklarasi tentang Hak Azasi Manusia 1948, termasuk di dalamnya hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi semua orang – PBB. b. Konvensi tentang Hak Anak 1989 (PBB, dipublikasikan tahun 1991) c. Pendidikan untuk Semua 1990: Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand yang menyatakan bahwa: (1) memberi kesempatan kepada semua anak untuk sekolah; dan (2) memberikan pendidikan yang sesuai bagi semua anak. Dalam kenyataannya, pernyataan tersebut belum termasuk di dalamnya anak luar

biasa (UNESCO, dipublikasikan tahun 1991 dan 1992) d. Peraturan Standar tentang Kesamaan Kesempatan untuk Orang-orang Penyandang Cacat (PBB, 1993 dipublikasikan tahun 1994).

Pada Tahun 2017/2018, penduduk Provinsi NTT yang menerima layanan pendidikan luar biasa sebanyak 2.563 siswa, dengan komposisi terbesar pada jenjang umur 7-12 tahun sebesar 37%, dan usia 13-15 tahun sebesar 29%. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Jumlah Siswa Pendidikan Luar Biasa Menurut Kelompok Umur Provinsi NTT
Tahun 2017/2018

No.	Jenjang	< 7 tahun		7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun		> 18 tahun		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Pendidikan Luar Biasa (PLB)	42	1.64	955	37	736	29	582	23	-	-	2563	100
	Negeri	16	0.84	727	38	557	29	415	22	197	10	1913	100
	Swasta	26	3.99	228	35	179	28	167	26	51	7.8	651	100

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Jumlah sekolah luar biasa pada tahun 2017/2018 berjumlah 37 unit dengan rincian SDLB sebanyak 4 unit, SMPLB sebanyak 3 unit, SMLB sebanyak 4 unit serta SLB sebanyak 26 unit. Sedangkan menurut jenis pendidikan, sebanyak 7 unit SLB adalah sekolah swasta dari total 37 unit. Rincian gambaran mengenai sekolah luar biasa dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Gambaran Pendidikan Luar Biasa Provinsi NTT
Tahun 2015/2016sampai dengan 2017/2018

No.	Indikator	2015/2016	2016/2017	2017/2018
1.	Jumlah Sekolah	34	34	37
	Negeri	25	27	30
	Swasta	9	7	7
2.	Jumlah Siswa Baru	33	594	524
	Negeri	28	481	383
	Swasta	5	113	141
3.	Jumlah Siswa	2209	2429	2563
	Negeri	1679	1859	1912
	Swasta	530	570	651
4.	Jumlah Siswa Mengulang	N/A	N/A	84
	Negeri	N/A	N/A	44
	Swasta	N/A	N/A	40
5.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	N/A	N/A	18
	Negeri	N/A	N/A	9
	Swasta	N/A	N/A	9
6.	Jumlah Siswa Yang Lulus	281	188	76
	Negeri	214	139	-
	Swasta	67	49	76
7.	Jumlah Guru	554	487	615

No.	Indikator	2015/2016	2016/2017	2017/2018
	Negeri	442	390	522
	Swasta	112	97	93
8	Jumlah Tenaga Kependidikan	554	57	87
	Negeri	442	54	82
	Swasta	112	3	5
9.	Jumlah Rombongan Belajar	389	517	512
	Negeri	306	422	427
	Swasta	83	95	85
10.	Jumlah Ruang Kelas	359	373	439
	Negeri	287	304	370
	Swasta	72	69	69

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.1.2 Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah memelihara kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat hidup lebih lama dan produktif yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dan pelayanan kesehatan masyarakat (preventif dan promotif). Pelayanan kesehatan dilakukan melalui fasilitas-fasilitas kesehatan maupun Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) agar mampu menjangkau semua elemen masyarakat. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan menambah kuantitas fasilitas kesehatan terkait dengan dan peningkatan kualitas melalui standarisasi mutu pelayanan di fasilitas kesehatan melalui akreditasi.

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Perkembangan posyandu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan namun rasionya fluetuatif dengan satuan balita yang dilayani. Rasio tahun 2013 sebesar 15.18, tahun 2014 sebesar 16.45 dan pada tahun 2017 sebesar 15.89 yang artinya setiap 15 posyandu dapat menampung 1.000 balita (15:1.000). Walaupun sudah melewati kondisi ideal dimana seharusnya 10 posyandu untuk melayani 1.000 balita, namun keaktifan posyandu itu sendiri masih rendah, di kondisi ini digambarkan bahwa pada tahun 2017 persentase posyandu aktif hanya mencapai 50,78%. Perkembangan posyandu dan rasio dapat diihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Provinsi NTT, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Posyandu	9.368	10.323	5.954	10.033	10.053
Jumlah Balita	617.216	627.547	622.757	627.471	632.639
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	15,18	16,45	9,56	15,99	15,89

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

b. Rasio Prasarana Kesehatan per Satuan Penduduk

Pada tahun 2016 jumlah puskesmas 384 dengan rasio sebesar 1:13.550 jiwa dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 396 puskesmas dengan rasio 1:13.351 jiwa, sudah berada dalam kondisi ideal dimana 1 puskesmas harus melayani 16.000 penduduk, namun dengan kondisi geografis dirasa perlu ditingkatkan jumlah puskesmas agar dapat melayani penduduk di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Pertambahan jumlah puskesmas juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah polindes dan klinik/balai kesehatan yang pada tahun 2017 masing-masing dengan rasio 1:5.513 jiwa untuk polindes dan rasio 1:550.760 jiwa untuk klinik/balai kesehatan. Namun untuk Puskesmas Pembantu mengalami penurunan sehingga rasio puskemas pembantu pada tahun 2017 sebesar 1 : 4.979 yang berarti belum memenuhi rasio ideal sebesar 1 : 1.500 penduduk.

Tabel 2.38
Rasio Puskesmas, Polindes, Posyandu dan Klinik/Balai Kesehatan
Per Penduduk Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Puskesmas	368	379	383	384	396
- Rasio Puskesmas	1:13.461	1:13.289	1:13.368	1:13.550	1:13.351
Puskesmas Pembantu	1.080	1.081	1.088	1.081	1.062
- Rasio Puskesmas Pembantu	1:4.587	1:4.659	1:5.625	1:4.814	1:4.979
Polindes	755	1,022	710	944	959
- Rasio Polindes	1:6.561	1:4.928	1:7.211	1:5.512	1:5.513
Klinik/Balai Kesehatan	0	0	0	29	96
- Rasio Klinik/Balai Kesehatan	0	0	0	1:179.431	1:550.760
Jumlah Penduduk	4.953.967	5.036.897	5.120.061	5.203.514	5.287.302

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit dalam periode 2013-2017 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2013 tercatat terdapat 43 rumah sakit, meningkat pada tahun 2017 menjadi 50 rumah sakit. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk pada tahun 2013-2017 belum mencukupi, pada tahun 2017 tercatat rasio sebesar 1:103.672 penduduk, sementara idealnya 1 rumah sakit untuk 1000 penduduk (WHO). Penambahan fasilitas Rumah sakit dan rasionya seperti pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Penduduk Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Sakit	43	44	46	47	51
Jumlah Penduduk	4.953.967	5.036.897	5.120.061	5.203.514	5.287.302
Rasio Rumah Sakit	1:115.208	1:114.474	1:111.305	1:110.713	1:103.672

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Dengan demikian beberapa desa yang ada di pulau-pulau kecil dan pulau besar yang memiliki kondisi topografi berupa gunung dan lembah yang sulit dijangkau oleh pelayanan medis sehingga membutuhkan pelayanan khusus lewat laut dan kasus-kasus emergensi yang membutuhkan rujukan cepat via transportasi udara.

d. Rasio Dokter Dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan harus didukung ketersediaan tenaga medis dan prasarana kesehatan. Pada tahun 2017 rasio tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) sebesar 17 per 100.000 penduduk, meningkat dari tahun 2013 sebesar 14 per 100.000 penduduk. Rasio bidan naik dari keadaan tahun 2013 sebesar 56 per 100.000 penduduk menjadi 74 per 100.000 penduduk, sedangkan rasio perawat turun dari keadaan tahun 2013 sebesar 108 per 100.000 penduduk menjadi 97 per 100.000 penduduk di tahun 2017. Untuk tenaga kesehatan lainnya (tenaga gizi, sanitarian, apoteker dan asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, keterapi fisik dan keteknisan medik) naik dari keadaan tahun 2013 sebesar 39 per 100.000 penduduk menjadi 67 per 100.000 penduduk di tahun 2017. Walaupun rasio tenaga kesehatan cenderung mengalami peningkatan, namun masih jauh di bawah kondisi standar.

Tabel 2.40
Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Sarana Kesehatan Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Jenis Tenaga Kesehatan	Ratio Tenaga Kesehatan NTT per 100.000 penduduk tahun					Standar
	2013	2014	2015	2016	2017	
Tenaga Medis	14	20	15	15	17	62
Bidan	56	56	72	72	74	100
Perawat	108	108	91	92	97	173
Tenaga Kesehatan Lainnya	39	39	55	48	67	83

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

e. Angka kesakitan

Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular di Provinsi NTT fluktuatif dari tahun 2013 sampai ke tahun 2017. Angka kesakitan malaria, tuberkolosis, HIV, diare dan DBD mengalami penurunan yang berarti, namun tetap belum memenuhi target secara keseluruhan. Rincian angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka kesakitan Malaria (Annual Paracite Index – API) per 1.000 penduduk	22	13,59	7,05	5,5	5,39
2	Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	210	68	92	106	61
3	Prevalensi HIV (%) pada populasi penduduk dewasa usia (15-49 tahun)	0,2	0,3	0,1	0,001	0,001
4	Angka kesakitan diare per 1.000 penduduk	8,96	6	8	6	6
5	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	10,7	2,45	1,06	19,82	4,00
6	Prevalensi Kusta per 1.000 penduduk	0,6	0,90	1,00	0,30	1,18
7	Angka Kesakitan Filariasis per 1.000 penduduk	1	1,20	0,69	6,08	3,70
8	Persentase penduduk dengan hipertensi	NA	49,12	4,64	4,72	14,30
9	Persentase penduduk obesitas	NA	16,74	0,01	3,26	12,61
10	Persentase IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	NA	3,54	0,89	12,56	0,71
11	Persentase tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	NA	2,76	1,50	1,33	12,11

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan sebagai penghubung antar willyah di Provinsi NTT perlu diketahui kondisinya untuk mengidentifikasi kelancaran mobilisasi barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang dalam rangka peningkatan kegiatan perekonomian. Panjang jalan Provinsi NTT berdasarkan SK Gubernur Nomor 256/KEP/HK/2017 adalah 2.650 km, dengan proporsi 42,47% terletak di pulau-pulau Timor, Alor, Rote, Sabu, 39,73% di pulau Flores, Lembata dan 17,80% di pulau Sumba.

Tabel 2.42
Total Panjang Jalan Provinsi NTT tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan Provinsi (Km)	1.397,12	1.737,37	1.737,37	1.737,37	2.650

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Peningkatan kualitas jalan dilakukan melalui program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang dilakukan tiap tahunnya. Panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan direhabilitasi tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan jembatan Provinsi (Km)	41,87	55,18	59,89	38,13	87,76

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Pada tahun 2017 kondisi jalan dalam keadaan baik 54,49%, sementara jalan rusak ringan 9,41%, jalan rusak sedang sebesar 9,35% dan jalan dengan kondisi rusak berat 26,75%. Proporsi kondisi jalan pada tahun 2017 dapat Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Kondisi Jalan Provinsi NTT Tahun 2017

Kondisi Jalan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Persentase	54,49	9,41	9,35	26,75

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

B. Jaringan Irigasi Provinsi

Pada tahun 2017, ada 52 Daerah Irigasi Pusat yang luas potensialnya 133.929 Ha dengan luas fungsional 31.356 Ha (23,4 persen). Daerah Irigasi Provinsi sebanyak 36 daerah irigasi dengan luas potensialnya 49.326 Ha, luas fungsional 27.589 Ha (55,6 persen). Untuk Daerah Irigasi Kabupaten/Kota luas fungsional 67.223 Ha. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR RI, Kabupaten dengan luas Daerah Irigasi terbesar adalah Manggarai (8.250 ha), Sumba Timur (6.910 ha), Manggarai Barat (4.731 ha), Ngada (4.544 ha) dan Sumba Barat Daya (3.589 ha).

Tabel 2.45
Kondisi Baik Jaringan Irigasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (Ha)	58.555	58.555	60.328	60.328	60.328

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.45, dapat dilihat bahwa tingkat kondisi baik jaringan irigasi terus meningkat dari 58.555 hektar are di tahun 2013 menjadi 60.328 hektar are di tahun 2017.

C. Sumber Air Minum Rumah Tangga

Jika dilihat sumber air minum rumah tangga, sampai dengan tahun 2017 sumber air utama masyarakat NTT adalah Mata Air Terlindungi (31,51 persen) dan disusul oleh Sumur Terlindungi (18,31 persen). Sementara layanan air ledeng menurun dari 13,62 persen tahun 2013 menjadi 12,42 persen pada tahun 2017.

Sumber lain yang juga meningkat adalah air kemasan/isi ulang (biasanya layanan oleh swasta) dan sumur bor/pompa. Yang menjadi perhatian utama adalah masih adanya pelayanan air minum rumah tangga dengan menggunakan sumur / mata air tidak terlindung yaitu sebesar 17,82% pada tahun 2017.

Tabel 2.46
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Tahun	Air kemasan/ isi ulang	Ledeng	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Sumur/ mata air tidak terlindung	Lainnya
2013	5,43	13,62	3,45	20,33	29,53	20,05	7,59
2014	6,10	12,16	3,31	19,26	31,55	19,78	7,84
2015	5,10	13,89	3,58	18,37	32,92	17,72	8,42
2016	5,69	13,49	3,60	18,05	30,56	20,81	7,79
2017	8,10	12,42	4,99	18,31	31,51	17,82	6,85

Sumber : Susenas 2014-2017

Sedangkan untuk indikator yang diukur yaitu persentase sarana air bersih perdesaan naik dari 20% pada tahun 2013 menjadi 60,16% pada tahun 2017.

Sedangkan persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak meningkat dari 43,33% dari tahun 2013 menjadi 65,20% pada tahun 2017.

Tabel 2.47
Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan dan Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017

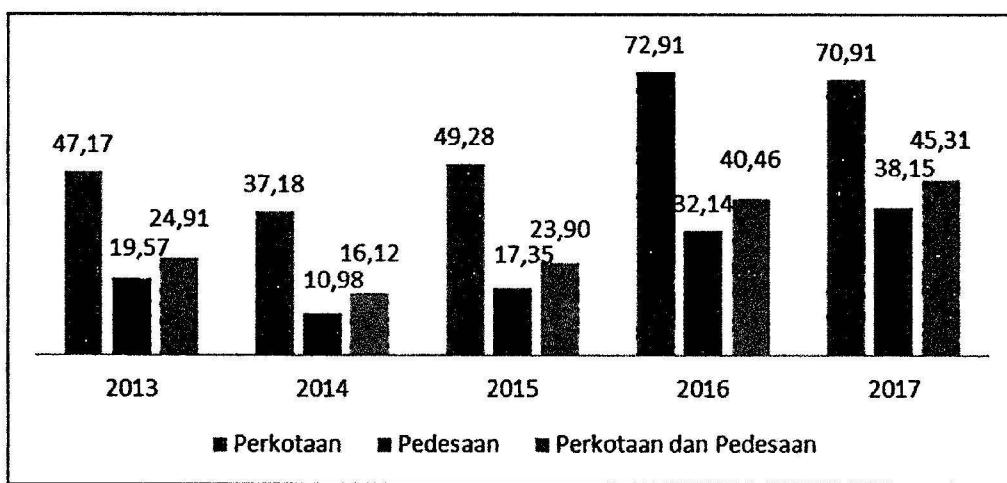
No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sarana Air Bersih Perdesaan	20	47,99	57,46	54,68	60,16
2	Rumah tangga dengan sumber air minum layak	43,33	54,88	62,72	60,04	65,20

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

D. Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Rumah tangga dengan sanitasi layak adalah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Pada tahun 2013 rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 24,91 persen, mengalami kenaikan sebesar 20,40 poin pada tahun 2017 menjadi 45,31%. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 67,89%, maka tentunya masih berada di bawah rata-rata nasional. Gambar di bawah memperlihatkan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi layak selama kurun waktu 2013-2017.

Gambar 2.13
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses
Terhadap Sanitasi Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017



Sumber : Statistik Perumahan Provinsi NTT, 2018

2.3.1.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pencapaian agenda prioritas nasional dan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyediaan perumahan mengarahkan Peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut meliputi pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Dukungan Pemerintah Daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah.

A. Indikator Rumah Layak Huni

Pada tahun 2013 jumlah rumah dengan atap seng mencapai 80,91 persen menjadi 88,16% tahun 2017 atau meningkat meningkat 7,25%. Untuk lantai rumah terluas menunjukkan tertinggi lantai semen mencapai 46,65% tahun 2013 menjadi 49,89% tahun 2017 atau meningkat 3,24%. Lantai rumah yang perlu menjadi prioritas peningkatan yaitu rumah lantai tanah yang mencapai 23,37% dan lainnya 6,64% tahun 2017. Khusus untuk rumah adat karena tradisi lebih memilih lantai kayu atau semen, sehingga perlu dilakukan pendekatan khusus sehingga secara budaya tetap terjaga dan dari kebutuhan kelayakan tetap dapat dipenuhi.

Tabel 2.48
Persentase Rumah Layak Huni Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Rumah Layak Huni	63,3	63,4	64	NA	63

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Persentase rumah layak huni selama tahun 2013 sampai 2017 mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 sebesar 63,3%, menurun tipis pada tahun 2017 menjadi sebesar 63%.

B. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sampai dengan 2017, masih ada 426.990 unit rumah tidak layak huni di NTT, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 399.739 unit. Jumlah RTLH tertinggi ada di Kabupaten Sumba Barat Daya (70.213 unit), Kabupaten TTS (52.784 unit) dan Kabupaten TTU (30.046 unit). Jumlah RTLH terendah ada di Kabupaten Sumba Barat (3.380 unit), Kota Kupang (4.964 unit) dan Kabupaten Ngada (6.156 unit).

2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, TTU, LSM, Yayasan, PMKRI dan GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FKUB; (iii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK; dan (iv) peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi 350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda, LSM, Ormas Pemuda, Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas. Jumlah linmas di tahun 2017 sebanyak 44.876 orang. Dalam rangka Peningkatan Ketahanan Seni Budaya, untuk memperkaya puncak-puncak seni budaya nasional yang pada gilirannya dapat memperkuat jati diri bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan serta toleransi kehidupan beragama. Dari 22 Kabupaten/Kota kaya akan potensi seni dan budaya serta keragaman yang tersebar di berbagai pulau, memerlukan pengelolaan dalam sebuah wadah seni dan budaya seperti *art and culture center*.

2.3.1.6 Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial-ekonomi, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa Kabupaten seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius. Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Permasalahan PMKS terbanyak di Provinsi NTT, yaitu fakir miskin, anak terlantar dan korban bencana alam. Data PMKS di Provinsi NTT tahun 2013-2017 tersaji pada Tabel 2.49.

Tabel 2. 49
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2013	2014	2015	2016	2017
Anak Balita Terlantar	14.529	14.529	17.081	33.939	33.939
Anak Terlantar	62.092	62.092	58.170	120.876	120.876
Korban Tindak Kekerasan	1.470	1.470	1.663	1.429	519
Anak Jalanan	3.672	3.672	2.965	1.259	1.259
Anak Cacat	5.001	5.001	6.706	5.775	5.775
Lansia Terlantar	-	-	36.022	52.666	-
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	58.511	58.511	45.276	57.236	70.185
Penyandang Cacat	34.079	22.862	30.782	30.400	30.400
Pemulung	1.218	1.218	1.274	1.045	1.045
Tuna Suila	823	823	1.953	1.797	1.797
Penyandang HIV/AIDS	2.351	319	3.700	3.700	3.700
Pengemis	7	7	614	604	604
Gelandangan	8	8	272	265	265
Eks Narapidana	7.215	7.215	7.267	7.211	7.211
Korban Penyalahgunaan Napza	166	166	345	370	370
Keluarga Fakir Miskin	504.852	610.495	421.799	597.413	216.914
Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	15.792	15.792	-	-	-
Korban Bencana Alam	51.765	51.765	36.039	86.106	86.106
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3.515	-	2.359	2.142	2.142
Komunitas Adat Terpencil	12.522	-	10.964	5.071	5.071
Pekerja Migran/Deportan	362	-	1.701	805	805
Anak Berhadapan Dengan Hukum	-	3.114	190	234	234
Anak Korban Tindak Kekerasan	-	-	1.024	519	519
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	61	106	106
Kelompok Minoritas	-	-	499	693	693
Korban Traffiking	-	-	424	225	-
Korban Bencana Sosial	-	-	2.884	805	805

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2 Urusan Pelayanan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

Berdasarkan data Sakernas, penduduk usia kerja tahun 2013 mencapai 3.191.748 orang yang meningkat menjadi 3.471.856 orang atau naik 2,11%. Penduduk usia kerja dominan ada di pedesaan atau 79,63% dan menurun menjadi 76,33%. Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran angkatan kerja dari pedesaan ke perkotaan dengan peningkatan mencapai 7,28%, sedangkan pedesaan meningkat 0,71%.

Tabel 2.50
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

PUK	Absolut	%								
	2013		2014		2015		2016		2017	
Jenis Kelamin										
Laki-laki	1.558.416	48,83	1.592.960	48,84	1.628.065	48,86	1.662.622	48,87	1.697.137	48,88
Perempuan	1.633.332	51,17	1.668.379	51,16	1.704.335	51,14	1.739.453	51,13	1.774.719	51,12
L+P	3.191.748	100,00	3.261.339	100,00	3.332.400	100,00	3.402.075	100,00	3.471.856	100,00
Daerah										
Kota	649.969	20,36	667.059	20,45	754.201	22,63	787.953	23,16	821.888	23,67
Desa	2.541.779	79,64	2.594.280	79,55	2.578.199	77,37	2.614.122	76,84	2.649.968	76,33
K+D	3.191.748	100,00	3.261.339	100,00	3.332.400	100,00	3.402.075	100,00	3.471.856	100,00

Sumber: Sakernas, 2018

A. Angkatan Kerja (AK)

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan. Kondisi angkatan kerja tahun 2013-2017 berdasarkan jenis kelamin dan daerah seperti pada tabel berikut

Tabel 2.51
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

AK	Absolut	%								
	2013		2014		2015		2016		2017	
Jenis Kelamin										
Laki-laki	1.244.946	57,33	1.274.336	56,70	1.311.858	56,85	1.324.755	56,29	1.357.673	56,60
Perempuan	930.225	42,77	973.102	43,30	995.879	43,15	1.028.893	43,71	1.040.936	43,40
L+P	2.175.171	100,00	2.247.438	100,00	2.307.737	100,00	2.353.648	100,00	2.398.609	100,00
Daerah										
Kota	365.88	16,82	388.987	17,31	440.178	19,07	506.468	21,52	478.616	19,95
Desa	1.809.291	83,18	1.858.451	82,69	1.867.559	80,93	1.847.180	78,48	1.919.993	80,05
K+D	2.175.171	100,00	2.247.438	100,00	2.307.737	100,00	2.353.648	100,00	2.398.609	100,00

Sumber: Sakernas, 2018

Jumlah angkatan kerja tahun 2013 mencapai 2.175.171 orang meningkat menjadi 2.298.609 pada tahun 2017 orang atau meningkat 2,19%. Berdasarkan domisili menunjukkan ada peningkatan angkatan kerja perkotaan dari 18,82% menjadi 19,95%.

Proporsi angkatan kerja pada tahun 2017 sebanyak 56,60% laki-laki dan 43,40% perempuan.

B. Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Kondisi bukan angkatan kerja seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

BAK	Absolut	%								
	2013		2014		2015		2016		2017	
Jenis Kelamin										
Laki-laki	313.470	30,84	318.624	31,43	316.207	30,86	337.867	32,23	339.464	31,63
Perempuan	703.107	69,16	695.277	68,57	708.456	69,14	710.56	67,77	733.783	68,37
L+P	1.016.577	100	1.013.901	100	1.024.663	100	1.048.427	100	1.073.247	100
Daerah										
Kota	284.089	27,95	278.072	27,43	314.023	30,65	281.485	26,85	343.272	31,98
Desa	732.488	72,05	735.829	72,57	710.64	69,35	766.942	73,15	729.975	68,02
K+D	1.016.577	100	1.013.901	100	1.024.663	100	1.048.427	100	1.073.247	100

Sumber: Sakernas. 2018

Jumlah penduduk bukan angkatan kerja tahun 2013 mencapai 1.016.577 orang meningkat menjadi 1.073.247 orang tahun 2017 atau meningkat 1,92%. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin komposisi penduduk bukan angkatan kerja laki-laki mencapai 31,63% jauh dibawah perempuan yang mencapai 68,37%. Komposisi bukan angkatan kerja dominan di perdesaan mencapai 68,02% dan di perkotaan hanya mencapai 31,63%.

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dihitung dari banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas. Angkatan kerja sendiri adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang melakukan kegiatan bekerja secara aktif atau sedang mencari pekerjaan. TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTT disajikan pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

TPAK	2013	2014	2015	2016	2017
Laki-laki	79,89	80,00	80,58	79,68	80,00
Perempuan	56,95	58,33	58,43	59,15	58,65
Laki-laki + Perempuan	68,15	68,91	69,25	69,18	69,09
Kota	56,29	58,31	58,36	64,28	58,23
Desa	71,18	71,64	72,44	70,66	72,45
Kota + Desa	68,15	68,91	69,25	69,18	69,09

Sumber : Sakesnas, 2018

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 sebesar 68,15% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 69,09%. Berdasarkan jenis kelamin, kenaikan TPAK dari tahun 2013 sampai tahun 2017 lebih tinggi pada perempuan dengan kenaikan sebesar 1,7% dibanding laki-laki sebesar 0,11%. Berdasarkan wilayah tahun 2013 sampai tahun 2017, kenaikan pada daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan, dimana pada wilayah perkotaan TPAK naik sebesar 1,94% sedangkan pada wilayah perdesaan sebesar 1,27%.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi NTT cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017, TPT terendah mencapai 8,22%. TPT tertinggi tahun 2013 yang mencapai 9,22%.

Tabel 2.54
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT dan Nasional 2013-2017

TPT	NTT Tahun					Indonesia
	2013	2014	2015	2016	2017	
Jenis Kelamin						
Laki-laki	2,81	3,23	3,19	2,88	3,41	
Perempuan	3,84	3,30	4,68	3,73	3,10	
L+P	3,25	3,26	3,83	3,25	3,27	5,50
Daerah						
Kota	7,40	8,05	8,80	5,56	8,66	6,79
Desa	2,41	2,25	2,66	2,62	1,93	4,01
K+D	3,25	3,26	3,83	3,25	3,27	5,50

Sumber : Sakernas, 2018

Berdasarkan Tabel 2.54, dapat dilihat bahwa TPT mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 sebesar 3,25% dan meningkat di tahun 2015 menjadi 3,83%, kemudian turun di tahun 2016 menjadi 3,25% lalu naik lagi pada tahun 2017 menjadi 3,27%. Berdasarkan jenis kelamin, kenaikan TPT tahun 2017 lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan, sedangkan berdasarkan wilayah pada tahun 2017, TPT

pada daerah perkotaan lebih tinggi daripada wilayah perdesaan. Jika dibandingkan dengan angka nasional sebesar 5,50% maka TPT NTT sudah berada di bawah nasional. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja.

Tabel 2.55
Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi NTT
Tahun 2015-2017

Pendidikan	Jumlah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa)		
	2015	2016	2017
SD Ke bawah	15.146	13.401	14.985
SLTP	9.264	8.873	7.116
SLTA Ke atas	64.036	54.306	56.447
Jumlah	88.446	76.580	78.548

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Proporsi tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi pada tahun 2017 adalah pengangguran dengan pendidikan SLTA ke atas dengan 71,86%, turun dari proporsi tahun 2015 sebesar 72,40%. Pengangguran dengan tingkat pendidikan SLTP proporsinya menurun dari 10,47% pada tahun 2015 menjadi 9,06% di tahun 2017, sedangkan pengangguran dengan tingkat pendidikan SD ke bawah naik proporsinya dari 17,12% di tahun 2015 menjadi 19,08% di tahun 2017.

E. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT

Jumlah PMI asal NTT yang bekerja di luar negeri menurun dari tahun 2013 sebanyak 4.095 orang menjadi 1.739 orang di tahun 2017. Malaysia menjadi negara yang paling banyak menyerap PMI asal NTT dengan total PMI sebanyak 1.478 orang. Jumlah PMI illegal pada tahun 2016 sebanyak 443 orang, meningkat di tahun 2017 menjadi sebanyak 510 orang. Sedangkan jumlah PMI yang meninggal tahun 2016 sebanyak 46 orang, meningkat di tahun 2017 menjadi sebanyak 62 orang, dan pada tahun 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 104 orang. Jumlah sebaran PMI berdasarkan Negara tujuan tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Sebaran PMI Asal NTT Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2017

No	Negara Tujuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Malaysia	3.471	3.504	2.449	1.853	1.478
2	Singapura	430	296	184	151	124
3	Hongkong	62	30	37	22	29
4	Brunai Darussalam	6	7	15	16	93
5	Arab Saudi	5	3	-	-	-
6	Qatar	21	-	-	1	4
7	Taiwan	-	3	1	-	1
8	Cyprus	1	-	-	-	-

No	Negara Tujuan	2013	2014	2015	2016	2017
9	Oman	30	10	3	1	2
10	Kuwait	1	-	-	-	-
11	Uni Emirat Arab	67	-	1	-	2
12	Timor Leste	-	-	-	-	2
13	Kongo	1	-	-	-	-
14	Italia	-	3	-	-	-
15	Papua New Guinea	-	1	-	-	-
16	Bahrain	-	6	10	-	-
17	New Zealand	-	-	-	2	-
18	Makao	-	-	2	-	-
19	Sudan	-	-	-	-	1
20	Uzbekistan	-	-	-	-	1
21	Turki	-	-	-	-	1
19	Solomon	-	-	4	-	1
Jumlah		4.095	3.856	2.706	2.046	1.739

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

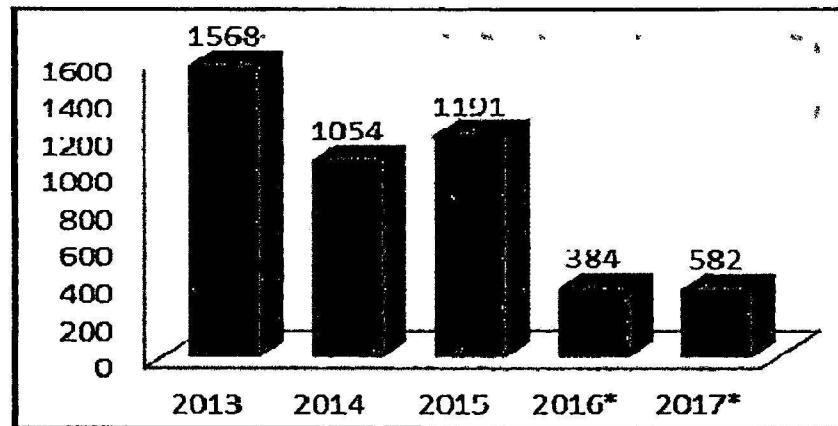
F. Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK di Provinsi NTT sampai tahun 2018 berjumlah 8 unit, yaitu BLK Ruteng di Kabupaten Manggarai, BLK Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, BLK Kabupaten Flores Timur, BLK UKM Ende di Kabupaten Ende, BLK Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, BLK Alor di Kabupaten Alor, BLK Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya dan UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK) Kupang di Kota Kupang.

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjuk dengan indikator sebagai berikut: Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dimana DP3A mencatat terdapat 4.542 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2013-2017; Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2017 sebesar 305; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKPK) Perempuan yaitu sebesar 64,41% lebih rendah dari laki-laki sebesar 81,23%; perempuan yang bekerja pada sektor formal hanya sebesar 35,52% dan yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 45,52% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan secara total sebesar 3,30% dan laki-laki sebesar 3,23 %.Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung menurun dari 1.568 kasus di tahun 2013 menjadi 582 kasus di tahun 2017. Walaupun pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2016 sebanyak 384 kasus, seperti yang terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.14
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi NTT
Tahun 2013-2017



Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Kasus kekerasan terhadap anak NTT pada tahun 2017 mencapai 305 kasus, dimana kasus kekerasan lebih banyak terjadi pada anak perempuan daripada laki-laki. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2017 sebanyak 282 kasus dan anak laki-laki sebanyak 21 kasus.

Tabel 2.57
Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi NTT Tahun 2017

NO	KAB / KOTA	GENDER		TOTAL
		L	P	
1	Kabupaten NTT	0	0	0
2	Kabupaten Alor	1	5	6
3	Kabupaten Bima	1	15	16
4	Kabupaten Ende	2	10	12
5	Kabupaten Flores Timur	0	0	0
6	Kabupaten Kupang	1	19	20
7	Kabupaten Lembata	3	25	28
8	Kabupaten Malaka	0	0	0
9	Kabupaten Manggarai	0	0	0
10	Kabupaten Manggarai Barat	0	0	0
11	Kabupaten Manggarai Timur	0	12	12
12	Kabupaten Ngada	1	3	4
13	Kabupaten Rote Ndao	2	25	27
14	Kabupaten Sabu Raijua	2	25	27
15	Kabupaten Sikka	0	0	0
16	Kabupaten Sumba Barat	0	29	29
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	0	1	1
18	Kabupaten Sumba Tengah	0	0	0
19	Kabupaten Sumba Timur	0	0	0
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	42	18	60
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	3	67	70
22	Kota Kupang	2	49	51
	TOTAL	21	282	303

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Sedangkan, kedudukan perempuan sebagai anggota DPRD dapat dijelaskan bahwa anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT periode 2014-2019 berjumlah 715 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak 615 orang (91,04%) dan anggota perempuan sebanyak 64 orang (8,95%). Jumlah Perwakilan anggota perempuan terbanyak yaitu di Kabupaten Malaka 24%, TTS 20% dan Ngada 20%, sedangkan Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah tidak memiliki perwakilan anggota perempuan di DPRD.

Tabel 2.58
Jumlah Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kotadan PNS Provinsi NTT
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Perempuan (Anggota DPRD) :					
- Provinsi	4	6	7	7	7
- Kabupaten/Kota	49	64	63	60	69
- PNS	3.958	2.546	2.746	6.885	6.782

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.3 Pangan

Data Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT menunjukkan bahwa ketersediaan pangan untuk konsumsi per kapita per hari di NTT mengalami penurunan dalam kelompok pangan sumber energi (nabati dan hewani) dari 3.449 tahun 2015 menjadi 3.294 tahun 2017. Penurunan juga terjadi di kelompok makanan sumber lemak dari 73,41 tahun 2015 menjadi 56,89 di tahun 2017. Sementara di kelompok sumber protein terjadi peningkatan dari 77,23 tahun 2015 menjadi 92,80 tahun 2017.

Kemampuan daya dukung dan daya tampung yang didukung berdasarkan pengembangannya sesuai peruntukan ruang, yaitu kawasan untuk usaha pertanian, perikanan, pertambangan, industri menengah dan besar, industri kecil/rumah tangga, kawasan peruntukan pariwisata; dan kawasan peruntukan permukiman. Luas dan peran jasa ekosistem untuk penyediaan pangan di NTT menunjukkan bahwa potensi wilayah yang menopang penyediaan pangan yang berkategori tinggi sampai sangat tinggi adalah 32,98% (15,226,95 ha) dan berkategori sedang luasnya 14,09% (6,503,40 ha).

Dengan demikian, potensi penyediaan pangan untuk keseluruhan wilayah NTT relatif cukup besar. Kisaran persentasi potensi wilayah berdasarkan luas masing-masing Kabupaten yang berkategori sangat tinggi adalah 0,02 sampai 1,2%. Pada kategori ini, lima Kabupaten terendah dalam persentasi luasan wilayahnya dalam penyediaan pangan adalah Belu, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Sedangkan lima Kabupaten terluas dalam kategori ini adalah Manggarai, Ngada, Flores Timur, Lembata dan Alor.

Tabel 2.59
Jumlah Cadangan Pangan Provinsi NTT Tahun 2013-2016

2.3.1.2.4 Pertanahan Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah Cadangan Pangan	100	109,23	178,27	146,32

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah.

Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Persentase Luas Lahan Bersertifikat di NTT disajikan pada Tabel 2.60. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat bahwa Persentase Luas Lahan Bersertifikat dominan Provinsi NTT hingga tahun 2018 adalah sebesar 72,07 persen

Tabel 2.60
Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Uraian	HGB	HGU	HM	HPL
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (persen)	6,00	4,26	72,08	2,57

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup meliputi perencanaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) untuk melihat daya dukung, daya tampung, jasa ekosistem dan risiko lingkungan bagi seluruh aktifitas pembangunan. Daya dukung lingkungan mencakup ketersediaan air permukaan, kondisi DAS, pangan, fungsi lindung dan lahan terbangun. Daya tampung lingkungan terkait dengan kemampuan lahan, kondisi udara dan air. Sedangkan kinerja jasa ekosistem mencakup penyedia dan pengendali air, penyedia pangan, informasi kerentanan terhadap perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kearifan lokal, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati. Risiko Lingkungan mencakup kawasan rawan bencana dan persampahan.

A. Kawasan Pendukung Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup didukung kawasan lindung terdiri dari: kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; kawasan rawan bencana; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya. Kawasan hutan lindung di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan luas total kurang lebih 652.916 ha. Pembangunan lingkungan hidup juga didukung pada kawasan budidaya.

B. Kondisi Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup dilihat berdasarkan kualitas kawasan hutan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan tingkat kekritisannya. Luas lahan

kritis menjadi ancaman dalam meningkatkan kelestarian lingkungan. Dari total lahan dalam kawasan hutan seluas 1.808.774,65ha yang tidak kritis hanya seluas 116.983,72 ha atau 7,34%. Selanjutnya lahan tidak kritis di luar kawasan hutan seluas 713.206,87ha atau 1,09% dari total lahan di luar kawasan hutan seluas 2.926.215,79 ha. Kawasan konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar di 21 Kabupaten/Kota yang terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa dan kawasan taman hutan raya.

Tabel 2.61
Lahan Kritis dalam Kawasan hutan dan di Luar Kawasan Hutan
Provinsi NTT Tahun 2017

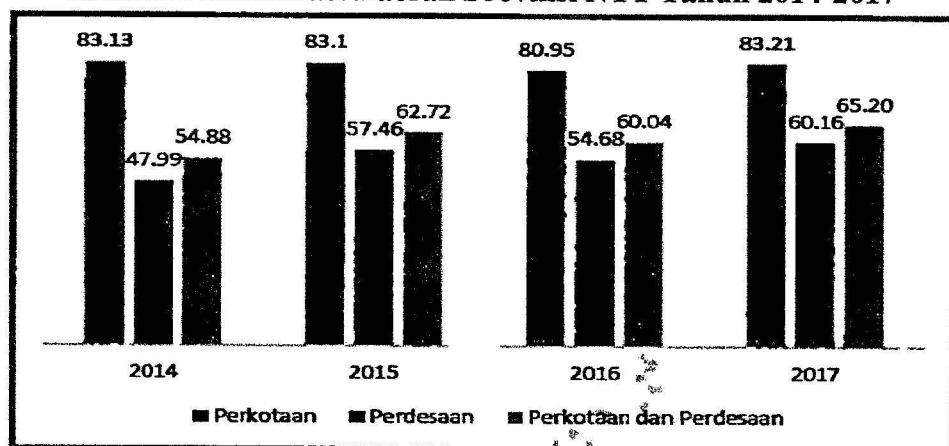
No	Kondisi	2017	Persentase (%)
A	Dalam Kawasan Hutan		
1	Tidak Kritis	116.983,74	7,34
2	Potensial Kritis	932.980,00	32,17
3	Agak Kritis	676.702,80	58,49
4	Kritis	75.832,75	1,18
5	Sangat Kritis	6.275,34	0,82
	Jumlah	1.808.774,64	100
B	Luar Kawasan Hutan		
1	Tidak Kritis	713.206,87	1,09
2	Potensial Kritis	304.114,51	49,31
3	Agak Kritis	1.024.667,13	16,37
4	Kritis	872.502,7	32,53
5	Sangat Kritis	11.724,58	0,71
	Jumlah	2.926.215,79	100

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

C. Akses Air Minum

Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Pada tahun 2017 layanan air minum 65,20%, seperti yang terlihat pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15
Percentase Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak
Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2014-2017



Sumber : Susenas 2014-2017

Berkaitan dengan rumah tangga di NTT yang memiliki akses terhadap air minum layak, jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka terjadi kenaikan sebanyak 10,52 poin.

Akan tetapi jika dipilah menurut daerah tempat tinggal, maka perbedaan yang besar besar antara akses air layak penduduk perkotaan dan perdesaan. Masih sekitar 40% penduduk perdesaan masih mengkonsumsi air tidak layak.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis, disebutkan bahwa kondisi hingga tahun 2017, capaian akses air minum layak sebesar 60,04% dan target akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%, sehingga terdapat gap sebesar 39,96%. Daya tampung sumber air minum layak sampai dengan tahun 2017, sumber air utama masyarakat NTT adalah Mata Air Terlindungi (31,51 persen), disusul oleh sumur terlindungi (18,31 persen). Sementara layanan air ledeng menurun dari 13,62 persen tahun 2013 menjadi 12,42 persen pada tahun 2017. Sumber lain yang juga meningkat adalah air kemasan/isi ulang (biasanya layanan oleh swasta) dan sumur bor/pompa.

Tabel 2.62
Percentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Tahun	Air kemasan/ Isi ulang	Ledeng	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Sumur/ Mata air tidak terlindung	Lainnya
2013	5,43	13,62	3,45	20,33	29,53	20,05	7,59
2014	6,10	12,16	3,31	19,26	31,55	19,78	7,84
2015	5,10	13,89	3,58	18,37	32,92	17,72	8,42
2016	5,69	13,49	3,60	18,05	30,56	20,81	7,79
2017	8,10	12,42	4,99	18,31	31,51	17,82	6,85

Sumber : Susenas 2013-2017

Mengenai distribusi luas dan peran jasa ekosistem terhadap penyediaan air bersih berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten yang memiliki potensi jasa penyediaan air bersih dalam kategori tinggi memiliki luas lahan berkisar antara 0,01 sampai 0,5% dari luas wilayah masing-masing Kabupaten. Tiga belas Kabupaten yang memiliki persentasi luasan terkecil dalam kategori ini adalah Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Sikka, Lembata, Alor, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Sementara tiga Kabupaten yang memiliki persentasi luasan tertinggi berdasarkan luas Kabupaten masing-masing adalah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Belu.

Secara umum, lahan yang ada di Provinsi NTT memberikan jasa pengaturan pemurnian air yang tergolong tinggi. Kabupaten yang tergolong memiliki persentase besar lahan berpotensi tinggi dalam penyediaan jasa ini adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 256.807,63 ha atau 5,56%, Kabupaten Kupang seluas 255.092,86 ha atau 5,53%, dan Ende seluas 154.900,03 ha atau 3,36% dari total lahan yang ada. Untuk lahan yang terbilang luas, tetapi berpotensi sangat rendah hingga rendah dalam penyediaan jasa pengaturan pemurnian air terdapat di Kabupaten Sumba Timur. Luas lahan di Kabupaten ini yang berpotensi sangat rendah adalah 212.835,90 ha atau 4,61% dan yang

berkategori rendah seluas 323.353,59 ha atau 7,0% total luas lahan di NTT. Kabupaten Sumba Timur memiliki banyak air permukaan yang mengalir dari Kabupaten tetangganya. Akan tetapi, vegetasi yang relatif jarang membuat air sulit untuk memurnikan diri yang menyebabkan rendahnya kualitas air di Kabupaten ini.

D. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 1.227 buah dan tersebar di 1.192 pulau baik pulau kecil maupun pulau besar di NTT. Dari DAS yang ada, maka terdapat 27 DAS memiliki peran yang dominan dengan cakupan luas 1.527.900 ha perlu dikelola secara intensif dengan memanfaatkan rencana pengelolaan DAS terpadu. Saat ini sudah terdapat 4 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) yaitu RPDAST Benain, RPDAST Noelmina, RPDAST Aesesa, dan RPDAST Kambaniru.

E. Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Dalam hal jasa pengaturan iklim, Kabupaten/Kota di NTT umumnya hanya memiliki lahan yang relatif sempit yang mampu mempengaruhi iklim secara signifikan. Tiga Kabupaten yang memiliki persentase tertinggi potensinya dalam mengatur iklim adalah berturut-turut dari yang tertinggi ke terendah adalah: Kabupaten Alor (seluas 137.138,02 ha (2,97% dari total lahan di NTT), Manggarai Barat (124.451,76 ha atau 2,70%) dan Ende (119.637,20 atau 2,59% total lahan). Jasa pengaturan iklim berkategori tinggi terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (seluas 175.358,10 ha atau 3,80%) dan Kabupaten Kupang (156.731,75 ha atau 3,39% luas total lahan di NTT). Lahan yang didominasi oleh pegunungan berhutan lebat dan perkebunan serta sungai, bendungan dan embung-embung di kelima Kabupaten ini membuat kelimanya melampaui Kabupaten lainnya dalam hal pengaturan iklim. Dengan tutupan vegetasi yang luas membuat suhu di Kabupaten-Kabupaten ini menjadi lebih rendah dibandingkan Kabupaten lainnya di NTT.

Dari segi tata air dan pengaturan banjir, tiga Kabupaten yang menyumbang lahan paling luas untuk jasa berkategori sangat baik adalah: Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 187.840,89 atau 4,07%, Kabupaten Kupang seluas 153.664,00 atau 3,33% dan Kabupaten Alor seluas 140.164,67 ha atau 3,04%. Kabupaten Kupang juga menyumbang lahan seluas 119.486,23 ha atau 2,59% untuk kategori jasa pengaturan tata air dan banjir berpotensi baik. Lahan berpotensi baik lainnya untuk tata air dan banjir terdapat juga di Kabupaten Ngada seluas 107.044,85 atau 2,32% dan Manggarai Timur seluas 101.154,89 ha atau 2,19%. Sebaliknya, lahan terluas yaitu 407.747,37% atau 8,83% berpotensi jasa yang sangat rendah terdapat di Kabupaten Sumba Timur. Lahan potensinya sangat rendah juga terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 123.864,85 ha atau 2,68% dan Kabupaten Sumba Tengah seluas 110.076,28 ha atau 2,38% total luas lahan di NTT.

Jasa pengaturan selanjutnya adalah pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana. Kabupaten yang memiliki persentase paling tinggi dalam menyediakan jasa pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah Kabupaten Alor seluas 107.517,34 ha atau 2,33% dan Manggarai Barat seluas 102.379,81 ha atau 2,22%. Sedangkan lahan yang menyediakan jasa pengaturan pencegahan bencana berpotensi baik terdapat di Manggarai Timur seluas 126.379,80 ha atau 2,74% total luas lahan. Sebaliknya, Kabupaten yang jasa perlindungan bencananya berpotensi sangat rendah adalah Kabupaten Kupang seluas 459.146,80 ha atau 9,95%, Sumba Timur seluas 448.369,50 ha atau 9,71% dan di Timor Tengah Selatan seluas 333.792,19 ha atau 7,23% luas total lahan di NTT.

F. Kualitas Udara

Eko-region yang ada di NTT memberikan jasa pemeliharaan kualitas udara mulai dari kategori sangat rendah hingga sangat tinggi. Meskipun demikian, luasan eko-region yang menghasilkan jasa sangat rendah dan rendah relatif besar dan tidak berbeda dengan eko-region yang menyediakan jasa tinggi hingga sangat tinggi. Lahan yang berpotensi sangat rendah hingga rendah dalam pemeliharaan kualitas udara di NTT mencapai luasan sebesar 1.708.601,05 atau sekitar 37,01% dari total lahan yang ada. Luasan ini berimbang dengan lahan yang berpotensi tinggi dan sangat tinggi yang mencapai luasan sebesar 1.714.155,15 ha atau 37,13% dari keseluruhan lahan yang terdapat di NTT.

2.3.1.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

a. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi adalah ada atau tidaknya ketersediaan database kependudukan skala Provinsi. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2013 sampai dengan 2017 berada dalam kategori “ada”.

Tabel 2.63

Ketersediaan Database Kependudukan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif adalah jumlah PKK aktif dibagi dengan jumlah PKK dikalikan 100 persen. Persentase PKK aktif di Provinsi NTT disajikan pada Tabel 2.64., di mana persentase PKK Aktif tahun 2013 sampai tahun 2017 sebesar 100%.

Tabel 2.64

Persentase PKK Aktif di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

b. Persentase Posyandu Aktif

Persentase Posyandu aktif adalah jumlah Posyandu aktif dibagi dengan jumlah Posyandu dikalikan 100 persen. Persentase Posyandu aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 2.65. Persentase Posyandu Aktif menurun dari keadaan tahun 2013 sebesar 51,22% menjadi 50,78%. Hal ini menjadi masalah karena belum optimalnya pelayanan, Posyandu Aktif, padahal Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang paling terkecil.

Tabel 2.65

Persentase Posyandu Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Posyandu Aktif	51,22	50,50	57,54	57,34	50,78

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

c. Persentase Desa Siaga Aktif

Persentase Desa Siaga Aktif adalah jumlah Desa Siaga Aktif dibagi dengan jumlah Desa Siaga dikalikan 100 persen. Persentase Desa Siaga Aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan pada Tabel 2.66. Persentase Desa Siaga Aktif meningkat dari keadaan tahun 2013 sebesar 57,17% menjadi 79,75%. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pembentukan desa siaga di masyarakat.

Tabel 2.66
Persentase Desa Siaga Aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Desa Siaga Aktif	57,17	50,78	59,47	70,81	79,75

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

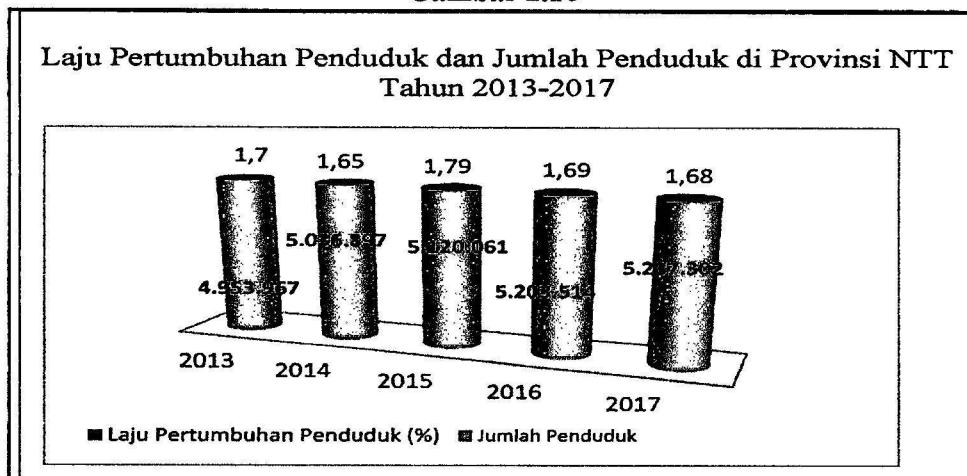
2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4Terlalu; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun).

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kondisi laju pertumbuhan penduduk fluktuatif yaitu 1,7% tahun 2013 dengan jumlah penduduk 4.953.967 jiwa sedangkan tahun 2016 tumbuh 1,69% dengan jumlah penduduk 5.203.541 jiwa.

Gambar 2.16



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1,68% dengan jumlah penduduk 5.237.302 jiwa atau turun 0,01% dibanding tahun 2016.

b. Cakupan Peserta KB aktif

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang isterinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.

Tabel 2.67
Cakupan Peserta KB Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	60,10	45,69	52,64	57,19	32,51

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Peserta KB aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan signifikan terjadi dari tahun 2016 sebesar 57,19% menjadi 32,51% pada tahun 2017. Ini menunjukkan semakin menurunnya pemahaman dan kesadaran PUS di NTT untuk menjadi peserta KB yang aktif.

c. Cakupan peserta KB Baru

Peserta KB baru (PB) adalah jumlah orang yang pertama kali menggunakan metode kontrasepsi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mengukur kemampuan program untuk menarik PB dari segmen masyarakat yang belum memanfaatkan Program KB. Cakupan peserta KB baru Provinsi NTT tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Cakupan Peserta KB Baru Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Peserta KB Baru (%)	11,6	10,6	8,8	8,6	5,2

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Peserta KB Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2013 cakupan peserta KB baru sebesar 11,6% namun pada tahun 2017 turun menjadi hanya 5,2%. Ini menunjukkan penurunan tingkat kesadaran PUS di NTT untuk menjadi peserta KB.

d. Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Tujuan pembentukan kampung KB untuk meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga non-pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Pencanangan Kampung KB dari tahun 2016 sebesar 25 Kampung KB, kemudian naik menjadi 320 Kampung KB yang dicanangkan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 pencanangan Kampung KB mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan hanya sebesar 218 Kampung KB, sehingga total Kampung KB yang telah terbentuk di Provinsi NTT sebanyak 563 Kampung KB. Jumlah Kampung KB yang sudah dibentuk di Provinsi NTT dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2. 69
Jumlah Kampung KB yang Sudah Dibentuk per Kabupaten/Kota
di Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun Pencanangan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Sumba Barat	-	6	-	6
2	Sumba Timur	3	26	8	37
3	Kupang	1	26	12	39
4	Timor Tengah Selatan	1	15	2	18
5	Timor Tengah Utara	-	32	9	41
6	Belu	4	12	3	19
7	Alor	-	16	5	21
8	Lembata	2	6	4	12
9	Flores Timur	1	20	2	23
10	Sikka	1	24	3	28
11	Ende	-	23	34	57
12	Ngada	2	10	5	17
13	Manggarai	-	12	10	22
14	Rote Ndao	1	21	8	30
15	Manggarai Barat	2	8	26	36
16	Sumba Tengah	1	5	5	11
17	Sumba Barat Daya	2	10	18	30
18	Nagekeo	1	7	6	14
19	Manggarai Timur	1	20	42	63
20	Sabu Raijua	1	2	11	14
21	Malaka	1	12	5	18
22	Kota Kupang	-	7	-	7
	Nusa Tenggara Timur	25	320	218	563

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.9 Perhubungan

A. Jumlah Terminal

Sebagai simpul transportasi darat yang berfungsi sebagai tempat perpindahan orang dan barang, berdasarkan keputusan menteri perhubungan dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 169/Kep/HK/2010, di NTT terdapat 20 Terminal, yaitu: Terminal Type A 1 unit, Type B 15 unit dan Terminal Type C 4 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota se NTT. Dalam tahun 2014 terjadi penambahan terminal Type A : 1 unit yaitu di Naiola-Kabupaten TTU dan Terminal Type B 1 unit di Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat) sehingga jumlah keseluruhan Terminal menjadi 22 unit.

B. Jumlah Pelabuhan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) di Provinsi NTT saat ini sudah memiliki 74 (tujuh puluh empat), dimana sebelumnya hanya 42 (empat puluh dua) Pelabuhan Laut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2002

tentang Kepelabuhan Nasional, terjadi penambahan 32 (tiga puluh dua) pelabuhan. Berdasarkan hirarki dan fungsinya Pelabuhan Laut di NTT terdiri dari: 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 64 (enam puluh empat) Pelabuhan Pengumpulan (Regional & Lokal). Adapun pelabuhan- pelabuhan tersebut yaitu :

1. **Pelabuhan Utama**, dari aspek penggunaan, hirarki dan fungsi pelabuhan di Provinsi NTT ada 1 (satu) Pelabuhan Utama yaitu **Pelabuhan Laut Tenau Kupang**. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi.
2. **Pelabuhan Pengumpul**, adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi. Di Provinsi NTT terdapat 9 (sembilan) pelabuhan pengumpul.
3. **Pelabuhan Pengumpulan (Regional dan Lokal)**, adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi. Berdasarkan hirarki dan fungsi pelabuhan di Provinsi NTT ada 64 (enam puluh empat) pelabuhan pengumpulan, yang terdiri dari : **Pengumpulan Regional**, ada 6 (enam) yaitu Pelabuhan Kalabahi Kabupaten Alor, Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya, Pelabuhan Terong/Waiwerang Kabupaten Flores Timur, Pelabuhan Baranusa Kabupaten Alor, Pelabuhan Marapokot Kabupaten Nagekeo dan Pelabuhan Moru Kabupaten Alor. Pelabuhan **Pengumpulan Lokal** berjumlah 58 (lima puluh delapan).

Alur pelayaran sistem transportasi laut terdiri dari :

- Alur pelayaran internasional meliputi jalur Kupang - Timor Leste, Atapupu – Timor Leste dan Kalabahi – Timor Leste;
- Alur pelayaran nasional meliputi jalur Kupang - Lewoleba – Maumere – Makasar – Pare Pare – Nunukan – Tarakan, Larantuka – Makasar – Batu Licin – Semarang – Tanjung Priuk – Tanjung Pinang, Ende - Waingapu – Benoa – Surabaya – Dumai – Surabaya; dan
- Alur pelayaran regional meliputi jalur Kupang – Ndao – Sabu – Raijua – Ende – Pulau Ende – Maumbawa – Mborong – Waingapu – Waikelo – Labuan Bajo,

Kupang – Naikliu – Wini – Kalabahi – Maritaing – Lirang – Kisar – Leti, Kupang – Mananga – Lewoleba – Balauring – Baranusa – Kalabahi – Atapupu, Kupang – Mananga – Maumere – Marapokot – Reo – Labuan Bajo – Bima, Kupang – Sabu Raijua – Raijua – Sabu Raijua – Kupang, dan Kupang – Mananga – Maumere – Sukun – Palue – Maurole – Marapokot – Reo – Labuan Bajo – Bima.

C. Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor serta Kecelakaan Lalu Lintas

Jumlah kendaraan bermotor meningkat pesat dari tahun 2013 sebanyak 439.708 unit menjadi 679.991 unit di tahun 2017 atau meningkat sebanyak 54,6%.

Tabel 2.70
Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	Perkembangan Jumlah Kendaraan di NTT				
	2013	2014	2015	2016	2017
Mobil Penumpang	24.918	24.918	34.423	30.999	33.222
Bus/Mikro Bus	1.390	1.390	1.400	1.623	1.662
Truk/ Pick Up	21.055	21.055	30.659	28.107	31.271
Alat Berat *)	0	0	0	156	165
Sepeda Motor	392.345	439.832	507.545	561.795	613.671
Jumlah	439.708	487.195	574.027	622.680	679.991

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

*) = (Data Tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak tersedia)

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi NTT naik dari keadaan tahun 2013 sebanyak 1.109 kecelakaan menjadi 1.342 kecelakaan pada tahun 2017. Kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas sejalan dengan kenaikan jumlah korban, dimana korban mati naik dari 423 orang pada tahun 2013 menjadi 499 orang pada tahun 2017, korban luka berat naik dari 378 orang pada tahun 2013 menjadi 398 orang pada tahun 2017, dan korban luka ringan naik dari 1.182 orang di tahun 2013 menjadi 1.743 orang di tahun 2017. Data kecelakaan lalu lintas tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2. 71
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban
di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas	1.109	982	1.104	1.338	1.342
2	Mati	423	403	349	440	499
3	Luka Berat	378	396	411	437	398
4	Luka Ringan	1.182	970	1.408	1.699	1.743

Sumber : Kepolisian Daerah NTT, 2018

D. Arus Kunjungan dan Penumpang

Arus kunjungan kapal laut terindikasi meningkat, hal ini seiring dengan bertambahnya unit kapal laut yang beroperasi di wilayah NTT. Namun meningkatnya arus kunjungan kapal laut tidak diikuti dengan arus penumpang naik dimana terjadi

penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2017, sedangkan untuk arus penumpang turun mengalami kenaikan. Arus kunjungan kapal laut dan penumpang kapal kaut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Arus Kunjungan Kapal Laut dan Penumpang Kapal Laut
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Arus Kunjungan Kapal Laut :					
- Datang	29.659	14.238	1.274.787	1.687.407	39.052
- Berangkat	29.659	14.223	1.286.504	1.653.065	0
Arus Penumpang Kapal Laut :					
- Naik	1.034.014	575.990	122.084	1.023.639	1.028.030
- Turun	987.503	577.232	110.483	1.091.522	1.002.119

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Sementara arus penumpang pesawat mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2017. Hal ini mengindikasikan perubahan alat angkutan yang digunakan dalam mobilisasi antar-daerah dari penggunaan sarana angkutan kapal laut ke pesawat udara.

Tabel 2.73
Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara
Provinsi NTT Tahun 2015-Desember 2018

Bandar Udara	Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara Di Provinsi NTT (Orang)							
	Berangkat				Datang			
	2015	2016	2017	Desember 2018	2015	2016	2017	Desember 2018
Tambolaka	66.964	78.331	96.970	9.766	64.048	75.755	93.081	10.302
Umbu Mehang Kunda	55.974	77.027	79.685	6.969	56.881	76.083	77.044	6.786
Terdamu	8.837	6.631	5.487	561	7.660	6.024	4.872	534
A. A. Bere Tallo, Belu	11.146	37.936	41.321	4.625	11.425	36.773	41.668	4.188
Mali	33.401	51.197	57.789	4.554	34.150	50.804	57.482	4.706
Wunopito	12.253	13.101	13.827	1.219	11.932	12.843	13.572	1.390
Gewayantana	24.300	36.906	44.088	3.642	25.162	37.566	44.208	3.753
Frans Seda	68.548	108.988	90.837	9.047	72.464	107.493	93.264	10.567
H.H. Aroebusman	77.046	91.389	100.945	8.109	74.066	97.094	100.670	8.724
Turalelo	23.735	34.161	35.451	3.523	22.863	30.773	31.691	3.912
Frans Sales Lega	16.270	9.805	9.880	1.134	16.507	12.701	11.308	1.017
Lekunik	12.653	20.420	22.170	2.304	12.349	21.309	22.892	2.247
Komodo	120.437	189.755	238.287	22.057	112.851	174.404	217.922	28.896
El Tari	754.940	897.418	847.294	78.471	752.429	947.785	913.804	85.789
Jumlah	1.286.504	1.653.065	1.684.031	155.981	1.274.787	1.687.407	1.723.415	172.811

Sumber : Survei Transportasi Udara, 2018

2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

A. Keberadaan *Website* Milik Pemerintah dan Jumlah Nama Domain yang Dikelola Pemerintah Daerah

Dalam upaya peningkatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan dari pemerintah Provinsi kepada masyarakat, maka diperlukan keberadaan *website* milik pemerintah Provinsi. Status keberadaan *website* milik Pemerintah Provinsi NTT dan jumlah nama domain yang dikelola pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74

Status *Website* Milik Pemerintah Jumlah Nama dan Domain yang Dikelola Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Capaian
1	Website Pemprov. NTT	Penyebarluasan informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara online	Masyarakat	5 terbitan (setiap tahun ditebitkan)
2	Website PPID	Penyebarluasan informasi pemerintahan berupa profil perangkat daerah, program kegiatan dan capaian kinerja perangkat daerah dan laporan keuangan serta informasi-informasi lain sesuai peraturan yang berlaku	Masyarakat	5 terbitan (setiap tahun ditebitkan)
3	Domain resmi pemerintah (.go.id)	Tersedianya domain website resmi khusus pemerintah sebagai media hosting	Perangkat Daerah	20 sub domain
4	Domain Resmi e-mail (.go.id)	Tersedianya domain e-mail resmi pemerintah	Perangkat Daerah	100 alamat e-mail

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan Tabel 2.74, dapat dilihat bahwa website milik pemerintah daerah adalah website Pemprov. NTT, website PPID, serta tersedia 20 sub domain milik pemerintah dan 100 alamat email dengan domain resmi. Sementara penyebarluasan informasi publik milik pemerintah Provinsi NTT dari tahun 2013 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75
Penyebaran Informasi Publik Milik Pemerintah Provinsi NTT
Tahun 2013-2018

No	Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Capaian
1	Kegiatan Pameran	Penyebarluasan informasi pembangunan dan capaian kinerja pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Masyarakat	5 kali (100 %)
2	Kegiatan Dialog Radio/TV/Publik	Penyebarluasan informasi program /kegiatan pemerintah yang aktual melalui media elektronik dan media tatap muka	Kelompok stakeholder terkait dan masyarakat	Dialog TV 5 kali Dialog Radio 10 kali Dialog publik 18 kali
3	Pemutaran Film	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan wawasan kebangsaan yang edukatif	Masyarakat Pedesaan	25 kali tersebar di 21 Kabupaten
4	Media Luar Ruang Publik	Penyebarluasan informasi program dan himbauan-himbauan yang aktual melalui media Baliho dan Spanduk	Masyarakat	50 media baliho/spanduk
5	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Penyebarluasan informasi program pemerintah melalui pembentukan kelompok informasi masyarakat pedesaan melalui media online dan tradisional	Masyarakat Pedesaan	22 Kelompok dan kegiatan setiap tahun

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Penyebaran informasi publik milik pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan pameran, dialog radio/tv/publik, pemutaran film di desa-desa, media penyampaian informasi luar ruang publik, serta melalui kelompok informasi masyarakat. Sementara itu layanan jumlah layanan publik yang diselenggarakan dengan aplikasi melalui sistem e-government terdiri dari PPID, Free Hotspot, e-Surat, e-Absensi, e-Report, E-Jadwal dan E-Agenda.

B. Persentase Penduduk yang Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi

Dalam kurun waktu 2013-2017, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang menggunakan komputer dan internet. Walau demikian, angka ini masih relatif rendah dibandingkan Nasional. Data Susenas menunjukkan bahwa pengguna komputer di NTT tahun 2017 sebesar 12,98% dan pengguna internet sebanyak 17,88%. Padahal pengguna internet secara Nasional sudah mencapai 54,68%. Laki-laki lebih banyak menggunakan internet daripada perempuan, walaupun perbedaannya tidak signifikan.

Tabel 2.76

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenis Alat Komunikasi dan Informasi	2013	2014	2015	2016	2017
Telepon dan Komputer					
Telepon	2,70	2,60	1,33	3,52	0
Telepon Seluler	69,20	72,05	36,65	37,96	40,97
Komputer	10,83	11,84	11,52	9,69	12,89
Internet					
Pria	8,25	10,98	13,61	19,44	
Wanita	6,81	9,07	12,02	16,36	
Jumlah	7,52	10,01	12,81	17,88	

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

A. Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2013 jumlah koperasi di NTT sebanyak 2.720 unit dengan jumlah koperasi yang aktif sebesar 2.408 unit atau sebesar 88,53%. Tahun 2017 persentase koperasi aktif naik menjadi 91,27% atau sebanyak 3.776 unit dari jumlah keseluruhan koperasi sebesar 4.137 unit.

Tabel 2.77
Persentase Koperasi Aktif Provinsi NTT Tahun 2013 - 2017

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif
2013	2.720	2.408	88,53
2014	3.130	2.818	90,03
2015	3.707	3.394	91,56
2016	4.059	3.752	92,44
2017	4.137	3.776	91,27

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

B. Jumlah Koperasi Unit Desa

Jumlah koperasi meningkat dari 2.720 koperasi pada tahun 2013 menjadi 4.137 di tahun 2017. Sayangnya, hanya terdapat 175 adalah Koperasi Unit Desa (4%). Sementara anggota koperasi meningkat lebih dari dua kali lipat dalam periode yang sama. Jumlah Koperasi Unit Desa juga hanya bertambah 7 unit dari keadaan 2013 sebesar 168 unit.

Tabel 2.78
Jumlah Koperasi Unit Desa Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1. Koperasi Unit Desa	168	171	149	109	175
2. Koperasi Lainnya	2.552	2.597	3.245	3.305	3.962
Jumlah	2.720	2.768	3.394	3.414	4.137
Total Anggota Koperasi	585.695	695.699	727.218	997.050	1.206.390

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

C. Posisi Kredit Usaha Kecil

Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) perbankan di Provinsi NTT fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2016, dimana meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2015, lalu menurun pada tahun 2016. Rincian Posisi KUK Perbankan menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT tahun 2012 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 79

Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (Juta Rupiah) Tahun 2012-2016

Wilayah	Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota				
	2012	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	109.414	140.266	159.302	178.723	196.776
Sumba Timur	166.819	199.159	250.912	315.887	285.662
Kupang	118.276	153.317	282.959	358.554	250.208
TTS	99.795	146.167	192.695	183.922	222.649
TTU	154.816	184.293	199.357	252.668	258.080
Belu	256.866	312.413	371.850	448.287	395.189
Alor	87.174	109.026	148.649	197.028	199.395
Lembata	85.870	128.674	147.018	172.141	173.248
Flores Timur	151.982	202.693	246.921	265.089	259.639
Sikka	285.649	325.970	379.041	457.177	388.000
Ende	229.101	282.965	328.495	366.365	350.590
Ngada	149.083	189.759	213.234	221.728	244.543
Manggarai	279.241	373.573	444.541	428.623	368.092
Rote Ndao	20.934	42.521	85.051	125.518	85.025
Manggarai Barat	39.744	49.556	98.557	152.212	213.325
Sumba Tengah	3.004	8.376	16.942	19.907	21.420
SBD	8.962	17.238	52.751	77.125	91.367
Nagekeo	12.606	33.278	70.226	119.054	117.496
Manggarai Timur	9.070	40.869	75.018	98.524	107.877
Sabu Raijua	-	1.873	5.578	16.068	20.128
Malaka	-	-	-	-	-
Lainnya / Others Kota / Municipality	-	-	-	-	1.432
Kota Kupang	1.028.806	1.184.524	1.465.060	1.746.060	934.966
Jumlah / Total	3.297.212	4.126.507	5.234.157	6.201.300	5.185.107

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

D. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di NTT per 30 Nopember 2018 sebanyak Rp1,471 trilyun atau meningkat Rp.199,805 miliar (13,58%) dari penyaluran KUR tahun 2017. Jumlah tersebut hanya sebesar 1,24% saja dari total penyaluran KUR di Indonesia (Rp.118,290,743). Namun jumlah penyaluran KUR di NTT pada tahun 2017 (Rp.1,271 Trilyun) justru berkurang 5,13% dari jumlah penyaluran KUR tahun 2016 (Rp.1,340 Milyar). Total penyaluran KUR di NTT per 30 Nopember 2018, terdiri dari KUR Mikro sebesar Rp.853.909 Milyar ditambah KUR Kecil sebesar Rp.616.118 Milyar dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp.1,170 Milyar. Penyaluran KUR di Provinsi NTT tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 80
Penyaluran KUR di Provinsi NTT Tahun 2013-2018

Tahun	Realisasi	Keterangan
2013	NA	tidak ada data
2014	NA	tidak ada data
2015	NA	tidak ada data
2016	1.340.155000000	per 31 Desember 2016
2017	1.271.391.500.000	per 31 Desember 2017
2018	1.471.197.000.000	per 30 Nopember 2018

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro adalah usaha produktif perorangan atau badan usaha dengan syarat aset maksimal Rp 500 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta. Usaha kecil bersyarat aset antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan omzet antara Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah bersyarat besar aset antara Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar dan omzet sebesar Rp 2,5 miliar sampai Rp 50 miliar. Ketiga bentuk kewirausahaan ini merupakan indikator penting untuk menilai perkembangan ekonomi masyarakat, karena dikelola langsung oleh masyarakat dan biasanya padat karya (melibatkan banyak tenaga kerja) yang berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja dan pendapatan. Perkembangan dan persebaran usaha mikro, kecil dan menengah di NTT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 81
Data Sebaran Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah Di NTT
Tahun 2013- 2017 (Per Desember Setiap Tahun)

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Unit Usaha Mikro	70.558	70.558	76.668	79.316	76.670
a	Aset	444.515.400	444.515.400	444.515.000	444.515.400	544.515.400
b	Omset	2.998.410.200	2.998.410.200	2.998.410.200	2.998.410.200	3.283.410.200
c	Tenaga Kerja	70.588	70.588	76.668	79.260	76.670
2	Jumlah Unit Usaha Kecil	24.936	24.936	24.936	24.936	24.947
a	Aset	1.620.800.000	1.620.800.000	1.620.800.000	1.620.800.000	2.224.800.000
b	Omset	14.213.755.000	14.213.755.000	14.213.755.000	14.213.755.000	17.083.755.000
c	Tenaga Kerja	24.936	24.936	24.936	24.936	24.947
3	Jumlah Unit Usaha Menengah	2.103	2.103	2.103	2.149	2.103
a	Aset	7.570.800.000	7.570.800.000	7.570.800.000	7.570.800.000	7.570.800.000
b	Omset	2.063.100.000	2.063.100.000	2.063.100.000	2.063.100.000	2.063.100.000
c	Tenaga Kerja	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.81 menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan signifikan jumlah unit usaha mikro di NTT dalam kurun waktu 2013-2017 (hanya 9%). Bahkan unit usaha kecil dan menengah relatif tidak bertambah. Tetapi dalam hal aset dan omset, ada peningkatan

22% untuk usaha mikro, dan 37% untuk usaha kecil. Sedangkan omset usaha mikro meningkat 10% dan usaha kecil meningkat 20%. Walau terjadi peningkatan aset dan omset sebagaimana dijelaskan, tetapi tidak terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang signifikan di usaha mikro (hanya 9%) dan tidak terjadi penambahan tenaga kerja di unit usaha kecil. Berdasarkan data di atas, terjadi stagnasi usaha menengah di NTT dalam kurun waktu 2013-2017, baik dalam hal jumlah unit usaha, jumlah aset, omset maupun penyerapan tenaga kerja.

2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan investasi, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan berbagai usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Tabel 2.82
Realisasi Investasi Provinsi NTT Periode Tahun 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan Tenaga Kerja Penanaman Modal					
- Proyek	9	94	8	16	97
- Tenaga Kerja	0	0	1,807	1,327	12,567
Nilai Investasi Proyek PMDN (Juta Rupiah)	47.111,78	109.130,97	1.296.677,02	505.619,50	2.538.516,04
Jumlah Realisasi Proyek PMA dan Tenaga Kerja					
- Proyek	37	93	55	45	72
- Tenaga Kerja	0	0	1,255	3,215	108
Nilai Investasi Proyek PMA (Juta Rupiah)	155.464,12	484.145,49	991.346,97	1.641.450,53	963.451,27

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.82 menunjukkan bahwa NTT merupakan Provinsi yang diminati oleh investor, baik dari dalam maupun luar negeri yang terlihat dari meningkatnya besaran proyek, tenaga kerja maupun nilai investasi. Hal ini menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Provinsi NTT dalam prospek pengembangan ekonomi di masa depan.

2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan melalui berbagai peningkatan jumlah dan kualitas organisasi pemuda, Organisasi Olah Raga serta pembangunan gelanggang remaja dan lapangan olahraga. Organisasi pemuda yang melaksanakan pembinaan dan pengkaderan anggota secara berkesimbungan yaitu PMKRI, GMKI, GMNI, GAMKI, GP Ansor, Pemuda Muhamadiyah, Peradah serta Organisasi Kemahasiswaan, Karang Taruna dan lainnya. Sedangkan organisasi keolahragaan ditangani semakin profesional dengan meningkatnya partisipasi masyarakat.

Tabel 2.83
Data Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan	12	47	82	117	152
Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina	3	7	11	15	19
Jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina	11	15	19	23	27
Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina	56	2	5	5	5

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.83 dilihat bahwa jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan mengalami kenaikan yang berarti dari tahun 2013 sebesar 12 orang menjadi 152 orang pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan peningkatan keberhasilan pembinaan atlet. Sementara itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina dari 3 organisasi pada tahun 2017 menjadi 19 organisasi pada tahun 2017, dan jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina dari 11 organisasi pada tahun 2013 menjadi 27 organisasi pada tahun 2017. Sedangkan jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina turun dari 56 organisasi di tahun 2013 menjadi 5 organisasi saja di tahun 2017. Hal ini menunjukkan fokus pembinaan organisasi pada lima tahun terakhir yang lebih pada organisasi lingkungan dan ekonomi daripada organisasi sosial.

Tabel 2. 84
Indikator Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017

No	Indikator	Capaian 2017
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	41 organisasi
2	Jumlah wirausaha aktif	875 orang
3	Jumlah cabang olahraga yang dibina	6 cabor
4	Jumlah atlet bersertifikat	750 atlet
5	Jumlah pelatih bersertifikat	333 atlet
6	Jumlah atlet berprestasi	180 atlet
7	Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan	324 medali
8	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	4.299 lapangan
9	Jumlah pemuda NTT Yang masih menganggur	78.548 pemuda

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif sampai saat ini berjumlah 41 Organisasi Kepemudaan, Persentase wirausaha yang aktif sebanyak 875 orang, cakupan pembinaan olahraga dari 40 Cabang Olahraga dan 5 Cabang Prioritas, ada 6 Cabang olahraga yang menjadi binaan yaitu Kempo, Tinju, Atletik, Taekwondo, Pencak Silat, Karate. Jumlah atlet yang bersertifikat sebanyak 750 atlet dengan jumlah atlet berprestasi 180 atlet, sedangkan jumlah Pelatih yang bersertifikat 333 Pelatih. Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan (Cabang

Kempo, Tinju, Atletik, Taekwondo, Pencak Silat dan Karate) di kejuaraan nasional dan internasional adalah 291 medali dengan rincian 121 medali emas, 82 medali perak, 88 medali perunggu. Jumlah pemuda NTT yang masih menganggur sebanyak 78.548 Pemuda. Sedangkan untuk sarana dan prasarana olahraga, jumlah gedung olahraga sebanyak 27 gedung terdiri dari 5 buah GOR, 3 buah gedung serba guna dan 19 buah stadion. Sedangkan jumlah lapangan olahraga di Desa berjumlah 4.299 lapangan olahraga, terdiri dari 1.477 lapangan sepakbola, 2.139 lapangan bola voli, 282 lapangan bulutangkis, 78 lapangan bola basket, 279 lapangan tenis meja dan 44 lapangan futsal.

2.3.1.2.14 Statistik

Dalam penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan pemerintah, diperlukan data yang akurat agar pembangunan bisa berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, ketersediaan dokumen berupa “Provinsi Dalam Angka” dan Buku “PDRB Provinsi” mutlak dibutuhkan. Kedua dokumen tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun oleh Badan Pusat Statistik.

Tabel 2.85
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2 ^s	Buku PDRB Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Sementara itu sampai dengan tahun 2018 belum ada rekomendasi pelaksanaan survei yang dikeluarkan oleh BPS, padahal menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, setiap survei yang ingin dilaksanakan oleh pihak lain harus meminta rekomendasi oleh BPS.

2.3.1.2.15 Persandian

Penetration Test untuk mengetahui celah kerawanan dari aplikasi sehingga dapat dilakukan antisipasi untuk memperbaiki celah kerawanan tersebut sehingga relatif aman dari serangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat ini baru 3 aplikasi yang sudah dilakukan penetration test, yaitu SIPKD (Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Server dan Email nttprov.go.id di Dinas Komunikasi dan Informatika, RKPD online di Bappeda. Data tentang alat dan kondisi alat pengamanan informasi yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 86
Data Alat Dan Kondisi Alat Pengamanan Informasi Milik
Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017

No	Nama Alat	Jumlah	Keterangan
1	Jammer	1	Belum digunakan
2	Counter Surveilans	1	Belum digunakan
3	Email Sanapati	1	Baik

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengamanan informasi di Pemerintah Provinsi NTT belum berjalan maksimal, karena alat pengamanan informasi belum digunakan. Selain itu dari tahun 2013-2017 hanya 2 orang SDM yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai persandian.

2.3.1.2.16 Kebudayaan

Sebagai Provinsi kepulauan, NTT mempunyai kekayaan budaya yang spesifik. Untuk menjamin kelestariannya, maka pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui pengkajian, pembinaan, pendataan, pelestarian, pengembangan terhadap berbagai aspek kebudayaan yaitu permuseuman, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan kepada Tuhan, kesenian, dan bahasa dan sastra. Pembangunan kebudayaan juga mendukung peningkatan pariwisata budaya melalui pengembangan desa adat, desa budaya dan kekuatan kultur organisasi.

Tabel 2.87
Jenis Sarana Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2017

No	Jenis	Jumlah
1	Cagar Budaya	2
2	Desa Adat	25
3	Museum	4
4	Rumah Budaya Nusantara	5
5	Sanggar dan Komunitas	25
6	Warisan Budaya Tak Benda	20
Jumlah		81

Sumber : Ditjen Kebudayaan, 2017

Jumlah sarana kebudayaan Provinsi NTT sampai tahun 2017 sebanyak 81 sarana, dimana jumlah terbanyak adalah desa adat dan juga sanggar dan komunitas yang berjumlah masing-masing 25 unit.

Tabel 2.88
Persentase Obyek Budaya Provinsi NTT yang Tertangani Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase obyek budaya yang tertangani	55	71	71	100	48,67

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Persentase obyek budaya yang ditangani cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 55% menjadi 48,67% di tahun 2017. Walaupun di tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan.

2.3.1.2.17 Perpustakaan

A. Jumlah Pengunjung Perpustakaanper Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Provinsi NTT pada Tahun 2013 sebanyak 248.013 orang, dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 menjadi 48.086 orang. Pengunjung perpustakaan di Provinsi NTT dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 89
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2012-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	248.013	12.440	32.916	38.585	48.086

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Sedangkan jumlah koleksi perpustakaan, data tenaga pustakawan, data tenaga teknis fungsional umum dan data tenaga penilai angka kredit yang memiliki sertifikat di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 90
Jumlah Koleksi Perpustakaan, Data Tenaga Pustakawan, Data Tenaga Teknis Fungsional Umum Dan Data Tenaga Penilai Angka Kredit Yang Memiliki Sertifikat Di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah koleksi buku perpustakaan	6.009 judul / 14.088 eksemplar
2	Jumlah tenaga pustakawan	13 orang
3	Jumlah tenaga teknis fungsional umum	46 orang
4	Jumlah tenaga penilai angka kredit yang memiliki sertifikat	4 orang

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT sampai tahun 2018 sebanyak 6.009 judul dengan jumlah keseluruhan 14.088 eksemplar, dengan jumlah tenaga pustakawan sebanyak 13 orang. Jumlah tenaga teknis fungsional umum yang membantu mengelola perpustakaan sebanyak 46 orang, sedangkan tersedia 4 orang tenaga penilai angka kredit yang memiliki sertifikat. Secara umum keadaan perpustakaan di Provinsi NTT Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2. 91
Keadaan Perpustakaan Di Nusa Tenggara Timur s/d2018

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Umum	21
2	Khusus	630
3	Sekolah	6.693
a.	SD/MI	4.819
b.	SMP/MTS	1.320
c.	SMA/SMK/MA	554
7	Perguruan Tinggi	40
8	Desa/Kelurahan	1.083
9	Rumah Ibadah	1.763
10	Taman Bacaan Masyarakat	224
11	Puskesmas	10
Jumlah		10.395

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Jumlah perpustakaan di NTT sampai tahun 2018 berjumlah 10.395 buah, dimana sebagian besar terdapat di sekolah-sekolah dengan jumlah 6.693, sedangkan sisanya terdapat di rumah ibadah, desa/kelurahan, serta fasilitas sosial lainnya.

2.3.1.2.18 Kearsipan

Aspek pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan pengelolaan SDM arsip. Untuk mewujudkan tatakelola arsip, maka telah dilaksanakan empat kegiatan utama sebagai dasar program, yaitu perbaikan sistem administrasi karsipan, penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, peningkatan kualitas pelayanan informasi, pembinaan dan pengembangan aparatur. Jumlah tenaga fungsional karsipan (arsiparis) yang ada di NTT sampai tahun 2018 adalah sebanyak 168 orang, dimana 50 orang berstatus pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota dan 118 orang berstatus pegawai Pemerintah Provinsi NTT. Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah Provinsi NTT yang Memenuhi Standar Baku Karsipan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 92
Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah Provinsi NTT yang Memenuhi Standar Baku Karsipan Tahun 2018

Uraian	Perangkat Daerah	Memenuhi Standar Baku Karsipan	Belum Memenuhi Standar Baku Karsipan
JUMLAH	49	23	26
%	100	46,9	53,1

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.92 terlihat bahwa walaupun memiliki 118 arsiparis namun pengelolaan karsipan lingkup Pemerintah Provinsi NTT belum baik, terbukti dari rendahnya persentase perangkat daerah Provinsi NTT yang memenuhi standar baku karsipan sebesar 46,9%. Hal ini membuktikan tenaga arsiparis belum tersebar di Perangkat

Daerah Provinsi NTT secara merata menyebabkan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah belum berjalan optimal. Padahal tertib penyelenggaraan kearsipan merupakan bagian penilaian dari indeks reformasi birokrasi.

Peningkatan kapasitas SDM kearsipan bagi pengelola di Provinsi NTT dari tahun 2014 sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 93
Data Peningkatan SDM Kearsipan Tahun 2014-2018

Tahun	No	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Jumlah
2018	1	Bimtek aparatur pengelola JIKN, SIKN, JIKD dan SIKD di Provinsi NTT	25 orang
	2	Bimtek pengawasan kearsipan bagi arsiparis/pengelola arsip pada perangkat daerah	50 orang
2017	1	Diklat penyusutan arsip	1 orang
	2	Bimtek pengelolaan arsip elektronik/SIKD bagi aparatur pengelola arsip di Provinsi NTT	25 orang
2016	1	Diklat pengelolaan arsip inaktif	1 orang
	2	Bimtek kearsipan bagi Sekdes/Seklur di 2 Kabupaten	70 orang
2015	1	Diklat program arsip vital	1 orang
	2	Diklat penyusunan jadwal retensi arsip	1 orang
	3	Diklat pengangkatan arsiparis ahli	1 orang
	4	Diklat pengelolaan arsip dinamis	1 orang
	5	Diklat layanan informasi kearsipan	2 orang
	6	Diklat pengelolaan arsip berbasis TIK	1 orang
2014	1	Diklat teknik akuisisi bagi arsiparis / pengelola arsip di lembaga kearsipan sedaratan Flores, Lembata dan Alor	30 orang
	2	Bimtek arsip masuk desa	65 orang
TOTAL			274 orang

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Menurut Tabel 2.93, dari tahun 2014 sampai 2018 sudah 274 orang tenaga pengarsipan di Provinsi NTT yang ditingkatkan kapasitasnya melalui arsip melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis. Peningkatan kapasitas tenaga dilaksanakan dengan sasaran tenaga pengarsipan itu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan. Sektor perikanan turut berkontribusi pada PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK yang terus meningkat dalam periode 2013 sampai 2017. Dalam tahun 2017, kontribusi sektor ini pada PDRB-ADHB sebesar 5,01% dan PDRB-ADHK sebesar 5,37%.

Potensi budidaya lainnya yang potensial yaitu rumput laut yang telah menjadi sumber utama ekonomi pada beberapa wilayah. Produksi Rumput Laut tahun 2013 mencapai 1.802.090 ton dan 1.836.847 ton tahun 2016 dengan sentral produksi terbesar Kabupaten Kupang yang mencapai 1.342.582 ton dan kontribusi produksi Kabupaten lainnya yaitu Alor, Flores Timur, Rore Ndao dan Sabu Raijua.

Panjang garis pantai di seluruh wilayah Provinsi NTT adalah 5.700 Km dengan jumlah desa pantai 808 desa yang dihuni oleh penduduk di daerah pesisir sebanyak 1,3 juta jiwa. Jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor perikanan tangkap sebanyak 25.002 RTP dan sebanyak 37.267 RTP yang berusaha di sektor perikanan budidaya.

Tabel 2.94
Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya, Produksi
Perikanan Laut dan Kontribusi terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha
(Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan- Miliar/Persen) di
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Perikanan Laut		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Produksi Perikanan Laut	Ton	127.156	108.009	118.292	175.992	179.296
Rumah Tangga Perikanan Budidaya	-	37.009	38.931	38.443	37.267	0*
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.805.184	1.971.792	2.062.164	1.841.882	0*
PDRB Menurut Lapangan Usaha						
Sektor Perikanan (PDRB-ADHB)	Miliar	2.747,7	3.235,0	3.628,4	4.091,1	4.569,3
	%	4,48	4,72	4,77	4,87	5,01
Sektor Perikanan (PDRB-ADHK)	Miliar	2.344,6	2.518,2	2.643,8	2.794,7	2.944,9
	%	4,06	7,41	4,99	5,71	5,37

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

* (Data tahun 2017 Tidak Tersedia)

Potensi lestari perikanan tangkap sebesar \pm 491.700 ton/tahun, tangkapan yang diperbolehkan sebanyak \pm 393.360 ton/thn, produksi tahun 2016 sebesar 123.765 (31,5%). Luas lahan budidaya air tawar di NTT adalah 51,870 Ha dan pemanfaatannya berupa kolam ikan lele, karper dan nila seluas 570 Ha/1,1% (Data tahun 2016). Potensi dan pemanfaatan lahan budidaya laut dengan luas lahan budidaya laut di NTT 53.727 Ha dengan pemanfaatan budidaya rumput laut dan kerapu seluas 11.245 Ha/20,92%. (Data Tahun 2016).

Terdapat 5 (lima) Kabupaten penghasil rumput laut terbanyak di Provinsi NTT adalah Kabupaten Kupang, Alor, Rote Ndao, Flores Timur dan Sumba Timur. Produksi Rumput Laut paling tinggi dihasilkan dari Kabupaten Kupang, dengan produksi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 produksi rumput laut mencapai 1.548.467 ton, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1.342.582 ton.

Tabel 2.95
Produksi Rumput Laut Per Kabupaten Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Wilayah	Produksi Rumput Laut (Ton)			
	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	199,46	59,95	160	154,7
Sumba Timur	18.773,29	19.648	21.546,5	21.546,5
Kupang	1.305.333,3	1.431.933,3	1.548.467	1.342.582
Timor Tengah Selatan	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	-	-	-	-
Belu	255,6	-	-	-
Alor	86.138,67	197.464,53	161.347,6	161.347,6
Lembata	6.418,67	4.735,07	7.375	7.375
Flores Timur	70.846,13	84.738,32	92.849,01	124.526,06
Sikka	264	16	20	20
Ende	84	38,99	25,9	25,76
Ngada	2.599,05	283,46	35	35
Manggarai	452,87	2.219,94	32,41	681,15
Rote Ndao	111.213,33	145.840,83	145.840	128.595,13
Manggarai Barat	63,47	157,65	183,88	185,79
Sumba Tengah	276	236,29	96,19	76,47
Sumba Barat Daya	62.390,53	3.744,83	280,04	160,37
Nagekeo	87,38	-	9,87	9,87
Manggarai Timur	1.894,55	2.006,96	2.311,39	1.311,2
Sabu Raijua	134.800	74.720,55	75.571,72	48.214,49
Malaka	-	-	-	-
Kota Kupang	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	1.802.090,3	1.967.844,7	2.056.151,5	1.836.847,1

Sumber : Statistik Perikanan, 2017

Potensi dan pemanfaatan lahan budidaya air payau, dengan luas lahan budidaya air payau 35.455 Ha dan pemanfaatan untuk budidaya bandeng, dan udang seluas 1.356 Ha/3,82 %.Teknologi yang digunakan oleh rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha adalah tanpa perahu, perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor. Berdasarkan data series dari tahun 2012-2016, mayoritas rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha mayoritas menggunakan perahu tanpa motor dengan jumlah yang fluktuatif dan cenderung menurun hingga tahun 2016.

Tabel 2.96
Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut Kategori Usaha Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Kategori Usaha	2013	2014	2015	2016
Tanpa Perahu	7.609	7.937	4.828	4.828
Perahu Tanpa Motor	17.738	16.290	13.302	13.302
Motor Tempel	5.483	5.941	5.516	6.734
Kapal Motor	6.585	6.682	7.115	7.283
<5 GT	4.744	4.719	4.291	4.458
5 GT ke atas	1.841	1.963	2.824	2.825
Jumlah	37.415	36.850	30.761	32.147

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.97
Luas Lahan dan Kapasitas Produksi, Lokasi Garam Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Kab/Kota	Lokasi Kab/ Kec	Lahan (Ha)		Kapasitas Produksi/musim/				Tahun 2017 Lahan (Ha)		Ket
		Potensi	Yang Digarap	2013	2014	2015	2016	Potensi	Yang Digarap	
Kota Kupang	Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima	5	0.5	-	60		-	5	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran (tidak ada tidak lanjut pendampingan dari Pemda Kota Kupang)
Kabupaten Kupang	Desa Oeteta Kec. Sulamu	30	25	40	40	60	60	30	25	Tambak Garam Rakyat
	Desa Buipolo Kec. Sulamu	500	400	40	40	60	60	500	400	Tambak Garam Rakyat
	Desa Merdeka Kec. Sulamu	1,000	100	40	40	60	60	1,000	100	Tambak Garam Rakyat
	Desa Nunkurus dan Desa Oebelo	2,720	-	-	-	-	-	2,720	-	
Timor Tengah Selatan	Desa Toineke Kec. Kualin	50	1	40	80	120	120	50	1	2015 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Timor Tengah Utara	Desa Oesoko Kec. Insana	500	2	40	80	120	120	500	2	2015 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Belu	Wewiku	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
	Tasifeto Timur	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
Malaka	Betun	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	Tambak Garam Rakyat
Lembata	Ileape	15	2	40	40	40	40	15	2	Tambak Garam Rakyat
	Lebatukan	5	4	40	40	40	100	5	4	sebelum tahun 2016 masih menggunakan tambak tanah. 2016 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Alor	Pantar Tengah	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Alor Besar Alor Barat laut	1	0.5	40	60	130	130	1	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Flores Timur	Desa Pledo Kec. Witihama	10	0.5	80	-	-	-	10	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran

Kab/Kota	Lokasi Kab/ Kec	Lahan (Ha)		Kapasitas Produksi/musim/				Tahun 2017 Lahan (Ha)		Ket
		Potensi	Yang Digarap	2013	2014	2015	2016	Potensi	Yang Digarap	
	Desa Kolidateng	2	1	40	-			2	1	Tambak Garam Rakyat
Sikka	Desa Nangahale Kec. Talibura	4	0.5	70	84	100	100	4	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Ende	Desa Wewaria	500	100	40	40	40	40	500	100	Tambak Garam Rakyat
Ngada	Kaburea	100	10	40	40	40	40	100	10	Tambak Garam Rakyat
Nagekeo	Desa Waekoka, Kec. Aesesa	1,000	5	40	40	40	40	1,000	5	Tambak Garam Rakyat (Tanah Pemda)
	Desa Totumala, Kec. Mbay	100	50	40	40	40	40	100	50	Tambak Garam Rakyat
	Desa Anapoli, Kec. Wolowae	100	-	-	-	-	-	100	-	
	Desa Totonala, Kaburea - Kec. Wolowae	200	-	-	-	-	-	200	-	
Manggarai Timur	Desa Reo	5	3	40	40	40	40	5	3	Tambak Garam Rakyat
Sumba Timur	Pandawai	4	4	40	40	40	40	4	4	Tambak Garam Rakyat
	Umalolu	2	1	40	40	40	40	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Haharu	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Kayuri, Kec. Umalolu	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-
Sumba Barat Daya	Laura	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
Sumba Tengah	Mamboro	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Katikutana Selatan	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
Sabu Raijua	Lokasi Menyebar Di seluruh Kec.		121	40	1000	1800	9000		121	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Rote Ndao	Rote Tengah	5	1	40	10	10	10	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Rote Timur	30	1	40	10	10	10	30	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Daudolu Kec. Rote Barat Laut	3	3	40	10	10	10	3	3	Tambak Garam Rakyat
	Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Kec. Lobalain	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Oenggac Desa Tunganamo Kec. Pante Baru	2	2	60	80	100	100	2	2	Tambak Garam Teknologi Geomembran
	Desa Seru Beba Kec. Rote Timur	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Faifua Kec. Rote Timur		1	40	10	10	10		1	Tambak Garam Rakyat

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.2.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan masa depan ekonomi NTT, karena mempunyai *multiplier-effect* yang banyak. NTT merupakan salah satu destinasi utama pariwisata nasional dan Labuan Bajo sebagai salah satu KSPN dari 10 yang ada secara nasional. Pariwista mengalami perkembangan cukup pesat dengan selama periode 2013-2017 seperti pada Tabel 2.98.

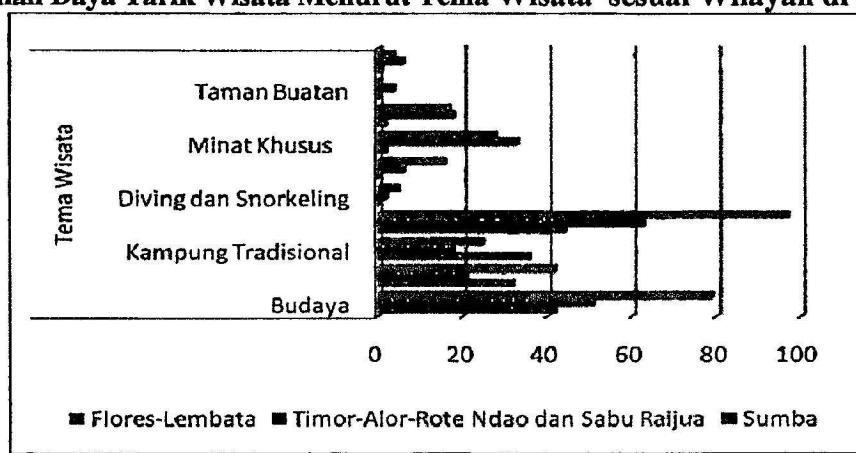
Tabel 2. 98
Perkembangan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Manca Negara	45.107	65.939	66.860	65.499	93.455
Domestik	318.658	331.604	374.456	430.582	523.083
Total	363.765	397.543	441.316	496.081	616.538
Rata-Rata Lama Menginap					
Tamu Asing	2,19	1,99	2,26	2,23	2,15
Tamu Domestik	1,79	1,95	1,84	1,85	1,86
Tingkat Penghunian Kamar					
Hotel Bintang	39,48	47,29	45,98	51,48	54,56
Hotel Non Bintang	19,65	18,55	18,82	19,63	22,20

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan disertai dengan pilihan yang bervariasi sesuai dengan potensi wisata yang ada di seluruh wilayah. Perkembangan berdasarkan minat wisatawan seperti pada Gambar 2.17.

Gambar 2. 17
Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Tema Wisata sesuai Wilayah di NTT



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTT, 2018

Sesuai dengan pengembangan *The Ring of Beauty*pariwisata NTT, yaitu Wilayah Pulau-Pulau Timor-Sumba dan Flores menunjukkan variasi minat wisatawan. Berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa pariwista alam dan budaya pada wilayah

Lembata-Flores, Timor dan Sumba mendapat kunjungan wisatawan tertinggi. Kunjungan wisatawan lainnya yang diminati, yaitu pantai dan kampung tradisional.

Meningkatnya kunjungan wisatawan mendukung peningkatan kontribusi sektor akomodasi dan makan-minum pada perekonomian daerah. Perkembangan kontribusi yang dicapai pada Tahun 2013-2017 seperti pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum
terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum (ADHB)	Miliar	367,8	422,4	487,1	586,1	675,9
	%	0,60	0,62	0,64	0,70	0,70
- Penyediaan Akomodasi (ADHB)	Miliar	188,6	213,8	246,5	312,8	375,1
-Miliar)	%	0,31	0,31	0,32	0,37	0,41
- Penyediaan Makan dan Minum (ADHB-Miliar)	Miliar	179,2	208,7	240,6	273,3	300,9
	%	0,29	0,30	0,32	0,33	0,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum (ADHK)	Miliar	299,6	318,3	337,9	386,8	439,3
	%	7,34	6,25	6,17	14,46	13,59
- Penyediaan Akomodasi (ADHK)	Miliar	155,9	164,9	174,4	210,7	249,3
-Miliar)	%	6,97	5,78	5,78	20,81	18,31
- Penyediaan Makan dan Minum (ADHK-Miliar)	Miliar	143,7	153,4	163,5	176,1	190,0
	%	7,76	6,77	6,59	7,69	7,93

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan perkembangan kontribusi pada PDRB menunjukkan bahwa penyediaan akomodasi dan makan-minum berdasarkan ADHB meningkat perannya dari 0,60% menjadi 0,70% tahun 2017. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan perkembangan yaitu 7,34% menjadi 13,59%.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas seperti atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitis dan *awareness* serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan yang menantang memberi sensasi.

NTT sebagai bagian dari pesona keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Provinsi NTT. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pariwisata untuk menarik minat wisatawan, baik wisatawan nusantara (domestik) maupun dari wisatawan manca negara (turis asing).

2.3.2.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu urusan penting terkait dengan perannya dalam pembinaan petani yang jumlahnya mencapai 59% lebih dari seluruh angkatan kerja yang bekerja. Pertanian juga merupakan penyumbang terbesar pada PDRB Nusa Tenggara Timur yang mencapai 28,72%. Perkembangan kontribusi PDRB-ADHB sektor pertanian dan sub sektornya seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.100
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB)
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian		2013	2014	2015	2016	2017
1. Sektor Pertanian dan Kehutanan (ADHB)	Miliar	18.272,8	20.456,3	22.752,4	24.316,9	26.183,6
	%	29,80	29,86	29,89	28,97	28,72
2. Pertanian, Peternakan, dan Jasa Peternakan	Miliar	15.437,1	17.120,5	19.009,8	20.103,7	21.485,5
	%	25,17	24,99	24,97	23,95	23,57
3. Kehutanan	Miliar	88,1	100,8	114,3	122,1	128,9
	%	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Kontribusi pertanian terhadap PDRB ADHB menunjukkan penurunan yaitu 29,80% tahun 2013 menjadi 28,72% atau menurun sebesar 1,08%.

A. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT tahun 2017 menunjukkan peningkatan luas tanam (ha), luas panen (ha) dan produksi (ton) jagung dalam periode 2013-2017. Tetapi terjadi penurunan produktivitas (ton/ha) dari 2,62 ton/ha tahun 2013 menjadi 2,59 ton/ha tahun 2017 atau menurun sebanyak 0,26 persen.

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada tanaman padi. Walau dalam kurun waktu 2013-2017 luas tanam (ha) meningkat 9,09%, luas panen meningkat 4,12% dan produksi meningkat 3,86%, tetapi produktivitas (ton/ha) menurun 0,26%.

Luas lahan sawah dengan irigasi di NTT meningkat dari 119.413 ha tahun 2013 menjadi 122.746 ha tahun 2017. Kabupaten dengan lahan sawah beririgasi terluas tahun 2017 adalah Sumba Timur (15.209 ha) dan Manggarai Barat (11.559 ha). Sedangkan lahan sawah beririgasi terkecil pada tahun yang sama ada di Kabupaten Lembata (74 ha) dan Kota Kupang (205 ha).

Luas sawah non-irigasi di NTT juga meningkat dari 80.878 ha (tahun 2013) menjadi 93.049 ha (tahun 2017). Kabupaten dengan sawah non-irigasi terluas tahun 2017 adalah Kabupaten Kupang (16.896 ha) dan Kabupaten Rote Ndao (14.785 ha). Sedangkan yang tersempit ada di Kabupaten Lembata (8 ha) dan Kota Kupang (197 ha).

Berdasarkan kemampuan produksi, ada lima Kabupaten mampu memenuhi kebutuhan sendiri, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Nagekeo dan Rote Ndao. Berdasarkan kemampuan produksi yang mencapai lebih dari 500.000 ton masih

dibutuhkan 200.000 ton lebih dengan asumsi konsumsi per kapita sebanyak 112 kg/kapita per tahun.

B. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain Kelapa, Jambu Mete, Kopi, Kakao, Cengkeh, Vanili, Tembakau dan Kapas. Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal, regional maupun ekspor ke luar negeri. Produksi perkebunan yang menonjol yaitu kelapa 68.347 ton, kopi 22.228 ton, kakao 19.096 ton, vanili 463 ton dan pinang 4.984 ton.

C. Peternakan

Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang menonjol pada tahun 2013- 2017 sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.101
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenis Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
Sapi	823.134	865.731	899.577	984.551	1.285.360
Kerbau	133.786	134.457	141.075	156.927	174.875
Kuda	111.047	112.948	111.047	112.557	149.523
Kambing	592.365		626.431	637.969	2.018.130
Domba	63.877	677.012	65.421	66.884	321.667
Babi	1.739.481	1.755.058	1.812.449	1.845.408	3.464.686
Ayam Kampung	10.681.149	10.766.948	10.585.385	10.662.627	11.093.152
Ayam Ras	770.095		551.299	5.039.677	5.574.589
- Pedaging	590.45	931.746	350.537	4.838.166	5.540.704
- Petelur	179.645		200.762	201.511	33.885
Itik	302.096	315.417	322.923	344.942	203.03

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Perkembangan populasi ternak menunjukkan perkembangan yang positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi (1.854.408) diikuti Sapi (984.508) Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan NTT sebagai pendukung swasembada daging.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 66 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdiri dari 54 RPH Pemerintah dan 2 RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH. Jumlah ternak yang dipotong tahun 2016 adalah babi sebesar 158.459 ekor dan sapi sebanyak 69.121 ekor per tahun. Khusus untuk ternak sapi menunjukkan perkembangan pemotongan dan pengiriman yang meningkat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan (%)
Populasi Sapi (ekor)	865.731	899.534	984.508	1.003.752	3,83
Kuota	62.605	57.536	66.150	70.800	3,48
Realisasi	49.568	52.811	63.429	66.574	7,90
Pemotongan	77.709	81.991	82.944	83.212	1,75
Konsumsi Lokal (ekor)	77.709	81.991	82.944	83.212	1,75
Antar Pulau (ekor)	49.614	52.811	63.429	66.574	7,88
Jumlah Dimanfaatkan	127.323	134.802	146.373	149.786	4,20

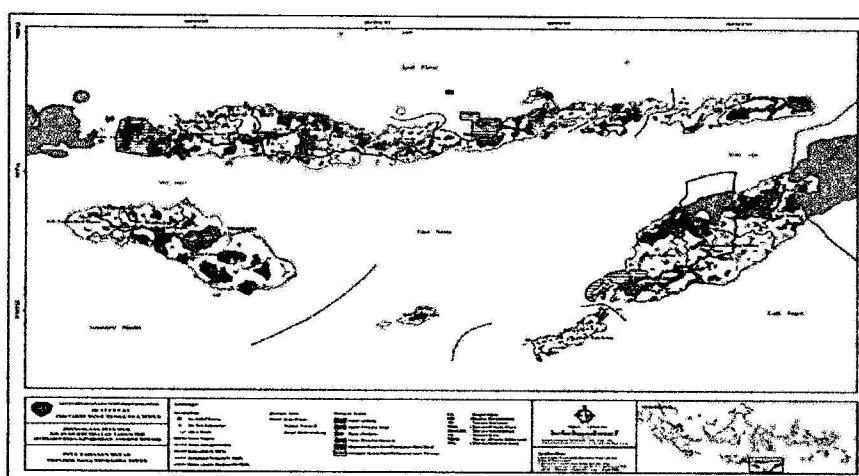
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Populasi ternak sapi pada tahun 2014 mencapai 856.731 ekor menjadi 1.00.752 ekor atau tumbuh 3,83%. Ternak sapi menjadi potensi utama mendukung perdagangan dan untuk memenuhi potensi pasar dalam negeri.

2.3.2.4 Kehutanan

Laju deforestasi di NTT cukup tinggi. Menurut Statistik Kehutanan, pada tahun 2014-2015 terjadi deforestasi sebesar 13.932 ha, dimana 2.835 ha adalah hutan tetap. Sektor kehutanan sendiri bukanlah sektor yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB. Pada tahun 2017, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB hanya 0,14% yang diperoleh dari penjualan kayu, menurun 0,01 persen dari tahun 2014. Padahal, dari segi pelestarian air dan lingkungan, hutan adalah faktor penting.

Gambar 2.18
Sebaran Tutupan Hutan Provinsi NTT Tahun 2015



2.3.2.5 Energi Dan Sumber Daya Mineral

A. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Sumber penerangan rumah tangga terdiri dari rumah tangga yang menggunakan listrik PLN, Listrik npn PLN dan bukan listrik. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik Non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang

dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN). Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.103
Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga Provinsi NTT Tahun 2013-2018

Sumber Penerangan Utama	NTT Tahun					Indonesia
	2013	2014	2015	2016	2017	
Listrik PLN	59,85	65,47	64,11	64,96	66,02	95,99
Listrik Non PLN	10,82	8,73	9,79	7,18	11,34	2,15
Bukan Listrik	29,33	25,80	26,09	27,86	22,64	1,86

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.103, terlihat bahwa ada kenaikan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dari 59,85% pada tahun 2013 menjadi 66,02% pada tahun 2017. Kenaikan juga terjadi pada rumah tangga yang menggunakan listrik non-PLN dari 10,82% di tahun 2013 menjadi 11,34% pada tahun 2017, sehingga persentase rumah tangga yang sumber penerangan utama bukan listrik turun menjadi 22,64% di tahun 2017 dari keadaan tahun 2013 sebesar 29,33%. Jika dibandingkan dengan angka nasional dimana persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebesar 95,99% dan Listrik non PLN sebesar 2,15% dan bukan listrik sebesar 1,86%, maka dapat dikatakan kondisi NTT masih jauh dari harapan. Data terakhir dari kementerian ESDM bahwa rasio elektrifikasi (RE) Provinsi NTT sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 terendah se-Indonesia, yakni sebesar 60,38%.

Tabel 2.104
Kapasitas Listrik di Provinsi NTT Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik (Mega Watt)	158,69	160,54	272,8	297,25	337,73
Tenaga Listrik yang Dibangkitkan (GWh)	643,87	717,66	730,93	820,2	908,97
Listrik yang Didistribusikan (GWh)	567,32	639,57	702,26	749,76	829,59

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi NTT mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 158.69 MW menjadi 337.73 MW pada tahun 2016. Tenaga listrik yang dibangkitkan pada tahun 2012 sebesar 643.87 GWh mengalami peningkatan menjadi 908.97 GWh pada Tahun 2016. Sedangkan Listrik yang didistribusikan pada Tahun 2012 sebesar 567.32 GWh juga mengalami peningkatan menjadi 829.59 GWh.

B. Jumlah Usaha Pertambangan

Jumlah usaha pertambangan di Provinsi NTT meningkat 68 unit, dari 253 unit di tahun 2015 menjadi 321 unit di tahun 2017. Peningkatan tertinggi usaha pertambangan ada di Kabupaten Kupang yang meningkat 40 usaha dan Manggarai Barat yang bertambah 14 usaha pertambangan.

Tabel 2.105
Jumlah Usaha Pertambangan per Kabupaten/Kota Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Wilayah	Jumlah Usaha Perusahaan Pertambangan		
	2015	2016	2017
Sumba Barat	1	1	1
Sumba Timur	2	1	1
Kupang	36	58	76
Timor Tengah Selatan	74	74	75
Timor Tengah Utara	43	45	45
Belu	35	35	36
Alor	4	6	7
Lembata	0	1	1
Flores Timur	0	1	3
Sikka	0	2	2
Ende	6	9	9
Ngada	4	5	5
Manggarai	13	14	13
Rote Ndao	11	9	9
Manggarai Barat	1	1	15
Sumba Tengah	1	1	1
Sumba Barat Daya	2	2	2
Nagekeo	2	2	2
Manggarai Timur	3	7	4
Sabu Raijua	2	2	2
Malaka	10	10	10
Kota Kupang	3	3	2
Nusa Tenggara Timur	253	289	321

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.3.2.6 Perdagangan

Kegiatan perdagangan NTT didukung perdagangan Dalam Negeri melalui perdagangan daerah dan perdagangan keluar daerah melalui perdagangan antar pulau dan ekspor.

Tabel 2.106
Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2013-2017 (Juta US \$ / Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nusa Tenggara Timur :					
- Ekspor	21,24	20,79	23,94	33,15	22,68
- Impor	27,06	31,92	7,87	29,09	73,71
- Selisih	- 5,82	- 11,13	16,07	4,06	-51,02
- PDRB (ADHB) Miliar	1.196,29	1.383,71	1.834,22	1.776,70	2.282,87
- Net Ekspor Antar Daerah (ADHB)	(27.025,56)	(32.543,14)	(38.889,04)	(42.425,10)	(46.100,56)

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Miliar					
Indonesia :					
- Eksport	182.552	176.292	150.366	145.186	168.828
- Impor	186.629	178.178	142.695	135.653	156.986
- Selisih	- 4.077	- 1.886	7.672	9.533	11.843

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB NTT Tahun 2017, terbesar adalah dari perdagangan besar dan eceran reparasi mobil serta sepeda motor yang menyumbang 11,05% PDRB. Secara nominal, kontribusi sektor ini meningkat stabil dalam Periode 2013-2017.

2.3.2.7 Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah. Pengembangan industri di desa dan kelurahan kondisinya yaitu: Industri Kulit 11 Desa (0,37%), Industri dari Kayu 940 Desa/Kelurahan (31,69%), industri dari bahan logam mulia 102 Desa (3,44%), Industri Anyaman 344 Desa (11,60%), Industri Gerabah/Keramik/Batu 289 Desa (9,74%), Industri dari Kain/Tenun 999 Desa (33,68%) Industri Makanan dan Minuman 560 Desa (18,88%) dan industri lainnya 172 Desa (5,80%).

2.3.2.8 Transmigrasi

Transmigrasi merupakan suatu program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di suatu wilayah, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di wilayah lainnya. Agar program ini berjalan lancar, maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi penduduk yang berminat untuk bertransmigrasi. Besaran peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi di Provinsi NTT dapat dilihat di Tabel 2.107 yang menunjukkan peningkatan persentasi peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi dari 52,8% di tahun 2013 menjadi 62,89% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah untuk dapat melaksanakan program transmigrasi secara maksimal.

Tabel 2.107
Besaran Peminat Transmigrasi yang Berhasil Difasilitasi
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Besaran peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi	52,8	33,69	50,63	67,52	62,89

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang

2.3.3.1 Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025. RPJMD Provinsi NTT sebagai penjabaran RPJPD telah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2013-2018. Selama periode 2013-2017 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yaitu (1) Dokumen Perencanaan: tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA;tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA;tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. (2) Dokumen pengendalian rencana pembangunan dan Hasil evaluasi tahunan rencana pembangunan.Dan (3) Dokumen pengendalian pelaksanaan dan hasil pengendalian pembangunan sesuai Peraturan Gubernur.

Perencanaan pembangunan sangat penting untuk memandu dan mengintegrasikan pembangunan daerah sesuai visi-misi kepala daerah. Kualitas perencanaan sangat menentukan capaian kinerja pembangunan. Untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, maka melalui kerjasama Badan Pusat Statistik telah dikembangkan NTT Satu Data pembangunan yang didukung pemetaaan melalui dukungan Badan Informasi Geospasial (BIG).

2.3.3.2 Keuangan

A. Tata Kelola Keuangan

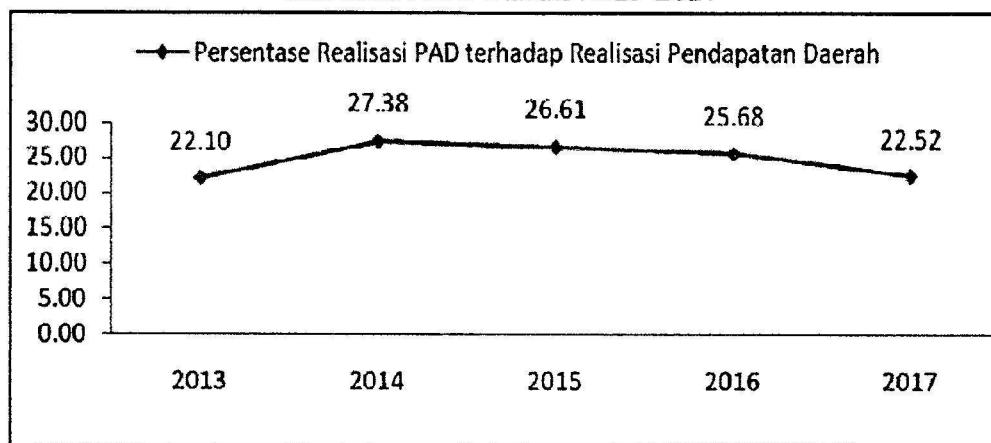
Tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan *good governance*. Audit rutin tatakelola keuangan dilaksanakan setiap akhir pelaksanaan pembangunan. Hasil audit BPK akan menghasilkan opini dalam pelaporan kinerja pemerintah Daerah Provinsi. Pada Periode Tahun 2013-2015, Opini BPK terhadap LKPD mencapai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun 2013 dan 2014. Sedangkan sejak tahun 2015 hingga 2017 mencapai kinerja dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

B. Realisasi Penerimaan Asli Daerah

Realisasi PAD Provinsi terhadap total pendapatan daerah selama tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami tren yang menurun. Hal tersebut menunjukkan kinerja yang masih kurang dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk

menjaring penerimaan bagi Pemerintah Provinsi. Perkembangan PAD tahun 2013-2017 seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.19
Percentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi NTT Tahun 2013-2017



Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Umum

Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, LSM, Yayasan, PMKRI dan GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FKUB; (iii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK; dan (iv) peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi 350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda, LSM, Ormas Pemuda, Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Hasil penyelenggaraan pemerintah daerah selama lima tahun dalam RPJMD 2013-2018 terhadap pelaksanaan aspek dan urusan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 108
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				1			
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB ADHK	5.41	5.05	4.92	5.17	5.16		
1.1.1.2	Laju inflasi	8.41	7.76	4.92	2.48	2.00		
1.1.1.3	PDRB ADHK per kapita (dalam juta)	10.4	10.74	11.09	11.49			
1.1.1.4	Indeks Gini	0.35	0.36	0.34	0.36	0.36	0.39	
1.1.1.5	Jumlah Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	8,002	8,070	8,085	8,195	8,649		
1.1.1.6	Rasio Penduduk yang Bekerja			96.17		96.73		
1.1.1.7	Tingkat Pengangguran Terdidik							
1.1.1.8	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat							
1.1.1.9	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
1.1.1.10	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	66.2	65	71.3	73			-
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Sosial Kemasyarakatan							
1.2.1.1	IPM	61.68	62.26	62.67	63.13	63.73	70.81	
1.2.1.2	Umur Harapan Hidup	65.82	65.91	65.96	66.04	66.07	71.06	
1.2.1.3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	82.27	36.53					
1.2.1.4	Indeks Pembangunan Gender	91.74	92.76	92.91	92.72	92.44	90.96	
1.2.1.5	Indeks Pemberdayaan Gender	59.81	63.06	64.75	65.07	63.76	71.74	
1.2.2	Pendidikan							
1.2.2.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	6.76	6.85	6.93	7.02	7.15	8.42	
1.2.2.2	Harapan Lama Sekolah	12.27	12.65	12.84	12.97	13.07		
1.2.2.3	Persentase Penduduk miskin	20.24	19.6	22.58	22.01	21.38	10.12	
1.2.2.4	Angka Partisipasi Kasar :							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.2.2.4.1	SD/MI	113.44	114.68	116.46	114.12	114.05	108.5	
1.2.2.4.2	SMP/MTs	80.25	88.66	88.96	89.56	91.35	90.23	
1.2.2.4.3	SMA/SMK/MA	64.85	71.86	75.54	79.34	78.83	82.84	
1.2.2.5	Angka Partisipasi Murni							
1.2.2.5.1	SD/MI	93.60	94.56	94.95	95.24	95.40	97.19	
1.2.2.5.2	SMP/MTs	59.24	65.86	66.32	66.56	67.16	78.40	
1.2.2.5.3	SMA/SMK/MA	47.31	52.15	52.51	52.87	53.32	60.37	
1.2.2.6	Angka Partisipasi Sekolah							
1.2.2.6.1	7 - 12 tahun	92.34	97.99	98.13	98.24	98.27	99.14	
1.2.2.6.2	13 - 15 tahun	89.39	94.26	94.39	94.60	94.76	95.08	
1.2.2.6.3	16 - 18 tahun	64.90	73.96	74.25	74.56	74.65	71.42	
1.2.2.6.4	19 - 24 tahun	22.88	26.22	26.54	26.75	27.80	24.77	
1.2.2.6.5	Angka Buta Huruf	8.5	8.82	7.27	7.40	7.25		
1.2.3	Kesehatan							
1.2.3.1	Kasus Kematian							
1.2.3.1.1	Ibu	176	158	176	182	163		
1.2.3.1.2	Bayi	1,286	1,280	1,300	1,088	1,044		
1.2.3.1.3	Balita	1,478	1,437	1,480	1,268	1,174		
1.2.3.2	Persentase Balita Gizi Buruk dan Kurang							
1.2.3.2.1	Balita Gizi Buruk	1.10	1.00	0.96	0.87	0.87		
1.2.3.2.2	Balita Gizi Kurang	6.90	7.15	4.16	2.50	2.84		
1.2.3.2.3	Baduta stunting	NA	NA	32.7	32.1	29.8	20.1	
1.2.3.2.4	Baduta wasting	NA	NA	11.7	17.5	17.9	12.8	
1.2.3.2.5	Baduta underweight	NA	NA	18.9	23.0	22.8	14.8	
1.2.3.2.6	Balita stunting	NA	NA	41.2	38.7	40.3	29.6	
1.2.3.2.7	Balita wasting	NA	NA	13.6	17.4	15.8	9.5	
1.2.3.2.8	Balita underweight	NA	NA	25.6	28.2	28.3	17.8	
2)	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah	97.34	97.99	98.13	98.24	98.27		
2.1.1.1.2	Rasio Guru terhadap murid	34.83	31.6	15.32	15.41	15.8		
2.1.1.1.3	Angka Putus Sekolah	1.88	1.32	0.69	0.30	1.04		
2.1.1.1.3.1	SD	1 : 179	NA	1 : 164	1 : 88	1 : 116		
2.1.1.1.3.2	SMP	1 : 207	NA	1 : 206	1 : 96	1 : 109		
2.1.1.1.3.3	SMA/MA/ SMA/LB	1 : 414	NA	1 : 299	1 : 84	1 : 136		
2.1.1.1.3.4	SMK	1 : 336	NA	NA	1 : 73	1 : 108		
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.2.1.1	SMP/MTs	89.39	94.26	94.39	94.6	94.76		
2.1.1.2.1.2	SMA/SMK/MA	64.81	73.96	74.25	74.56	74.65		
2.1.1.2.2	Rasio Guru terhadap murid							
2.1.1.2.2.1	SMP/MTs	30.29	30.85	13.38	14.42	14.04		
2.1.1.2.2.2	SMA/SMK/MA	8.02	10.26	12.76	13.73	13.26		
2.1.1.2.3	Angka Putus Sekolah							
2.1.1.2.3.1	SMP/MTs	1.7	1.31	1.23	6.02	3.77		
2.1.1.2.3.2	SMA/SMK/MA	1.8	0.59	2.49	8.6	4.57		
2.1.1.2.4	Angka Melanjutkan Pendidikan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.1.2.4.1	SMP/MTs			85.34	84.61	91.33		
2.1.1.2.4.2	SMA/SMK/MA			86.97	74.38	85.45		
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	15.18	16.45	9.56	15.99	15.89		
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
	Puskesmas	1 : 13.461	1 : 13.289	1 : 13.368	1 : 13.550	1 : 13.351	1 : 16.000	
	Puskesmas Pembantu	1 : 4.587	1 : 4.659	1 : 5.625	1 : 4.814	1 : 4.979	1 : 1.500	
	Polindes	1 : 6.561	1 : 4.928	1 : 7.211	1 : 5.512	1 : 5.513		
2.1.2.3	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	1 : 115.208	1 : 114.474	1 : 111.305	1 : 110.713	1 : 103.672	1 : 1.000	
2.1.2.4	Rasio Tenaga Kesehatan							
2.1.2.4.1	Tenaga Medis	14	20	15	15	17	62	
2.1.2.4.2	Bidan	56	56	72	72	74	100	
2.1.2.4.3	Perawat	108	108	91	92	97	173	
2.1.2.4.4	Tenaga Kesehatan Lainnya	39	39	55	48	67	83	
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.1.3.1	Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)				54.41	54.49		
2.1.3.2	Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	58.555 ha	58.555 ha	60.328 ha	60.328 ha	60.328 ha		
2.1.3.3	Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan	20	47.99	57.46	54.68	60.16		
2.1.3.4	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Sanitasi Layak	24.91	16.12	23.9	40.46	45.31		
2.1.4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman							
2.1.4.1	Persentase Persentase Rumah Layak Huni	63.3	63.4	64	NA	63		
2.1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
2.1.5.1	Persentase Ormas dan LSM aktif							
2.1.5.2	Jumlah Linmas					44,876		
2.1.6	Sosial							
2.1.6.1	Persentase PMKS yang Tertangani							
2.1.7	Tenaga Kerja							
2.1.7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68.15	68.91	69.25	69.18	69.09		
2.1.7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.25	3.26	3.83	3.25	3.27	5.5	
2.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.8.1	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	1568	1054	1191	384	582		
2.1.8.2	Kasus Kekerasan Terhadap Anak							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.9	Pangan							
2.1.9.1	Jumlah cadangan pangan provinsi (ton)	100	109.23	178.27	146.32			
2.1.10	Pertanahan							
2.1.10.1	Persentasi Luas Lahan Bersertifikat							
2.1.11	Lingkungan Hidup							
2.1.11.1	Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak	43.33	54.88	62.72	60.04	65.2		
2.1.11.2	Indeks Kualitas Air	50.14	52.48	53.35	NA	39.63		
2.1.11.3	Indeks Kualitas Udara	85.41	77.13	NA	NA	91.18		
2.1.11.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan							
2.1.12	Kependudukan dan Catatan Sipil							
2.1.12.1	Ketersediaan Database Kependudukan	ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.1.13.1	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100	
2.1.13.2	Persentase Posyandu Aktif	51.22	50.5	57.54	57.34	50.78		
2.1.13.3	Persentase Desa Siaga Aktif	57.17	50.78	59.47	70.81	79.75		
2.1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.1.14.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.7	1.65	1.79	1.69	1.68		
2.1.14.2	Cakupan Peserta KB Aktif	60.1	45.69	52.64	57.19	32.51		
2.1.14.3	Cakupan Peserta KB Baru	11.6	10.6	8.8	8.6	5.2		
2.1.14.4	Unmeet Need							
2.1.15	Perhubungan							
2.1.15.1	Jumlah Terminal	20	22	22	22	22		
2.1.15.2	Jumlah Pelabuhan	74	74	74	74	74		
2.1.16	Kommunikasi dan Informatika							
2.1.16.1	Keberadaan Website Milik Pemerintah	ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
2.1.17.1	Persentase Koperasi Aktif	88.53	90.03	91.56	92.44	91.27		
2.1.17.2	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	168	171	149	109	175		
2.1.18	Penanaman Modal							
2.1.18.1	Nilai Investasi Proyek PMDN (Juta Rupiah)	47,112	109,131	1,296,677	505,620	253,851,604		
2.1.18.2	Nilai Investasi Proyek PMA (Juta Rupiah)	155,464.12	484,145.49	991,346.97	1,641,450.53	963,451.27		
2.1.19	Kepemudaan dan Olahraga							
2.1.19.1	Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan	12	47	82	117	152		
2.1.19.2	Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina	3	7	11	15	19		
2.1.19.3	Jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina	11	15	19	23	27		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.19.4	Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina	56	2	5	5	5		
2.1.20	Statistik							
2.1.20.1	Ketersediaan Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.1.20.2	Ketersediaan Buku PDRB Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.1.21	Persandian							
2.1.21.1	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang Terlindungi	3	3	3	3	3		
2.1.22	Budaya							
2.1.22.1	Persentase obyek budaya yang tertangani	55	71	71	100	48,67		
2.1.23	Perpustakaan							
2.1.23.1	Jumlah pengunjung perpustakaan	248,013	12,440	32,916	38,585	48,086		
2.1.24	Kearsipan							
2.1.24.1	Persentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Standar Baku Kearsipan					46,94%	100	
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Kelautan dan Perikanan							
2.2.1.1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB		4.72	4.77	4.87	5.01		
2.2.1.2	Produksi Perikanan (ton)	127,156	108,009	118,292	175,992	179,296		
2.2.2	Pariwisata							
2.2.2.1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		5.83	5.89	6.09	6.16		
2.2.2.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan							
2.2.2.2.1	Manca Negara	45,107	65,939	66,860	65,499	93,455		
2.2.2.2.2	Domestik	318,658	331,604	374,456	430,582	523,083		
2.2.2.3	Rata-rata Lama Menginap							
2.2.2.3.1	Tamu Asing	2.19	1.99	2.26	2.23	2.15		
2.2.2.3.2	Tamu Domestik	1.79	1.95	1.84	1.85	1.86		
2.2.3	Pertanian							
2.2.3.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		24.99	24.97	23.95	23.57		
2.2.4	Kehutanan							
2.2.4.1	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB		0.15	0.15	0.15	0.14		
2.2.5	Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.2.5.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	70.67	74.2	73.9	72.14	77.36	98.14	
2.2.5.2	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB		1.44	1.41	1.39	1.3		
2.2.6	Perdagangan							
2.2.6.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		10.65	10.87	11.1	11.05		
2.2.7	Perindustrian							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.2.7.1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB		1.23	1.24	1.23	1.26		
2.2.8	Transmigrasi							
2.2.8.1	Persentase Transmigran Swakarsa							
3)	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	240,207	267,584	298,180	312,312	399,251		
3.2	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Non-Makanan	191,846	225,504	235,710	264,315	282,232		
3.3	Nilai tukar petani	99.05	100.26	101.91	101.07	102.18		
3.4	Rasio Ketergantungan	68.34	68.34	66.75	65.99	65.29		
3.5	Jumlah Penumpang Kapal Laut							
3.5.1	Penumpang Naik	1,034,014	575,990	122,084	1,023,639	1,028,030		
3.5.2	Penumpang Turun	987,503	577,232	110,483	1,091,522	1,002,119		
3.6	Jumlah Penumpang Pesawat							
3.6.1	Penumpang Berangkat	1,098,317	1,137,909	1,286,504	1,653,065	1,684,031		
3.6.2	Penumpang Datang	1,133,292	1,085,990	1,274,787	1,687,407	1,723,415		
3.7	Ketersediaan Akomodasi							
3.7.1	Jumlah Hotel			334	334	365		
3.7.2	Jumlah Kamar			6,491	6,491	8,316		
3.8	Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan	959	975	976	1,683	2,149		

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang telah diolah dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan menunjukkan tingkat konsumsi rumah tangga. Semakin besar konsumsi, semakin atraktif bagi peningkatan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi dihitung berdasarkan pengeluaran untuk bahan makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Pola pengeluaran konsumsi ini juga menjadi salah satu alat menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran berarti semakin buruk kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena, makanan adalah prioritas pengeluaran rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah, sehingga tidak banyak pendapatan yang tersisa untuk kebutuhan non makanan. Perkembangan

pengeluaran per kapita menurut kelompok makanan penduduk NTT bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan Penduduk NTT menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2013 – 2017

Wilayah	Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
NTT	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	240.207	267.584	298.180	312.312	399.251
	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Non-Makanan	191.846	225.504	235.710	264.315	282.232
	Persentase makanan tehadap total pengeluaran	56%	54%	56%	54%	59%
NASIONAL	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	356.435	388.350	412.462	460.639	527.956
	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Non-Makanan	347.126	387.682	456.361	485.619	508.541
	Persentase makanan tehadap total pengeluaran	51%	50%	47%	49%	51%

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Secara merata, pengeluaran per kapita untuk makanan per bulan di NTT tidak banyak berubah sejak tahun 2013 sampai 2017, dan hanya terjadi sedikit peningkatan. Ada penurunan pada tahun 2014, tetapi kembali meningkat tahun 2015 dan 2017 sehingga, pada tahun 2017, persentase pengeluaran untuk kelompok makanan mendominasi pengeluaran keluarga dengan angka 59%. Dibandingkan konsumsi berdasarkan kelompok pengeluaran secara nasional, persentase NTT tetap lebih tinggi, walaupun persentase nasional juga tidak banyak berubah dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2017, persentase pengeluaran kelompok makanan penduduk NTT sebesar 59%, sedangkan secara nasional sebesar 51%. Ini berarti, NTT masih butuh peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk agar persentase pengeluaran untuk makanan

bisa menurun dan konsumsi keluarga bisa lebih atraktif. Ini bukan saja meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi positif untuk ekonomi daerah.

2.4.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan di bayar (Ib) petani. NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar. Sebaliknya, bila NTP lebih kecil atau dibawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2. 110
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Petani Menurut
Sub Sektor Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	Desember 2018
- NTP	99,05	100,26	101,91	101,07	102,18	107,02
Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor						
- Tanaman Bahan Makanan	97,06	99,24	105,04	103,43	104,84	111,38
- Hortikultura	93,21	97,41	99,89	98,78	101,24	104,44
- Tanaman Perkebunan Rakyat	94,65	98,71	88,57	95,10	95,45	102,21
- Peternakan	113,06	104,95	105,30	105,95	106,18	108,36
- Perikanan	113,88	102,77	104,01	103,67	105,67	108,36

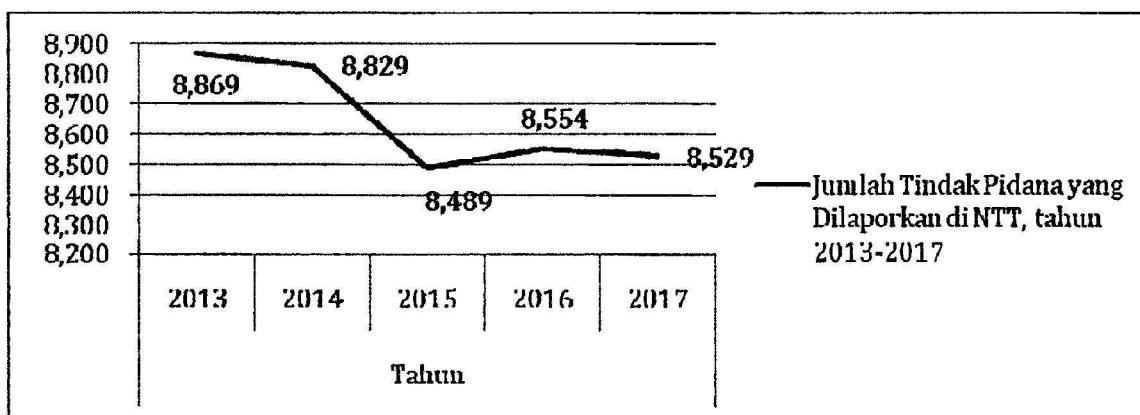
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

NTP Provinsi NTT dalam lima tahun terakhir berkisar antara 99,05 pada tahun 2013 sampai 102,18 di tahun 2017 dan pada bulan Desember 2018 sebesar 107,02. Secara umum, NTP terus meningkat, tetapi NTP menurut sub sektor mengalami variasi. NTP untuk tanaman bahan makanan mengalami NTP yang membaik setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Sementara NTP untuk sub sektor tanaman perkebunan rakyat, walaupun cenderung lebih baik daripada periode tahun dasar dalam lima tahun terakhir, tetapi belum mencapai angka 100 pada tahun 2017 dan pada bulan Desember mencapai angka 102. Demikian juga NTP hortikultura yang baru mencapai 101,24 pada tahun 2017. NTP pada sub sektor peternakan dan perikanan justru cenderung menurun. NTP peternakan menurun dari 113,06 pada tahun 2013 menjadi 106,18 tahun 2017, dan NTP perikanan menurun dari 113,88 menjadi 105,67. Hal ini menunjukkan menurunnya kemampuan tukar produk peternakan dan perikanan yang perlu menjadi perhatian dalam program pembangunan NTT.

2.4.3. Tingkat Kriminalitas

Tingkat kriminalitas diukur dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan persentase penyelesaian tindak pidana kriminalitas.

Gambar 2. 20
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan di NTT tahun 2013-2017



Sumber: BPS RI, 2018

NTT menunjukkan kecenderungan tindak pidana kriminalitas yang menurun dari tahun 2013 sampai 2017. Tahun 2013, tindak pidana yang dilaporkan sebanyak 8.869 kasus, sedangkan tahun 2017 menurun menjadi 8.529 kasus. Kabupaten Sumba Barat (data masih termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah) dan Kota Kupang adalah Kabupaten/Kota dengan jumlah tindak pidana yang dilaporkan tertinggi di NTT sepanjang 2013 sampai 2017. Selain tindak pidana yang dilaporkan, tingkat kriminalitas juga terkait dengan persentase penyelesaian kasus kriminalitas. Dibandingkan dengan persentase nasional, penyelesaian kasus tindak pidana kriminalitas di NTT semakin membaik dibandingkan rata-rata nasional.

Tabel 2. 111
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kriminalitas Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2013-2016

Tahun	NTT	INDONESIA
2013	51,34	52,92
2014	55,10	54,26
2015	62,79	58,13
2016	60,87	58,74

Sumber: BPS RI, 2018

Pada tahun 2013, hanya 51,34% kasus kriminalitas yang diselesaikan, sementara rata-rata nasional sebesar 52,92%. Tetapi pada tahun 2016, persentasi penyelesaian mencapai 60,87%, jauh lebih baik daripada rata-rata nasional yang sebesar 58,75%. Kabupaten Sumba Barat (termasuk data dari Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah) serta Kota Kupang masih menjadi Kabupaten/Kota dengan kemampuan penyelesaian kasus tindak pidana kriminalitas terendah di NTT.

2.4.4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (15-64 tahun) dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur tekanan ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan, artinya makin banyak yang harus ditanggung dan dalam jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Rasio ketergantungan di Provinsi NTT dibandingkan Indonesia bisa dilihat pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112
Rasio Ketergantungan NTT dan Indonesia

Tahun	2010	2015
NTT	70,60	66,70
INDONESIA	50,50	48,60

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Rasio ketergantungan NTT menurun dari 70,60 di tahun 2010 menjadi 66,70 di tahun 2015. Ini artinya, dari 100 penduduk usia produktif di NTT tahun 2015 harus menanggung 66,7 penduduk bukan usia produktif. Walaupun menurun, Rasio Ketergantungan NTT masih di atas rata-rata Nasional, yakni 50,5 (tahun 2010) dan 48,60 (tahun 2015). Selain itu, rasio ketergantungan NTT adalah yang tertinggi secara nasional dalam pengukuran tahun 2010 dan 2015, sementara yang terendah adalah DKI Jakarta dengan rasio 37,4 (tahun 2010) dan 39,9 (tahun 2015). Proyek Rasio Ketergantungan tahun 2020 dan 2025, NTT masih akan menduduki posisi tertinggi nasional. Hal ini merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi, dimana selain usaha menciptakan lebih banyak lapangan kerja, juga menanggung konsekuensi dari profil demografi yang relatif menua. Rasio ketergantungan dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Tabel 2.113
Rasio Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) Penduduk
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Umur	2013		2014		2015		2016		2017	
	Absolut	persen								
0-14	1.770.012	35,73	1.799.637	35,73	1.799.021	35,14	1.813.199	34,85	1.827.378	34,56
15-64	2.942.795	59,40	2.992.061	59,40	3.070.775	59,98	3.134.874	60,25	3.198.817	60,50
65+	241.160	4,87	245.199	4,87	250.265	4,89	255.441	4,91	261.107	4,94
0-14 & 65+	2.011.172	40,60	2.044.836	40,60	2.049.286	49,02	2.068.640	39,75	2.088.485	39,50
Total	4.953.967	100,00	5.036.897	100,00	5.120.061	100,00	5.203.514	100,00	5.287.302	100,00
Dependency Ratio	68,34		68,34		66,75		65,99		65,29	

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Rasio ketergantungan mengalami penurunan, dimana secara numerik berada di atas 50, artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit lebih banyak penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun). Itu berarti, kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) masih kurang mampu menekan beban ketergantungan sampai pada tingkat terendah yang berguna mendongkrak pembangunan ekonomi.

2.4.5. Akomodasi

Salah satu komponen daya saing daerah, terutama terkait pariwisata, adalah ketersediaan akomodasi. Data jumlah hotel dan kamar di NTT dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan akumulatif sebanyak 21 hotel, dari 334 (tahun 2015) menjadi 365 (tahun 2017). Jumlah hotel di Kabupaten Manggarai Barat dalam periode ini bertambah 22 unit dan di Kabupaten Rote Ndao bertambah 10 unit, sementara di Kabupaten Ende justru berkurang 13 unit dan di Kabupaten Sikka berkurang 6 unit.

Tabel 2.114
Jumlah Akomodasi Hotel menurut Kabupaten/Kota (unit)
Provinsi NTT Tahun 2015-2017

Kabupaten/Kota	Hotel			Kamar		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sumba Barat	7	7	9	162	162	195
Sumba Timur	8	8	14	157	157	352
Kupang	3	3	2	51	51	39
Timor Tengah Selatan	10	10	13	237	237	305
Timor Tengah Utara	9	9	10	187	187	236
Belu	14	14	11	310	310	285
Alor	6	6	7	123	123	150
Lembata	5	5	6	135	135	167
Flores Timur	16	16	15	207	207	221
Sikka	31	31	25	530	530	567
Ende	34	34	21	405	405	440
Ngada	23	23	27	290	290	328

Kabupaten/Kota	Hotel			Kamar		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Manggarai	18	18	14	299	299	282
Rote Ndao	8	8	18	118	118	204
Manggarai Barat	50	50	72	801	801	1272
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	8	8	6	163	163	167
Nagekeo	7	7	12	88	88	153
Manggarai Timur	7	7	6	66	66	71
Sabu Raijua	6	6	5	55	55	58
Malaka	-	-	4	-	-	60
Kota Kupang	64	64	68	2107	2107	2764
Nusa Tenggara Timur	334	334	365	6491	6491	8316

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

2.4.6. Restauran dan Rumah Makan

Ketersediaan restauran dan rumah makan merupakan bagian dari fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan maupun pengunjung lain ke NTT, baik penduduk nasional maupun mancanegara. Perkembangan jumlah restaurant dan rumah makan bisa dilihat di Tabel 2.115.

Tabel 2.115
Jumlah Restauran dan Rumah Makan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Jumlah				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	21	21	21	21	21
Sumba Timur	14	14	14	14	33
Kupang	15	15	15	15	35
Timor Tengah Selatan	15	15	15	15	144
Timor Tengah Utara	52	52	52	62	62
Belu	78	78	78	82	82
Alor	11	11	11	11	15
Lembata	23	23	23	23	41
Flores Timur	24	24	24	70	90
Sikka	55	55	55	55	130
Ende	53	53	53	53	82
Ngada	88	104	104	104	50
Manggarai	72	72	72	72	119
Rote Ndao	29	29	29	29	36
Manggarai Barat	33	33	33	33	106
Sumba Tengah	5	5	6	6	6
Sumba Barat Daya	6	6	6	21	21
Nagekeo	92	92	92	92	122
Manggarai Timur	12	12	12	12	42
Sabu Raijua	8	8	8	8	36
Malaka	-	-	-	39	-
Kota Kupang	253	253	253	846	876
Nusa Tenggara Timur	959	975	976	1683	2149

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Secara keseluruhan, ada peningkatan jumlah rumah makan dan restauran di Provinsi NTT, yaitu dari 959 unit (tahun 2013) menjadi 2.149 unit (tahun 2017) atau naik sebanyak 1.190 unit dalam lima tahun terakhir. Rata-rata semua Kabupaten mengalami peningkatan jumlah, kecuali Kabupaten Ngada yang justru berkurang sebanyak 54 unit dari 104 menjadi 50 unit.

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengingat pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 telah berakhir, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan menjadi permasalahan untuk diperhatikan pada perencanaan ke depan.

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 yang merupakan akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, terdapat berbagai Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 8 Misi Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Misi I: Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing. Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT, dan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT. Sedangkan Program Priotas yang dijalankan adalah:

- A. Program Urusan Pendidikan
 - 1) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal
 - 2) Program Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa
 - 3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan
 - 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - 5) Program Hibah Pendidikan
 - 6) Program Bantuan Sosial Kependidikan
 - B. Program Urusan Kebudayaan
 - 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - C. Program Urusan Perpustakaan
 - 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - D. Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
 - 3) Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
2. Misi 2: Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat
- Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan RSUD Prof. DR. W.Z. Yohanes Kupang, dengan Program Priotas yang dijalankan adalah:

- 1) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
 - 2) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 - 4) Program Peningkatan Gizi
 - 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
 - 6) Program Manajemen Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan
 - 7) Program Upaya Kesehatan Perorangan
 - 8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - 9) Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan
 - 10) Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan
3. Misi 3: Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisataan dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal.
- Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 11 SKPD, yaitu:
- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
 - 2) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT
 - 3) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi NTT
 - 4) Kantor P2TSP Provinsi NTT
 - 5) Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT
 - 6) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
 - 7) Badan Ketahanan Pangan dan Penyaluhan Provinsi NTT
 - 8) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT
 - 9) Dinas Peternakan Provinsi NTT
 - 10) Dinas Kehutanan Provinsi NTT
 - 11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
- Program Prioritas yang dijalankan adalah:
- A. Program Urusan Ketenagakerjaan
 - 1) Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan
 - 2) Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - 3) Program Pengembangan dan Pembinaan Wilayah Transmigrasi
 - B. Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi
 - 2) Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - 3) Program Hibah Koperasi
 - C. Program Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 2) Program Peningkatan Investasi Daerah
 - 3) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
 - 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
 - 5) Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 6) Program Fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha
 - 7) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian
 - D. Program Urusan Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, Destinasi dan Promosi Pariwisata

- 2) Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif
- 3) Program Hibah Pariwisata
- E. Program Urusan Ketahanan Pangan
 - 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
 - 2) Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani
- F. Program Urusan Pertanian
 - 1) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan
 - 2) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 3) Program Pengembangan Benih dan Pembibitan
 - 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - 6) Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan
- G. Program Urusan Kehutanan
 - 1) Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan
- H. Program Urusan Perindustrian dan Perdagangan
 - 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - 3) Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri
 - 4) Program Hibah Bidang Perekonomian.

4. Misi 4: Pembentahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 23 SKPD, yaitu:

- 1) Bappeda Provinsi NTT
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- 3) Satpol Pamong Praja Provinsi NTT
- 4) Biro Umum Setda Provinsi NTT
- 5) Biro Keuangan Setda Provinsi NTT
- 6) Biro Hukum Setda Provinsi NTT
- 7) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
- 8) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
- 9) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT
- 10) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT
- 11) Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT
- 12) Sekretariat Dewan Provinsi NTT
- 13) Inspektorat Provinsi NTT
- 14) Kantor Penghubung Provinsi NTT
- 15) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
- 16) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT
- 17) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
- 18) Sekretariat Dewan KORPRI Provinsi NTT
- 19) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTT
- 20) Badan Arsip Daerah Provinsi NTT
- 21) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
- 22) Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT
- 23) Komisi Penyiaran dan Indonesia Daerah Provinsi NTT

Program Prioritas yang dijalankan adalah:

- A. Program Urusan Perencanaan
 - 1) Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 2) Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan Lembaga Internasional
- B. Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - 1) Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
 - 2) Program Fasilitasi Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 3) Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat
 - 4) Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah
 - 5) Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban
- C. Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
 - 2) b) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 - 4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
 - 6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - 7) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
 - 8) Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah
 - 9) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
 - 10) Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama
 - 11) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Keagamaan dan Kependidikan
 - 12) Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan.
 - 13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - 14) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan dan Otonomi Daerah
 - 15) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - 16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - 17) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - 18) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - 19) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
 - 20) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penataan Aset
 - 21) Program Pendidikan Kedinasan
 - 22) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - 23) Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan KORPRI
 - 24) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi
 - 25) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

- 26) Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan Hidup, Politik dan Pemerintahan
- 27) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian
- D. Program Urusan Kearsipan
 - 1) Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan
 - 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- E. Program Urusan Komunikasi Dan Informasi
 - 1) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah
 - 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
 - 3) Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
 - 4) Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi
 - 5) Program Pengembangan Data dan Informasi
- F. Program Urusan Umum
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Misi 5: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 8 SKPD, yaitu:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT
- 2) Dinas Kesehatan Provinsi NTT
- 3) Dinas Perhubungan Provinsi NTT
- 4) Bappeda Provinsi NTT
- 5) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT
- 6) Dinas Kehutanan Provinsi NTT
- 7) Kesatuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mutis Timau Provinsi NTT
- 8) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT

Program Prioritas yang dilaksanakan adalah:

- A. Program Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 2) Program Pengolahan Sumber Daya Air
 - 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
 - 4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan
 - 5) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
 - 6) Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum
- B. Program Urusan Kesehatan
 - 1) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- C. Program Urusan Perhubungan
 - 1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan
 - 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- D. Program Urusan Perencanaan
 - 1) Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang

- E. Program Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3) Program Rehabilitasi Hutan dan Hutan
 - F. Program Urusan Kehutanan
 - 1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - G. Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1) Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas dan Panas Bumi
 - 2) Program Pengembangan Pertambangan
 - 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
6. Misi 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak
- Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:
- 1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan
 - 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - 3) Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
7. Misi 7: Mempercepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan
- Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah:
- 1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
 - 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - 3) Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - 4) Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan
8. Misi 8: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan Kawasan Perbatasan
- Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh SKPD yaitu:
- 1) Bappeda Provinsi NTT
 - 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT
 - 3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT
 - 4) Dinas Sosial Provinsi NTT
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
- Program Prioritas yang dijalankan adalah:
- A. Program Urusan Perencanaan
 - 1) Program Desa Mandiri Anggur Merah
 - 2) Program Hibah Ekonomi Produktif
 - B. Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan

- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa
- 3) Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan
- 4) Program Hibah Perumahan (P2LDT)
- C. Program Urusan Perbatasan
 - 1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- D. Program Urusan Sosial
 - 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya
 - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 3) Program Penyandang Penyakit Sosial
 - 4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - 5) Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga
- E. Program Urusan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) yang tertuang dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, harus dievaluasi capaianya secara periodik/triwulan agar diketahui kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT selaku pengelola anggaran. Hal ini dapat dilihat dari realisasi atau penyerapan kinerja program/kegiatan APBD dari masing-masing PD.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018, maka Bappeda Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD, Renja dan Renstra PD Provinsi, baik melalui pelatihan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya maupun dengan penjelasan cara pengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada lampiran surat yang dikirimkan oleh Bappeda kepada seluruh PD.

Pada Triwulan IV ini, capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan dari seluruh PD lingkup pemerintah Provinsi NTT hanya dapat dilakukan terhadap 42 PD yang menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) PD (Kondisi Laporan yang disampaikan ke Bappeda Provinsi NTT s/d bulan Desember 2018).

42 PD yang melaporkan ke Bappeda Provinsi NTT yang sesuai dengan Format Pelaporan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan Provinsi NTT
2. Dinas Kearsipan Provinsi NTT
3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT
4. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT
5. Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6. Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT
7. Biro Hukum Setda Provinsi NTT
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT
10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT
11. Dinas Sosial Provinsi NTT
12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT
13. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT

14. Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT
15. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
16. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT
17. Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi NTT
18. Dinas Perhubungan Provinsi NTT
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20. Biro Pengadaan Layanan BJ Setda Provinsi NTT
21. Biro Organisasi Setda Provinsi NTT
22. Dinas Kesehatan Provinsi NTT
23. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT
24. Biro Umum Setda Provinsi NTT
25. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
26. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
27. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
28. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT
29. Dinas Pariwisata Provinsi NTT
30. Dinas Kehutanan Provinsi NTT
31. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT
32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
34. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT
35. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT
36. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT
37. Sekretariat DPRD Provinsi NTT
38. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
39. Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT
40. Dinas Perpustakan Provinsi NTT
41. Dinas Perdagangan Provinsi NTT
42. Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT

Terdapat 7 PD, yang tidak menyampaikan laporan Evaluasi Hasil Renja PD, yaitu :

1. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
2. Dinas Pertanian Provinsi NTT
3. Dinas Peternakan Provinsi NTT
4. Dinas Pendidikan Provinsi NTT
5. Biro Pemerintahan
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT
7. Dinas Perindustrian Provinsi NTT

Capaian target anggaran triwulan IV lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2018 sebagaimana pada tabel 2.116 berikut ini:

Tabel 2.116
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran
Per-Urusan Pemerintahan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2018
Keadaan Triwulan IV

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN			SISA ANGGARAN	
		PAGU	REALISASI		RP	%
			Rp	%		
1	PENDIDIKAN	474,348,355,000	362,126,651,002	76.34	112,221,703,998	23.66
	DINAS PENDIDIKAN	474,348,355,000	362,126,651,002	76.34	112,221,703,998	23.66
2	KESEHATAN	221,061,823,100	170,684,425,305	77.21	50,377,397,795	22.79
	DINAS KESEHATAN	61,475,885,700	50,636,422,465	82.37	10,839,463,235	17.63
	RSUD PROF. DR. WZ. JOHANNES	159,585,937,400	120,048,002,840	75.22	39,537,934,560	24.78
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	264,202,667,000	260,098,605,899	98.45	4,104,061,101	1.55
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	264,202,667,000	260,098,605,899	98.45	4,104,061,101	1.55
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	117,823,426,000	106,519,163,960	90.41	11,304,262,040	9.59
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	117,823,426,000	106,519,163,960	90.41	11,304,262,040	9.59
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6,839,233,300	4,824,013,142	70.53	2,015,220,158	29.47
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6,839,233,300	4,824,013,142	70.53	2,015,220,158	29.47
6	SOSIAL	19,201,210,290	18,858,551,830	98.22	342,658,460	1.78
	DINAS SOSIAL	19,201,210,290	18,858,551,830	98.22	342,658,460	1.78
7	TENAGA KERJA	7,999,560,200	6,493,333,208	81.17	1,506,226,992	18.83
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7,999,560,200	6,493,333,208	81.17	1,506,226,992	18.83
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,605,835,668	1,508,142,130	93.92	97,693,538	6.08
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,605,835,668	1,508,142,130	93.92	97,693,538	6.08
9	KETAHANAN PANGAN	7,227,135,500	7,121,409,165	98.54	105,726,335	1.46
	DINAS KETAHANAN PANGAN	7,227,135,500	7,121,409,165	98.54	105,726,335	1.46
10	LINGKUNGAN HIDUP	3,695,628,600	3,410,146,737	92.28	285,481,863	7.72
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	3,695,628,600	3,410,146,737	92.28	285,481,863	7.72
11	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,783,785,900	4,561,855,051	95.36	221,930,849	4.64
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,783,785,900	4,561,855,051	95.36	221,930,849	4.64
12	PERHUBUNGAN	14,542,516,900	13,584,649,196	93.41	957,867,704	6.59
	DINAS PERHUBUNGAN	14,542,516,900	13,584,649,196	93.41	957,867,704	6.59
13	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,988,955,600	3,444,754,357	86.36	544,201,243	13.64
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,988,955,600	3,444,754,357	86.36	544,201,243	13.64
14	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	19,354,533,000	18,424,207,157	95.19	930,325,843	4.81
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	19,354,533,000	18,424,207,157	95.19	930,325,843	4.81

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN			SISA ANGGARAN	
		PAGU	REALISASI	RP	%	
15	PENANAMAN MODAL	4,585,213,208	4,410,734,239	96.19	174,478,969	3.81
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,585,213,208	4,410,734,239	96.19	174,478,969	3.81
16	PEMUDA DAN OLAHRAGA	17,789,985,000	13,000,056,569	73.08	4,789,928,431	26.92
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17,789,985,000	13,000,056,569	73.08	4,789,928,431	26.92
17	KEBUDAYAAN	8,145,907,600	8,051,399,437	98.84	94,508,163	1.16
	DINAS KEBUDAYAAN	8,145,907,600	8,051,399,437	98.84	94,508,163	1.16
18	PERPUSTAKAAN	2,540,765,700	2,351,526,816	92.55	189,238,884	7.45
	DINAS PERPUSTAKAAN	2,540,765,700	2,351,526,816	92.55	189,238,884	7.45
19	KEARSIPAN	1,824,279,000	1,349,439,634	73.97	474,839,366	26.03
	DINAS KEARSIPAN	1,824,279,000	1,349,439,634	73.97	474,839,366	26.03
20	KELAUTAN DAN PERIKANAN	38,771,562,000	38,565,821,408	99.47	205,740,592	0.53
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	38,771,562,000	38,565,821,408	99.47	205,740,592	0.53
21	PARIWISATA	15,238,140,000	13,324,889,353	87.44	1,913,250,647	12.56
	DINAS PARIWISATA	15,238,140,000	13,324,889,353	87.44	1,913,250,647	12.56
22	PERTANIAN	47,531,871,136	23,910,224,820	50.30	23,621,646,316	49.70
	DINAS PERTANIAN	28,536,936,136	16,923,965,301	59.31	11,612,970,835	40.69
	DINAS PETERNAKAN	18,994,935,000	6,986,259,519	36.78	12,008,675,481	63.22
23	KEHUTANAN	33,841,787,000	21,226,014,348	62.72	12,615,772,652	37.28
	DINAS KEHUTANAN	33,841,787,000	21,226,014,348	62.72	12,615,772,652	37.28
24	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	63,500,294,100	23,161,159,919	36.47	40,339,134,181	63.53
	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	63,500,294,100	23,161,159,919	36.47	40,339,134,181	63.53
25	PERDAGANGAN	3,224,791,200	3,150,625,373	97.70	74,165,827	2.30
	DINAS PERDAGANGAN	3,224,791,200	3,150,625,373	97.70	74,165,827	2.30
26	PERINDUSTRIAN	8,500,375,000	4,467,602,150	52.56	4,032,772,850	47.44
	DINAS PERINDUSTRIAN	8,500,375,000	4,467,602,150	52.56	4,032,772,850	47.44
27	PENGAWASAN	9,084,744,208	8,797,576,192	96.84	287,168,016	3.16
	INSPEKTORAT	9,084,744,208	8,797,576,192	96.84	287,168,016	3.16
28	PERENCANAAN	14,212,785,000	13,269,386,603	93.36	943,398,397	6.64
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14,212,785,000	13,269,386,603	93.36	943,398,397	6.64
29	KEUANGAN	84,243,217,100	74,158,373,606	88.03	10,084,843,494	11.97
	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	84,243,217,100	74,158,373,606	88.03	10,084,843,494	11.97
30	KEPEGAWAIAN	12,774,296,200	10,999,587,920	86.11	1,774,708,280	13.89
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12,774,296,200	10,999,587,920	86.11	1,774,708,280	13.89
31	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	26,866,868,000	24,214,038,136	90.13	2,652,829,864	9.87
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	26,866,868,000	24,214,038,136	90.13	2,652,829,864	9.87
32	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2,970,388,080	2,895,264,100	97.47	75,123,980	2.53
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,970,388,080	2,895,264,100	97.47	75,123,980	2.53

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ANGGARAN			SISA ANGGARAN	
		PAGU	REALISASI		%	%
			Rp	%		
33	KOORDINASI PELAKSANAAN URUSAN PEM. DAN PEMBANGUNAN DGN PEM.PUSAT PERBATASAN	3,156,123,000	1,919,544,181	60.82	1,236,578,819	39.18
	BADAN PENGHUBUNG PROV.NTT di JAKARTA	3,156,123,000	1,919,544,181	60.82	1,236,578,819	39.18
34	PERBATASAN	2,305,649,000	2,218,426,400	96.22	87,222,600	3.78
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2,305,649,000	2,218,426,400	96.22	87,222,600	3.78
35	KORPS PEGAWAI RI	1,823,543,000	1,772,051,519	97.18	51,491,481	2.82
	SEKRETARIAT DP KORPRI	1,823,543,000	1,772,051,519	97.18	51,491,481	2.82
	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1,400,000,000	1,399,999,999	99.99	1,000,000	10.00
36	SEKRETARIAT DAERAH	92,501,630,100	78,055,941,044	84.38	14,445,689,056	15.62
	BIRO UMUM	67,188,821,000	55,870,528,874	83.15	11,318,292,126	16.85
	BIRO HUKUM	2,528,877,000	2,328,797,700	92.09	200,079,300	7.91
	BIRO ORGANISASI	3,698,031,000	3,561,544,425	96.31	136,486,575	3.69
	BIRO PEREKONOMIAN	2,502,859,100	2,459,741,400	98.28	43,117,700	1.72
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	4,044,153,000	3,865,215,125	95.58	178,937,875	4.42
	BIRO PEMERINTAHAN	3,289,191,000	1,101,396,740	33.49	2,187,794,260	66.51
	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	4,034,722,000	3,807,925,577	94.38	226,796,423	5.62
	BIRO LAYANAN PENG. BARANG & JASA	3,297,563,000	3,248,840,550	98.52	48,722,450	1.48
	BIRO KERJASAMA	1,917,413,000	1,811,950,653	94.50	105,462,347	5.50
37	SEKRETARIAT DPRD	69,129,991,000	66,649,090,567	96.41	2,480,900,433	3.59
	SEKRETARIAT DPRD	69,129,991,000	66,649,090,567	96.41	2,480,900,433	3.59
38	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN PENANGGULANGAN BENCANA	8,528,907,000	7,974,797,203	93.50	554,109,797	6.50
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,532,282,000	3,340,741,349	94.58	191,540,651	5.42
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,996,625,000	4,634,055,854	92.74	362,569,146	7.26

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian anggaran dari beberapa Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan pada Triwulan IV ini sudah berada di atas 80% dengan predikat Tinggi (T). Pada triwulan IV ini seharusnya realisasi capaian anggaran sudah mencapai 100 %.

Tabel 2.217
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI (ST)
76% ≤ 90%	TINGGI (T)
66% ≤ 75%	SEDANG (S)
51% ≤ 65%	RENDAH (R)
≤ 50%	SANGAT RENDAH (SR)

Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Hasil Sedang
Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah.
Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dari Tabel 2.217, dapat dikategorikan pencapaian target yang dicapai oleh 49 PD di urut dari yang tertinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.218
Capaian Target PD di Urut dari yang Tertinggi

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	%
1	DINAS KEBUDAYAAN	8,145,907,600	8,051,399,437	98.84
2	DINAS KETAHANAN PANGAN	7,227,135,500	7,121,409,165	98.54
3	BIRO LAYANAN PENG. BARANG & JASA	3,297,563,000	3,248,840,550	98.52
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	38,771,562,000	38,565,821,408	99.47
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	264,202,667,000	260,098,605,899	98.45
6	BIRO PEREKONOMIAN	2,502,859,100	2,459,741,400	98.28
7	DINAS SOSIAL	19,201,210,290	18,858,551,830	98.22
8	DINAS PERDAGANGAN	3,224,791,200	3,150,625,373	97.70
9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2,970,388,080	2,895,264,100	97.47
10	SEKRETARIAT DP KORPRI	1,823,543,000	1,772,051,519	97.18
11	INSPEKTORAT	9,084,744,208	8,797,576,192	96.84
12	SEKRETARIAT DPRD	69,129,991,000	66,649,090,567	96.41
13	BIRO ORGANISASI	3,698,031,000	3,561,544,425	96.31
14	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2,305,649,000	2,218,426,400	96.22
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,585,213,208	4,410,734,239	96.19
16	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	4,044,153,000	3,865,215,125	95.58

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	
			Rp	%
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,783,785,900	4,561,855,051	95.36
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	19,354,533,000	18,424,207,157	95.19
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3,532,282,000	3,340,741,349	94.58
20	BIRO KERJASAMA	1,917,413,000	1,811,950,653	94.50
21	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	4,034,722,000	3,807,925,577	94.38
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,605,835,668	1,508,142,130	93.92
23	DINAS PERHUBUNGAN	14,542,516,900	13,584,649,196	93.41
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14,212,785,000	13,269,386,603	93.36
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,996,625,000	4,634,055,854	92.74
26	DINAS PERPUSTAKAAN	2,540,765,700	2,351,526,816	92.55
27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	3,695,628,600	3,410,146,737	92.28
28	BIRO HUKUM	2,528,877,000	2,328,797,700	92.09
29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	117,823,426,000	106,519,163,960	90.41
30	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	26,866,868,000	24,214,038,136	90.13
31	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	84,243,217,100	74,158,373,606	88.03
32	DINAS PARIWISATA	15,238,140,000	13,324,889,353	87.44
33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3,988,955,600	3,444,754,357	86.36
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12,774,296,200	10,999,587,920	86.11
35	BIRO UMUM	67,188,821,000	55,870,528,874	83.15
36	DINAS KESEHATAN	61,475,885,700	50,636,422,465	82.37
37	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7,999,560,200	6,493,333,208	81.17
38	DINAS PENDIDIKAN	474,348,355,000	362,126,651,002	76.34
39	RSUD PROF. DR. WZ. JOHANNES	159,585,937,400	120,048,002,840	75.22
40	DINAS KEARSIPAN	1,824,279,000	1,349,439,634	73.97
41	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17,789,985,000	13,000,056,569	73.08
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6,839,233,300	4,824,013,142	70.53
43	DINAS KEHUTANAN	33,841,787,000	21,226,014,348	62.72
44	BADAN PENGHUBUNG PROV.NTT di JAKARTA	3,156,123,000	1,919,544,181	60.82
45	DINAS PERTANIAN	28,536,936,136	16,923,965,301	59.31
46	DINAS PERINDUSTRIAN	8,500,375,000	4,467,602,150	52.56
47	DINAS PETERNAKAN	18,994,935,000	6,986,259,519	36.78
48	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	63,500,294,100	23,161,159,919	36.47
49	BIRO PEMERINTAHAN	3,289,191,000	1,101,396,740	33.49

Kesimpulan hasil evaluasi kinerja PD dalam mengelola program dan kegiatan RKPD provinsi NTT tahun 2018 yang dijabarkan dalam renja PD masing-masing untuk Triwulan IV diperoleh data-data capaian kinerja RKPD dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.219
Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 Triwulan IV

NO	PERANGKAT DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas	Predikat Capaian Kinerja
1	DINAS KEBUDAYAAN	98.84	ST
2	DINAS KETAHANAN PANGAN	98.54	ST
3	BIRO LAYANAN PENG. BARANG & JASA	98.52	ST
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	99.47	ST
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	98.45	ST
6	BIRO PEREKONOMIAN	98.28	ST
7	DINAS SOSIAL	98.22	ST
8	DINAS PERDAGANGAN	97.70	ST
9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	97.47	ST
10	SEKRETARIAT DP KORPRI	97.18	ST
11	INSPEKTORAT	96.84	ST
12	SEKRETARIAT DPRD	96.41	ST
13	BIRO ORGANISASI	96.31	ST
14	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	96.22	ST
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	96.19	ST
16	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	95.58	ST
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	95.36	ST
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	95.19	ST
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	94.58	ST
20	BIRO KERJASAMA	94.50	ST
21	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	94.38	ST
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	93.92	ST
23	DINAS PERHUBUNGAN	93.41	ST
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	93.36	ST
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	92.74	ST
26	DINAS PERPUSTAKAAN	92.55	ST
27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	92.28	ST
28	BIRO HUKUM	92.09	ST
29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	90.41	T
30	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	90.13	T
31	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	88.03	T
32	DINAS PARIWISATA	87.44	T
33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	86.36	T
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	86.11	T
35	BIRO UMUM	83.15	T
36	DINAS KESEHATAN	82.37	T
37	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	81.17	T
38	DINAS PENDIDIKAN	76.34	T
39	RSUD PROF. DR. WZ. JOHANNES	75.22	S
40	DINAS KEARSIPAN	73.97	S
41	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	73.08	S
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	70.53	S
43	DINAS KEHUTANAN	62.72	R
44	BADAN PENGHUBUNG PROV.NTT di JAKARTA	60.82	R

NO	PERANGKAT DAERAH	Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas	Predikat Capaian Kinerja
45	DINAS PERTANIAN	59.31	R
46	DINAS PERINDUSTRIAN	52.56	R
47	DINAS PETERNAKAN	36.78	SR
48	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	36.47	SR
49	BIRO PEMERINTAHAN	33.49	SR

Capaian target anggaran triwulan I lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2019 sebagaimana pada Tabel 2.220 berikut ini:

Tabel 2.220
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran
Pemerintahan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2019
Keadaan Triwulan I

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN			SISA ANGGARAN	
		PAGU	REALISASI			
			Rp	%	RP	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT	40,937,119,000	691,050,575	1.69	40,246,068,425	98.31
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT	47,334,809,000	1,986,848,525	4.20	45,347,960,475	95.80
3	Dinas Kesehatan Prov. NTT	61,798,598,720	2,060,897,110	3.33	59,737,701,610	96.67
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	25,021,517,000	7,700,812,330	30.78	17,320,704,670	69.22
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT	1,742,349,000	257,554,100	14.78	1,484,794,900	85.22
6	Biro Organisasi Setda Prov. NTT	2,464,614,000	265,168,400	10.76	2,199,445,600	89.24
7	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	36,462,346,000	938,190,294	2.57	35,524,155,706	97.43
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. NTT	4,369,439,000	611,536,671	14.00	3,757,902,329	86.00
9	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	6,666,843,000	469,443,950	7.04	6,197,399,050	92.96
10	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Prov. NTT	4,077,816,000	244,568,020	6.00	3,833,247,980	94.00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTT	4,097,184,000	312,999,967	7.64	3,784,184,033	92.36
12	RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang	131,393,626,000	23,950,430,529	18.23	107,443,195,471	81.77
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. NTT	11,707,831,000	758,005,737	6.47	10,949,825,263	93.53
14	Dinas Sosial Prov. NTT	20,259,988,000	2,819,206,629	13.92	17,440,781,371	86.08
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	32,446,006,000	5,508,877,527	16.98	26,937,128,473	83.02
16	Inspektorat Daerah Prov. NTT	10,706,953,992	1,425,736,526	13.32	9,281,217,466	86.68
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	21,250,659,300	122,812,150	0.58	21,127,847,150	99.42
18	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT	15,477,039,000	978,250,817	6.32	14,498,788,183	93.68
19	Biro Hukum Setda Prov. NTT	1,462,670,200	272,589,000	18.64	1,190,081,200	81.36

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN			SISA ANGGARAN	
		PAGU	REALISASI			
			Rp	%	RP	%
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	4,134,638,000	292,580,056	7.08	3,842,057,944	92.92
21	Sekretariat DPRD Prov. NTT	55,971,036,200	8,957,319,378	16.00	47,013,716,822	84.00
22	Badan Pengelola Perbatasan Prov. NTT	1,943,489,000	212,694,600	10.94	1,730,794,400	89.06
TOTAL BELANJA LANGSUNG		590,792,027,412	68,624,878,794	11.69	479,168,708,694	88.31

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian anggaran dari 21 Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun anggaran 2019 ini masih berada di bawah 50% dengan predikat Sangat Rendah (SR).

2.5 INTERGRASI RTRW DALAM RPJMD

2.5.1 Rencana Struktur Ruang

2.5.1.1 Rencana Sistem Perkotaan

Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di wilayah Provinsi NTT merupakan pusat pertumbuhan wilayah Provinsi, yang dapat terdiri dari:

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp);
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasional, Nasional, atau beberapa Provinsi. PKN ditetapkan dengan kriteria:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa Provinsi; dan/atau
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa Provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. PKW ditetapkan dengan kriteria:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;

- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten; dan/atau
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan. PKL ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan; dan/atau
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. PKSN ditetapkan dengan kriteria:

- a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
- b. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
- c. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
- d. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya.

Rekomendasi hirarki Sistem Pusat Kegiatan dikaji dengan memperhatikan Hirarki Sistem Pusat Pelayanan Kecamatan. Sistem Pusat Kegiatan berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.27. Pada tabel ini dapat dilihat rekomendasi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN promosi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), PKW promosi, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi NTT, meliputi :

- a. PKN terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah Provinsi NTT;
- b. PKNp terdapat di Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere di Kabupaten Sikka;
- c. PKW terdapat di Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Ende di Kabupaten Ende, Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;

- d. PKWp terdapat di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bajawa di Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat dan Kota Atambua di Kabupaten Belu, dan Kota Mbay di Kabupaten Nagekeo;
- e. PKL terdapat di Kota Oelamasi di Kabupaten Kupang, Kota Ba'a di Kabupaten Rote Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
- f. PKSN terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor.

Sistem Perdesaan mencakup seluruh pusat Kecamatan diluar Sistem Perkotaan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi, dengan Kecamatan strategis tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.221
Kecamatan Strategis di Provinsi NTT

Kabupaten/ Kota	Kecamatan Strategis
Kota	-
Kupang	Kupang Barat, Amarasi, Sulamu, Amfoang Utara
Timor Tengah Selatan	Amanuban Selatan, Kolbano, Boking, Amanatun Utara, Mollo Utara
Timor Tengah Utara	Miomafo Timur, Miomafo Barat, Insana, Biboki Anleu
Belu	Malaka Tengah, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Lamaknen, Kobalima
Rote Ndao	Rote Timur, Rote Barat Daya
Alor	Alor Barat Daya, Alor Timur, Pantar
Lembata	Omesuri, Atadei
Flores Timur	Wulang Gitang, Solor Timur, Adonara Timur
Sikka	Paga, Waigete, Magepanda
Ende	Nangapenda, Wolowaru, Wewaria
Nagekeo	Nangaroro, Mauponggo, Boawae
Ngada	Golewa, Aimere, Wolomese
Manggarai Timur	Kota Komba, Sambi Rampas, Poco Ranaka
Manggarai	Satar Mese, Cibal
Manggarai Barat	Lembor, Kuwus
Sumba Barat Daya	Kodi Bangedo, Wewewa Timur
Sumba Barat	Lamboya, Tanarighu
Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat
Sumba Timur	Kambera, Lewa, Umalulu, Ngadu Ngala
Sabu	Hawu Mehara

Sumber Data: Hasil Analisis RTRW 2018

2.6 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan pembangunan dan hasilnya cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin baiknya beberapa indikator pembangunan. Namun demikian, harus diakui bahwa dengan berbagai keterbatasan dan karakteristik wilayah NTT, belum semua indikator menunjukkan hasil yang maksimal. Provinsi NTT masih tetap menemui berbagai kendala dan tantangan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai masalah, tantangan dan kendala dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2020 yang akan datang.

Permasalahan pembangunan daerah pada tahun 2020 yang masih dihadapi Provinsi NTT adalah aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah. Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Kondisi kesejahteraan masyarakat lainnya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM NTT yang masih berada jauh di bawah rata-rata RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 dan rata-rata IPM Indonesia.

Selain masalah kesejahteraan masyarakat masihnya yang juga memiliki keterkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat adalah rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Permasalahan pembangunan daerah tersebut sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan pembangunan pendidikan di NTT antara lain : (1) belum optimalnya mutu layanan pendidikan; dan, (2) belum meratanya akses layanan pendidikan. Kedua permasalahan tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa sub-masalah sebagai berikut :

- a) Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan;
- b) Distribusi guru yang belum merata antar-daerah serta masih rendahnya ketersediaan tenaga pendidik khusus untuk mengajar di lembaga pendidikan khusus;
- c) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru non-PNS;
- d) Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi;
- e) Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah;
- f) Nilai Rata-rata UAN yang masih rendah;
- g) Pengangguran terbesar berasal dari lulusan pendidikan menengah umum dan kejuruan serta pendidikan tinggi;

- h) Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan padajenjang sekolah menengah;
- i) Rendahnya literasi masyarakat NTT;
- j) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

2. Bidang Kesehatan

- a) Rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTT;
- b) Tingginya kasus gizi buruk dan *stunting*;
- c) Tingginya kasus kematian ibu dan bayi di NTT;
- d) Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular;
- e) Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
- f) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Jalan dan Jembatan
 - 1. Jaringan jalan Provinsi yang belum merata dikerjakan, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masih tinggi;
 - 2. Masih ada ketimpangan pembangunan jalan antar-kawasan di wilayah Timor, Sumba dan Manggarai Timur, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas, terutama di daerah yang terisolasi.
 - 3. Sebagian besar jalan kewenangan provinsi belum di sertifikasi kepemilikan lahan.
- b) Sumber Daya Air
 - 1. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi Provinsi;
 - 2. Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku.
- c) Air Minum dan Sanitasi
 - 1. Belum optimalnya akses terhadap layanan air bersih;
 - 2. Kualitas air minum dan sanitasi layak;
 - 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air bersih.
- d) Jasa Konstruksi
 - 1. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi daerah;
 - 2. Masih tingginya bangunan mangkrak dikarenakan keterlambatan pekerjaan oleh pelaku jasa konstruksi;
 - 3. Belum tersedianya informasi kondisi kelayakan bangunan aset milik daerah.
- e) Penataan Ruang
 - 1. Aspek pemanfaatan ruang terkendala pada pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
 - 2. Aspek pengendalian pemanfaatan ruang terkendala pada belum disusunnya seluruh perangkat pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a) Ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya;
- b) Dukungan PSU yang terbatas karena belum menjadi aset pemerintah;
- c) Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana pembangunan perkotaan yang tercantum dalam RTRW/RDTR karena dalam beberapa kasus belum ada dokumennya;
- d) Masih rendahnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang;
- e) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan.

5. Bidang Kamtibnas dan Perlindungan Masyarakat

- a) Meningkatnya ancaman terorisme dan intoleransi, serta ancaman terhadap kebebasan berdemokrasi dan ketahanan nasional yang membutuhkan pencegahan dan penanganan secara komprehensif serta terpadu;
- b) Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
- c) Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada masih dibawah rata-rata target KPU;
- d) Masih tingginya konflik kepemilikan tanah;
- e) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kamtibmas.

6. Bidang Sosial

- a) Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan kepada anak, perempuan dan tindak pidana perdagangan orang;
- b) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
- c) Belum optimalnya pemberdayaan dan rehabilitasi PMKS;
- d) Belum optimalnya penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial
- e) Masih tingginya potensi konflik sosial;
- f) Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- g) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial.

B. Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Non-Layanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

- a) Terbatasnya lapangan pekerjaan;
- b) Tingginya jumlah tenaga kerja asal NTT yang memiliki kompetensi rendah, baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri;
- c) Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah;
- d) Kurangnya minat dan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha baru);
- e) Masih tingginya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang belum terlindungi;
- f) Belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan yang sesuai dengan kebutuhan pasar;

g) Masih tingginya pengangguran dengan jenjang pendidikan SLTA ke atas.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah;
- c) Masih banyaknya jumlah perdagangan perempuan dan anak di NTT;
- d) Masih tinggi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e) Masih terbatasnya kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

3. Bidang Pangan

- a) Ketersediaan pangan antar wilayah Kabupaten di NTT masih timpang atau belum merata;
- b) Jumlah masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi;
- c) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi;
- d) Rendahnya keanekaragaman pangan masyarakat;
- e) Ketidakstabilan produksi dan harga pangan akibat perubahan iklim dan kesulitan akses terhadap pangan serta distribusi pangan.

4. Bidang Pertanahan

- a) Belum optimalnya dukungan penyediaan lokasi untuk pembangunan fasilitas umum;
- b) Masih cukup luas kepemilikan lahan masyarakat yang belum bersertifikat;
- c) Banyak lahan potensial untuk investasi tetapi terhambat karena status tanah serta banyak persoalan konflik agraria.

5. Bidang Lingkungan Hidup

- a) Menurunnya daya dukung dan fungsi layanan jasa ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi dan alih fungsi lahan produktif;
- b) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan;
- c) Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d) Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati.

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- a) Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) pengelola Kabupaten/Kota, menyebabkan proses pelayanan Dokumentasi Administrasi Kependudukan terhambat dalam menjangkau daerah terpencil;
- b) Kurang meratanya aksesibilitas jaringan komunikasi antara Kabupaten/Kota yang akan melakukan perekaman data;
- c) Masih banyak sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di Kabupaten/Kota yang rusak dan tidak layak operasi;
- d) Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL), sehingga terjadi keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah yang menyebabkan rendah dan lamanya proses penerbitan KTP di daerah;
- e) Masih tingginya jumlah anak yang belum memiliki akta lahir, sehingga mereka tidak tercantum dalam Kartu Keluarga.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Belum sinergis dan terpadu program/kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi NTT dengan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b) Masih diperlukan peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan dana desa;
- c) Belum seluruh desa memiliki BUMDES sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat dan ekonomi Pancasila di desa;
- d) Rendahnya Pendapatan Asli Desa PADes, yang mengakibatkan tingginya ketergantungan desa terhadap dana transfer;
- e) Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUMDES belum memahami manajemen BUMDES (pelaksana teknis hingga kepala desa);
- f) Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi/TI untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebagai akibat dari tingginya tingkat fertilitas;
- b) Cakupan peserta KB aktif menurun drastis;
- c) Rendahnya akses PUS untuk memperoleh layanan kontrasepsi.
- d) Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur.

9. Bidang Perhubungan

- a) Terbatasnya akses sarana dan prasarana (sarpras) transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan, dan tempat wisata;
- b) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelabuhan darat, laut dan udara untuk menjamin konektivitas antar-wilayah;
- c) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan *guardrill*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi;
- d) Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan, karena jembatan timbang tidak beroperasi;
- e) Belum adanya sarana angkutan antar-moda transportasi yang terintegrasi;
- f) Rendahnya kualitas layanan sarana angkutan umum (transportasi publik);
- g) Meningkatnya angka kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian;
- h) Tingginya permintaan ijin trayek angkutan antar jemput, angkutan sewa dan *taksi online*;
- i) Aktivitas transportasi berpotensi mencemarkan lingkungan dan konflik sosial (masalah tanah);
- j) Adanya praktik percaloan tarif penumpang/barang.

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a) Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informasi dan *website* dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- b) Rendahnya kapasitas dan inovasi SDM pengelola aplikasi Pemerintah;
- c) Masih banyak terdapat layanan teknologi informasi (TI) yang belum didukung dengan payung hukum atau regulasi/kebijakan yang dapat mengikat dan mengatur implementasi dan operasional layanan TI;
- d) Masih kurangnya sosialisasi terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur TI;
- e) Belum optimalnya kepatuhan dalam implementasi kebijakan, regulasi, dan prosedur layanan TI.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Belum optimalnya pendampingan pada kelembagaan koperasi;
- b) Rendahnya skala pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- c) Masih rendahnya akses terhadap sumberdaya oleh koperasi dan UMKM;
- d) Rendahnya tingkat produktivitas koperasi dan UMKM;
- e) Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM.

12. Bidang Penanaman Modal

- a) Belum optimalnya realisasi penanaman modal;
- b) Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata;
- c) Masih perlu ditingkatkan sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat secara lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah; dan
- d) Belum berjalannya perizinan terpadu satu pintu berbasis *One Single Submission* (OSS).

13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang terstandar;
- b) Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK;
- c) Kurangnya berkesinambungan pembinaan atlet secara profesional dan lemahnya kemitraan dengan *stakeholders*;
- d) Masih rendahnya prestasi atlit pada berbagai *event* kejuaraan olahraga pada level nasional maupun internasional;
- e) Masih tingginya pemuda NTT yang menganggur dikarenakan kurangnya *basic skill* dan minat berwirausaha.

14. Bidang Statistik

- a) Masih belum tersedia data/informasi yang terpercaya, mutakhir dan relevan guna menunjang pembangunan daerah secara terintegrasi;
- b) Belum berfungsi NTT satu data dan satu peta.

15. Bidang Persandian

Masih diperlukan peningkatan sistem pengamanan data pada jaringan komunikasi dan sistem informasi.

16. Bidang Kebudayaan

- a) Masih rendahnya perlindungan terhadap HAKI dan Hak Paten terhadap budaya lokal;
- b) Masih rendahnya apresiasi terhadap pelaku budaya;
- c) Belum optimalnya peran museum dalam pelestarian budaya;
- d) Kurang optimalnya promosi budaya lokal lewat peningkatan literasi.

17. Bidang Perpustakaan

- a) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota ada yang belum memiliki prasarana gedung permanen serta sarana pelayanan yang standar;
- b) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas pustakawan maupun teknisi perpustakaan;

- c) Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau semua daerah tertinggal, terjauh dan terluar;
- d) Belum optimalnya Pustakawan dalam peningkatan literasi masyarakat NTT;
- e) Belum baik layanan buku dan perpusatakaan elektronik.

18. Bidang Kearsipan

- a) Ketersediaan fasilitas dan sumber daya kearsipan belum sesuai standar kearsipan;
- b) Keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan;
- c) Penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif;
- d) Belum tersedianya pelayanan arsip elektronik.

C. Urusan Pemerintah Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

- a) Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir;
- b) Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya oleh nelayan;
- c) Kerusakan wilayah perairan;
- d) Belum optimalnya pemanfaatan budidaya rumput laut;
- e) Belum optimalnya produksi dan produktivitas garam daerah.

2. Bidang Pariwisata

- a) Belum adanya konsep dan penerapan *community-based tourism*;
- b) Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan kinerja sesuai potensinya;
- c) Majoritas masyarakat pada wilayah potensial wisata belum sadar wisata;
- d) Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan;
- e) Belum optimalnya kerjasama lintas sektor pariwisata (lembaga);
- f) Belum adanya design untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata;
- g) Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif.

3. Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan

- a) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik;
- b) Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usahapertanian masih berorientasi pada *on-farm*;
- c) Belum optimalnya perlindungan terhadap petani;
- d) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pertanian;

- e) Belum adanya konsep penerapan pertanian terpadu yang berorientasi industri pengolahan;
- f) Belum maksimalnya dan terintegrasi lembaga riset pertanian daerah, guna mendorong inovasi pertanian;
- g) Kurangnya pemanfaatan kearifan lokal di bidang pertanian dalam mengantisipasi anomali iklim NTT.

4. Bidang Peternakan

- a) Kurangnya kontrol pengeluaran ternak besar betina produktif keluar NTT;
- b) Berkurangnya padang penggembalaan dan lahan untuk hijauan pakan ternak;
- c) Ketergantungan bibit ayam Broiler pedaging dan petelur dari luar NTT;
- d) Ketergantungan akan pakan ternak (pellet dan konsentrat) dari luar NTT;
- e) Belum adanya database pemetaan potensi ternak, lahan padang penggembalaan dan lahan hijauan pakan ternak yang ter-update secara *on-line*;
- f) Belum adanya inovasi pemetaan dan pengendalian penyakit ternak, khususnya berbasis teknologi informasi secara *on-line*;
- g) Kurangnya introduksi teknologi pengolahan hasil ternak (pasca panen);
- h) Kurangnya jumlah rumah potong hewan;
- i) Belum adanya pabrik pengolahan daging;
- j) Masih minimnya jumlah usaha pembibitan ternak yang intensif dan berkelanjutan.

5. Bidang Kehutanan

- a) Belum optimalnya pemanfaatan hutan produksi untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan;
- b) Masih adanya lahan kritis walaupun kondisi daya dukung fungsi lindung dalam kategori baik;
- c) Belum adanya hutan pendidikan, riset dan wisata (arboretum);
- d) Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
- e) Meningkatnya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan.

6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Belum optimalnya evaluasi terhadap perizinan dan praktik pertambangan;
- b) Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik secara layak;
- c) Masih tingginya investasi energi baru terbarukan (EBT) dan harganya belum mencapai keekonomian, sehingga mengganggu keberlanjutan pemanfaatan EBT karena energi fosil harganya masih lebih murah;

- d) Eksploitasi air bawah tanah yang tidak berbasis pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan sistem KARST daerah.

7. Bidang Perdagangan

- a) Belum tersedianya informasi pasar secara *realtime*;
- b) Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
- c) Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;
- d) Dominasi barang impor (barang impor lebih besar dari ekspor);
- e) Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, domestik maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan informasi pasar dan menciptakan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
- f) Belum adanya pendampingan untuk menangkap arah perdagangan berbasis *on-line* ke depan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4.0), dimana model distribusi pasar mengalami perubahan secara mendasar kedepannya.

8. Bidang Perindustrian

- a) Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;
- b) Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikat;
- c) Belum adanya data kelompok industri;
- d) Belum adanya industri minuman beralkohol tradisional yang berlisensi dan bermerek.
- e) Pengembangan Status Kawasan Industri Bolok dari Badan Pengelola menjadi Perseroan Terbatas

9. Bidang Transmigrasi

- a) Pengawasan dan pendataan transmigrasi lokal; dan
- b) Penguatan sistem dan pengelolaan transmigrasi.

D. Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Bidang Perencanaan

- a) Permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah menurunnya persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan;
- b) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, dikarenakan kesalahan penjabaran dalam merumuskan indikator kegiatan kedalam item kegiatan-kegiatan pendukung;
- c) Belum adanya kesepahaman antara pemerintah dan DPRD dalam rangka penetapan usulan hasil Musrenbang dan hasil kunjungan kerja;
- d) Belum optimalnya pemanfaatan tenaga fungsional perencana.

2. Bidang Keuangan

- a) Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi yang disebabkan oleh belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b) Belum optimal penerapan system penerimaan pendapatan daerah secara on-line dari hasil pajak dan non pajak;
- c) Rasio ketergantungan fiskal yang masih cukup besar;
- d) Belum diterapkan metode penerapan standar biaya dalam anggaran;
- e) Belum ada ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana-prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan.

3. Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a) Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan;
- b) Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi jabatan pegawai;
- c) Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional;
- d) Belum optimalnya penerapan SAKIP;
- e) Belum dilakukan rencana pengembangan sumberdaya manusia ASN;
- f) Tingginya jumlah pegawai honorer;
- g) Masih adanya ketimpangan gender dalam pengisian jabatan struktural.

4. Bidang Penelitian,Pengembangan dan fungsi lainnya

- a) Hasil litbang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
- b) Belum optimalnya hilirisasi hasil-hasil litbang Iptekin;
- c) Belum optimalnya peningkatan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP serta pendampingan untuk memfasilitasi Kabupaten/Kota;
- d) Belum optimalnya manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- e) Belum sinergisnya kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- f) Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah NTT;
- g) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rumusan rencana Kebijakan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 merupakan implementasi tahun kedua dari RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023, dan dengan memperhatikan arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP.

Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, arah pembangunan tahun 2020 adalah “Pembangunan berpusat pada Sumber Daya Manusia”. Prioritas Pembangunan daerah pada tahun rencana 2020 adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Ekonomi Pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan;
- Pencapaian dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga;
- Pengembangan industri garam sebagai industri nasional.

Secara umum arahan ekonomi daerah Nusa Tenggara Timur di tahun rencana dipusatkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan dan cepat tumbuh yang dimotori sektor pariwisata daerah sebagai *Prime mover*. Pada saat yang sama pengembangan industri pengolahan didorong untuk tumbuh agar dapat memberi nilai tambah pada komoditi pangan daerah dan memberi daya dorong terhadap upaya pemerintah membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran. Pada gilirannya diharapkan pendapatan masyarakat akan tumbuh dan konsumsi rumah tangga meningkat dan memberi stimulus bagi berkembangnya makin banyak usaha-usaha produktif masyarakat.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023, empat indikator makro ekonomi yang menjadi target pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun rencana dan tahun selanjutnya adalah sebagaimana termuat tabel berikut :

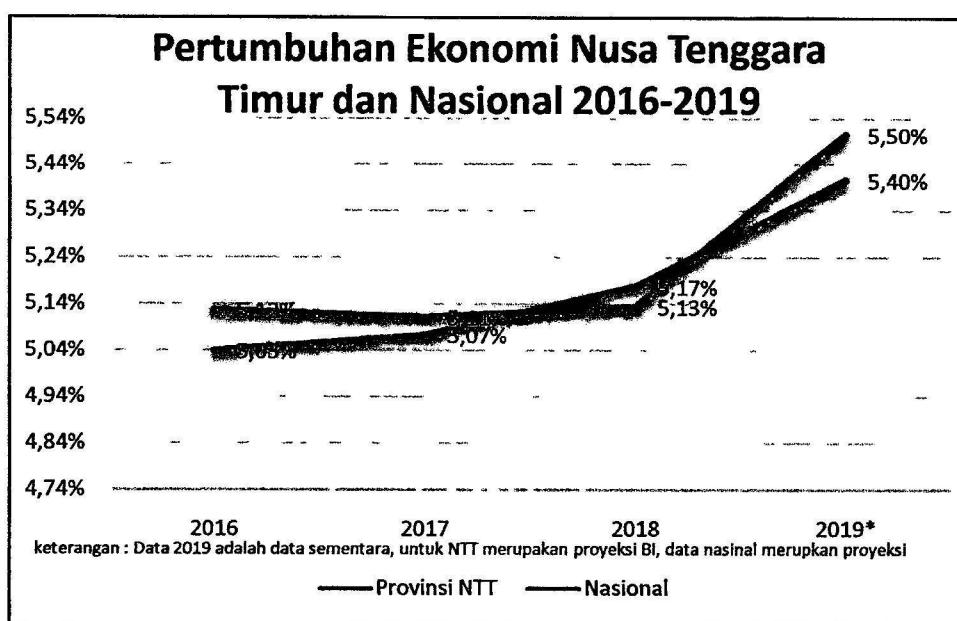
Tabel 3.1
Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019-2023

INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan ekonomi	%	5.87	6.6	7.7	8.57	10.09
Laju Inflasi	%	3	3	3	3	3
Indeks Gini	Poin	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	63.73	65.54	67.35	69.17	71
Persentase Penduduk Miskin	%	20	18	16	14	12

3.1.1. Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur.

Ekonomi Nusa Tenggara Timur sepanjang 2016-2017 menunjukkan

performa yang baik yang diindikasikan dengan laju pertumbuhan diatas rerata Nasional, kecuali pada tahun 2018 yang berada sedikit dibawah rerata Nasional. Pada tahun 2016 ekonomi NTT tumbuh 5,12% sementara



ekonomi nasional tumbuh 5,03%. Pada tahun 2017, Ekonomi NTT mengalami pelambatan dan hanya tumbuh 5,11%, namun masih lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan nasional. Pada tahun 2018, seiring dengan makin mebaiknya situasi perekonomian global, ekonomi NTT tumbuh lebih agresif dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 5.13%. pada saat yang sama ekonomi nasional juga tumbuh agresif sebesar 5.17. BI memprediksi ekonomi NTT akan tumbuh 5,50% pada akhir tahun 2019, sementara Pemerintah memprediksi pertumbuhan Nasional sebesar 5,40%.

a. PDRB Pendekatan Produksi/ Sektoral

Struktur perekonomian daerah di Nusa Tenggara Timur masih didominasi sektor-sektor ekstraktif (lapangan usaha pertanian, perikanan, kehutanan). Pada tahun 2018, sektor primer ini masih menyumbang hampir sepertiga dari total PDRB NTT. Perekonomian daerah juga didorong oleh sektor jasa, khususnya pada lapangan usaha “administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib” .

Lapangan usaha ini menyumbang 13,34% terhadap total PDRB NTT tahun 2018 yang berjumlah hampir 100 Trilyun. Tabel berikut menyajikan PDRB (Nominal) Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2018.

Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24.309.282,70	26.168.119,56	28.145.405,90
Pertambangan dan Penggalian	1.164.179,10	1.181.370,49	1.207.240,70
Industri Pengolahan	1.034.288,80	1.147.211,20	1.252.963,50
Pengadaan Listrik dan Gas	59.408,50	66.388,98	75.072,70
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48.990,40	50.483,47	53.566,90
Konstruksi	8.957.209,60	9.719.302,75	10.744.877,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.212.311,90	9.940.200,89	11.054.067,50
Transportasi dan Pergudangan	4.524.929,90	4.938.940,11	5.458.619,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	579.170,40	667.179,90	756.613,70
Informasi dan Komunikasi	5.878.512,60	6.194.544,62	6.569.830,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.357.415,10	3.735.986,04	4.066.116,90
Real Estate	2.179.209,10	2.315.518,98	2.475.130,40
Jasa Perusahaan	257.185,00	279.075,04	292.137,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.664.988,80	11.697.015,52	13.220.247,00
Jasa Pendidikan	7.976.286,50	8.769.875,91	9.466.185,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.767.997,10	1.941.036,82	2.150.818,80
Jasa lainnya	1.771.424,80	1.945.361,26	2.098.356,80
PDRB	83.742.790,80	90.757.611,54	99.081.252,10

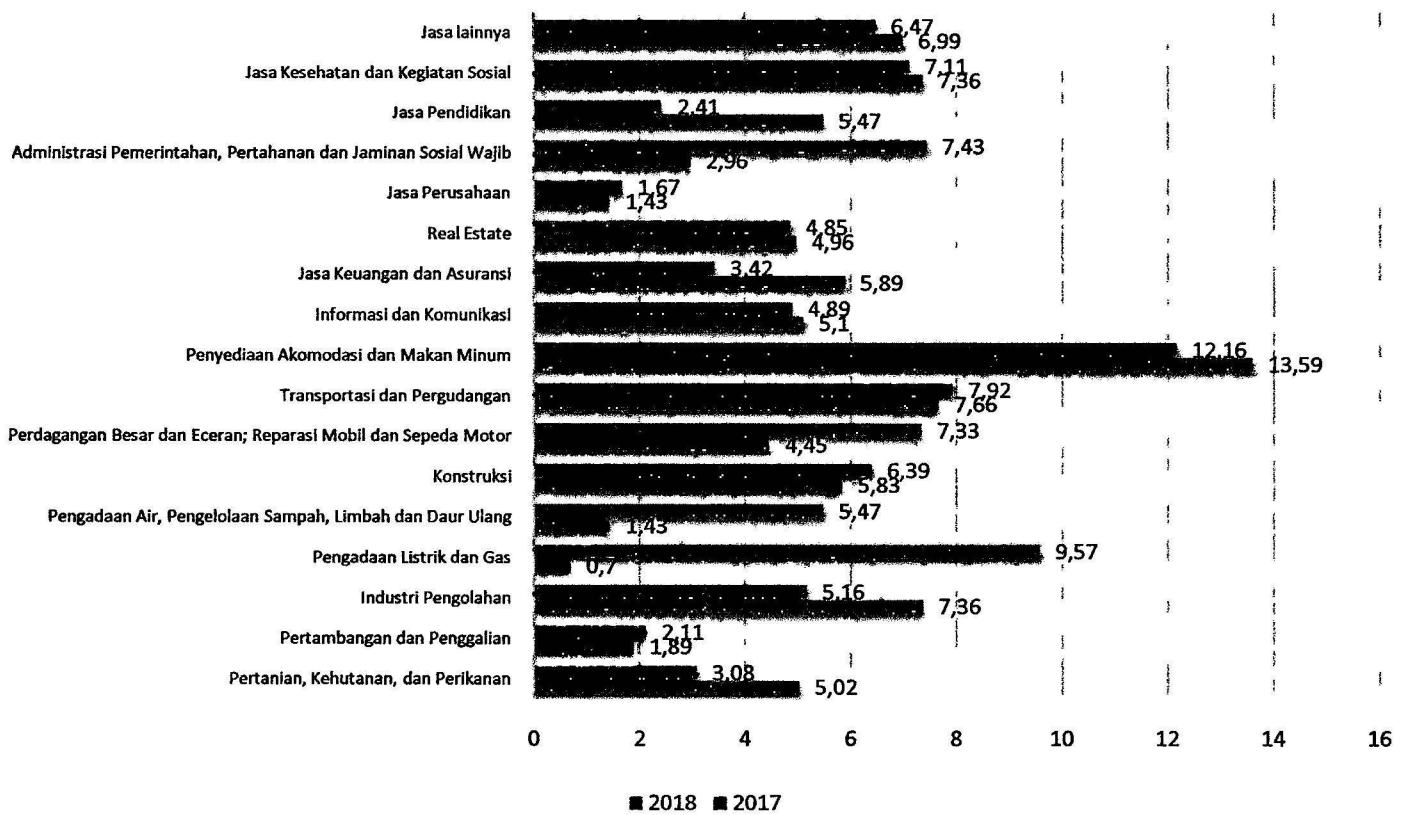
Sektor-sektor lain yang penting bagi penciptaan lapangan kerja dan pendorong pertumbuhan, seperti industri pengolahan hanya berkontribusi sebesar 1,26%, terhadap total PDRB tahun 2018.

Meskipun ekonomi daerah masih sangat tergantung pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, terlihat terjadinya pergeseran struktur perekonomian daerah. Sektor-sektor jasa terlihat makin membesar peranannya dalam perekonomian daerah sepanjang periode 2016-2018, sementara sektor primer secara perlahan berkurang dominasinya. Dibandingkan tahun 2017, pada tahun 2018, *share* sektor pertanian, perikanan dan kehutanan berkurang sebesar -0,43%. Lapangan usaha lain yang mengalami penurunan *share* adalah pertambangan dan penggalian (-0,08%), informasi dan komunikasi (-0,2%), jasa keuangan dan asuransi (-0,01%), jasa pendidikan (-0,11%), dan jasa lainnya (-0,03%). Sementara itu lapangan usaha yang membesar proporsinya dalam pembentukan PDRB dibandingkan tahun 2017 adalah konstruksi (0,13%), Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (0,20%), transportasi dan pergudangan (0,07%), penyediaan akomodasi dan makan minum (0,03%), administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib (0,45%), dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial (0,03%).

Pertumbuhan positif dan cenderung lebih baik dari rerata nasional pada periode 2016-2018, disumbangkan oleh bertumbuhnya semua sektor dan lapangan usaha yang ada di daerah, meskipun laju pertumbuhan per sektor masih bervariasi. Dengan meihat data PDRB riil periode 2016-2018, dapat disampaikan beberapa fakta berikut: Lapangan usaha dengan pertumbuhan paling tinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 12,16% pada tahun 2018. Meningkatnya arus kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir mendorong berkembangnya lapangan usaha ini. Sementara itu lapangan usaha dengan pertumbuhan paling rendah adalah jasa perusahaan yang hanya tumbuh 1,67%. Lapangan usaha dengan *share* terbesar dalam perekonomian daerah yaitu pertanian, perikanan dan kehutanan hanya tumbuh 3,08%, jauh lebih rendah dari tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,02%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lapangan usaha dengan Pertumbuhan tertinggi adalah "pengadaan listrik dan gas". Lapangan usaha ini tumbuh 9,57% pada tahun 2018 berbanding hanya 0,7% pada tahun sebelumnya. Perluasan jaringan kelistrikan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil pada kawasan Flores dan Sumba yang gencar dilaksanakan pada tahun 2018 menyumbang terhadap catatan pertumbuhan yang tinggi ini. lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang juga mencatat pertumbuhan yang tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 lapangan usaha ini tumbuh 5,47% jauh lebih tinggi dari catatan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,43%. Pembangunan besar-besaran infrastruktur pengairan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 dan 2018 berefek tumbuhnya produktivitas lapangan kerja ini. lapangan usaha yang juga mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Pada tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 2,96% dan setahun setelahnya meningkat pesat menjadi 7,3%. Upaya pemerintah melindungi masyarakat dengan merancang berbagai skema perlindungan sosial mendorong bertumbuhnya lapangan usaha ini. Selain itu, tuntutan perbaikan kinerja pelayanan publik dan upaya perbaikan manajemen pertanahan telah menyumbang terhadap bertumbuhnya lapangan usaha ini pada tahun 2018.

Pertumbuhan PDRB NTT berdasarkan Lapangan Usaha, 2017-2018



lapangan usaha yang kinerjanya lebih rendah pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh 3,08% lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 5,02%. Masih belum optimalnya infrastruktur pengairan dan perhubungan yang dibangun masih menyisakan kendala bagi sektor ini untuk dapat tumbuh lebih cepat. Kendala akses permodalan juga menjadi salah satu sebab masih belum maksimalnya sektor ini. Belum adanya tata niaga yang baik yang dapat melindungi petani, nelayan dan penggarap hutan menyebabkan masih belum optimalnya para pekerja pada lapangan usaha ini mengusahakan peningkatan skala produksinya. Ketiadaan industri pengolahan yang ada juga menyebabkan ketidakpastian pasar dan hilangnya potensi peningkatan nilai tambah pertanian.

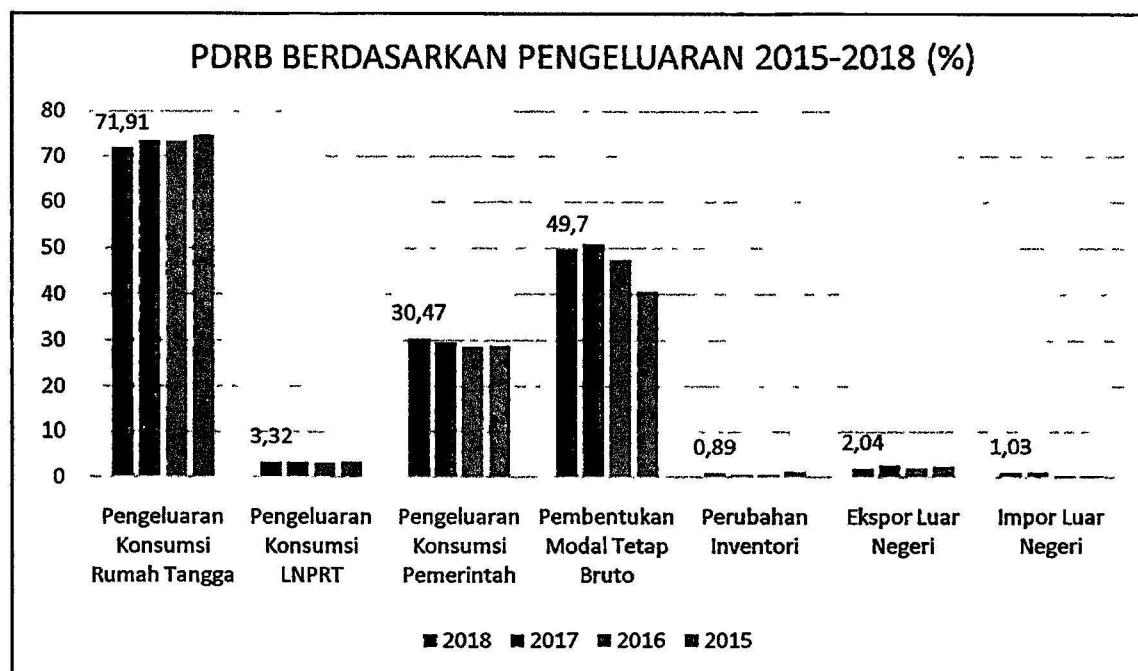
Lapangan usaha lain dengan pertumbuhan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum. Meskipun merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, terlihat bahwa capaian tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Selain itu lapangan usaha jasa pendidikan juga menunjukkan pelambatan dari pertumbuhan sebesar 5,47% pada tahun sebelumnya menjadi 2,41% pada tahun 2018. Meningkatnya kecendrungan untuk menyekolahkan anak-anak diluar NTT bisa jadi menjadi salah satu pendorong menurunnya *demand*, dan karenanya berefek pelambatan pertumbuhan, pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dan lapangan usaha jasa pendidikan sekaligus.

b. PDRB Pendekatan Pengeluaran

Nilai PDRB NTT pada (nominal) tahun 2017 adalah sebesar Rp. 92 Trilyun, tumbuh hampir 10% dibandingkan nilai PDRB pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 84 Trilyun. Sementara itu nilai riil PDRB NTT pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 62 Trilyun atau tumbuh 5,11% dari nilai tahun sebelumnya sebesar Rp. 59,6 Trilyun. Sepanjang 2016-2018, PDRB NTT tumbuh positif pada kisaran ± 5% pertahun. BI memproyeksikan ekonomi daerah pada tahun 2019 (triwulan I) tumbuh 4,90% - 5,30%.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi andalan pendorong pertumbuhan sepanjang 2015-2018 sebagaimana terlihat dari proporsinya dalam PDRB pengeluaran sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2018 konsumsi rumah tangga menyumbang 71,91% dari keseluruhan pengeluaran di NTT. Meskipun proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga sepanjang 2015 menunjukkan penurunan, penurunan tersebut sangat kecil dan belum menunjukkan pergeseran struktur pengeluaran dari PDRB NTT.

Apabila konsumsi rumah tangga menunjukkan trend menurun dalam komposisi pengeluaran sepanjang 2015 – 2018, tidak demikian halnya dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi yang meningkat sepanjang 2015-2017. Pembangunan infrastruktur perumahan,

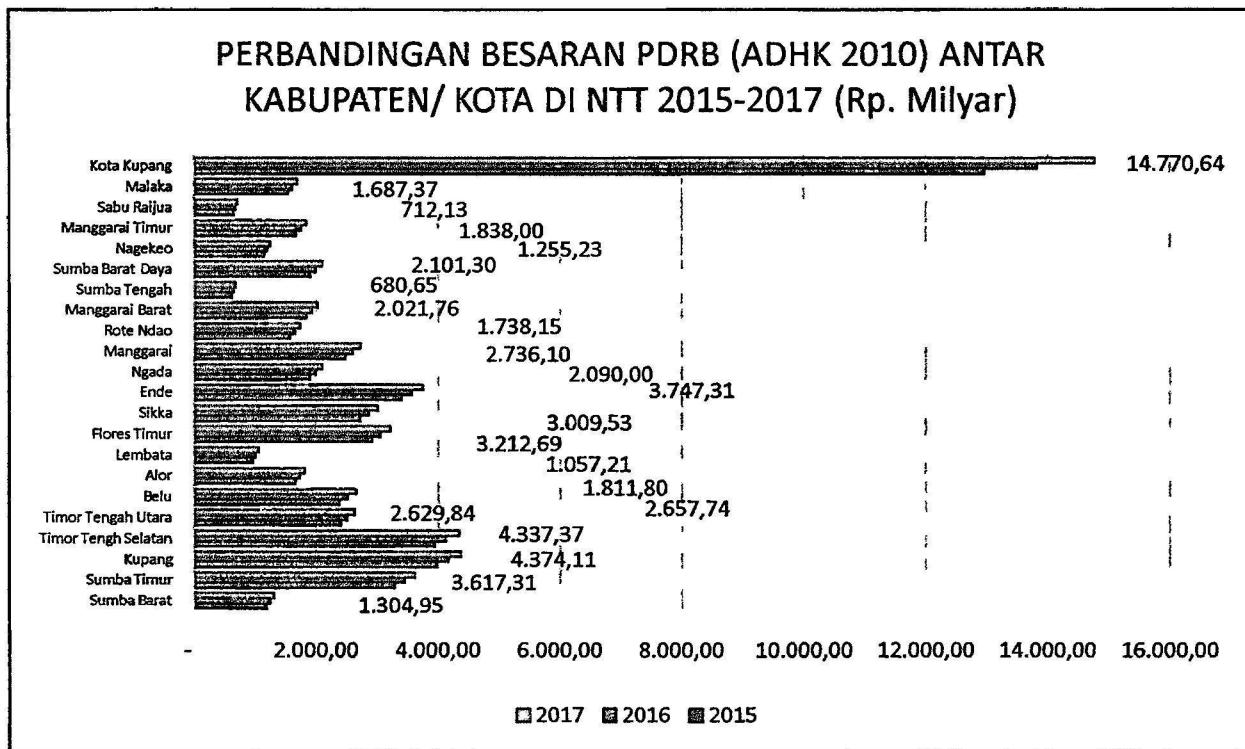


perhubungan/transportasi dan pengairan yang gencar dilaksanakan di wilayah Nusa Tenggara Timur oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah), serta swasta dalam tiga tahun tersebut mendorong terjadinya perubahan komposisi PDRB (pengeluaran) NTT.

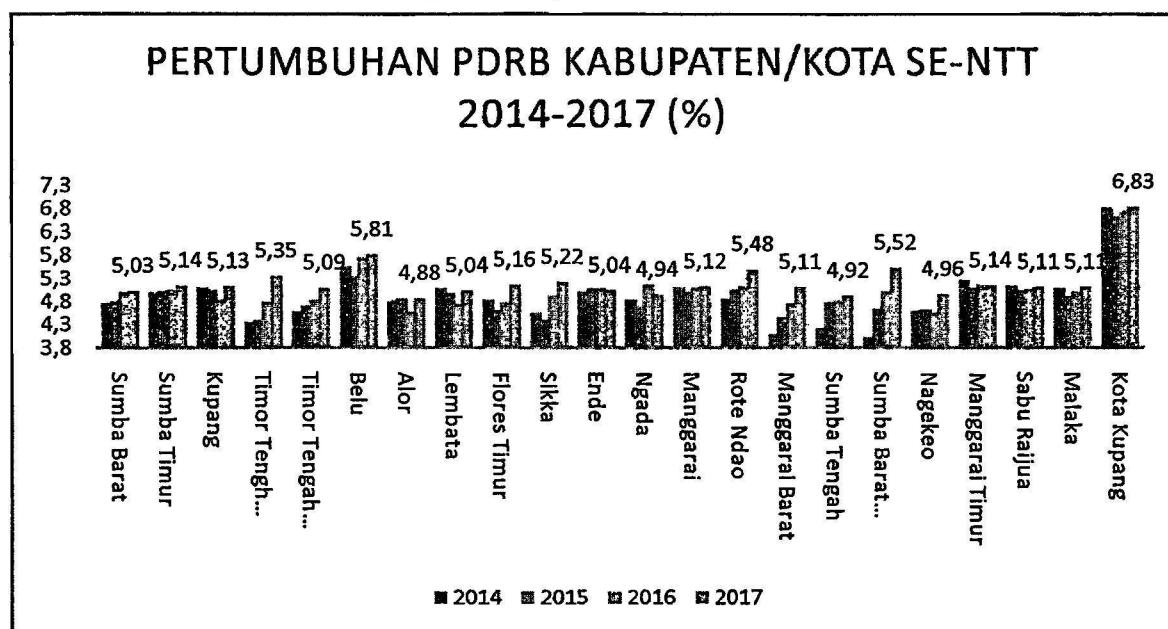
Sebagai salah satu instrumen fiskal daerah, APBD dapat digunakan untuk mendorong tumbuhnya produktivitas daerah lewat belanja pemerintah. Sepanjang periode 2015-2018 terlihat bahwa belanja pemerintah semakin meningkat proporsinya dalam pembentukan PDRB. Belanja pemerintah yang digunakan pemerintah daerah untuk merangsang tumbuhnya inisiatif-inisiatif produktif, secara total menyumbang 30,47%

terhadap pembentukan PDRB pengeluaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 65,9 Trilyun.

c. PDRB Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur



Dipilih per wilayah, kawasan-kawasan pusat aktivitas ekonomi, dan kawasan-kawasan dengan jumlah penduduk besar masih merupakan kawasan dengan nilai PDRB yang tinggi. Sepanjang 2015-2017, Kota Kupang tercatat sebagai daerah dengan PDRB terbesar diantara 22 Kabupaten/Kota di NTT diikuti Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan. Sementara Kabupaten dengan jumlah penduduk yang kecil, daerah pemekaran “baru” dan Kawasan dengan infrastruktur ekonomi yang minim masih menunjukkan kinerja PDRB yang tergolong kecil relatif terhadap Kabupaten/Kota lain di NTT. Beberapa Kabupaten tersebut, seperti Sabu Raijua, dan Sumba Tengah mencatatkan Pencapaian PDRB riil tahun 2017 dibawah Rp. 1 Trilyun.



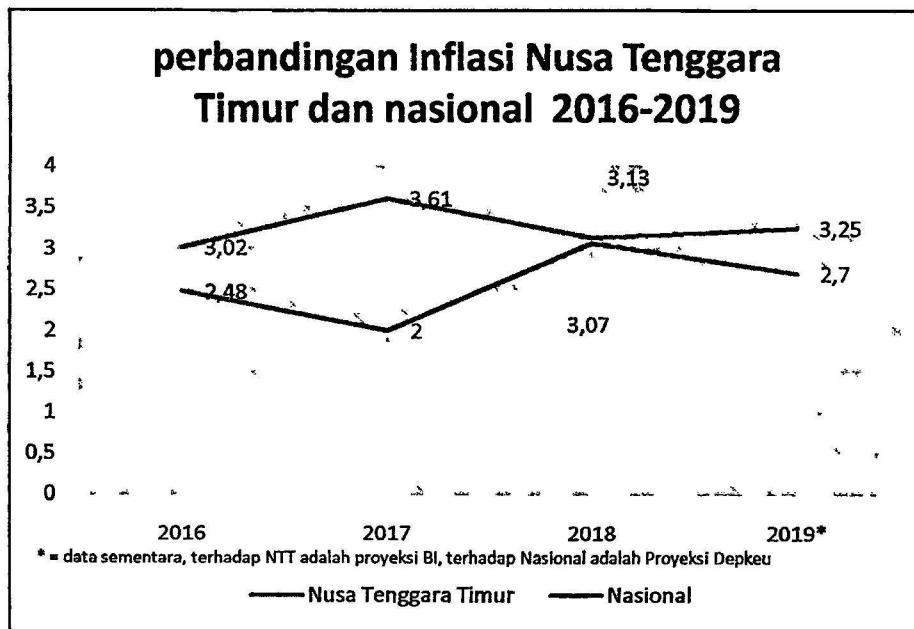
Meskipun beberapa Kabupaten/Kota memiliki angka PDRB yang tinggi relatif dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lain, namun hal ini tidaklah linear dengan catatan pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan ekonomi) daerah. Pengecualian untuk Kota Kupang yang mencatat baik angka maupun pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lain di NTT, beberapa Kabupaten menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang lebih baik dibandingkan rata-rata NTT. Kabupaten Belu, misalnya, pada tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan tertinggi kedua setelah Kota Kupang, diikuti oleh Kabupaten Rote Ndao. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Sumba Barat daya yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,52%, bandingkan dengan pertumbuhan 4,02% pada tahun 2014.

Beberapa Kabupaten region Flores seperti Kabupaten Ende, Ngada dan Manggarai Timur yang mengalami pelambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2016.

B. Inflasi

Povinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah dengan angka inflasi yang relatif rendah dibandingkan dengan rerata nasional. Pada tahun 2016, inflasi di Provinsi ini tercatat sebesar 2,48%, saat inflasi nasional

tercatat sebesar 3,02%. Pada tahun 2017 inflasi NTT turun menjadi 2% pada saat inflasi nasional adalah 3,61%. Pada tahun 2018 inflasi daerah adalah sebesar 3,13% saat inflasi nasional tercatat sebesar



3,07%. BI memproyeksikan bahwa stabilitas harga akan terjaga di NTT dengan catatan sebesar 2,7% sementara Kementerian Keuangan memproyeksikan inflasi nasional pada tahun 2019 sebesar 3,25%.

Situasi ekonomi nasional yang kondusif ditengah recovery ekonomi dunia menciptakan lingkungan yang baik untuk terjaganya harga. Stabilitas harga dikawasan ini didorong juga oleh turunnya harga kelompok komoditas pangan pasca kenaikan cukup tinggi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya stabilitas harga didorong oleh peningkatan kapasitas produksi pangan, khususnya komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah dan cabai, serta semakin lancarnya pasokan komoditas pangan seperti beras dan gula pasir. BI memproyeksikan inflasi di NTT pada akhir tahun 2019 lebih rendah dari 2018 yaitu sebesar 2,30-2,70.

Bahan pangan masih menjadi kontributor utama terjadinya inflasi di NTT. Tingginya harga ayam ras sebagai akibat naiknya harga pakan ayam turut berdampak pada inflasi di NTT yang memiliki ketergantungan atas

komoditas tersebut. Selain kelompok makanan, masih berlangsungnya kegiatan multiyears terkait pembangunan Bendungan Temef dan proyek elektrifikasi turut menyumbang pada inflasi di triwulan III 2018 dengan meningkatnya harga besi beton dan seng akibat permintaan yang tinggi.

Dalam laporan bulanan data sosial ekonomi NTT, bulan November 2018, BPS NTT mencatat jenis komoditi yang menyumbang terjadinya inflasi di NTT. Bahan makanan masih menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi di NTT dengan besar inflasi 4,84 (yo), diikuti oleh komoditi makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan laju inflasi sebesar 3,39%. Sementara sandang merupakan penyumbang terkecil terjadinya inflasi di NTT dengan angka inflasi tahunan sebesar 0,95%.

Tabel 3.3

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oktober 2018, menurut kelompok pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran	(1)	IHK			Inflasi Oktober 2018*)	Laju Inflasi tahun Kalender **)	Laju inflasi YOY ***)
		Des 2017	September 2018	Okttober 2018			
U m u m	130,68	131,24	131,18	-0,04	0,38	2,36	
1 Bahan Makanan	123,63	122,20	123,22	0,84	-0,33	4,84	
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	148,87	152,71	152,70	-0,01	2,57	3,39	
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	128,50	129,42	129,69	0,21	0,93	1,06	
4 Sandang	129,66	130,19	130,32	0,10	0,51	0,95	
5 Kesehatan	117,70	118,69	118,77	0,07	0,91	1,12	
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	132,66	134,61	134,66	0,04	1,51	1,55	
7 Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	134,68	134,46	132,18	-1,70	-1,86	1,33	

Secara umum dapat disampaikan bahwa inflasi Provinsi NTT pada triwulan III cenderung terjaga dan mengalami penurunan secara bulanan. Hal ini di sebabkan karena mulai menurunnya permintaan pasca inflasi di triwulan II 2018 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Harga daging dan telur ayam ras tercatat masih tinggi di awal triwulan III 2018 namun berangsur-angsur kembali normal hingga di bulan September 2018. Kelompok komoditas bumbu-bumbuan seperti aneka bawang, aneka cabai dan hortikultura tercatat stabil di seluruh periode triwulan III 2018. Tren ini juga diikuti oleh komoditas, beras walaupun secara tahunan mengalami inflasi namun secara bulanan relatif stabil.

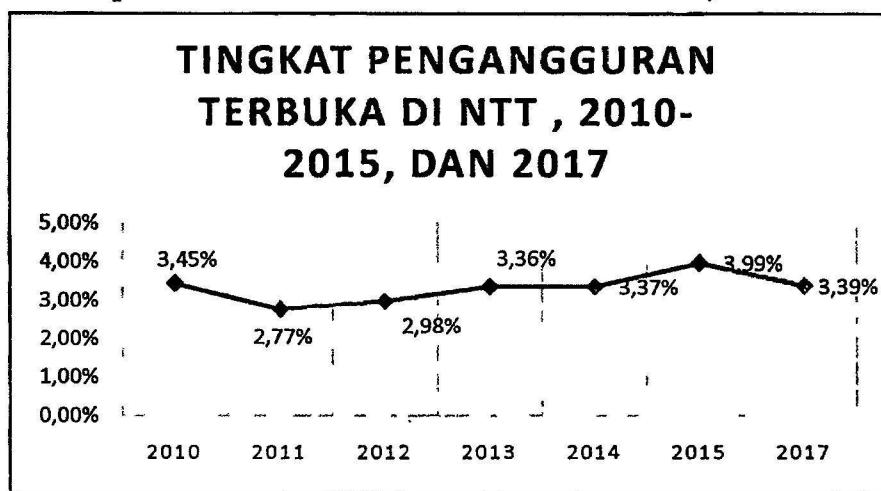
Dalam kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi NTT, Bank Indonesia memperingkatkan Potensi risiko inflasi yang perlu diwaspadai pada triwulan I Tahun 2019 adalah faktor cuaca seperti curah hujan serta gelombang tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan produksi ternak terutama ayam dan telur berkurang seiring ketahanan hewan ternak yang berkurang, selain pasokan bibit dari daerah lain yang terhambat tinggi gelombang. Di sisi lain, gelombang laut yang tinggi berpotensi menyebabkan inflasi dari sisi ikan laut tangkap yang produksinya berkurang seiring terhambatnya aktivitas melaut nelayan. Selain itu, pasokan bahan

makanan dari daerah lain juga berpotensi terhambat seiring adanya gelombang tinggi.

Situasi ekonomi nasional dan global turut andil dalam meningkatkan resiko inflasi daerah pada tahun 2019. Adanya pemilihan Presiden pada bulan april 2019 diperkirakan juga akan meningkatkan resiko inflasi di daerah. Perubahan harga minyak dunia juga dipercaya akan meningkatkan resiko inflasi daerah pada tahun fiskal 2019.

C. Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka di NTT sepanjang 2010-2017 berkisar antara 2,77% sampai dengan 3,99%, lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka secara nasional sepanjang 2010-2015 yang mencapai lebih dari 5%. Pada tahun 2010, TPT di Provinsi NTT mencapai 3,45% dari total angkatan kerja pada tahun yang sama sejumlah 2,06 juta jiwa. Pada tahun 2011, TPT NTT menurun menjadi 2,77% dari total angkatan kerja sejumlah 2,09 juta jiwa.



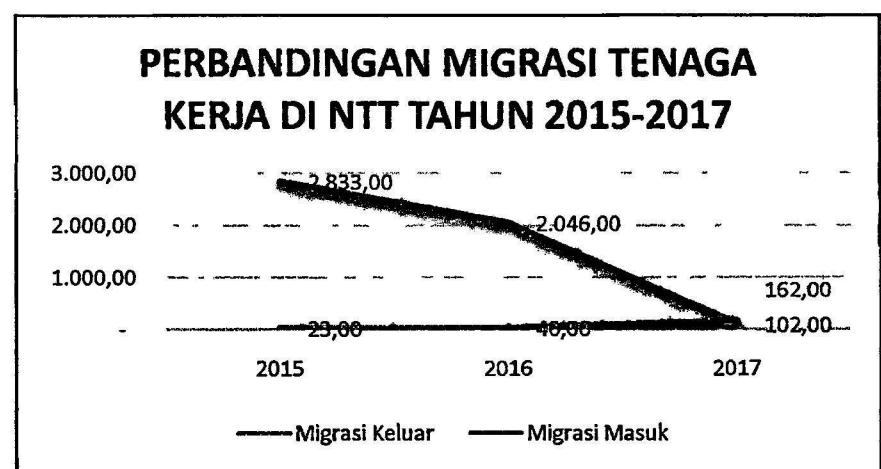
Tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 2,98% dari total angkatan kerja pada tahun 2012 sebesar 2,09 juta jiwa, dan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 3,36% dari angkatan kerja sejumlah 2,10 juta jiwa. TPT NTT menurun pada tahun 2014 menjadi 3,37% dari total angkatan kerja sebesar 2,17 juta tetapi meningkat lagi menjadi 3,99% dari total angkatan kerja sebesar 2,21 juta jiwa.

Tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 2,98% dari total angkatan kerja pada tahun 2012 sebesar 2,09 juta jiwa, dan meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 3,36% dari angkatan kerja sejumlah 2,10 juta jiwa. TPT NTT menurun pada tahun 2014 menjadi 3,37% dari total angkatan kerja sebesar 2,17 juta tetapi meningkat lagi menjadi 3,99% dari total angkatan kerja sebesar 2,21 juta jiwa.

Belum tumbuhnya sektor-sektor ekonomi sekunder (industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran) dan jasa menyebabkan ekonomi belum beroperasi secara penuh (*full employment*) dan menyumbang terhadap tingkat pengangguran terbuka di NTT.

Angka pengangguran yang relatif rendah di NTT disebabkan salah

satunya oleh migrasi angkatan kerja keluar daerah. BPS NTT mencatat angka migrasi keluar yang cukup besar pada tahun 2015-2016 dan menurun drastis pada tahun 2017. Sementara

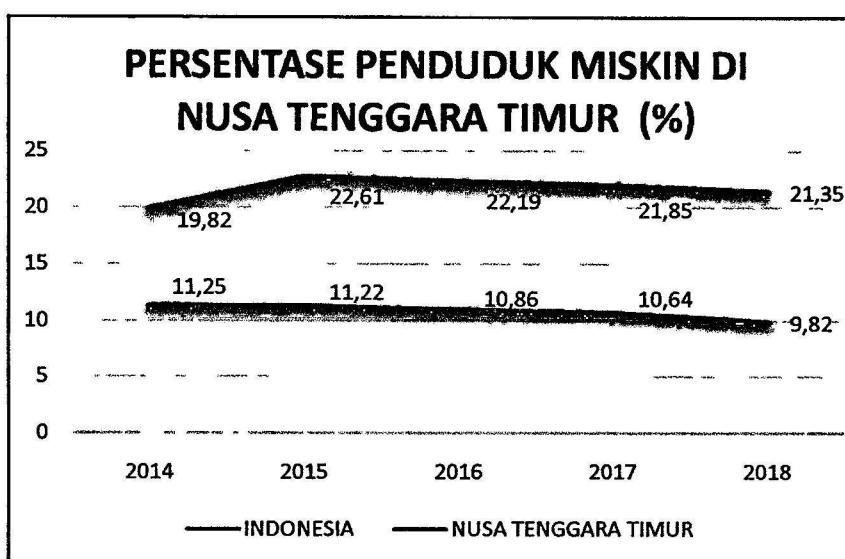


itu pada kurun waktu yang sama, migrasi tenaga kerja yang masuk ke wilayah NTT hanya sebanding dengan 1% migrasi tenaga kerja keluar NTT. Kebijakan nasional untuk menertibkan pengiriman tenaga kerja keluar negeri dan terbukanya lapangan kerja daerah sebagai imbas stabilnya ekonomi regional serta masuknya investasi di NTT khususnya yang berhubungan dengan industri pariwisata, menyumbang terhadap penurunan tajam angka migrasi keluar pada tahun 2017.

D. Kemiskinan

Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam daerah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di NTT mencapai 21,25% atau 1,1 juta jiwa. Lebih dari seperlima dari total penduduk NTT masuk dalam kategori penduduk miskin.

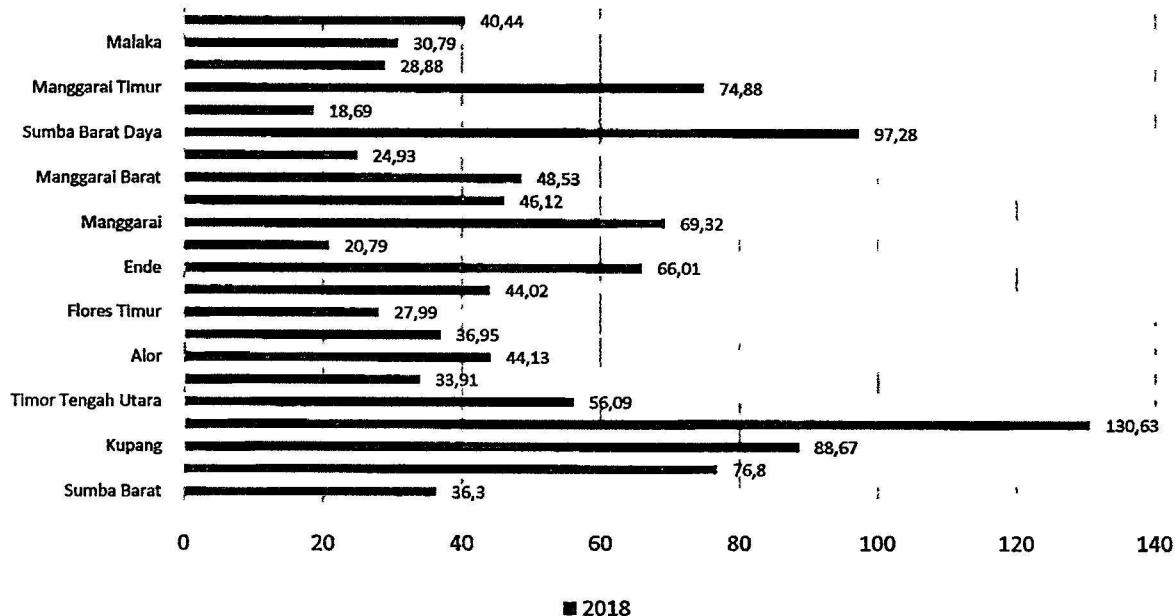
Hanya provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki Persentase penduduk miskin lebih besar daripada NTT. Data tahun 2014 - 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurun perlahan dengan pengecualian pada tahun 2015 yang



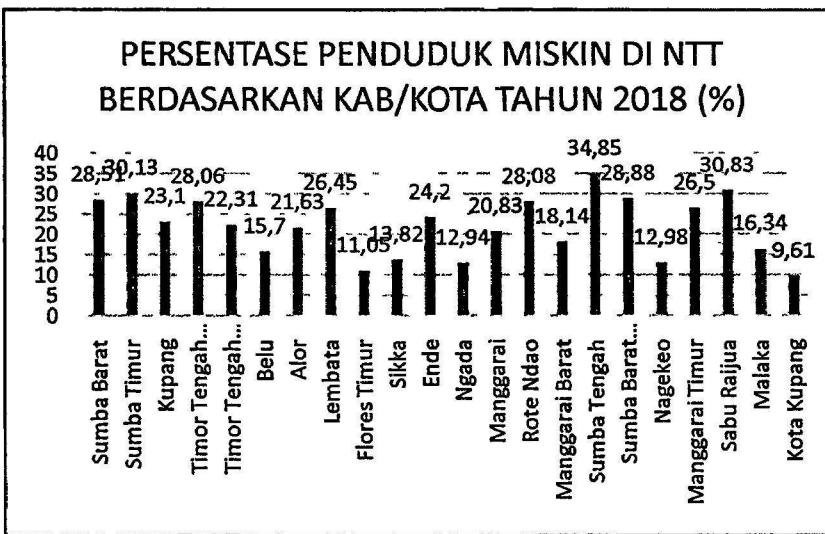
justru meningkat saat secara nasional persentase penduduk miskin menurun. Yang menarik adalah penurunan persentase penduduk miskin di NTT masih lebih lambat daripada persentase pendurunan nasional. Sepanjang 2014-2018 penurunan kemiskinan nasional pertahun berkisar antara 0,2 sampai 0,8 poin persen sementara di NTT penurunan kemiskinan hanya berkisar -3 sampai 0,3 poin persen. Catatan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa baik persentase penduduk miskin, maupun kinerja pengentasan kemiskinan di NTT masih jauh lebih rendah dari rerata nasional.

Dipilah per kabupaten/kota, Kabupaten Kupang tercatat sebagai Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten ini mencapai 130 ribu jiwa. Kabupaten Sumba Barat Daya berada di posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 mencapai hampir 100 ribu jiwa. Sedangkan kabupaten Nagekeo tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terkecil. Pada tahun 2018 penduduk miskin di Nagekeo tercatat sebanyak 18 ribu jiwa. Kabupaten berikutnya dengan jumlah penduduk miskin terkecil kedua adalah ngada dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 20 ribu jiwa.

JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI NTT BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018 (RIBU JIWA)



Data mengenai Persentase penduduk miskin di NTT berdasarkan kabupaten/ kota menunjukkan postur yang hampir serupa dengan pengecualian Kota Kupang yang mencatat persentase terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi NTT. Lokasi Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di NTT menyebabkan rendahnya persentase kemiskinan. Demikian halnya dengan Flores Timur yang mencatat persentase penduduk miskin kedua di NTT. Sejarah panjang Flores Timur sebagai pusat penyebaran pendidikan di Flores menyebabkan kabupaten ini tumbuh menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang penting pada kawasan Flores dan sekitarnya. Hal ini berimbang pada relatif rendahnya kemiskinan di Kabupaten ini dibandingkan Kabupaten lain di



daratan Flores maupun Sumba dan Timor. Hal ini mengkonfirmasi postur permasalahan kemiskinan di Indonesia yang secara umum yang cenderung terjadi di daerah perdesaan.

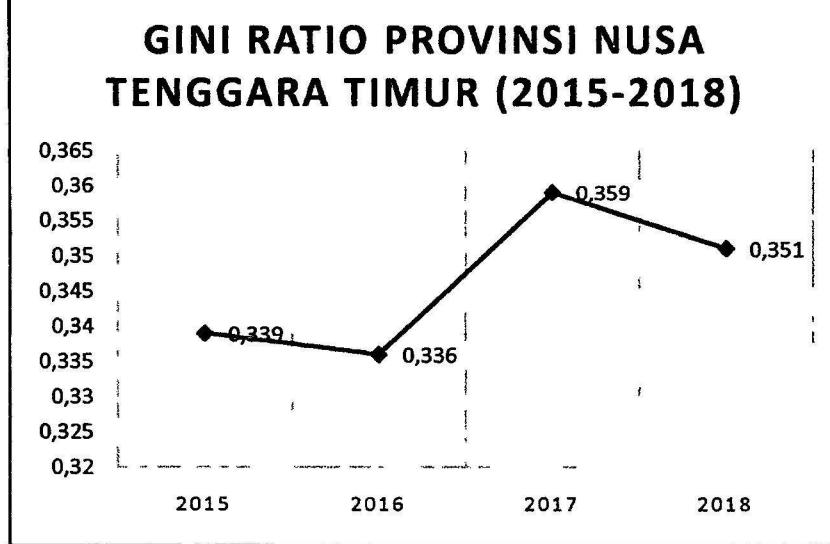
Pada tahun 2018 kabupaten dengan proporsi penduduk miskin terbanyak terhadap total penduduk adalah kabupaten Sumba Tengah. Lebih dari sepertiga penduduk di kabupaten ini masuk dalam kelompok miskin. Kabupaten Sabu Raijua menjadi kabupaten kedua dengan prosentase penduduk miskin tertinggi.

Pada tahun 2018, 30,83% dari total penduduknya termasuk dalam kelompok miskin. Karakteristik kedua kabupaten yang sama-sama merupakan daerah Otonom yang relatif baru (Sumba tengah merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat; dan Sabu Raijua merupakan pemekaran dari Kabupaten Kupang), masih membutuhkan waktu untuk bertransformasi menjadi daerah yang penting bagi perdagangan dan aktivitas produktif, dan karenanya dapat memberikan sumbangan bagi upaya pengentasan penduduk miskin di NTT.

E. Ketimpangan

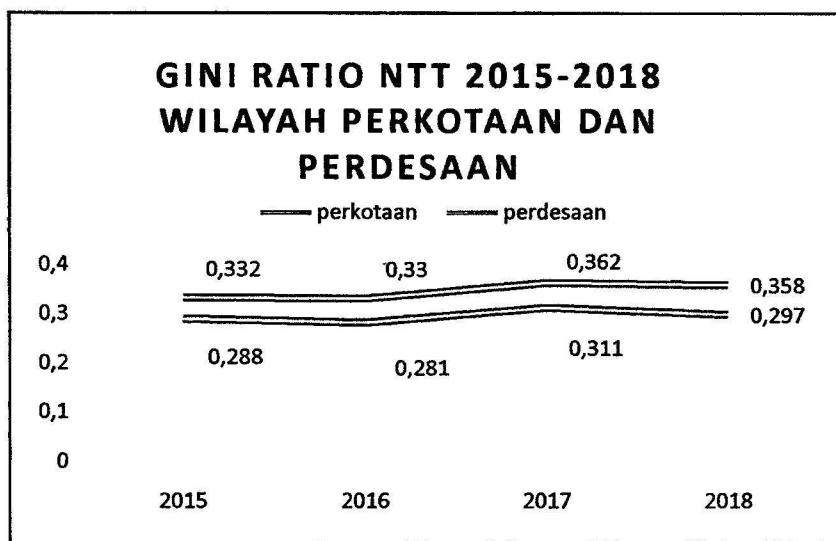
Meskipun termasuk dalam kelompok daerah paling miskin di Indonesia, Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kelompok yang paling kecil ketimpangannya. Pada tahun 2018 (Maret, *yo_y*) gini ratio NTT adalah 0,351, lebih rendah dari gini ratio nasional yang pada tahun yang sama mencapai 0,389. Meskipun demikian terdapat catatan mengenai upaya mengurangi ketimpangan di provinsi NTT. Sepanjang 2015-2018

menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2015 (perbandingan bulan Maret *year on year*) angka gini ratio mencapai 0,39 menurun pada tahun 2016 menjadi 0,336. Namun pada tahun 2017 meningkat menjadi 0,359, kemudian menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 0,351.



Selanjutnya, terlihat bahwa ketimpangan relatif lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Sepanjang 2015-2018,

ketimpangan di wilayah perkotaan di NTT selalu lebih tinggi dibandingkan ketimpangan di wilayah perdesaan. Perbedaan angka gini ratio antara perkotaan dan perdesaan bisa mencapai 0,4 poin sebagaimana yang terlihat pada grafik di atas.



3. Tantangan Perkonomian Daerah

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Nusa Tenggara Timur antara lain :

- 1) Ekonomi Nusa Tenggara Timur sepanjang 2014-2017 menunjukkan performa yang baik yang diindikasikan dengan laju pertumbuhan diatas rerata Nasional, kecuali pada tahun 2018 yang berada sedikit dibawah rerata Nasional, dimana nasional tumbuh 5,17% sedangkan Nusa Tenggara Timur 5,13%, namun pada tahun 2019 diperkirakan Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur akan tumbuh sebesar 5,50% di atas nasional yang diprediksi tumbuh 5,40%. Namun demikian pertumbuhan ekonomi ini belum mampu mengurangi secara signifikan kesenjangan pendapatan perkapita Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata pendapatan per kapita nasional;
- 2) Ketersediaan infrastruktur belum menjangkau seluruh wilayah kepulauan dan masih ada infrastruktur yang telah terbangun kualitasnya rendah sehingga tidak berfungsi optimal dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan daya tarik investasi;
- 3) Selain pertanian, sebagian besar kebutuhan lainnya masih didatangkan dari luar Nusa Tenggara Timur. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat;
- 4) Semua kabupaten perekonomiannya masih didominasi oleh sektor primer, kecuali Kota Kupang yang digerakkan oleh sektor tersier. Konsentrasi ekonomi terbesar juga di Kota Kupang, sehingga perlu dikembangkan pusat-pusat ekonomi di luar Kota Kupang;
- 5) Percepatan pelaksanaan kebijakan pembangunan holistik-tematik, integratif dan spasial karena sebagian pembangunan belum secara konsisten mengacu pada arahan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 6) Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pemanfaatan sumberdaya pembangunan belum efisien dan efektif dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Kebijakan afirmatif pembangunan kawasan perbatasan Negara, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), provinsi kepulauan, dan arahan pembangunan sesuai Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, yaitu Menuju Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, adil dan berkesinambungan;
- 8) Kemampuan percepatan pembangunan sumberdaya manusia belum mencapai target sehingga berdampak pada lemahnya daya saing tenaga kerja dan terbatasnya kemampuan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendanaan Pembangunan

Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan RKPD 2020 diarahkan pada kualitas belanja sesuai prioritas daerah tahun 2020 untuk pencapaian sasaran RPJMD 2018-2023, khususnya untuk tahun 2020 dengan prinsip *money follows program* melalui pendekatan *Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)*.

Untuk mencapai indikator dan target yang telah ditetapkan, perlu dilakukan sinkronisasi serta sinergi tidak saja dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan, namun juga dalam hal sinergi dan sharing pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, lembaga mitra pembangunan, swasta, dll.

3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pemberian) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pemberian) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan terukur. Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan tahapan : 1) evaluasi kinerja pendapatan daerah untuk tahun rencana, 2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pemberian), dan 3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer daerah.

3.2.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2018

Tabel 3.4 memperlihatkan persentase realisasi pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 3.4.
Percentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2018

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018 ¹
	PENDAPATAN	98,88	104,51	98,31	97,39
1	Pendapatan Asli Daerah	101,38	99,18	104,50	100,54
	Pajak Daerah	100,60	102,17	104,13	104,62
	Retribusi Daerah	85,92	88,31	96,23	104,28
	Hasil pengelolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	99,97	99,36	99,43	98,57
	Lain-lain PAD yang Sah	112,98	87,90	110,48	79,90
2	Dana Perimbangan	96,64	106,75	96,88	96,87
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	69,25	110,09	100,88	74,63
	Dana Alokasi Umum	100,00	116,79	100,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	80,88	98,53	93,76	94,86
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	100,13	90,87	49,17	26,86
	Dana Hibah		62,68	14,07	26,58
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100,95	100	100,00	
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	107,58	-		

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

¹) : Data sementara

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT yang ditunjukkan oleh tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan sejak tahun 2015 tidak pernah mencapai target, kecuali pada tahun 2016 melampaui target yang ditetapkan. Realisasi PAD setiap tahun selalu melampaui target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2017. Namun demikian, kinerja pengelolaan dana transfer daerah selalu di bawah target yang ditetapkan, khususnya DAK. Yang juga perlu menjadi perhatian, memperhatikan data realisasi PAD, perlu dihitung kembali potensi pendapatan daerah, karena data yang ada menunjukkan kinerja pengelolaan PAD masih memungkinkan untuk ditingkatkan.

3.2.1.2. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 3.5 menunjukkan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi NTT tahun 2013-2018 sebesar 15,12%, dengan proporsi terbesar dari Pendapatan Dana Perimbangan sebesar 29,51%, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 16,84%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 35,12%. Kondisi ini berdampak pada kemandirian daerah di mana NTT dinilai masih sangat bergantung terhadap Dana Perimbangan sehingga diperlukan upaya-upaya khususnya untuk meningkatkan PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tabel 3.5.
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2013-2018

No Urut	URAIAN	TA. 2013	TA. 2014	TA. 2015	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	PENDAPATAN	2.387.439.508.423	2.787.513.320.677	3.315.669.415.296	3.875.554.164.669	4.700.213.492.589	4.782.190.212.593	15,12
	1 Pendapatan Asli Daerah	523.201.203.067	763.300.806.702	882.315.240.378	995.186.120.952	1.047.491.567.026	1.096.370.228.577	16,84
	a. Pendapatan Pajak Daerah	363.720.612.876	559.803.345.782	662.667.383.501	745.481.335.512,06	814.122.727.711	886.157.779.773	20,08
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	8.589.942.871	18.447.549.341	32.888.198.526	40.418.137.792	24.266.495.631	28.670.494.733	38,82
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	53.317.240.346	63.445.962.924	71.557.011.784	77.139.883.317	67.209.561.753	72.415.455.930	6,89
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	97.573.406.974	121.603.948.655	115.202.646.567	132.146.764.331	141.892.781.931	129.126.498.141	6,49
	Pendapatan Dana Perimbangan	1.165.848.622.793	1.282.745.347.275	1.461.922.422.707	2.839.657.758.567	3.643.692.862.110	3.680.327.636.180	29,51
	a. Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	84.034.259.793	76.821.847.275	60.821.837.707	91.213.201.567	87.876.729.182	64.495.737.073	(1,94)
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.003.991.703.000	1.131.687.590.000	1.300.445.875.000	1.337.091.848.000	1.784.462.326.000	1.827.412.640.000	13,26
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	77.822.660.000	74.235.910.000	100.654.710.000	1.411.352.709.000	1.771.353.806.928	1.788.419.259.107	271,92
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	698.389.682.563	741.467.166.700	971.431.752.211	40.710.285.150	9.029.063.453	5.492.347.836	(35,12)
	a. Dana Kontingen/ Penyeimbang	-	-	-	-	-	-	-
	b. Dana Hibah	-	2.772.837.975	7.646.336.929	6.871.462.150	1.529.063.453	5.492.347.836	69,41
	c. Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	e. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	692.946.195.000	733.921.280.000	963.785.415.282	33.838.823.000	7.500.000.000	-	(47,42)
	f. Bantuan dari Pihak Ketiga	5.443.487.563	4.773.048.725	-	-	-	-	(2,46)

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , diolah.

3.2.1.3. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

Rata-rata belanja tidak langsung dihitung agar bisa memperkirakan besarnya belanja tidak langsung yang harus dianggarkan daerah untuk tahun rencana. Pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung untuk tahun 2014 – 2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6. berikut.

Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja 2014-2018

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
BELANJA	22,2	-25,37	32,81	22,95	93,39	29,196
Belanja Tidak Langsung	11,68	14,5	41,63	24,45	94,3	37,312
Belanja Pegawai	11,09	3,62	26,2	122,94	97,83	52,336
Belanja Bunga	-		-			
Belanja Subsidi	-		-			
Belanja Hibah	-99,8	25,44	28,18	-7,46	93,44	7,96
Belanja Bantuan Sosial	9,64	-20,01	8,54	113,39	99,82	42,276
Belanja Bagi Hasil	110,77	11,17	47,82	6,73	88,01	52,9
Belanja Bantuan Keuangan	124,71	-5,89	26,24	-83,29	100	32,354
Belanja Tak Terduga	439	-68,2	243,32	275	3,43	178,51
Belanja Langsung	44,75	32,78	25,25	20,31	91,64	42,946
Belanja Pegawai	-23,58	18,68	20,78	40,93	95,87	30,536
Belanja Barang dan Jasa	26,42	22,77	25,55	39,93	90,45	41,024
Belanja Modal	111,25	46,49	30,5	-4,42	92,77	55,318

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

3.2.1.4. Analisis Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Analisis sumber – sumber pendapatan daerah dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah sehingga bisa menjadi salah satu dasar pengambilan kebijakan, apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan target dan realisasi pendapatan daerah. Optimalisasi dimaksud terutama dilakukan pada komponen pendapatan yang relatif masih memberikan kontribusi kurang signifikan.

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi Dana Perimbangan sampai dengan tahun 2018 sebesar 76,96% dari total pendapatan daerah. Hal ini masih ditambah dengan dana transfer lainnya yaitu Dana Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Tabel 3.7.
Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 2013-2018

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	PENDAPATAN	100	100	100	100	100	100
	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	21,91	26,74	31,4	25,32	22,29	22,93
	Pajak Daerah	15,23	19,97	23,52	19,03	17,32	18,11
	Retribusi Daerah	0,36	0,96	1,17	0,83	0,52	0,6
	Hasil pengelolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,23	2,31	2,54	2,21	1,43	1,51
	Lain-lain PAD yang Sah	4,09	3,5	4,17	3,25	3,02	2,7
	Dana Perimbangan	48,83	46,54	51,89	73,53	77,52	76,96
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	3,52	2,66	2,16	2,21	1,87	1,35
	Dana Alokasi Umum	42,05	41,18	46,16	34,32	37,97	38,21
	Dana Alokasi Khusus	3,26	2,7	3,57	37,09	37,69	37,4
	<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	29,25	26,72	34,4	1,14	0,19	0,11
	Dana Hibah					0,03	0,11
	Dana Darurat						
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya						
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29,02	26,05	0,19	0,27	0,16	-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya						
	Pendapatan dari Jaminan Kesehatan						
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	0,23	0,23	34,21	0,87	-	-

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah.

Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berupaya melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan derajat otonomi fiskalnya, antara lain dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah dan hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3.2.1.5. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasinya.

Tabel 3.9.
Kinerja Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah 2014-2018

No Urut	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	PENDAPATAN					
1	1 Pendapatan Asli Daerah	101,42	98,88	104,51	97,98	97,39
	a. Pendapatan Pajak Daerah	103,88	101,12	99,18	103,10	100,54
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	101,99	100,60	102,17	104,11	104,62
	c. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	69,85	85,92	88,31	96,26	104,28
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	100,00	99,97	99,36	99,43	98,57
		126,57	110,81	87,90	100,45	79,9
2	2 Pendapatan Dana Perimbangan	100,28	96,64	106,75	96,86	96,87
	a. Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	104,90	69,25	110,09	100,88	74,63
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	100,00	100,00	116,79	100,00	100,00
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	100,00	80,88	98,53	93,70	94,86
3	3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	100,96	100,36	90,87	46,87	26,58
	a. Dana Kontingen/ Penyeimbang	-	-	-	-	-
	b. Dana Hibah	-	-	-	-	26,58
	c. Dana Darurat	-	-	-	-	-
	d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-
	e. Dana Penyesuaian dan Ottonomi	102,50	100,95	100,00	100,00	-
	f. Bantuan dari Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
2	BELANJA	92,74	94,45	97,03	92,55	93,39
1	1 Belanja Tidak Langsung	95,85	98,72	98,90	95,53	94,30
	Belanja Pegawai/Personalia	95,18	100,16	99,06	95,95	97,83
	Belanja Hibah	100,30	100,46	101,03	96,92	93,44
	Belanja Bantuan Sosial	62,64	73,96	100,00	92,54	99,82
	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	89,46	95,71	90,94	91,58	88,01
	Belanja Bantuan Keuangan	85,59	85,37	94,92	95,37	100,00
	Belanja Tidak Terduga	79,59	14,01	57,47	1,15	3,43
2	2 Belanja Langsung	87,60	88,37	93,79	87,11	91,64
	Belanja Pegawai/Personalia	96,82	94,62	97,63	94,65	95,87
	Belanja Barang dan Jasa	87,91	88,85	91,91	90,35	90,45
	Belanja Modal	85,69	87,06	95,12	79,77	92,77
3	3 Surplus (Defisit) (1-2)	8,68	4,43	7,48	5,43	23,30
4	PEMBIAYAAN	99,09	100,44	99,06	98,73	99,26
1	1 Penerimaan Pembiayaan	99,31	99,63	99,34	99,08	100,00
2	2 Penegeluaran Pembiayaan	99,71	98,00	99,93	99,99	69,39
5	5 Pembiayaan Netto	99,09	100,44	99,06	98,73	99,26
6	6 Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan (SILPA) (3+5)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPKD, diolah.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Menentukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2020 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan

arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun berkisar \pm 5,0%-5,2%, Namun tahun 2020 diproyeksikan meningkat menjadi 6,6% dengan pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang.
- 2) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilihat dari Gini Ratio, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah Nasional. Namun demikian perlu diupayakan agar ada penurunan Gini Ratio saat ada perbaikan kesejahteraan dari peningkatan pendapatan masyarakat.
- 3) Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 22,93% pada TA. 2018. Untuk itu sesuai amanat RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD.
- 4) Memperhatikan indikasi rencana pendapatan daerah pada RPJMD 2018-2023, maka terdapat selisih antara indikasi pendanaan jangka menengah dan hasil proyeksi pendapatan daerah. Hal ini disebabkan hasil kajian dan klarifikasi terdapat prospek pendapatan yang cukup baik pada tahun 2020. Realisasi Pendapatan TA. 2018, APBD TA. 2019, RPJMD 2020 dan Proyeksi RKPD 2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10.
Realisasi Pendapatan TA. 2018, APBD TA. 2019,
RPJMD 2020 dan Proyeksi RKPD 2020

Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) APBD 2019 - RKPD 2020	% 2019 - RKPD 2020
		REALISASI TA. 2018	TA. 2019	RPJMD UTK 2020	PROYEKSI 20220		
1	1	2	3	4	5	6	
4	PENDAPATAN DAERAH	4.782.190.212.593	5.347.158.022.105	5.613.609.255.928	5.653.645.247.522	306.487.225.417	5,73
4.1.	PAD	1.096.370.228.577	1.131.943.378.705	1.612.495.630.000	1.438.430.604.122	306.487.225.417	27,08
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	866.157.779.773	876.340.119.705	940.235.180.736	1.016.455.414.000	140.115.294.295	15,99
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	28.670.494.733	30.540.465.000	438.408.844.341	97.560.571.800	67.020.106.800	219,45
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG	72.415.455.930	80.950.000.000	84.997.500.000	131.550.000.000	50.600.000.000	62,51
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	129.126.498.141	144.112.794.000	148.854.104.923	192.864.618.322	48.751.824.322	33,83
4.2.	DANA PERIMBANGAN	3.680.327.636.180	4.174.054.978.000	3.959.130.767.130	4.174.054.978.000	-	-
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	64.495.737.073	63.170.495.000	88.152.208.680	63.170.495.000	-	-
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.827.412.640.000	1.875.182.301.000	1.891.372.082.400	1.875.182.301.000	-	-
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.788.419.259.107	2.235.702.182.000	1.979.606.476.050	2.235.702.182.000	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.492.347.836	41.159.665.400	41.982.858.798	41.159.665.400	-	-
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	5.492.347.836	41.159.665.400	41.982.858.798	41.159.665.400	-	-
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS					-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	4.782.190.212.593	5.347.158.022.105	5.613.609.255.928	5.653.645.247.522	306.487.225.417	5,73

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT

Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Untuk itu ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Peningkatan tata kelola pendapatan melalui:
 - Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
 - Pembenahan manajemen data penerimaan PAD
 - Optimalisasi Samsat Online untuk pajak daerah dan penerapan aplikasi online untuk seluruh pendapatan daerah;
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah melalui:
 - a) Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
 - b) Mengintensifkan penerimaan retribusi daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah secara profesional;
 - Memaksimalkan Kapasitas produksi dan produktivitas UPTD potensial
 - Kemitraan swasta dalam pengelolaan aset daerah
 - Penyertaan modal pada Bank NTT dan Lembaga keuangan lainnya yang potensial, termasuk BUMD dan BUMDes
 - Pengembangan kawasan wisata
 - Perbaikan sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai
3. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah seperti marungga, peternakan, garam, pembangunan feed mil, dll
4. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian yang mengalokasikan DAK, dan menyerap DAK dengan optimal sekaligus melakukan pelaporan DAK dengan baik
5. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber dana kerjasama hibah luar negeri dan lembaga internasional
6. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 :

- 1) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 2) Belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total APBD, fungsi kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD.
- 3) Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja *money follows program*, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
- 4) Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator RPJMD untuk tahun 2020.
- 5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama antar sektor, provinsi-kabupaten, ataupun antar perangkat daerah.
- 6) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan dan prevalensi stunting, untuk itu akan dilakukan penanganan terhadap rumah tidak layak huni yang tersebar di 22 kabupaten/kota sesuai sebanyak 6.125 rumah.
- 7) Sebagaimana pendapatan, terdapat perbedaan antara arahan RPJMD untuk belanja daerah tahun 2020 dengan proyeksi belanja daerah dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Proyeksi belanja daerah dalam RPJMD untuk tahun 2020 sebesar Rp 5,636 Trilyun lebih sedangkan proyeksi belanja RKPD tahun 2020 sebesar Rp 6,895 Trilyun lebih bertambah Rp.1,259 Trilyun lebih dari proyeksi belanja dalam RPJMD untuk tahun 2020.

Belanja Daerah pada tahun 2020 diarahkan untuk membiayai :

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
 - Menunjang pencapaian indikator dan target RPJMD 2018-2023 dan sinergi RKP 2020;
 - Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan yang bersifat multi – years;

- Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2019, Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan LHP BPK
 - Belanja perangkat daerah yang tidak mendukung secara langsung pencapaian indikator dan target RPJMD dianggarkan secara efisien dan efektif
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
 3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari kabupaten/kota kepada provinsi untuk bersama - sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1) Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka estimasi.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan dilakukan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Pencairan dilakukan terhadap dana cadangan yang sudah dibentuk sesuai Peraturan Daerah.

c) Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan untuk menampung penerimaan akibat pinjaman daerah yang dilakukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan sesuai target RPJMD 2018-2023.

d) Penerimaan Pokok Pinjaman Daerah

Diarahkan pada penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4.

2) Pengeluaran Pembiayaan

a) Penyertaan Modal

Penyertaan modal dilakukan kepada perusahaan daerah/BUMD/lembaga lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah daerah harus melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah akan memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Mengingat struktur RKPD Tahun 2020 mengalami defisit, maka perlu menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk penyesuaian/rasionalisasi terhadap berbagai usulan belanja sehingga defisit yang terjadi bisa ditutup oleh pembiayaan netto.

Memperhatikan Tabel 3.11 terlihat bahwa masih terdapat defisit yang cukup besar pada RKPD Tahun 2020, karena itu akan ditentukan prioritas program dan kegiatan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta disesuaikan dengan pendapatan defenitif yang berasal dari Dana Perimbangan dan perkembangan lebih lanjut.

Tabel 3.11
Realisasi Belanja dan Pembiayaan TA. 2018, APBD TA. 2019, RPJMD 2020 dan Proyeksi RKPD 2020

Nomor Urut	Uraian	ANGGARAN (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) APBD 2019 - RKPD 2020	% 8
		REALISASI TA. 2018	TA. 2019	RPJMD UTK 2020	PROYEKSI 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BELANJA DAERAH	4,847,508,278,861	5,448,447,210,705	5,636,139,493,578	6,895,626,414,666	1,447,179,203,961	26.56
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,218,631,037,313	3,427,011,819,705	3,271,258,212,012	3,740,566,590,043	313,554,770,338	9.15
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1,285,969,369,989	1,549,940,522,000	1,579,037,363,547	1,643,912,943,592	93,972,421,592	6.06
5.1.2.	BELANJA BUNGA	-	-	-	54,000,000,000	54,000,000,000	
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1,481,857,799,120	1,400,192,389,000	1,199,149,600,000	1,522,692,389,000	122,500,000,000	8.75
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	19,426,000,000	20,322,000,000	22,191,490,515	20,322,000,000	-	
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	427,541,748,500	448,845,974,305	462,355,543,230	491,928,323,051	43,082,348,746	9.60
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN	3,710,934,400	2,710,934,400	3,524,214,720	2,710,934,400	-	
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	125,185,304	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1,628,877,241,548	2,021,435,391,000	2,364,881,281,566	3,155,059,824,523	790,178,543,057	39.09
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	139,382,893,672	190,390,518,867	247,880,487,126	-	-	
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	959,733,313,273	888,544,793,115	1,148,323,103,668	-	-	
5.2.3.	BELANJA MODAL	529,761,034,603	942,500,079,018	968,677,690,772	-	-	
	JUMLAH BELANJA	4,847,508,278,861	5,448,447,210,705	5,636,139,493,578	6,895,626,414,666	1,447,179,203,961	26.56
	SURPLUS/(DEFISIT)	(65,318,066,268)	(101,289,188,600)	(22,530,237,650)	(1,241,981,167,144)	(1,140,691,978,544)	1,126.17
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	278,265,000,216	101,289,188,600	22,530,237,650	633,307,757,800	532,018,569,200	525.25
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGARAN DAERAH	273,576,825,165	94,532,949,600		183,307,757,800	88,774,808,200	93.91
6.1.2.	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH				450,000,000,000	450,000,000,000	
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI IPINJAMAN DAERAH/NVESTASI NON PERMANEN	4,688,175,051	6,756,239,000	22,530,237,650	-	(6,756,239,000)	(100.00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	278,265,000,216	101,289,188,600	22,530,237,650	633,307,757,800	532,018,569,200	525.25
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			-	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
6.2.1.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH	-	-	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	-
6.2.2.				-	25,000,000,000	25,000,000,000	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN			-	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000
	PEMBIAYAAN NETO	278,265,000,216	101,289,188,600	2,469,762,350	608,307,757,800	507,018,569,200	500.57
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	212,946,933,948		(20,060,475,300)	(633,673,409,344)	(633,673,409,344)	

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dimaksud dalam arahan periode keempat pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2018 - 2023 dirumuskan sebagai penuntasan MDGs dan pencapaian daya saing perekonomian daerah berlandaskan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas dan bermoral serta mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah. Arahan RPJPD untuk periode keempat 2018-2023 dimaksud dijabarkan ke dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam visi **"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"**.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi , yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Kelima misi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran tahunan melalui indikator dan target yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran tahunan ini sinkron dan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Secara makro, indikator dan target nasional dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional
Tahun 2020

Indikator	Capaian 2018		Target 2020	
	Indonesia	NTT	Indonesia	NTT
Pertumbuhan Ekonomi	5,17	5,13	5,3-5,5	6,6
IPM	71,39	64,9	72,5	65,54
Tingkat Kemiskinan	9,66	21,03	8,5-9,0	18
TPT	5,34	3,01	4,8-5,1	2,7
Indeks Gini	0,389	0,35	0,375-0,380	0,35

Pembangunan tahun 2020 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.2 menunjukkan keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD untuk tahun 2020.

Tabel 4.2
Keselarasan Misi, tujuan dan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2020

MISSION	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2020
MISI 1: Mewujudkan Masyarakat yang sejahtera, mandiri dan adil				
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah		Persentase pertumbuhan ekonomi	%	6,6
		PDRB per kapita	Rp. Juta	15
	1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan	Pengeluaran per kapita	Rp. Juta	8,54
		Persentase produksi pangan utama terhadap jumlah penduduk	%	96
		Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	84
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	25
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	115
	2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan ekspor	%	12
		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	2,47
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	13,37
	3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk	Persentase pertumbuhan investasi	%	6
		Persentase UMKM terhadap jumlah penduduk	%	0,9
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,7

INDIKATOR	DASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR	PERIODE (2019-2024)
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial		Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	18
		Indeks Gini	Poin	0,35
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	93
	1. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	65,5
	2. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, bagi penduduk miskin	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	210.000
		Persentase rumah tangga menurut airlayak	%	79
		Persentase rumah tangga menurut santi layak	%	67
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	62,5
		Kesesuaian fungsi, struktur dan pola ruang (RTRW)	%	40
	2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks risiko bencana	Poin	147

MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)

1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata dengan pola pendekatan kawasan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,2
		Lama tinggal kunjungan wisata	Hari	3
		Jumlah wisatawan domestik & mancanegara	Orang	887.815
		Jumlah <i>Tourism Estate</i> dalam <i>Ring of Beauty</i>	Kawasan	14

MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi baik	%	80
		Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	90
		Persentase bendungan dan embung dalam kondisi baik	%	
		Jumlah terminal dalam kondisi baik	Unit	2
		Jumlah dermaga dalam kondisi baik	Unit	1
		Jumlah bandar udara	Unit	2

PERIODE	SATUAN	INDIKATOR	SATUAN	MAPA/100
		dalam kondisi baik		
		Rasio elektrifikasi	%	70
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65
	1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	APS:	%	
		a. 3-6 Tahun		a. 20
		b. 7-12 Tahun		b. 100
		c. 13-15 Tahun		c. 96
		d. 16-18 Tahun		d. 78
		e. 19-24 Tahun		e. 29
		APM:	%	
		a. SD/MI/Sederajat		a. 97
		b. SMP/MTs/Sederajat		b. 69
		c. SMA/MA/Sederajat		c. 56
		d. Perguruan Tinggi		d. 18
		APK:	%	
		a. PAUD		a. 61
		b. SD/MI/Sederajat		b. 114
		c. SMP/MTs/Sederajat		c. 94
		d. SMA/MA/Sederajat		d. 82
		e. Perguruan Tinggi		e. 27
		Jumlah Anak Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan:	Siswa	
		a. SD/MI/Sederajat		a. 1780
		b. SMP/MTs/Sederajat		b. 2.250
		c. SMA/MA/Sederajat		c. 1.200
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,8
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,1
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	25
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	19
		Persentase SMA terakreditasi minimal B	%	25
		Persentase SMK terakreditasi minimal B	%	12
	2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan:		
		Rasio Tenaga Medis	per 100.000 penduduk	22
		Rasio Bidan	per 100.000 penduduk	85
		Rasio Perawat	per 100.000 penduduk	92
		Rasio Tenaga Kesehatan	per	72

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PATRIKIPER 2020
	Lainnya	100.000 penduduk		
	Jumlah unit layanan khusus (Puskesmas Terapung dan Flying Health Care)	Unit	4	
	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,4	
	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	55	
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	77,5	
	3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita	Persentase Balita Stunting	%	35,8
		Persentase Balita Wasting	%	13,1
		Persentase Balita Underweight	%	23,8
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik				
1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	%	68
		Opini BPK	Opini	WTP
		Peringkat LPPD	Peringkat	25
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	A
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	Poin	2
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,1
		Indeks kepuasan pelayanan publik	Poin	80
		Indeks Demokrasi	Poin	70
		Tingkat Partisipasi Pemilu Kepala Daerah NTT	%	-

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2020, harus tetap memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap Prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2020.

RKP 2020 merupakan titik krusial bagi proses perencanaan pembangunan nasional, karena pada saat bersamaan dilakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Karena itu, penyusunan RKP 2020 dan selanjutnya dijabarkan pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2020 perlu mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.

4.2.1. Arah Kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan RPJMN periode keempat dari RPJPN2005-2025. Visi Indonesia 2005-2025 adalah **“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”**, Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut:

RPJMN 2005 – 2009

Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat

RPJMN 2010 – 2014

Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian

RPJMN 2015 – 2019

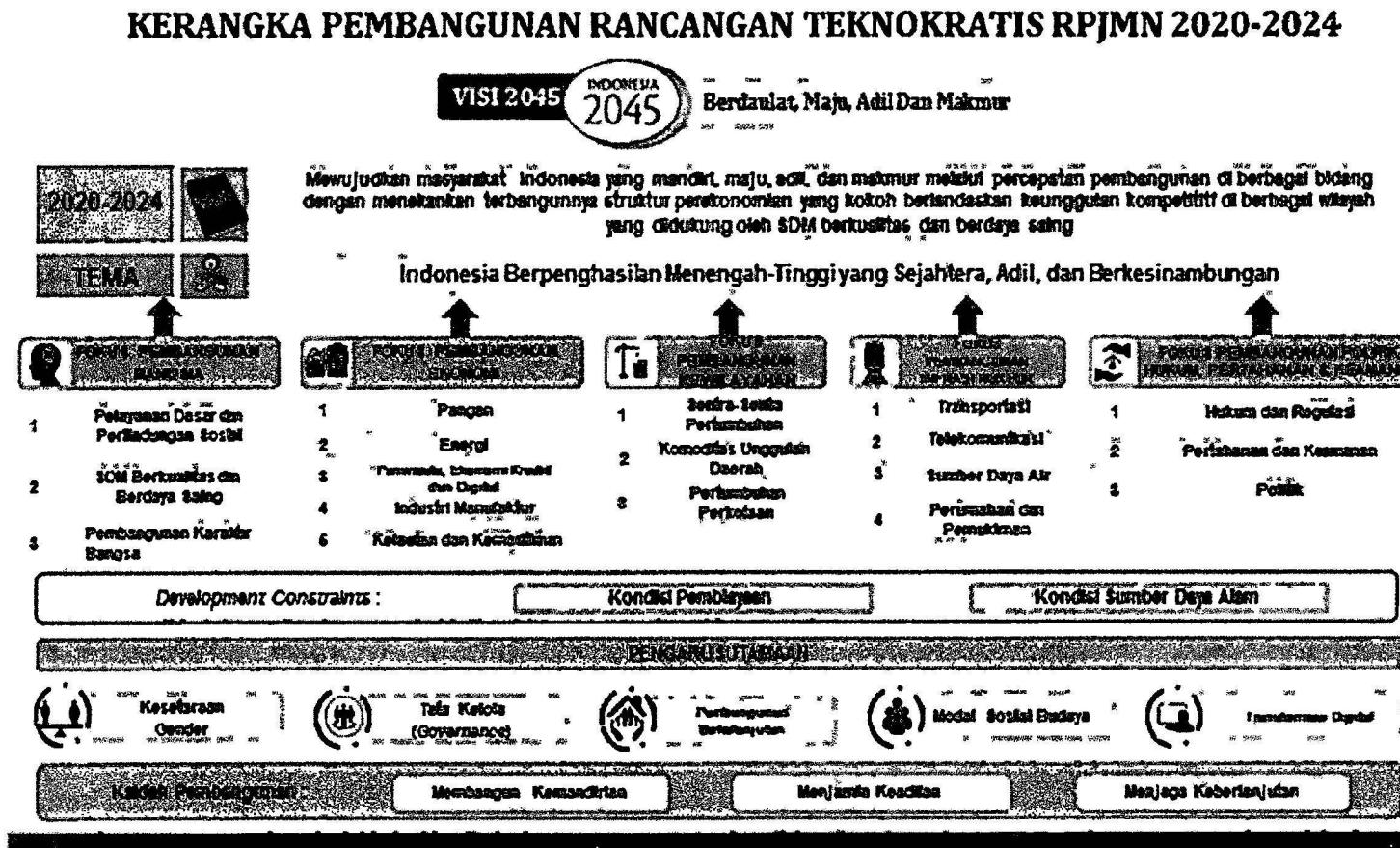
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terusmeningkat

RPJMN 2020 - 2024

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh** berlandaskan **keunggulan kompetitif di berbagai wilayah** yang didukung oleh **SDM berkualitas** dan berdaya saing. Terdapat tiga kata kunci dalam sasaran pokok dimaksud, yaitu : a. Struktur Perekonomian yang Kokoh, b.Keunggulan Kompetitif Wilayah, dan c.SDM Berkualitas.

Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 disusun dengan kerangka pemikiran sebagaimana gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1
Kerangka Pemikiran Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024



Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 direncanakan sebagaimana terlihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Indikator Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024

Indikator	Target Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,4 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 – 4,6
Gini Rasio	0,370 – 0,374
IPM	75,35

4.2.1.1. Arah Kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 untuk wilayah Nusa Tenggara

Pembangunan kewilayahan termasuk untuk wilayah Nusa Tenggara mengacu pada isu strategis pengembangan kewilayahan sebagaimana telah dikaji dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. PENURUNAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH

- Kemiskinan di KTI (12,3%), KBI (8,5%), perdesaan (13,1%) dan perkotaan (7,02%) yang tinggi (BPS, 2018)
- Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (0,324) -Perkotaan (0,4)
- Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa

2. PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

- Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (10 dari 12 KEK, 4 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata)
- Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah
- Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang

3. PENGELOLAAN URBANISASI

- Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030
- Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 4% PDB, di India 13% PDB)

4. PEMANFAATAN RUANG

- Konflik ruang yang semakin meningkat (15.525 kasus periode 2015-2018)
- Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (20.000 desa)
- Kejadian Bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian Banjir, Longsor, Kebakaran)

5. PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

- a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak baru 37,8%, air minum 72%, sanitasi layak 67,5%, dsb) (BPS, 2017)
- b) Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal
- c) Peraturan Perundangan yang belum harmonis serta Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang
- d) Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi

4.2.2. Tema Pembangunan 2020

4.2.2.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2020

RKP 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, Tema RKP 2020 adalah **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. RKP 2020 selain berfokus pada sumber daya manusia, juga dititikberatkan pada pemerataan wilayah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional (PN) untuk tahun 2020, yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

4.2.2.2 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

Sejalan dengan tema RKP 2020, RKPD 2020 menetapkan tema **“Peningkatan Kualitas SDM melalui Akses dan Mutu Pelayanan Dasar serta Pengembangan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi Berbasis Masyarakat”**.

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2020 sesuai RKPD diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programme*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD.

Pendekatan penyusunan RKPD 2020, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down, bottom up*, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2020 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang

menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistic mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kgiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antarwilayah.

4.2.2.3 Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2020

Dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran secara HITS aspek spasial lokasi pembangunan merupakan komponen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efisien, efektif serta berdaya guna dan berhasil guna. Penetapan lokasi pembangunan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030, dengan memperhatikan data dan capaian pembangunan masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

Terdapat dua strategi pengembangan kewilayahan pada RKPD 2020, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Dari 2 (dua) strategi ini, telah ditetapkan prioritas lokasi pembangunan, yaitu berdasarkan pemerataan, adalah lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pengembangan pariwisata ataupun pusat produksi untuk pertumbuhan wilayah, sebagaimana terdapat pada Tabel 4.5. Selain itu juga telah ditetapkan lokasi yang disepakati antara provinsi dan kabupaten/kota untuk pemerataan, hal ini lebih dikaitkan dengan penurunan kemiskinan dan pencegahan penanganan stunting, sebagaimana terdapat pada Tabel 4.6.

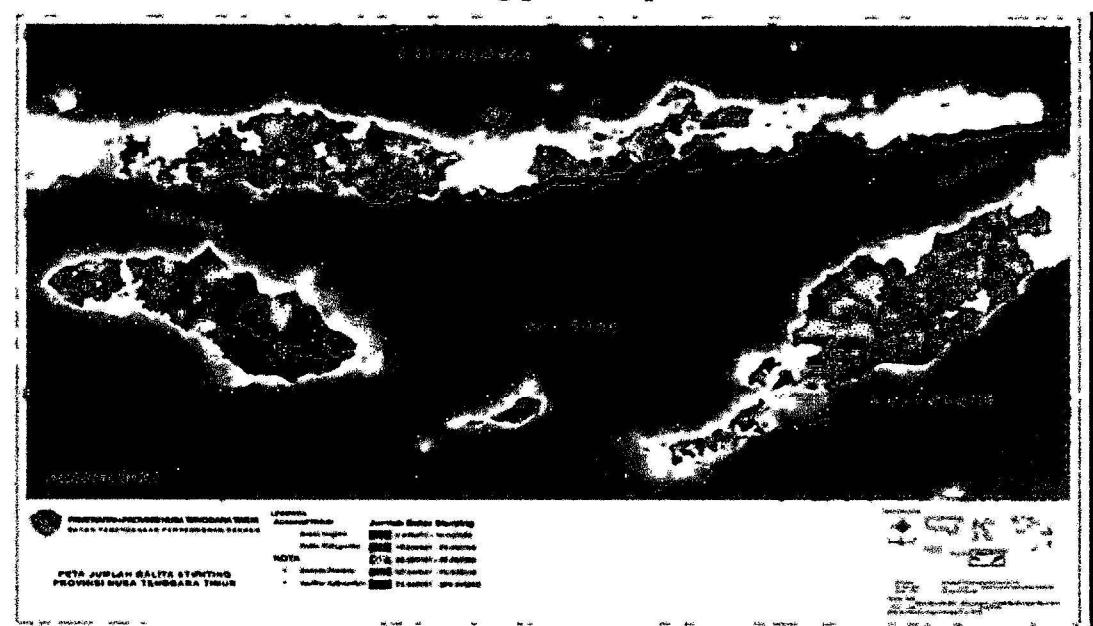
**Tabel 4.5
Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pertumbuhan**

No.	Kabupaten	Kecamatan
1.	Kabupaten Ende – Kelimutu	Kecamatan Kelimutu
2.	Kabupaten Kupang – Liman	Kecamatan Semau Selatan
3.	Kabupaten Rote Ndao – Mulut Seribu	Kecamatan Landuleko
4.	Kabupaten Lembata - Lamalera	Kecamatan Wulandoni
5.	Kabupaten Sumba Timur – Nggongi	Kecamatan Karera
6.	Kabupaten Alor – Moru	Kecamatan ABAL
7.	Kabupaten TTS – Fatumnasi	Kecamatan Fatumnasi
8.	Kabupaten SBD – Waikelo Sawah	Kecamatan Wewewa Timur

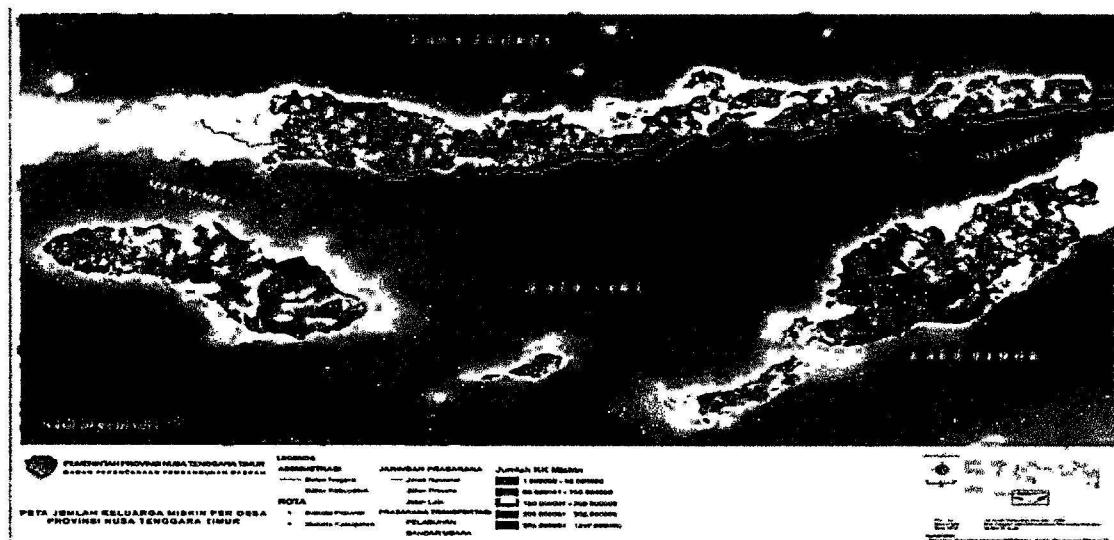
Tabel 4.6
Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pemerataan
untuk Penurunan Kemiskinan & Penanganan Stunting

No.	Kabupaten	Kecamatan
1.	Kabupaten TTU	Noemuti
2.	Kabupaten Belu	Raimanuk
3.	Kabupaten Malaka	Weliman
4.	Kabupaten Sabu Raijua	Sabu Barat
5.	Kabupaten Sumba Tengah	Umbu RatuNggay
6.	Kabupaten Sumba Barat	Tana Righu
7.	Kabupaten Flores Timur	Larantuka
8.	Kabupaten Sikka	Talibura
9.	Kabupaten Ngada	Bajawa
10.	Kabupaten Nagekeo	Boawae
11.	Kabupaten Sabu Raijua	Hawu Mehara
12.	Kabupaten Manggarai Timur	Kota Komba
13.	Kabupaten Manggarai	Langke Rembong
14.	Kota Kupang	Alak
15.	Kabupaten TTS	Kuatnana
16.	Kabupaten Kupang	Kupang Tengah
17.	Kabupaten Alor	Alor Barat Daya
18.	Kabupaten Sumba Timur	Lewa
19.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Kodi Utara
20.	Kabupaten Manggarai Barat	Komodo
21.	Kabupaten Ende	Nangapanda
22.	Kabupaten Lembata	Buyasuri

Gambar 4.3
Peta Sebaran Stunting per kabupaten/kota se-NTT



Gambar 4.4
Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota se-NTT



4.2.2.4 Prioritas Daerah RKPD 2020

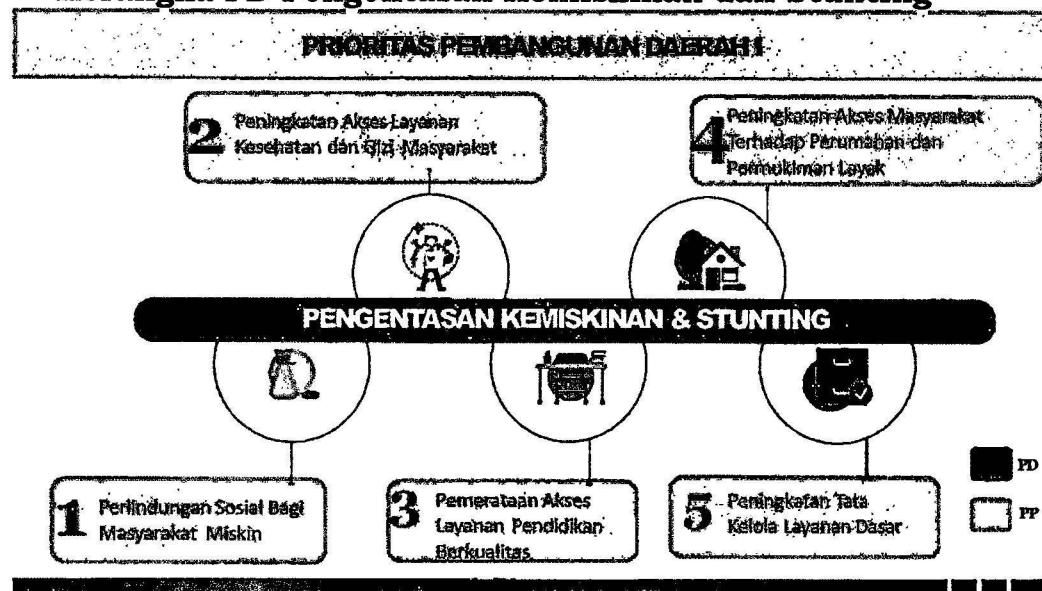
Terdapat 7 (tujuh) prioritas daerah untuk tahun 2020, yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan dan stunting
 2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
 3. Kelestarian Lingkungan Hidup
 4. Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata
 5. Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi
 6. Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan kesehatan
 7. Reformasi Birokrasi

a. **PRIORITAS DAERAH 1 :Pengentasan Kemiskinan dan stunting**

Prioritas daerah Pengentasan Kemiskinan dan Stunting bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur, dilakukan melalui penanganan terpadu pengentasan kemiskinan dan stunting pada lokasi prioritas hasil deselinasi. Prioritas daerah ini dilaksanakan melalui 5 (lima) sasaran, yaitu : 1) Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, 2) Peningkatan akses layanan kesehatan dan gizi masyarakat, 3) Pemerataan akses pendidikan berkualitas, 4) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, dan 5) Peningkatan tata kelola pelayanan dasar.

Gambar 4.5
Kerangka PD Pengentasan Kemiskinan dan Stunting



Pengentasan kemiskinan dan stunting dilakukan antara lain melalui : a) Penanganan rumah tidak layak huni pada keluarga miskin sebanyak 6.125 unit yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur, b) Peningkatan angka layanan aksesibilitas terhadap air bersih dan sanitasi serta energi listrik, c) Penanganan ibu hamil hingga 1000 hari kelahiran, d) peningkatan kapasitas kelembagaan kader posyandu dan kader PKK pada 629 desa/kelurahan yang paling besar berkontribusi dapa kemiskinan dan stunting, e) Peningkatan ketahanan pangan dan angka konsumsi terhadap sumber makanan bergizi.

Sasaran dan Indikator PD Pengentasan Kemiskinan dan Stunting sebagaimana terlihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Sasaran dan Indikator PD Pengentasan Kemiskinan dan Stunting

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin			
1.	Penduduk miskin, KAT, kelompok rentan dan PMKS lainnya terakses perlindungan sosial	%	80
Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
1.	Balita dengan masalah Gizi (intervensi gizi spesifik): - Stunting - Wasting - Underweight	%	35,8 13,1 23,8
2.	Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	%	2,0
3.	Proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	%	2,0
4.	Cakupan kelembagaan sosial budaya PKK dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan keluarga	%	40

Gambar 4.6
Kerangka PD Peningkatan Pendapatan Masyarakat



Sasaran dan Indikator PD Peningkatan Pendapatan Masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8
Sasaran dan Indikator PD Peningkatan Pendapatan Masyarakat

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian (Marungga)			
1.	Nilai Ekspor	US\$	27.446.739
2.	Volume Ekspor	Ton	113.248
3.	Jumlah industri pengolahan hasil-hasil dengan data terpilah gender	Klpk	2327
4.	Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, kelautan dan perikanan	Unit	156
5.	Jumlah jenis Industri pengolahan produkyang di-repacking dan di-rebranding	jenis	3
Pengembangan Industri Garam Daerah			
1.	Jumlah kelompok industri garam	Klpk	102
2.	Penggunaan luas lahan garam teknologi geomembran	Ha	102
3.	Jumlah produksi garam KI	Ton	10.200
Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan			
1.	Jumlah produksi rumput laut	ton	2.619.000
2.	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	216.948
3.	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2.228.677
4.	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	1,15
5.	Persentase pertumbuhan produksi hortikultura	%	1,25
6.	Persentase pertumbuhan produksi perkebunan	%	1,54

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas			
1.	Akreditasi sekolah minimal B (pemenuhan 8 standar sisdknas): SLB	%	40%
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak			
1.	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	unit	6.125
2.	Kab/Kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman layak huni	Kab/kota	22
3.	Persentase Penanganan kawasan kumuh	%	70
4.	Persentase rumah tangga menurut air layak	%	79
5.	Persentase Rumah tangga menurut sanitasi layak	%	67
6.	Penambahan rumah dengan penerangan dari listrik	unit	2500
7.	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik	%	67
Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar			
1.	Pencapaian SPM Sosial	%	100
2.	Persentase pencapaian SPM perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100

b. PRIORITAS DAERAH 2 :Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Prioritas daerah ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor riil, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi. Beberapa hal yang dilakukan adalah : 1) Peningkatan kapasitas, kreatifitas dan produktivitas tenaga kerja vokasi, 2) Pembangunan industri pakan ternak *Feedmil* dalam rangka menjaga stabilitas harga pakan serta mencegah inflasi terhadap telur dan daging ayam, 3) Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan berkualitas (kelor, padi, jagung, bawang merah, bawang putih), 4) Peningkatan sumber daya potensial, antara lain garam yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, 5) Peningkatan produksi pada kawasan hutan produksi dan hasil hutan bukan kayu, 6) Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, 7) Pembangunan industri pengolahan untuk hasil produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan sumber daya lainnya, 8) Peningkatan aksesibilitas perdagangan untuk hasil produksi dan hasil pengolahan, dan 9) Penguatan permodalan skala kecil dan menengah bagi koperasi dan BUMD.

7.	Persentase pertumbuhan produksi marungga	%	20
8.	Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	%	8
9.	Persentase pertumbuhan populasi ternak kecil	%	20
10.	Persentase pertumbuhan populasi ternak unggas	%	6
11.	Persentase pertumbuhan produksi pakan ternak		

Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

1.	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi terpisah gender)	%	60
2.	Persentase besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	40
3.	Persentase penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	45
4.	Persentase besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	70
5.	Persentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas	%	35
6.	Jumlah tenaga kerja sektor industri yang diserap		1.20

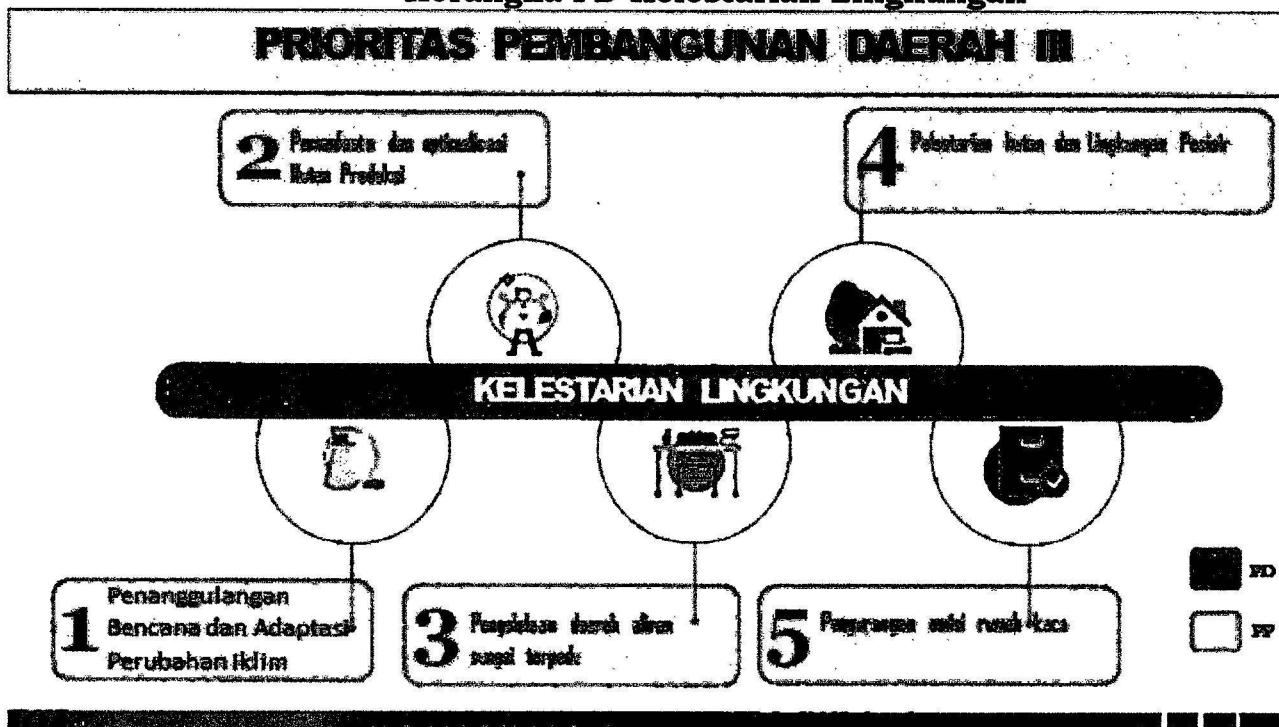
Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah

1.	Persentase koperasi aktif:	%	91,5
2.	Persentase pertumbuhan UKM:	%	2
3.	Persentase pertumbuhan UKM baru di		
4.	Persentase penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi dengan data terpisah gender	%	2
5.	Jumlah kemitraan investor dengan UMKM	Perusahaan	10

c. PRIORITAS DAERAH 3 :Kelestarian Lingkungan Hidup

Prioritas daerah ini diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Beberapa hal yang dilakukan adalah : 1) peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dalam penanganan pra bencana, kedaruratan dan pasca bencana, 2) mengurangi kerusakan hutan pasca penyerahan kewenangan kehutanan ke provinsi, meningkatkan reboisasi kawasan sumber daya air dan hutan serta menerapkan pengelolaan perhutanan sosial, 3) meningkatkan kualitas air, air laut dan udara serta penanganan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun, 4) mengurangi kerusakan laut dan pesisir serta meningkatkan konservasi perairan, 5) mengurangi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam melalui pengawasan terpadu perijinan pertambangan, 6) peningkatan pembangunan berkelanjutan di kawasan ekowisata terutama kawasan komodo.

Gambar 4.7
Kerangka PD Kelestarian Lingkungan



Sasaran dan Indikator PD Kelestarian Lingkungan sebagaimana terlihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Sasaran dan Indikator PD Kelestarian Lingkungan

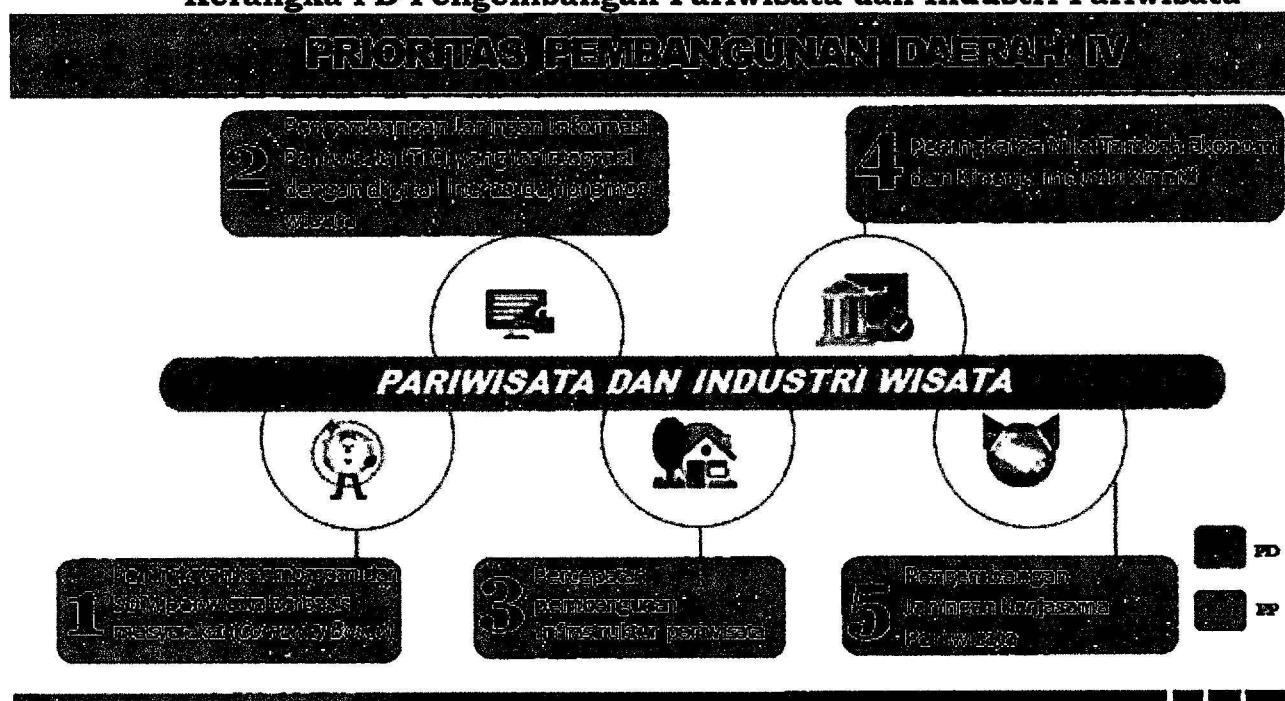
No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim			
1.	Rencana kontinjensi dan sistem peringatan dini bencana	sistem	2
2.	Kabupaten yang memiliki RPB dan RAD- PB-API	dokumen	16
3.	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana	desa/kel	100
Pemanfaatan dan optimalisasi Hutan Produksi			
1.	Luas hutan dan lahan yang direhabilitas	ha	400
2.	Luas hutan dengan tanaman bunga endemik lokal	ha	1000
3.	Jumlah hutan arboretum (khusus spesies flora dan fauna endemik)	unit	2
Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu			
1.	Indeks kualitas air		60
2.	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	7 DAS
3.	Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan penanganan limbah bahanberbahaya dan beracun	kab/kota	5
4.	Indeks kualitas udara		92,5
Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir			
1.	Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan perikanan	Ha	183.389,98
Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca			

d. PRIORITY DAERAH 4 : Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata

Prioritas Daerah Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata merupakan *prime mover* ekonomi Nusa Tenggara Timur. Melalui prioritas ini dilakukan upaya optimalisasi pemanfaatan pariwisata dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate*. Nusa Tenggara timur memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Letak geografisnya Nusa Tenggara Timur yang strategis memungkinkan untuk menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional. Beberapa hal yang menjadi fokus adalah : 1) Pembangunan 7 (tujuh) *tourism estate* baru di 7 (tujuh) kabupaten, 2) Pembangunan pertanian, perikanan dan peternakan terintegrasi pada 8 (delapan) lokasi *tourism estate*, 3) Pemenuhan unsur 5A pada 8 (delapan) lokasi *tourism estate*, 4) Penguatan promosi pariwisata lewat digitasi literasi yang terintegrasi dalam *tourism information center*, 5) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, 6) Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, 7) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata, 8) Repacking dan rebranding produk industri kreatif.

Gambar 4.8

Kerangka PD Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata



Sasaran dan Indikator PD Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata sebagaimana terlihat pada tabel 4.10 berikut.

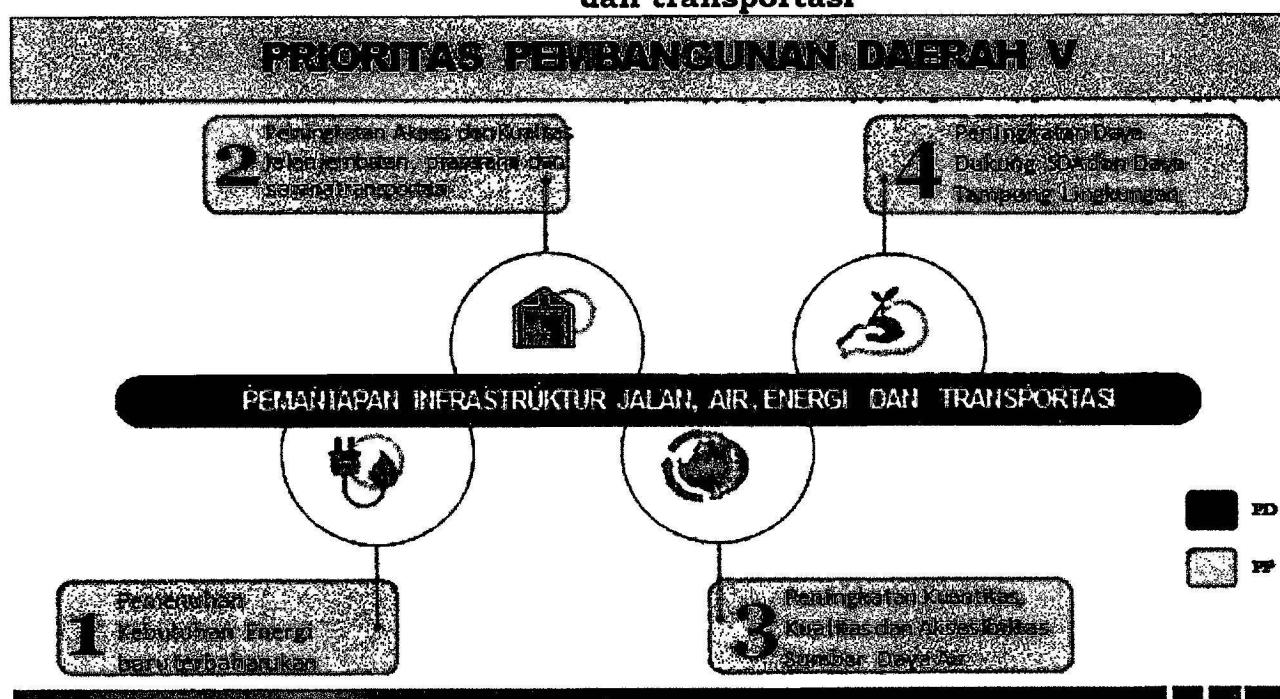
Tabel 4.10
Sasaran dan Indikator PD Pengembangan Pariwisata
dan Industri Pariwisata

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis masyarakat (Community Based)			
1.	Jumlah tenaga terampil bersertifikat dengan data terpisah Gender	orang	397
2.	Jumlah SMK yang di refitilisasi menjadi SMK percontohan dengan kualitas kelulusan yang bersaing pdalevelnasional / internasional (Lokasi prioritas pada Pariwisata estate SMK Pariwisata SMK Fashion SKM Maritim	Unit Unit Unit	4 4 4
3.	Jumlah usaha dibidang pariwisata yang di kelola masyarakat	unit	2.206
Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan digital literasi dan promosi wisata			
1.	Jumlah TIC (Tourism Information Centre di setiap kabupaten / kota yang terintergrasi dengan rumah NTT dan perpustakaan umum ramah pengunjung	Unit	14
2.	Jumlah obyek wisata yang memiliki literasi	Unit	14
3.	Presentase ketersediaan Perpustakaan Umum di Pariwisata Estate	%	34
Percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata			
1.	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan ke lokasi pariwisata estate	%	35
2.	Persentase trayek di pariwisata estate	%	25
3.	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata estate	km	64
4.	Persentasedukungan elektrifikasi di setiap pariwisata Estate	%	64
5.	Presentase ketersediaan fasilitas kesehatan di Pariwisata Estate	%	64
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja industri Kreatif			
1.	Jumlah UMKM berbasis ekonomi kreatif	Unit	55
2.	Jumlah Olah Raga Tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata Estate	Unit	5
3.	Jumlah olahraga rekreasi	Unit	3
4.	Jumlah lokasi hutan wisata yang mendukung pengembangan Pariwisata Estate	Unit	2
Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata			
1.	Persentase BUMDes Pariwisata Estate	%	64
2.	Persentase Investasi di Pariwisata Estate	%	64
3.	Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan	%	40
4.	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan pariwisata estate	%	64
5.	Presentase pertumbuhan produksi tanaman pangan di Pariwisata Estate	%	1,15
6.	Presentase pertumbuhan produksi hortikultura di Pariwisata Estate	%	1,12
7.	Presentase pertumbuhan produksi perkebunan di Pariwisata Estate:	%	1,15
8.	Presentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata Estate	%	4
9.	Persentase pertumbuhan industri di Pariwisata Estate	%	4

e. PRIORITY DAERAH 5 : Pemantapan infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi

Prioritas daerah ini dilaksanakan untuk menyediakan infrastuktur dasar berupa jalan, air, energi dan transportasi yang layak sebagai bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Akses infrastuktur diarahkan untuk penanganan jalan provinsi sehingga dapat memperpendek waktu tempuh. Pemenuhan kebutuhan akan air dilakukan melalui pembangunan Prioritas daerah ini dilaksanakan antara lain melalui: 1) Peningkatan jalan provinsi dengan aksesibilitas baik sepanjang 300 km melalui peningkatan kecepatan waktu tempuh, 2) Peningkatan jumlah daerah irigasikewenangan provinsi dengan kondisi baik, 3) Peningkatan jumlah embung, 4) Peningkatan jumlah perda rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dan pengurangan angka deviasi pemanfaatan ruang terhadap perencanaan ruang, 5) Peningkatan kualitas terminal Tipe B dan sarana prasarana keamanan lalu lintas untuk, 6) Peningkatan trayek dan armada lalu lintas untuk menunjang pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dan membuka isolasi, 7) Peningkatan kualitas pelabuhan penyeberangan, 8) Peningkatan kualitas layanan kapal dan trayek angkutan laut dan udara, 9) Pemenuhan kelengkapan fasilitas KIR kendaraan bermotor dan 10) Meningkatkan angka elektrifikasi.

Gambar 4.9
Kerangka PD Pemantapan infrastruktur dasar, jalan, air, energi dan transportasi



Sasaran dan Indikator PD Pemantapan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan Transportasi sebagaimana terlihat pada tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11
Sasaran dan Indikator PD Pemantapan Infrastruktur Dasar, Jalan,Air, Energi dan Transportasi

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Pemenuhan Kebutuhan Energi Baru Terbaharukan			
1.	Persentase bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	%	15
2.	Penambahan rumah dengan penerangan dari listrik	unit	2500
Peningkatan Akses dan Kualitas jalan jembatan , prasarana dan sarana transportasi			
1.	Panjang jalan dalam kondisi mantap:	km	1444
2.	Panjang jalan dengan aksesibilitas baik	km	2311
3.	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan provinsi:	%	85
4.	Jumlah terminal tipe B yang baik	unit	7
5.	Penambahan jumlah trayek angkutan jalan dan penyeberangan yang dilayani:		
	- Jalan	Trayek	3
	- Penyeberangan	Trayek	1
6.	pelayanan pelabuhan dan penyeberangan	%	80
7.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelabuhan dan penyeberangan	%	80
8.	Persentase pengawasan sub sektor darat, laut dan udara	%	70
9.	Peresentase pencapaian SPM Pekerjaan Umum		100
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air			
1.	Jumlah embung dalam kondisi baik	unit	50
2.	Jumlah prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta pulau-pulau kecil	unit	2
Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan			
3.	Kesesuaian fungsi dan pola ruang	%	40

f. PRIORITAS DAERAH 6 :Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan Kesehatan

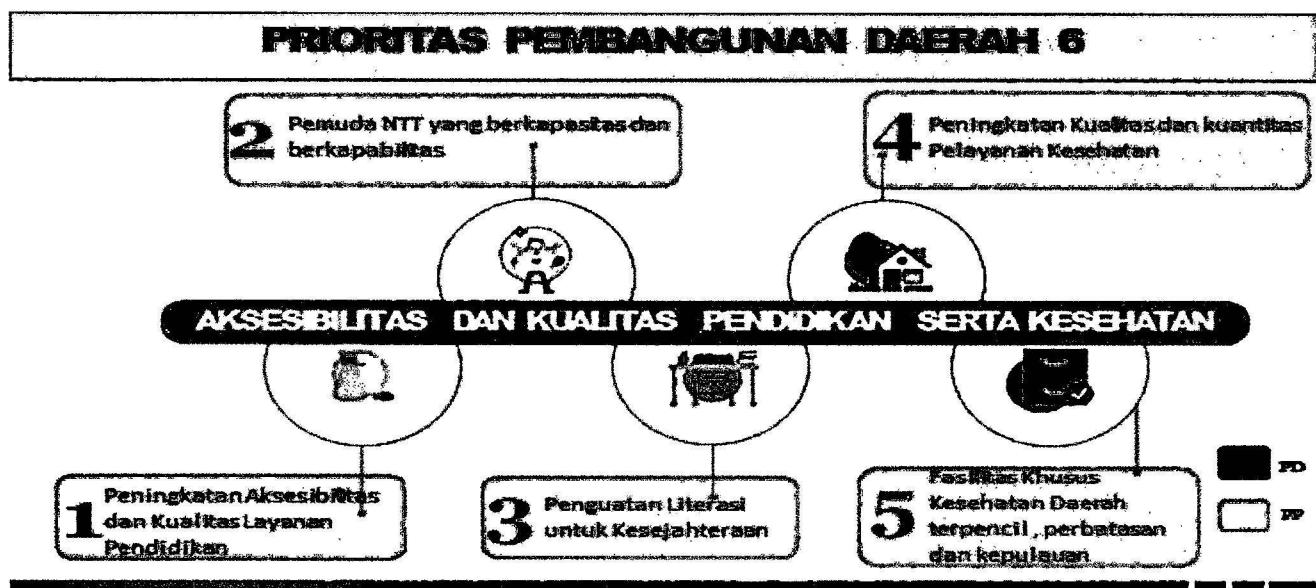
Prioritas daerah Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dari sektor pendidikan dan kesehatan, dengan cara meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Indikator kualitas SDM yang dilihat dari IPM NTT untuk tahun 2018 menunjukkan peningkatan cukup baik, dari 63,73 menjadi 64,9. Namun demikian prevalensi *stunting* masih tinggi. Untuk itu perlu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, melalui :

1) SARANA

- Peningkatan jumlah sekolah dan kelas
- Peningkatan jumlah puskesma dan layanan sarana mobile di darat, laut dan udara

- 2) PRASARANA
 - a) Peningkatan prasarana pendidikan (buku, peralatan laboratorium)
 - b) Peningkatan peralatan kesehatan
- 3) SDM
 - a) Peningkatan jumlah guru bersertifikat
 - b) Peningkatan jumlah guru
 - c) Peningkatan jumlah tenaga kesehatan
- 4) KEGIATAN PRIORITAS antara lain :
 - a) Peningkatan manajemen mutu pendidikan
 - b) Peningkatan angka literasi
 - c) Peningkatan pendidikan vokasi
 - d) Peningkatan lama sekolah
 - e) Peningkatan angka partisipasi sekolah
 - f) Peningkatan angka partisipasi murni
 - g) Pengurangan angka penyakit dominan di Nusa Tenggara Timur

Gambar 4.12
Kerangka PD Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan Kesehatan



Sasaran dan Indikator PD Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan sebagaimana terlihat pada tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12
Sasaran dan Indikator PD Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

No.	Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2020
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan			
1.	APS: Penduduk usia 16-18 tahun (data terpilah gender)	%	100
2.	APS: Penduduk usia 16-18 tahun (disabilitas)		
3.	APM SMA/sederajat	%	100
4.	APM SLB	%	100
5.	APK SMA/sederajat	%	100
6.	APK SLB	%	100

7.	SiswaAngka Putus Sekolah SLB (data terpilah gender):	siswa	0
8.	Angka Putus Sekolah SMK (data terpilah gender)	siswa	0
9.	Jumlah ketersediaan Asrama pada SMA/ Sederajat yang terdekat pada wilayah dengan aksesibilitas rendah	10 unit	10 unit
10.	Persentase akreditasi Sekolah Minimal B (Pemenuhan 8 Standar Sisdiknas): SMA= 25%; SMK	%	12
11.	Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	%	100
Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas			
Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan			
Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan			
1.	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi: Puskesmas= % RS= %	%	80 85
2.	Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita: Ibu= 0; Bayi= 0; Balita= 0	Kasus	0 0 0
3.	Persentase kasus HIV yang diobati	%	50
4.	Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif (case detection rate/CDR) TBC	%	65
5.	Jumlah Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	Kab/kota	14
6.	Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria	Kab/kota	5
7.	Jumlah Kab/Kota dengan insidens Rate DBD <49/ 100.000 penduduk	Kab/kota	22
8.	Jumlah Kab/Kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/ 10.000	Kab/kota	18
9.	Jumlah Kab/ Kota dengan Imunisasi Dasar Lengkap >90%	Kab/kota	9
10.	Jumlah Kab/Kota dengan Desa/ Kelurahan yang melaksanakan POSBINDU PTM>50%	Kab/kota	13
11.	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20%	Kab/kota	18
12.	Rasio Tenaga Kesehatan: medis= % bidan= % perawat: % nakes lainnya= %	Orang	23 85 154 72
13.	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	%	100
14.	Persentase Kemandirian BLUD	%	46
15.	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit	%	86
Fasilitas Khusus Kesehatan Daerah terpencil , perbatasan dan kepulauan			
1.	Jumlah Flying Health Care	unit	1

a. PRIORITAS DAERAH 7 : Reformasi Birokrasi

Prioritas daerah Reformasi Birokrasi ditujukan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan bekerja dengan profesional dan

berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilakukan melalui : 1). Perangkat Daerah yang right sizing, 2). Penerapan e-Government dan Data Terpadu, 3). Penerapan Sistem Manajemen Kinerja, 4). Penataan dan Pemutahiran Produk Hkum Daerah, 5). Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Gambar 4.12
Kerangka PD Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan Kesehatan



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

KINERJA EKONOMI DAERAH KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2017

Pada Bab ini akan dijabarkan Program Prioritas tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada Masyarakat. Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan periode kedua rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2023 yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan NTT 2019.

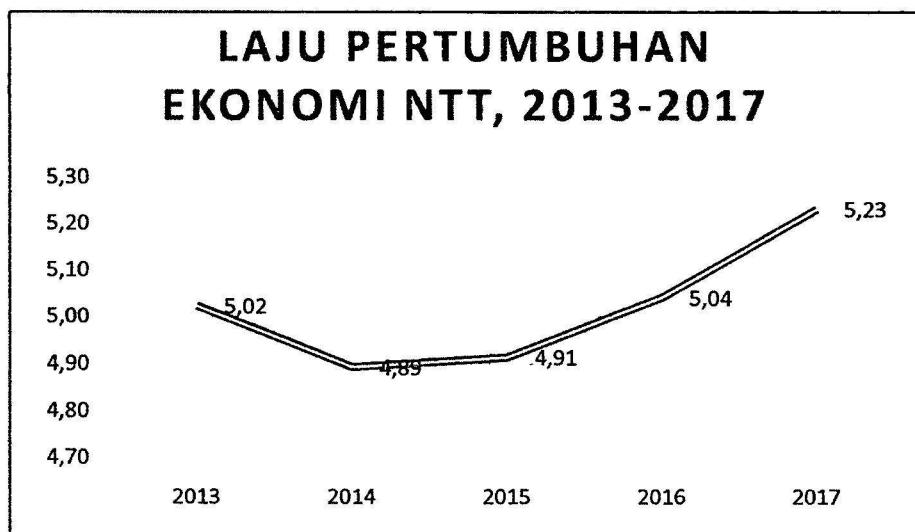
Dalam rangka menjamin ouput perencanaan agar sinergis, prioritas pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT perlu dijabarkan secara umum untuk menjamin integrasi perencanaan daerah kedalam perencanaan Pemerintah Provinsi dan Nasional. Untuk itu, dalam RKPD 2020 ini perlu memuat arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTT.

Bab ini akan dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama berisi evaluasi umum pencapaian kinerja ekonomi daerah pada 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012-2017, dan prediksi kinerja ekonomi daerah pada tahun rencana. Bagian kedua memuat mengenai arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Secara agregat Provinsi NTT, Kinerja ekonomi Daerah menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi dan konsisten sepanjang periode 2013, kecuali untuk tahun fiskal 2014. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,02%. Meskipun tetap tumbuh positif pada tahun berikutnya, lajupertumbuhan sedikit mengalami pelambatan pada tahun 2014, yang hanya tumbuh 4,89%. Situasi ekonomi daerah membaik pada tahun 2015 dan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 geliat ekonomi daerah semakin agresif yang ditunjukkan oleh catatan laju pertumbuhan yang menembus 5,04%. Stabilitas ekonomi nasional ditengah kelesuan ekonomi dunia menyediakan situasi yang kondusif bagi tumbuhnya ekonomi NTT pada tahun tersebut. Kinerja yang baik ini bertahan pada tahun 2017 yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,23%.

Gambar 5.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi NTT, 2013-2017



Maraknya proyek-proyek infrastruktur pengairan dan transportasi pada tahun-tahun tersebut mendorong ekonomi tumbuh melewati rerata laju pertumbuhan nasional.

Kinerja ekonomi daerah pada 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, sepanjang 2013-2017 menunjukkan trend positif, meskipun terlihat mengalami sedikit pelambatan pada tahun 2014-2015. Kota Kupang tercatat sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi sepanjang 2013-2017, dan menyumbang terhadap pertumbuhan NTT yang relatif tinggi sepanjang periode tersebut.

Pada tahun 2013, pertumbuhan Kota Kupang tercatat sebesar 7,20%. Sementara Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua adalah Kabupaten Belu (6,04%). Kabupaten dengan catatan pertumbuhan paling rendah pada tahun 2013 adalah Kabupaten Alor (4,20%).

Pada tahun 2014, walaupun sedikit mengalami pelambatan dibanding tahun sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi kota Kupang tecatat sebesar 6,81%, juga adalah yang tertinggi di Provinsi NTT, dan lebih tinggi dari pertumbuhan agregat ekonomi daerah NTT secara keseluruhan (NTT = 4,89%). Pada tahun yang sama, rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten lain di Provinsi NTT berkisar antara 4,02% - 5,5,7%. Kabupaten Sumba Barat daya tercatat sebagai Kabupaten dengan laju pertumbuhan paling lambat relatif terhadap Kabupaten/Kota lain di NTT.

Pada tahun fiskal 2015, ekonomi NTT tumbuh sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tumbuh 4,91%. Kota Kupang masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi relatif dibandingkan Kabupaten lain. Ekonomi Kota Kupang tumbuh 6,63% sementara Kabupaten lain tumbuh antara 4,39% - 5,34%.

Kabupaten Timor Tengah Selatan tercatat sebagai Kabupaten dengan tingkat pertumbuhan paling lambat dibandingkan dengan Kabupaten lain di NTT.

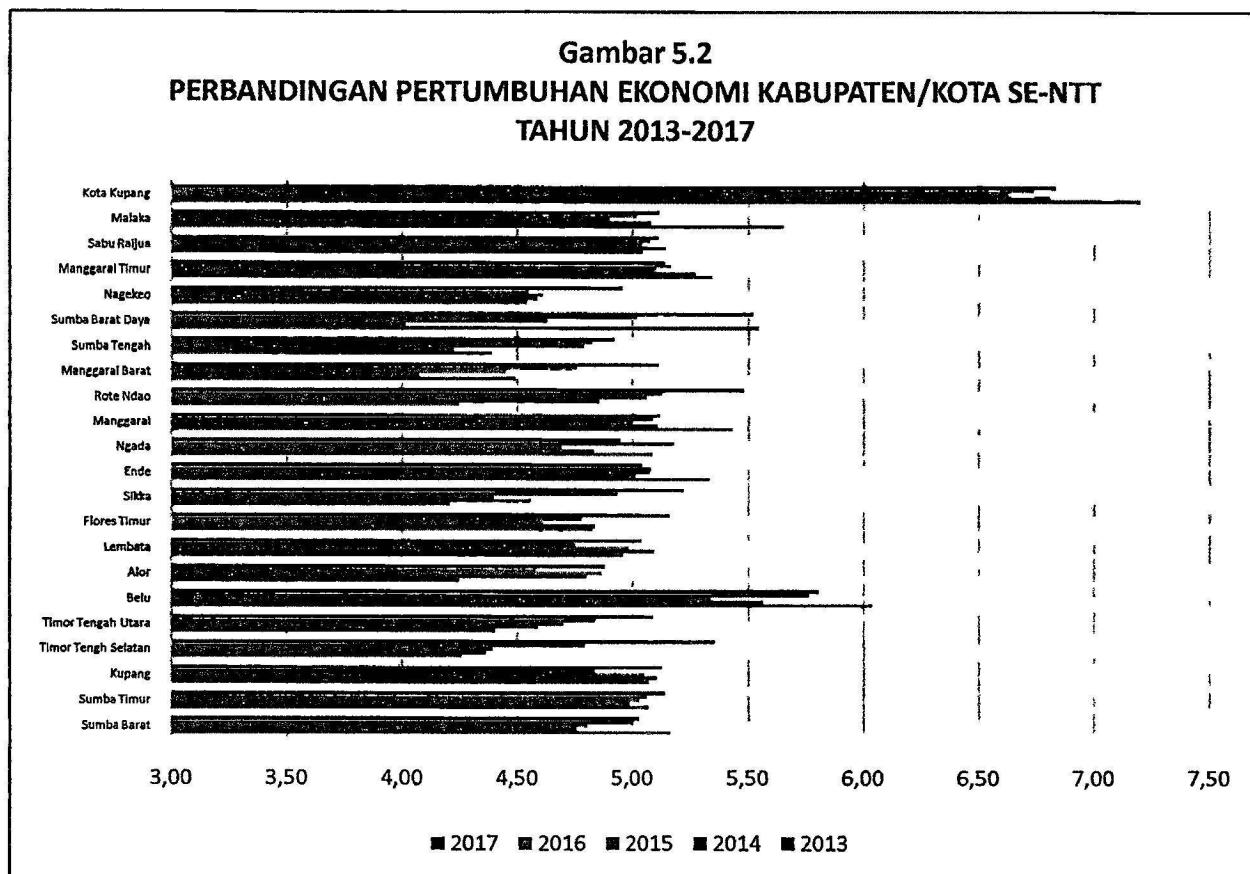
Tabel 5.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-NTT

Kabupaten/Kota	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	5,16	4,76	4,80	5,00	5,02
Sumba Timur	5,07	4,99	5,03	5,06	5,14
Kupang	5,07	5,10	5,05	4,83	5,13
Timor Tengah Selatan	4,25	4,36	4,39	4,79	5,35
Timor Tengah Utara	4,40	4,58	4,70	4,84	5,09
Belu	6,04	5,57	5,34	5,76	5,81
Alor	4,24	4,80	4,86	4,58	4,88
Lembata	4,96	5,09	4,98	4,75	5,04
Flores Timur	4,82	4,84	4,61	4,77	5,16
Sikka	4,20	4,56	4,40	4,93	5,22
Ende	5,33	5,01	5,07	5,08	5,04
Ngada	5,09	4,83	4,69	5,18	4,94
Manggarai	5,43	5,11	5,00	5,09	5,12
Rote Ndao	4,25	4,85	5,06	5,13	5,48
Manggarai Barat	4,49	4,08	4,45	4,76	5,11
Sumba Tengah	4,39	4,22	4,79	4,82	4,92
Sumba Barat Daya	5,54	4,02	4,63	5,02	5,52
Nagekeo	4,54	4,59	4,61	4,55	4,96
Manggarai Timur	5,34	5,27	5,10	5,16	5,14
Sabu Raijua	5,04	5,14	5,04	5,07	5,11
Malaka	5,65	5,08	4,90	5,02	5,11
Kota Kupang	7,20	6,81	6,63	6,74	6,83

Mayoritas Kabupaten/Kota yang ada di NTT mengalami pelambatan pada tahun fiskal 2015, sementara beberapa Kabupaten menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang lebih baik. Pada tahun tersebut ekonomi kota Kupang tumbuh 6,63%, tertinggi dibandingkan daerah lain di NTT, sementara Nagekeo tercatat sebagai Kabupaten dengan laju pertumbuhan paling lambat relatif terhadap Kabupaten lain dengan laju sebesar 4,45%. Trend “konvergensi” laju pertumbuhan ekonomi terlihat pada tiga tahun ini yang dicerminkan dengan makin kecilnya gap laju pertumbuhan antara daerah dengan pertumbuhan tertinggi dengan daerah dengan catatan pertumbuhan paling rendah.

Pada tahun 2016, trend menguatnya pertumbuhan ekonomi terlihat semakin nyata. Kota Kupang terlihat masih menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi 6,74% diikuti Kab. Belu dengan pertumbuhan 5,76%. Ekonomi Kabupaten lain tumbuh berkisar 4,55% - 5,16%. terlihat bahwa seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTT tumbuh lebih baik dibandingkan kinerja pada tahun sebelumnya.

Ekonomi NTT kembali bergairah pada tahun 2017. Pertumbuhan NTT pada tahun 2017, sebesar 5,23%, masih berada di atas pertumbuhan nasional, dan laju pertumbuhan ekonomi daerah NTT lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kota Kupang masih merupakan kontributor terbesar dalam ekonomi agregat NTT dengan catatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun fiscal 2017 sebesar 5,81%, diikuti oleh Kabupaten Belu sebesar 5,73%. Rata-rata pertumbuhan Kabupaten lain di NTT berkisar antara 4,88-5,49%.



5.1.1. Kinerja Kesejahteraan Rakyat

Bagian sebelumnya memberi gambaran mengenai perbandingan kinerja pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota secara umum, namun belum menyentuh mengenai perbandingan pertumbuhan dengan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dua indikator penting kesejahteraan masyarakat. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan IPM akan dapat memperjelas posisi Kabupaten/Kota dalam kuadran-kuadran posisi tertentu, sebagai contoh, menjelaskan Kabupaten mana saja yang memiliki pertumbuhan tinggi dengan proporsi penduduk miskin yang juga tinggi, atau pertumbuhan rendah namun proporsi penduduk miskin yang juga rendah.

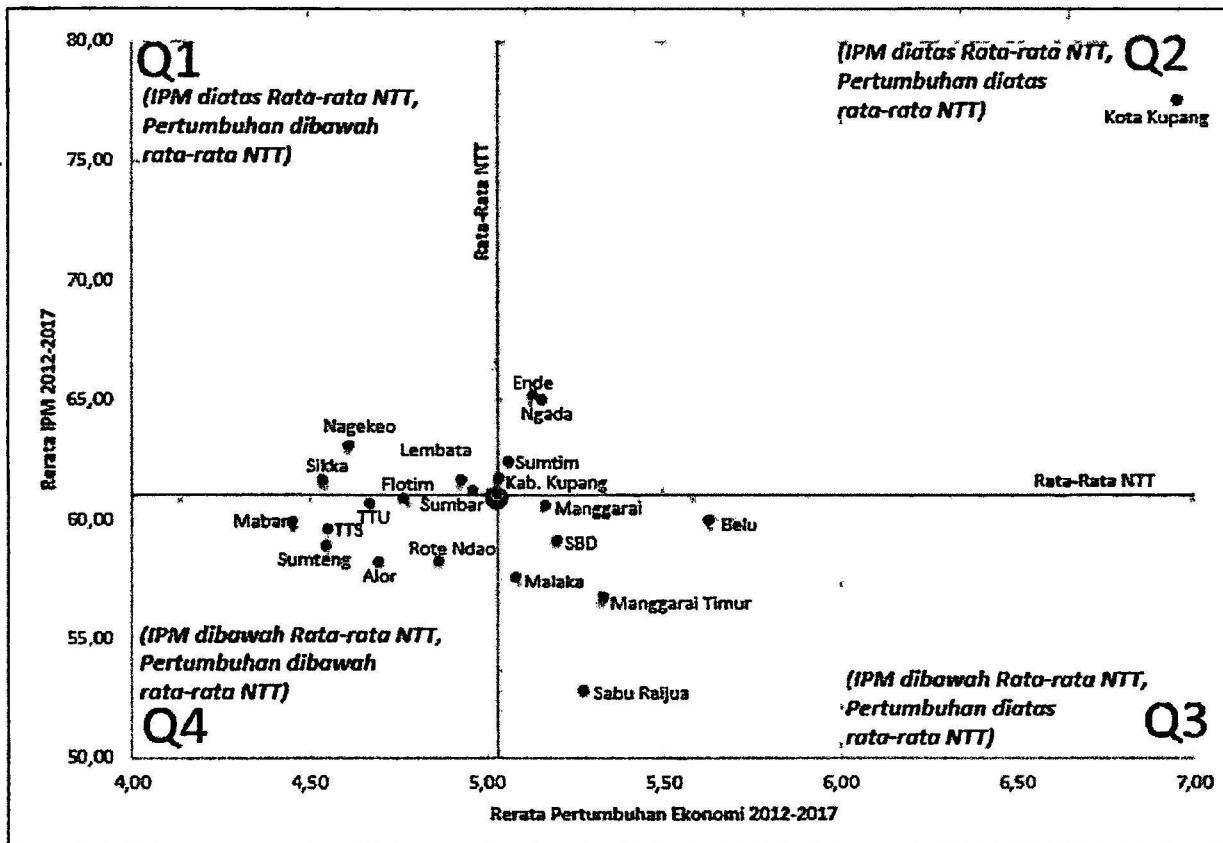
Untuk tujuan ini digunakan tiga diagram cartesian yaitu : pertumbuhan dan proporsi penduduk miskin, pertumbuhan dengan indeks pembangunan manusia, dan Proporsi penduduk miskin dengan indeks pembangunan manusia.

5.1.1.1. Laju Pertumbuhan dan Indeks Pembangunan Manusia

Sumbu Y pada diagram dibawah ini adalah rerata IPM tahun 2012-2017 dan sumbu X mencantumkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 2012-2017. Empat kuadran yang ada mencantumkan informasi sebagai berikut :

- Kuadran 1 (Q1) merupakan memuat kelompok Kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia lebih tinggi dari rata-rata NTT 2012-2017, sementara pertumbuhan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan NTT sepanjang 2012-2017
- Kuadran 2 (Q2) memuat kelompok Kabupaten/Kota yang rerata IPM nya sepanjang 2012-2017 diatas rata-rata NTT dan Pertumbuhan Ekonominya diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi NTT.
- Kuadran 3 (Q3) memuat kelompok Kabupaten yang rerata IPMnya lebih rendah dari rata-rata IPM NTT sepanjang 2012-2017, namun pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari rata-rata Pertumbuhan ekonomi NTT 2012-2017
- Kuadran 4 (Q4) memuat kelompok Kabupaten yang rerata IPMnya berada dibawah rata-rata IPM NTT sepanjang 2012-2017, dan laju pertumbuhan ekonominya lebih lambat dibanding laju pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang periode yang sama.

Gambar 5.3
Diagram rerata IPM tahun 2012-2017



Plot pada diagram di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Nagekeo, Sikka, Lembata, dan Sumba Barat termasuk dalam kuadran pertama. Angka Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi relatif terhadap Kabupaten lain tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi yang relative lambat sepanjang periode yang sama.

Pada kuadran ke dua beberapa Kabupaten/Kota seperti Ende, Ngada, Sumba Timur, Kabupaten Kupang, dan terutama Kota Kupang, tercatat berada dalam kelompok Kab/Kota dengan rerata IPM lebih tinggi dibandingkan rerata IPM NTT 2012-2017 dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lain sepanjang 2012-2017.

Pada kuadran ke tiga, Kabupaten Sumba Barat Daya, Manggarai, Manggarai Timur, Belu, Malaka dan Sabu Raijua memiliki rerata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi relatif terhadap Kabupaten lain yang ada di NTT, namun rerata IPM pada Kabupaten-kabupaten ini masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten-Kabupaten lain sepanjang periode 2012-2017.

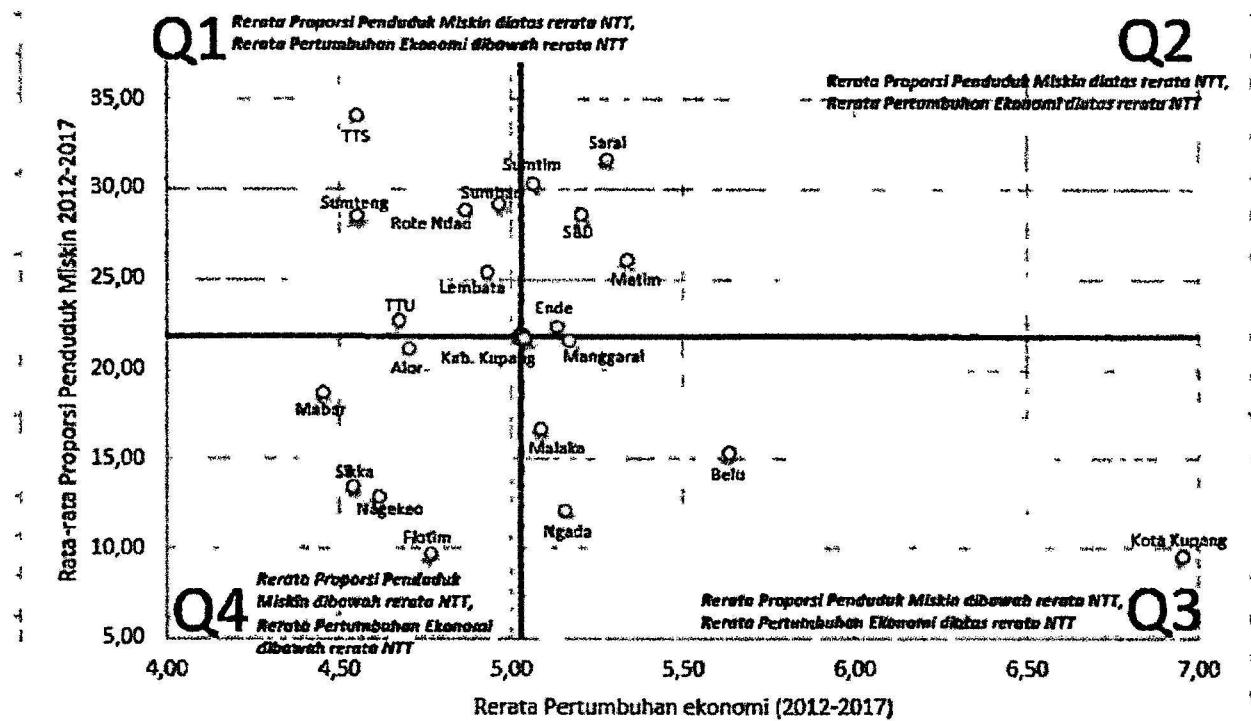
Terdapat tujuh Kabupaten yang menghuni kuadran ke empat pada diagram diatas yang menandakan IPM yang lebih rendah dibandingkan rerata NTT sepanjang 2012-2017, dan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada NTT pada periode 2012-2017. Kabupaten tersebut adalah : Manggarai Barat, Timor Tengah Selatan, Sumba Tengah, Alor, Rote Ndao, Timor Tengah Utara, dan Flores Timur.

5.1.1.2. Laju Pertumbuhan dan Proporsi Penduduk Miskin

Sumbu Y pada diagram dibawah ini mencatat rerata proporsi Penduduk miskin di NTT pada periode 2012-2017 sementara sumbu X mencatat laju pertumbuhan ekonomi sepanjang periode yang sama. Dengan menarik garis lurus pada plot rerata provinsi NTT, didapatkan 4 kuadran sebagai berikut :

- Kuadran 1 (Q1) mengelompokkan Kabupaten yang memiliki Proporsi penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di NTT, dan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di NTT sepanjang periode 2012-2017.
- Kuadran 2 (Q2) mengelompokkan Kabupaten yang memiliki Proporsi penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan Kab/Kota lain di NTT, namun laju pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan Kab/Kota lain di NTT sepanjang 2012-2017
- Kuadran 3 (Q3) meneglompokkan Kabupaten/Kota yang memiliki Proporsi Penduduk miskin lebih kecil dibandingkan Kabupaten lain di NTT dan laju pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lain sepanjang 2012-2017.
- Kuadran 4 (Q4) mengelompokkan Kabupaten yang memiliki Proporsi Penduduk Miskin lebih rendah dibandingkan Kabupaten lain, namun laju pertumbuhan ekonominya lebih lambat dibandingkan Kabupaten lain di NTT sepanjang 2012-2017.

Gambar 5.4
Diagram rerata Proporsi Penduduk Miskin tahun 2012-2017



Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Tengah, Timor Tengah Utara, Lembata, Sumba Barat dan Rote Ndao termasuk dalam Kelompok Kuadran 1 yang mengindikasikan kinerja pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di NTT sepanjang periode 2012-2017

Kuadran 2 dihuni oleh Kabupaten Sabu raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya Manggarai Timur dan Ende. Kelompok Kabupaten ini mencatat laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten lain di NTT, namun Proporsi penduduk miskin pada Kelompok ini juga masih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Lain di NTT sepanjang 2012-2017.

Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang, Malaka, Ngada, Belu, dan khususnya Kota Kupang menghuni Kuadran 3 yang menggambarkan bagaimana laju pertumbuhan ekonomi sepanjang 2012-2017 lebih baik dibandingkan Kabupaten lain di NTT, dan Proporsi Penduduk Miskin di Kabupaten ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten lain di NTT pada periode 2012-2017.

Kabupaten Manggarai Barat, Alor, Sikka, Flores Timur dan Nagekeo berada pada kuadran 4 yang berarti kelompok ini memiliki proporsi penduduk miskin lebih rendah dibandingkan Kabupaten lain di NTT, namun kinerja pertumbuhan ekonominya masih lebih lambat dibandingkan Kabupaten lain di NTT sepanjang periode 2012-2017.

5.1.1.2. Indeks Pembangunan Manusia dan Proporsi Penduduk Miskin

Diagram cartesian terakhir mengelompokkan Kabupaten/Kota dalam ruang kuadran IPM dan Proporsi penduduk miskin. Sumbu Y pada diagram tersebut menunjukkan rerata proporsi penduduk miskin sepanjang 2012-2017, sementara sumbu X menunjukkan rerata IPM sepanjang 2012-2017.

tinggi dan IPM yang rendah relatif terhadap capaian NTT sepanjang periode 2012-2017

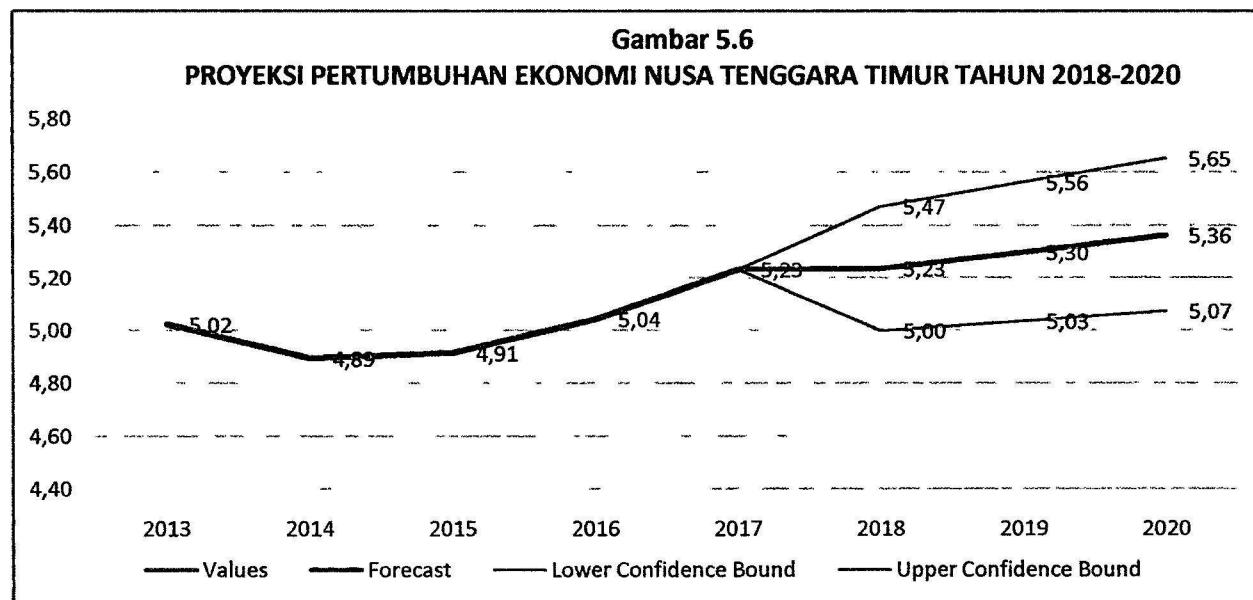
Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Lembata, Ende, dan Kabupaten Kupang berada pada kuadran kedua yang mengindikasikan rerata IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan rerata NTT, namun dengan proporsi penduduk miskin yang lebih banyak dibandingkan rerata NTT pada periode 2012-2017.

Kota Kupang, Ngada, Nagekeo, dan Sikka berada pada kuadran ketiga yang mendgindikasikan rerata IPM lebih tinggi dibandingkan rerata IPM NTT, dan proporsi penduduk miskin lebih rendah dibandingkan rerata NTT pada periode 2012-2017

Pada kuadran keempat Kabupaten Alor, Manggarai, Manggarai Barat, Malaka, Belu, dan Flores Timur termasuk dalam kelompok Kabupaten dengan proporsi penduduk miskin lebih sedikit dibandingkan rerata Provinsi NTT, namun dengan rerata IPM yang juga lebih rendah dibandingkan rerata NTT pada periode 2012-2017.

5.2. PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI NTT PADA TAHUN RENCANA

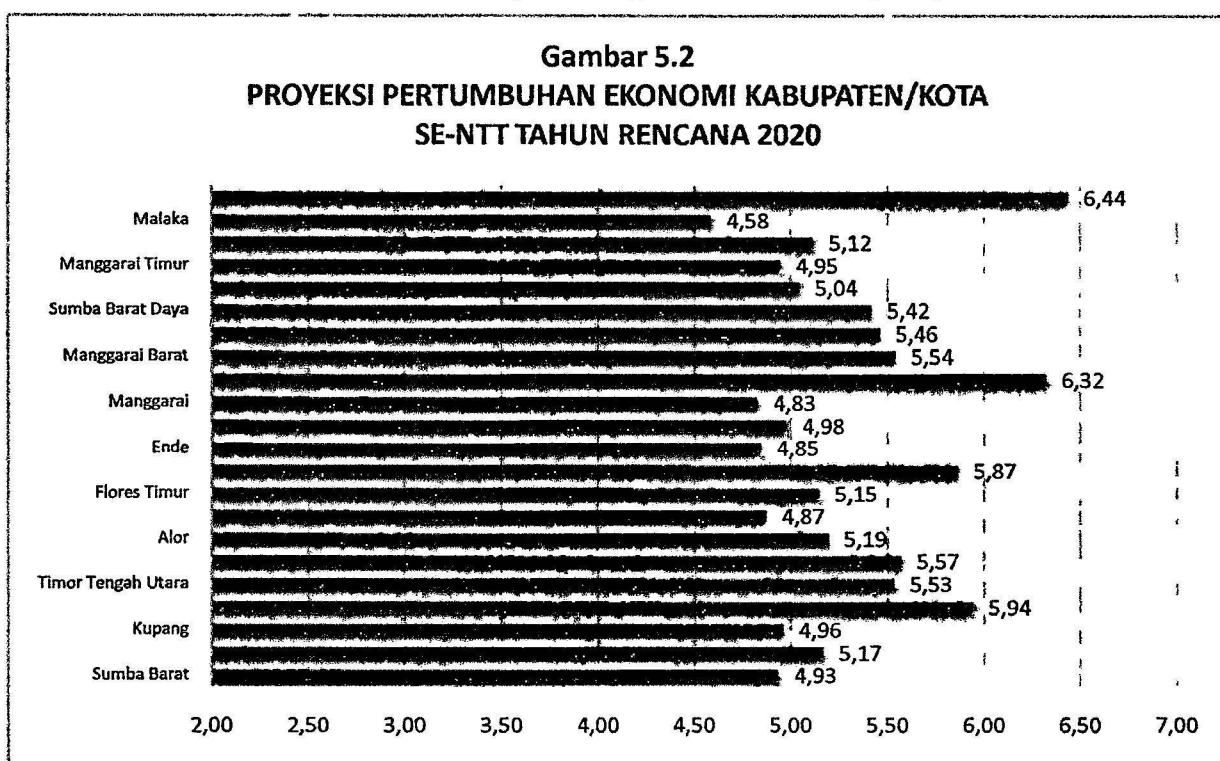
Berdasarkan catatan kinerja ekonomi daerah sepanjang 2013-2017, pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang 2018-2020 diproyeksikan akan terus menunjukkan kinerja yang semakin baik. Pada tahun 2018, ekonomi Nusa



Tenggara Timur diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,23%, laju yang diprediksikan akan sama dengan kinerja pada tahun 2017. Pertumbuhan lebih tinggi diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2019 dengan angka pertumbuhan 5,30%. Membaiknya situasi ekonomi dunia, dan nasional dipercaya akan mendorong ekonomi dunia untuk ikut tumbuh lebih cepat. Trend pertumbuhan yang makin tinggi juga diprediksi akan terus terjadi pada tahun rencana 2020. Ekonomi NTT diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,36%.

Dipilih per Kabupaten/Kota, Kinerja ekonomi beberapa Kab/Kota yang sepanjang 2013-2017 tercatat memiliki pertumbuhan yang tinggi, diprediksi akan tetap tumbuh dengan cepat, akan tetapi laju pertumbuhannya tidak akan seagresif laju pertumbuhan dari Kabupaten/Kota yang sepanjang periode 2013-2017 menunjukkan kinerja yang lambat. Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT masih akan tetap menjadi daerah dengan laju pertumbuhan yang paling tinggi relative terhadap Kabupaten lain di NTT. Pada tahun 2020, ekonomi Kota Kupang diprediksi tumbuh 6,44%. Kabupaten Rote Ndao juga diprediksi akan mencatat laju pertumbuhan yang tinggi. Pada tahun 2020, Ekonomi Kabupaten ini diprediksikan akan tumbuh 6,32%. Dengan melihat kinerja ekonomi daerah dalam lim lim atahun terakhir, pada tahun rencana 2020 Kabupaten Malaka diprediksi akan memiliki laju pertumbuhan paling rendah relative terhadap Kabupaten lain di NTT dengan laju pertumbuhan terprediksi sebesar 4,58%.

Trend “konvergensi” laju pertumbuhan ekonomi daerah akan tetap berlangsung sepanjang 2018-2020 dengan pole yang berbeda. Berbeda dengan periode 2013-2017, dimana laju pertumbuhan dari Kabupaten-kabupaten paling lambat terlihat sangat “cepat” sementara pertumbuhan dari Kabupaten dengan pertumbuhan tinggi melambat, pada 2018-2020, semua Kabupaten/Kota rata-rata mengalami pertumbuhan yang stabil dan lebih

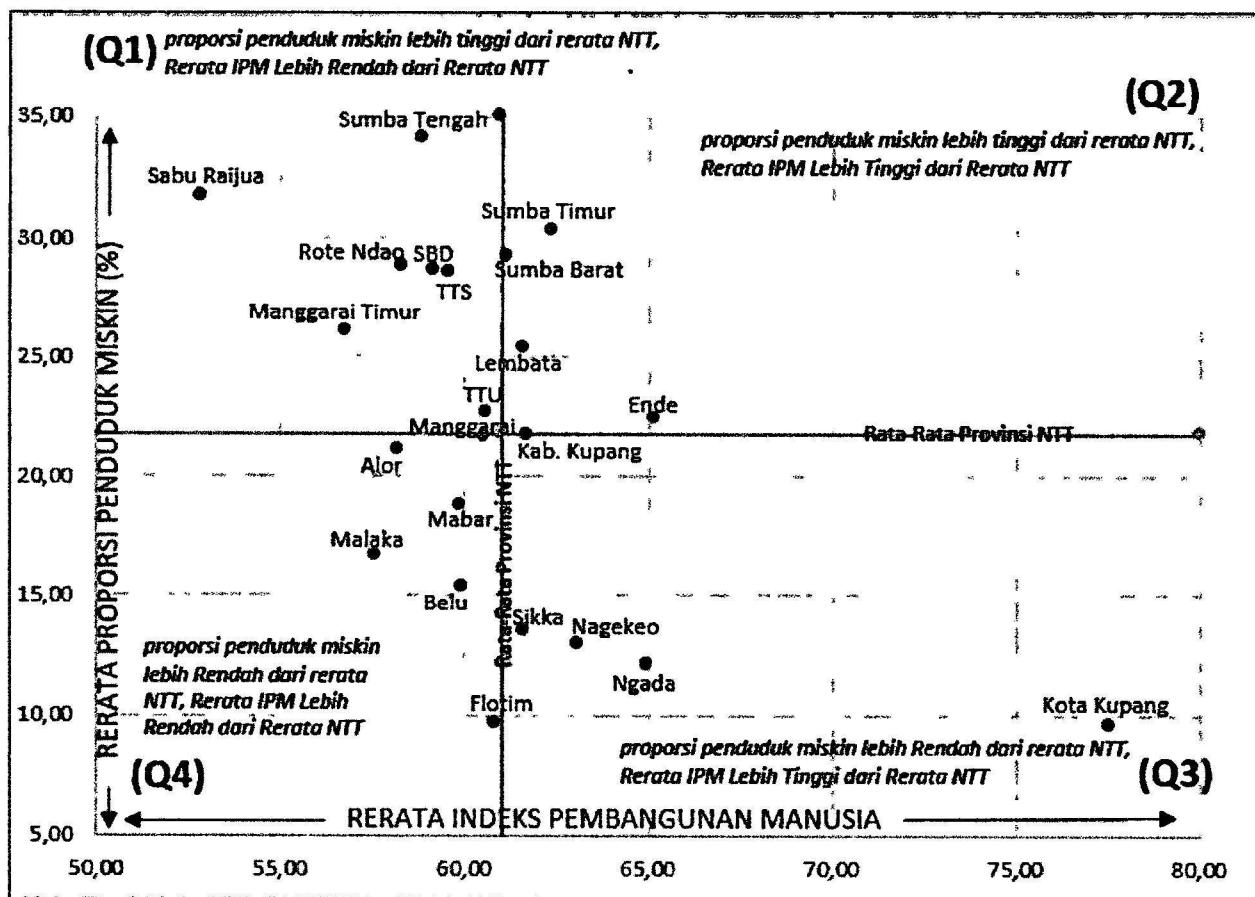


tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, beberapa daerah diprediksi akan mengalami pelambatan laju pertumbuhan, namun angkanya sangat kecil dan tidak mempengaruhi angka pertumbuhan agregat NTT yang diprediksi tumbuh 5,36%.

Dengan menggunakan plot NTT dalam diagram didapatkan empat kuadran dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. Kuadran 1 (Q1) : Mengelompokkan Kabupaten yang memiliki rerata Proporsi Penduduk Miskin lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain di NTT dan rerata IPM lebih rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di NTT sepanjang 2012-2017.
2. Kuadran 2 (Q2) mengelompokkan Kabupaten yang memiliki rerata proporsi penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain, sementara rerata IPM nya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lain di NTT sepanjang 2012-2017
3. Kuadran 3 (Q3) mengelompokkan Kabupaten/Kota yang memiliki rerata proporsi penduduk miskin lebih sedikit dibandingkan Kabupaten lain di NTT dan rerata IPM yang lebih tinggi dibandingkan rerata NTT sepanjang 2012-2017
4. Kuadran 4 (Q4) mengelompokkan Kabupaten yang memiliki proporsi penduduk miskin lebih sedikit dibandingkan rerata NTT namun dengan rerata IPM yang juga lebih rendah dibandingkan rerata NTT sepanjang periode 2012-2017

Gambar 5.5
Diagram rerata Proporsi Penduduk Miskin dan
Pertumbuhan IPM rerata tahun 2012-2017



Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Tengah, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur dan Timor Tengah Utara berada pada kuadran pertama yang mengindikasikan proporsi penduduk miskin yang

3. TARGET PENGURANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NTT PADA TAHUN RENCANA 2020

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan untuk mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin menjadi di bawah dua digit pada akhir periode pembangunan jangka menengah 2018-2023. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.146.788 jiwa dari total populasi sebesar 5.371.370 jiwa atau setara dengan 21,35%, jauh lebih tinggi dari proporsi penduduk miskin di Indonesia secara umum. Pada tahun rencana 2020, pemerintah menargetkan pengurangan baik jumlah maupun proporsi penduduk miskin di NTT menjadi 997.461 jiwa dari prediksi total populasi sebesar 5.541.355 jiwa, atau setara dengan 18% dari total populasi; pada 2021 ditargetkan turun menjadi 14%; pada 2022 ditargetkan turun menjadi 11%; dan pada tahun 2023 ditargetkan turun menjadi 8%.

Dengan menetapkan target pengentasan kemiskinan demikian, Pemerintah Provinsi membutuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administrasinya untuk dapat mencapai target pengurangan kemiskinan minimal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini

Tabel 5.2
Target Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten se Provinsi NTT Tahun Rencana 2020

NO	KAB/ KOTA	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		Populasi / (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%	Proyeksi Populasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%	Prediksi Populasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%	Prediksi Populasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%	Prediksi Populasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%	Prediksi Populasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%
1	Sumba Barat	127,776	36,562	28.61%	129,795	36,531	28.15%	131,819	31,801	24.12%	133,863	25,117	18.76%	135,924	20,039	14.74%	138,004	14,797	10.72%
2	Sumba Timur	256,722	77,908	30.35%	260,778	77,842	29.85%	264,846	67,762	25.59%	268,951	53,521	19.90%	273,093	42,700	15.64%	277,272	31,529	11.37%
3	Kupang	378,704	84,057	22.20%	384,688	83,985	21.83%	390,689	73,110	18.71%	396,744	57,745	14.55%	402,854	46,070	11.44%	409,018	34,018	8.32%
4	Timor Tengah Selatan	471,357	135,975	28.85%	478,805	135,860	28.37%	486,274	118,288	24.33%	493,811	93,412	18.92%	501,416	74,525	14.86%	509,088	55,029	10.81%
5	Timor Tengah Utara	253,681	58,386	23.02%	257,690	58,336	22.64%	261,710	50,783	19.40%	265,766	40,110	15.09%	269,859	32,000	11.86%	273,988	23,629	8.62%
6	Belu	216,992	33,832	15.59%	220,421	33,803	15.34%	223,859	29,426	13.14%	227,329	23,242	10.22%	230,830	18,543	8.03%	234,362	13,692	5.84%
7	Alor	206,116	43,747	21.22%	209,373	43,710	20.88%	212,639	38,050	17.89%	215,935	30,053	13.92%	219,260	23,977	10.94%	222,615	17,705	7.95%
8	Lembata	139,904	36,134	25.83%	142,114	36,103	25.40%	144,331	31,428	21.77%	146,568	24,823	16.94%	148,825	19,804	13.31%	151,102	14,623	9.68%
9	Flores Timur	255,612	26,876	10.51%	259,650	26,853	10.34%	263,701	23,376	8.86%	267,788	18,463	6.89%	271,912	14,730	5.42%	276,072	10,877	3.94%
10	Sikka	322,337	44,853	13.91%	327,430	44,815	13.69%	332,538	39,012	11.73%	337,692	30,813	9.12%	342,893	24,583	7.17%	348,139	18,152	5.21%
11	Ende	276,410	64,884	23.47%	280,777	64,828	23.09%	285,158	56,434	19.79%	289,577	44,573	15.39%	294,037	35,561	12.09%	298,536	26,258	8.80%
12	Ngada	161,610	20,140	12.46%	164,164	20,123	12.26%	166,725	17,517	10.51%	169,309	13,835	8.17%	171,916	11,038	6.42%	174,547	8,151	4.67%
13	Manggarai	334,432	71,610	21.41%	339,716	71,549	21.06%	345,016	62,284	18.05%	350,364	49,194	14.04%	355,759	39,248	11.03%	361,202	28,981	8.02%
14	Rote Ndao	162,152	45,412	28.01%	164,714	45,373	27.55%	167,283	39,498	23.61%	169,876	31,197	18.36%	172,492	24,889	14.43%	175,132	18,378	10.49%
15	Manggarai Barat	267,392	49,218	18.41%	271,617	49,176	18.10%	275,854	42,809	15.52%	280,130	33,812	12.07%	284,444	26,975	9.48%	288,796	19,919	6.90%
16	Sumba Tengah	71,843	25,282	35.19%	72,979	25,260	34.61%	74,117	21,989	29.67%	75,266	17,368	23.08%	76,425	13,856	18.13%	77,594	10,232	13.19%
17	Sumba Barat Daya	337,171	99,204	29.42%	342,498	99,119	28.94%	347,841	86,285	24.81%	353,233	68,151	19.29%	358,673	54,371	15.16%	364,160	40,148	11.02%

NO	KAB/KOTA	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		Populasi / (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%	Proyeksi Populasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%	Prediksi Populasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%	Prediksi Populasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%	Prediksi Populasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%	Prediksi Populasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	%
18	Nagekeo	145,075	19,133	13.19%	147,367	19,117	12.97%	149,666	16,642	11.12%	151,986	13,144	8.65%	154,326	10,487	6.80%	156,687	7,743	4.94%
19	Manggarai Timur	284,572	74,590	26.21%	289,068	74,526	25.78%	293,578	64,876	22.10%	298,128	51,241	17.19%	302,719	40,881	13.50%	307,351	30,187	9.82%
20	SabuRajua	92,967	28,122	30.25%	94,436	28,098	29.75%	95,909	24,460	25.50%	97,396	19,319	19.84%	98,896	15,413	15.59%	100,409	11,381	11.33%
21	Malaka	189,274	30,802	16.27%	192,265	30,776	16.01%	195,264	26,791	13.72%	198,291	21,161	10.67%	201,345	16,882	8.38%	204,425	12,466	6.10%
22	Kota Kupang	419,270	40,080	9.56%	425,695	40,046	9.41%	432,538	34,861	8.06%	439,243	27,534	6.27%	446,007	21,967	4.93%	452,831	16,220	3.58%
	Nusa Tenggara Timur	5,371,369	1,146,807	21.35%	5,456,040	1,145,829	21.00%	5,541,355	997,482	18.00%	5,627,246	787,828	14.00%	5,713,905	628,539	11.00%	5,801,330	464,115	8.00%

Secara agregat NTT, penurunan kemiskinan sebesar -3,35 poin persen dibandingkan pada tahun 2018. Dengan prediksi populasi sebesar 5,4 juta penduduk pada tahun 2020, jumlah total penduduk miskin ditargetkan turun menajadi dibawah 1 juta jiwa.

Dengan memperhatikan besaran proporsi penduduk miskin pada Kabupaten/Kota yang ada di NTT, dan kinerja penurangan penduduk miskin pada masing-masing kabupaten/kota se-NTT maka target pengurangan kemiskinan yang lebih besar dibebankan kepada Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu Kabupaten Sumba tengah (tahun 2018:35,19%, ditargetkan menjadi 29,67% pada tahun 2020), Kabupaten Sumba Timur (tahun 2018: 30,35% ditargetkan menjadi 25, 59% pada tahun 2020), dan Kabupaten Sabu Raijua (tahun 2018: 30,25% ditargetkan menjadi 25,50%).

Untuk dapat mencapai target penurunan penduduk miskin pada tahun rencana 2020, kegiatan-kegiatan pembangunan yang berioentasi kepada masyarakat miskin mutlak diperlukan. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota perlu diarahkan secara efektif untuk menciptakan program-program kerayatan yang *pro-poor*, dan *pro job* agar persoalan kemiskinan yang menempatkan NTT sebagai Provinsi termiskin nomor tiga di Indonesia dapat diurai dan diselesaikan.

5.4 PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NTT PADA TAHUN RENCANA 2020

Dalam kaitan dengan penurunan kemiskinan, fokus pada aspek-aspek paling mendasar dari kemiskinan menjadi strategi dasar untuk menurunkan kemiskinan di NTT. Salah satu aspek kemiskinan adalah perumahan layak. Tingginya angka kemiskinan di NTT disebabkan salah satunya oleh tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi ini. Pada tahun 2018 jumlah RTLH di NTT berjumlah 426.990 unit rumah.

Mengingat besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk penanganan RTLH di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi berinisiatif untuk mengusulkan intervensi pemerintah pusat dalam menangani persoalan RTLH dimaksud. Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan skema penanganan RTLH untuk dibiayai APBN sepanjang 2019-2023 sebanyak 100.000 RTLH dengan rincian 20.000 RTLH yang ditangani setiap tahun yang tersebar pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT sebagaimana tertera pada table berikut ini

Tabel 5.3
Usulan penanganan RTLH dari APBN tahun 2019-2023

No	Kab/Kota	Desa	RTLHO	% RTLH	2,019	2,020	2021	RTLH3	2022	2023	TOTAL
1	Sumba Barat	63	3,380	12	158	56	-	-	-	-	214
2	Sumba Timur	140	20,130	3,679	943	950	919	4513	725	-	8,050
3	Kupang	160	26,583	3,293	1,245	1,306	1361	8114	1303	-	13,329
4	TTS	266	52,784	5,254	2,472	2,722	3068	21431	3441	3629	36,763
5	TTU	160	30,046	3,979	1,407	1,511	1637	10612	1704	-	16,871
6	Belu	69	18,402	2,488	862	938	1038	7006	1125	559	11,528
7	Alor	158	10,931	3,221	512	382	120	-	-	-	1,014
8	Lembata	144	9,606	1,519	450	322	65	-	-	-	837
9	Flores Timur	229	8,274	3,149	388	134	-	-	-	-	522
10	Sikka	147	21,636	3,021	1,013	1,030	1014	5231	840	-	9,128
11	Ende	255	17,795	1,787	834	665	317	-	-	-	1,816
12	Ngada	135	6,156	2,316	288	129	-	-	-	-	417
13	Manggarai	145	16,508	3,893	773	729	612	1637	263	-	4,014
14	Rote Ndao	112	13,453	3,831	630	590	488	1171	188	-	3,067
15	Manggarai Barat	164	21,834	4,949	1,023	1,020	968	4478	719	-	8,208
16	Sumba Tengah	65	7,578	9,770	355	302	189	-	-	-	846
17	SBD	173	70,213	2,929	3,289	3,872	4794	38902	6246	12632	69,735
18	Nagekeo	97	9,056	4,578	424	349	191	-	-	-	964
19	Manggarai Timur	159	27,769	5,648	1,301	1,377	1460	9023	1449	-	14,610
20	Sabu Raijua	58	11,192	1,231	524	525	502	2385	383	-	4,319
21	Malaka	127	4,964	2,093	233	68	-	-	-	-	301
22	Kota Kupang	0	18,700		876	1,024	1256	10065	1616	3180	18,017
					20,000	20,001	19999	124568	20002	20000	224,570

Selain mendorong peran Pemerintah Pusat dalam penanganan RTLH, dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan penanganan 25.000 unit RTLH yang akan dibagi dalam lima tahun masing-masing 5000 unit pada setiap tahun sejak 2020-2023 yang tersebar pada 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan APBD Provinsi NTT dengan rincian sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 5.4
Target Penanganan RTLH oleh Pemerintah Provinsi NTT tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	RTLHO	% RTLH	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1	Sumba Barat	3,380	12.41	40	14	-	-	-	54
2	Sumba Timur	20,130	3,679	236	237	230	181	-	884
3	Kupang	26,583	3,293	311	326	340	326	-	1,303
4	TTS	52,784	5,254	618	680	767	860	-	2,925
5	TTU	30,046	5,557	352	378	409	426	-	1,565
6	Belu	18,402	3,979	215	234	259	281	-	989
7	Alor	10,931	2,488	128	96	30	-	-	254
8	Lembata	9,606	3,231	112	80	16	-	-	208
9	Flores Timur	8,274	1,519	97	34	-	-	-	131
10	Sikka	21,636	3,149	253	257	253	210	-	973

No	Kabupaten/Kota	RTLHO	% RTLH	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
11	Ende	17,795	3,021	208	166	79	-	-	453
12	Ngada	6,156	1,787	72	32	-	-	-	104
13	Manggarai	16,508	2,316	193	182	153	66	-	594
14	Rote Ndao	13,453	3,893	158	147	122	47	-	474
15	Manggarai Barat	21,834	3,831	256	255	242	180	-	933
16	Sumba Tengah	7,578	4,949	89	76	47	-	-	212
17	SBD	70,213	9,770	822	968	1198	1561	3990	8,539
18	Nagekeo	9,056	2,929	106	87	48	-	-	241
19	Manggarai Timur	27,769	4,578	325	344	365	362	-	1,396
20	Sabu Raijua	11,192	5,648	131	131	126	96	-	484
21	Malaka	4,964	1,231	58	17	-	-	-	75
22	Kota Kupang	18,700	20.93	219	256	314	404	1,009	2,202
	TOTAL	426,990	2,093	4,999	4,997	4998	5000	4999	24,993

Pemerintah Provinsi juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah administrasinya untuk menggunakan sumber daya APBD nya masing-masing untuk menangani RTLH di Kabupaten/Kota masing-masing dengan target lima tahun sebanyak 6.343 RTLH yang dapat ditangani. Rata-rata setiap tahun RTLH yang ditangani oleh Kab/Kota se-NTT secara total sebanyak 1.300 unit. Rincian target penanganan RTLH oleh Kabupaten/Kota se-NTT sepanjang 2019-2023 adalah sebagaimana tertera pada table berikut

Tabel 5.5
Target Penanganan RTLH oleh Kabupaten/Kota
tahun 2018-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	RTLHO	%RTLH	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1	SUMBA BARAT	3,380	12	40	14			-	54
2	SUMBA TIMUR	20,130	37	236	237	230	181	-	884
3	KUPANG	26,583	33	311	326	340	326	-	1,394
4	TIMOR TENGAH SELATAN	30,046	53	618	680	767	860	-	2,926
5	TIMOR TENGAH UTARA	18,402	56	352	378	409	426	-	1,565
6	BELU	10,931	40	2,156	234	259	281	-	991
7	ALOR	9,606	25	128	96	30		-	254
8	LEMBATA	8,274	32	112	80	16		-	209
9	FLORES TIMOR	21,636	15	97	34	-		-	131
10	SIKKA	17,795	31	253	257	253	210	-	974
11	ENDE	6,156	30	208	166	76		-	454
12	NGADA	16,508	18	72	32	-		-	104
13	MANGGARAI	13,453	23	193	182	153	66	-	594
14	ROTE NDAO	21,834	39	158	147	122	47	-	474
15	MANGGARAI BARAT	7,578	38	256	255	242	180	-	932
16	SUMBA TENGAH	70,213	49	89	76	47		-	211
17	SUMBA BARAT DAYA	70,213	98	822	968	1,198	1,561	3,990	8,540
18	NAGEKEO	9,056	29	106	87	48		-	241
19	MANGGARAI TIMUR	27,769	46	325	344	365	362	-	1,397
20	SABU RAIJUA	11,192	56	131	131	126	96	-	484
21	MALAKA	4,964	12	58	17	-	-	-	75
22	KOTA KUPANG	18,700	21	219	256	314	405	1,009	2,202
	TOTAL	426,990	37	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000

Selain dengan memobilisasi anggaran pemerintah (APBN dan APBD), pemerintah Provinsi juga berinisiatif mendorong partisipasi Desa melalui Dana Desa, dan partisipasi swasta lewat dana CSR yang diarahkan untuk penanganan RTLH di NTT. Dari sumber pendanaan tersebut , ditargetkan dalam lima tahun 195.717 RTLH telah ditangani oleh ADD, sementara 25.000 RTLH ditangani oleh swasta melalui CSR. Rincian target penanganan RTLH yang dibiayai dari ADD dan CSR sepanjang 2019-2023 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut

Tabel 5.5
Target penanganan RTLH dibiayai ADD dan CSR tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN	DESA	RTLH	RTLH	2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL	
					2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023
1	SUMBA BARAT	63	33,80	12,41%	1,260	40		14					-	-	1,260	54
2	SUMBA TIMUR	140	20,139	36,79%	2,800	236		237	2,800	230	2,438	181	-	-	10,838	884
3	KUPANG	160	26,583	32,93%	3,200	311	2,800	326	3,200	340	3,200	326	960	-	13,760	1,304
4	TIMOR TENGAH SELATAN	266	62,784	52,54%	5,320	618	3,200	680	5,320	767	5,320	860	5,320	-	26,600	3
5	TIMOR TENGAH UTARA	160	30,046	55,57%	3,299	352	5,320	378	3,200	409	3,200	426	2,857	-	15,657	2
6	BELU	69	18,402	39,79%	1,380	215	3,200	234	1,380	259	1,380	281	1,380	-	6,900	991
7	ALOR	158	10,931	24,88%	3,160	128	1,380	96	90	30			-	-	6,410	254
8	LEMBATA	144	9,606	32,21%	2,880	112	3,160	80		16			-	-	5,760	209
9	FLORES TIMUR	229	8,274	15,19%	4,580	97	2,880	34					-	-	5,491	131
10	SIKKA	147	21,636	31,49%	2,940	253	911	257	2,940	253	2,940	210	-	-	11,760	974
11	ENDE	255	17,795	30,21%	5,100	208	2,940	166	1,873	79			-	-	12,073	454
12	NGADA	135	6,156	17,87%	2,700	72	5,100	32	2,900				-	-	3,530	104
13	MANGGARAI	145	16,508	23,16%	2,900	193	830	182	2,240	153	2,900	66	-	-	8,948	594
14	ROTE NDAO	112	13,453	38,93%	2,240	159	2,900	147	3,280	122	2,240	47	-	-	7,628	474
15	MANGGARAI BARAT	164	21,834	38,31%	3,280	256	2,240	255	710	242	3,280	180	-	-	12,251	932
16	SUMBAH TENGAH	65	7,578	49,49%	1,300	89	3,280	76	360	47	710		-	-	3,310	211
17	SUMBA BARAT DAYA	173	70,213	97,70%	3,460	822	1,300	968	731	1,198	3,460	1,561	3,460	3,990	17,300	8,540
18	NAGEKEO	97	9,056	29,29%	1,940	106	3,460	87	3,180	48	731		-	-	4,611	241
19	MANGGARAI TIMUR	159	27,769	45,78%	3,180	325	1,940	344	1,160	365	3,180	362	1,670	-	14,390	1,397
20	SABU RAIJUA	58	11,192	56,48%	1,160	131	3,180	131		126	1,160	95	-	-	4,297	484
21	MALAKA	127	4,964	12,31%	2,540	59	1,160	17				-	-	-	2,943	75
22	KOTA KUPANG	-	18,700	20,93%		219	403	256		314		404	-	1,009	-	2,202
	TOTAL	3,026	42,990	37,30%	60,520	5,000	51,584	5,000	38,464	5,000	38,464	5,000	15,647	5	195,717	25,000

Dengan mendorong mobilisasi sumber daya yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota, Desa dan Swasta, target penanganan 100% RTLH di NTT dapat diselesaikan pada akhir periode perencanaan Jangka Menengah 2018-2023.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 merupakan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. Namun demikian, dalam mewujudkan tujuan dan saran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018–2023 dan RKPD Tahun 2020 khususnya, dibutuhkan kerjasama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, maupun Lembaga donor/mitra.

Program dan Kegiatan sesuai arahan nasional yang mendukung pencapaian prioritas nasional sekaligus mendukung pencapaian prioritas daerah. Karena itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung program dan kegiatan nasional di Nusa Tenggara Timur.

Perencanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 mengacu pada RPJMD 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kewenangan masing-masing perangkat daerah. Perencanaan dimaksud akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2020.

Pagu Indikatif per Perangkat Daerah untuk tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2020

PERANGKAT DAERAH	Anggaran
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	639.008.868.556
DINAS KESEHATAN	369.840.773.395
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG	162.893.626.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.375.629.810.132
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.871.322.120
DINAS SOSIAL	23.430.995.260
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.434.500.200
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	36.278.102.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.103.719.200
DINAS PERHUBUNGAN	10.751.711.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.790.528.700
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	18.697.027.500
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.368.351.000
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.021.236.760
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.591.060.860
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.937.119.000
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	36.781.346.000
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	47.306.720.000
DINAS PETERNAKAN	21.641.288.000
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.880.828.900
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.177.769.000
PERANGKAT DAERAH	Anggaran
INSPEKTORAT DAERAH	10.706.954.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	17.559.464.600
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	45.416.006.000
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI	19.828.211.740
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	20.592.269.900
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	19.943.292.726
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	4.878.830.000
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2.743.336.500
BIRO UMUM	61.582.173.500
BIRO HUKUM	1.975.681.598
BIRO ORGANISASI	3.754.751.000
BIRO EKONOMI DAN KERJASAMA	3.456.811.000
BIRO PEMERINTAHAN	6.666.843.000
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	4.578.266.000
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	2.850.282.191
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	62.662.495.700
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.443.490.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.983.961.585
TOTAL	3.155.059.824.623

Pagu indikatif ini dijabarkan ke dalam program dan kegiatan dalam Rancangan Renja masing-masing Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD dan Renstra PD. Rincian pagu belanja langsung terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2020.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2020 disajikan sebagaimana Tabel 7.1 dan 7.2 berikut.

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020
1	Pertumbuhan ekonomi	%	6,6
2	Laju Inflasi	%	3
3	Indeks Gini	poin	0,35
4	Indeks Pembangunan Manusia	poin	65,54
5	Persentase Penduduk Miskin	%	18
6	Usia Harapan Hidup	Umur	66,67
7	Peringkat Nasional LPPD	peringkat	24

**Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2020**

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT <i>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i> - Persentase peningkatan - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan PDRB perkapita - Tingkat pengeluaran perkapita - Tingkat pengangguran terbuka <i>Kesejahteraan Sosial</i> Urusan Pendidikan - Rata-rata lama sekolah - Angka melek huruf	Rp.M Rp.Juta Rp.000 %	1.450.000 19 8,3 3,04 7,85 93,66
1			
1			

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020
B	ASPEK PELAYANAN UMUM		
2	<p><i>Pelayanan Urusan Wajib :</i> Terkait Pelayanan Dasar</p> <p>Pendidikan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata lama sekolah - Angka melek huruf 	thn %	7,85 93,66
3	<p>Urusan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angka kematian ibu - Angka kematian bayi - Angka kematian balita 	kasus kasus kasus	0 0 0
4	<p>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase jalan dalam kondisi baik - Daerah irigasi dalam kondisi baik - Jumlah rumah tidak layak huni 	km ha unit	423 3.600 304.990
5	<p>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih Melalui pemilu : <ul style="list-style-type: none"> - Pilpres - Pilkada - Presentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 		
6	<p>Urusan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase PMKS yang ditangani <p>Pelayanan Urusan Tidak Terkait Pelayanan Dasar</p>	%	18,55
7	<p>Urusan Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pengangguran terbuka 	%	2,7
8	<p>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> - % Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi - Jumlah kasus KDRT - Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak 	% Kasus %	30 250 2,9
9	<p>Urusan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skor pola pangan harapan 	poin	78
10	<p>Urusan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks kualitas lingkungan hidup 	poin	64
11	<p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posyandu aktif - BUMDes aktif 	Unit Unit	5642 780
12	<p>Urusan Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase angkutan umum layak jalan 		
13	<p>Urusan Komunikasi dan Informatika</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skor PeGi pemeringkatan e-government - Persentase informasi publik yang disediakan dan Dipublikasi - Persentase perangkat daerah yang telah memiliki website aktif 	unit	37

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2020
14	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah - Rasio UMKM dan koperasi terhadap populasi penduduk	Poin	0,9
15	Urusan Penanaman Modal - Realisasi nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	5,5
16	Urusan Kepemudaan dan Olahraga - Jumlah medali yang diperoleh dalam penyelenggaraan olah raga tingkat regional, nasional dan internasional - Persentase organisasi pemuda yang dibina	Buah	5
17	Urusan Kebudayaan - Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	55
18	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan - Persentase Angka kunjungan perpustakaan per tahun - Pengelolaan arsip secara baku	%	52
19	Pelayanan Urusan Pilihan Urusan Pertanian - Nilai tukar petani	Point	101,7
20	Urusan Pariwisata - Presentase kunjungan wisatawan - Rata-rata lama tinggal wisatawan	org hari	887.815 3
21	Urusan Kelautan dan Perikanan - Nilai tukar nelayan	poin	105,8
22	Urusan Perindustrian dan Perdagangan - Persentase pertumbuhan ekspor	%	
23	Urusan Transmigrasi		
24	Urusan Pemerintahan Urusan Perencanaan Pembangunan - Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen perencanaan - Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD - Persentase ketersediaan data dan informasi - Perencanaan pembangunan	%	100 100 100 100
25	Urusan Keuangan dan Asset Opini laporan BPK	opini	WTP
26	Urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Nilai rata-rata SKP	Point	
27	Urusan Kelitbangan - Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	laporan	20

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2020 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan Program dan Kegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang berasal dari swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga Kejasama Bilateral dan Multilateral.

Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang mulai dari jenjang pemerintahan terendah yaitu Desa hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional. Acuan dokumen Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 selain dokumen perencanaan jangka menengah daerah, juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Oleh karena itu Penyesuaian RKPD Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi dan pelayanan umum pemerintah dan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap Program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing perangkat daerah wajib menyempurnakan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 sesuai Penyesuaian RKPD 2020 sebagai berikut:

1. Usulan pembangunan tahun 2020 harus di dukung perencanaan berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan pembangunan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis berupa *Survey Investigation Design (SID)*, proposal dan TOR sesuai jenis program/kegiatan;
2. Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan Program/kegiatan pembangunan tahun 2020, maka Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP4D/Bappelitbang Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi sehingga masing-masing perangkat daerah terkait Tingkat Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi kewajibannya;
3. Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh perangkat daerah Provinsi;

4. Untuk usulan strategis program/kegiatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota maka usulannya disiapkan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
5. Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;

Demikian Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 disusun untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (SKPD) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerjanya dan juga sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2020 selanjutnya.

Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam penyesuaian RKPD Tahun 2020 ini.

 **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**



 **VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT**